



Keunikan dan Permasalahan
Perbatasan-perbatasan di Dunia

Seniwati

DAFTAR ISI

BAB 1. PERBATASAN KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

1.1. <i>Korean Demilitarized Zone (DMZ)</i>	1
1.2. <i>Joint Security Area</i>	3
1.3. <i>DMZ Cultural Center</i>	10
1.4. Kesimpulan	14

BAB 2. PERBATASAN HAITI DAN REPUBLIK DOMINIKA

2.1. Sejarah	16
2.2. Lingkungan	31
2.3. Politik	33
2.4. Kesimpulan	33

BAB 3. PERBATASAN ANTARA INDIA DAN BANGLADESH

3.1. <i>International Migrants</i>	35
3.2. Sejarah Kemerdekaan dan Perpolitikan di Bangladesh	36
3.3. Isyu migran Ilegal	41
3.4. Nasib Imigran Ilegal Bangladesh di India	43
3.5. Kesimpulan	48

BAB 4. PERBATASAN INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA

4.1. Kegiatan Perekonomian di Daerah Perbatasan	50
4.2. Hambatan Dalam Pengelolaan Perbatasan Papua dan PNG	54
4.3. Pengelolaan Perbatasan Papua dan PNG	55
4.4. Kesimpulan	58

BAB 5. PERBATASAN AMERIKA SERIKAT DAN MEKSIKO

5.1. Sejarah	60
5.2. Kebijakan Donald Trump	61
5.3. Hak Asylum	62
5.4. Pandangan Demokrat dan Republik	63
5.5. Kesimpulan	67

BAB 6. PERBATASAN SINGAPURA DAN INDONESIA

6.1. <i>Family from The Sea</i>	70
6.2. <i>Free Trade Zone (FTZ)</i>	70
6.3. Paradiplomasi Dalam Studi Perbatasan Indonesia dengan Singapura	73
6.4. Integrasi Informal di Wilayah Perbatasan	75
6.5. kesimpulan	77

BAB 7. PERBATASAN POLANDIA DAN UKRAINA

7.1. Terbentuknya Perbatasan Polandia-Ukraina	79
7.2. Alasan Kerjasama Antara Kedua Negara	81
7.3. Menyambut Kejuaraan Eropa 2012	82
7.4. Kesimpulan	84

BAB 8. PERBATASAN KAMBOJA DAN THAILAND

8.1. Kronologi Konflik Kuil Kuno	85
8.2. Peran ASEAN	87
8.3. Kesimpulan	90

BAB 9. PERBATASAN UNI EMIRAT ARAB DAN YAMAN

9.1. Pulau Socotra	91
9.2. Perang yang Tiada Henti	94
9.3. Dampak Perang Terhadap Masyarakat Sipil	97
9.4. Kesimpulan	99

BAB 10. PERBATASAN HONG KONG DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

10.1. Perbatasan yang Perlahan Menghilang	101
10.2. <i>One Country, Two Systems</i>	105
10.3. Upaya <i>Mainlandization</i>	106
10.4. Kesimpulan	108

BAB 11. PERBATASAN PORTUGAL DAN SPANYOL

11.1. Sejarah	111
11.2. Keunikan Portugal dan Spanyol	114
11.3. Kesimpulan	118

BAB 12. PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE

12.1. Penetapan Batas Negara Berdasarkan Hukum	119
12.2. Sejarah Penjajahan dan Keanekaragaman di Wilayah Perbatasan	120
12.3. Konflik di Daerah Perbatasan	124
12.4. Kesimpulan	126

BAB 13. PERBATASAN GIBRALTAR DAN SPANYOL

13.1. Konflik antara Inggris, Spanyol dan Gibraltar	127
13.2. Keunikan Bandara Internasional Gibraltar	130
13.3. Konsep Bandara Lintas Batas	136
13.4. Kesimpulan	139

BAB 14. PERBATASAN-PERBATASAN DI BENUA ASIA

14.1. Keunikan Perbatasan-Perbatasan di Benua Asia	142
14.2. Pudarnya Batas sebuah Perbatasan	145
14.3. Penerapan Konsep Perbatasan	146
14.4. Isyu Migran di Daerah Perbatasan	148
14.5. Kesimpulan	148

BAB 15. PERBATASAN BELGIA-BELANDA

15.1. Perbatasan yang Damai	149
15.2. Peran Polisi di Daerah Perbatasan	154

15.3. Pengembangan Pariwisata Lintas Batas	155
15.4. Kesimpulan	157

BAB 16. PERBATASAN SPANYOL DENGAN MAROKO, GIBRALTAR DAN PRANCIS

16.1. Perbatasan Spanyol-Maroko	159
16.1.1. Keunikan	159
16.1.2. Wilayah Melilla Sumber Pertikaian	162
16.1.3. Arti Perbatasan Menyangkut Keamanan Internal Wilayah	163
16.2. Perbatasan Spanyol-Gibraltar	164
16.3. Perbatasan Spanyol-Prancis	166
16.4. Kesimpulan	168

BAB 17. PERBATASAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN NEPAL

17.1. Perbatasan Tanpa <i>Border</i>	170
17.2. Kerjasama RRT dan Nepal	174
17.3. Kesimpulan	176

BAB 18 PERBATASAN AMERIKA SERIKAT DAN KANADA

18.1. Perbatasan yang Unik	178
18.2. Perbedaan di Bidang Sosial	182
18.3. Tingkat Keamanan Perbatasan yang Rentan Kejahatan	183
18.4. Salmon Sebagai Sumber Konflik	184
18.5. Kesimpulan	188

BAB 19. PERSIAPAN KOTA-KOTA KECIL DI IRLANDIA UTARA DALAM MENGHADAPI BREXIT

19.1. Cerita dari Strabane	191
19.2. Dampak Brexit	194
19.3. Dampak Brexit Terhadap Sektor Transportasi	196
19.4. Model Interaksi Perbatasan	197
19.5. Kesimpulan	198

DAFTAR GAMBAR

1.1. Sebuah Pagar Kawat Bersilet Membatasi Kedua Sisi, Ditandai dengan Nomor Khusus1	
1.2. Kunjungan Turis Domestik dan Mancanegara ke area DMZ	2
1.3. Kawasan yang Memberikan Kesempatan kepada Turis untuk Menggunakan Teropong 2	
1.4. Kuburan Tentara Korea Utara dan China	3
1.5. Panmunjeom (<i>Joint Security Area</i>)	3
1.6. Tentara Korea Selatan dan Utara Berdiri Saling Berhadapan di Kedua Sisi Garis Demarkasi Militer yang Melintasi Area Keamanan Bersama di Desa Gencatan Senjata Panmunjom. Bangunan di Seberang adalah Panmungak yang Terletak di Korea Utara, dan Gedung Biru di Sisi Kiri adalah Ruang Konferensi JSA	5
1.7. Letak Desa Panmunjom	6
1.8. Letak Desa Panmunjom	7
1.9. Terowongan yang Dibangun Korea Utara Menuju Korea Selatan	7
1.10. Wilayah DMZ	8
1.11. Pemandangan Korea Utara Dilihat dari <i>the Chewwon Peace Observatory</i>	9
1.12. Tentara yang Ditempatkan di Unit Pusat Garis Depan Sepanjang DMZ	10
1.13. Dua Tentara Memandang DMZ dari Pos Jaga yang Terletak di Pusat Garis Depan13	
2.1. Haiti (Saint-Domingue) dan Republika Dominika (Santo Domingo)	16
2.2. Parade Kemerdekaan Republik Dominika	18
2.3. Protes Warga Republik Dominika (DR) Keturunan Haiti yang Ditolak Kewarganegaraanya oleh DR	19
2.4. Antrian Warga Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan yang Harus Mendaftar Untuk Mendaftakan Kewarganegaraan DR	20
2.5. Limbo (Lokasi Penampungan Pengungsi) yang Sangat Memperhatikan	21
2.6. Salah Seorang Pengungsi di Limbo yang Meninggalkan Rumahnya karena Dibakar	21
2.7. Salah Seorang Pengungsi yang Telah Tinggal di Limbo Selama Dua Tahun....	21
2.8. Seorang Pengungsi di Limbo yang Meninggalkan Rumahnya karena Telah Dibakar	22
2.9. Perbatasan Haiti dan Republik Dominika (DR)	22
2.10. Warga Haiti Antri Dengan Membawa Barang yang Akan di Jual di Pasar DR	23
2.11. Warga Haiti Antri Dengan Membawa Barang yang Akan di Jual di Pasar DR	23
2.12. Warga Haiti Antri Dengan Membawa Barang yang Akan di Jual di Pasar DR	24
2.13. Letak Perbatasan di Mana PBB dan Uni Eropa Membangun Pasar untuk Warga DR dan Haiti	24
2.14. Letak Perbatasan di Mana PBB dan Uni Eropa Membangun Pasar untuk Warga DR dan Haiti	25
2.15. Kondisi Pasar di Perbatasan di Mana PBB dan Uni Eropa Membangun untuk Warga DR dan Haiti	25
2.16. Penjual Berwarga Negara DR Dapat Mengatur Lebih Dahulu Barang Jualannya	26
2.17. Antrian warga haiti yang harus menunggu sebelum masuk di pasar yang telah dibangun PBB dan Uni Eropa, beberapa orang harus membayar untuk masuk lebih awal	26
2.18. Antrian Warga Haiti Yang Harus Menyebrang dan Menunggu Sebelum Masuk Di Pasar yang Telah Dibangun PBB Dan Uni Eropa	27
2.19. Antrian Warga Haiti Yang Harus Menyebrang dan Menunggu Sebelum Masuk Di Pasar yang Telah Dibangun PBB Dan Uni Eropa	27
2.20. Orang-Orang yang Dideportasi dari DR Karena Ditolak Status Kewarganegaraannya29	
2.21. Antrian Warga Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan yang Harus Mendaftar Untuk Mendaftakan Kewarganegaraan DR	31
2.22. Perbatasan Negara Haiti dan republic Dominika	31

2.23. Ilustrasi Mengenai Tindakan Prancis yang Menanam Tanaman di Haiti sampai Tanah di Negara Tersebut Menjadi Rusak	32
3.1. Bangladesh Menduduki Urutan Ketiga untuk Tingkat Kepadatan Penduduk pada Tahun 2016	36
3.2. Konflik Pakistan dan India Memperebutkan Kashmir dan Jammu	37
3.3. Letak Negara Bangladesh	39
3.4. Perdana Menteri Sheikh Mujib Rahman sebagai PM Pertama	40
3.5. Mayor Jenderal Ziaur Rahman Sebagai Penggagas Reformasi Bangladesh	40
3.6. Khaleda Zia	41
3.7. Assam District Map	44
3.8. Gugatan Warga India yang Namanya Tidak Masuk Dalam NRC	45
3.9. Warga memeriksa nama mereka dalam daftar warga negara NRC dan mencetaknya di desa Pabhokat, distrik Morigaondi negara bagian Assam, Indi pada bulan Agustus 2019	46
3.10. Demo Tolak UU NRC di Gauhati, Assam, India	47
3.11. Beberapa Demonstrasi yang Terluka	48
4.1. SKOUW, Perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini	50
4.2. Perbatasan RI-PNG di Kab.Merauke	51
4.3. Perbatasan RI-PNG di Kab.Merauke	52
4.4. Perbatasan Papua dan PNG di Kab.Merauke	55
4.5. Perbatasan Papua dan PNG dengan Latar Belakang Masyarakat PNG	56
4.6. Berfoto Bersama Anak PNG di Perbatasan Papua dan PNG	57
5.1. Perbatasan AS dan Meksiko	60
5.2. Jumlah Migran yang Ditahan	61
6.1. FTZ Batam	71
6.2. FTZ Batam-Bintan-Karimun	75
7.1. Perbatasan Polandia-Ukraina	79
7.2. Perbatasan yang unik antara Polandia dan Ukraina. Keunikannya terletak pada sebuah desain yang bergambar seekor ikan raksasa, sebagian tubuh ikan tersebut berada di Polandia dan sebagian lainnya berada di Ukraina	83
8.1. Bendera Kamboja berkibar saat kuil Preah Vihear menjadi warisan budaya dunia	86
8.2. Perbatasan Thailand dan Kamboja serta Wilayah yang diPersengketakan	87
8.3. Perbatasan Thailand dan Kamboja dan Kuil Preah Vihear	90
9.1. Letak Pulau Socotra	91
9.2. Pulau Socotra	92
10.1. Perbatasan antara Hong Kong dan RRT	101
10.2. Jembatan Penghubung antara RRT dan Hong Kong	102
10.3. Jembatan layang di atas laut yang membentang sepanjang 55 kilometer dari Hong Kong menuju Shenzen	103
10.4. <i>The Umbrella Movement</i>	104
11.1. Hispania	111
11.2. Kerajaan Bentukan Orang-Orang Jerman	112
11.3. Ekspansi Portugal dan Spanyol	112
11.4. Kerajaan Toledo	113
11.5. Sistem Pemerintahan yang Dianut Portugal dan Spanyol	113
11.6. Letak Portugal dan Spanyol secara Geografis	114
11.7. Letak Ibukota Masing-Masing Negara	114
11.8. Pulau-Pulau yang Dimiliki Portugal dan Spanyol	115
11.9. <i>The running of the bulls</i>	116
11.10. Negara Tetangga Spanyol	117
11.11. Flying fox, naik dari Spanyol dan akan mendarat di Portugal	118

12.1. Peta Politik Timor Leste	122
12.2. Peta Wilayah Timor Leste	123
12.3. Naktuka, Wilayah Demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste	124
13.1. Posisi Strategis Gibraltar	127
13.2. Posisi Strategis Gibraltar	128
13.3. Posisi Strategis Gibraltar	129
13.4. Letak Gibraltar International Airport	130
13.5. Letak Gibraltar International Airport	131
13.6. Letak Gibraltar International Airport	132
13.7. Keindahan Gibraltar International Airport	133
13.8. Keunikan Gibraltar International Airport yang Juga Dapat Dilalui Kendaraan	133
13.9. Keunikan Gibraltar International Airport yang Juga Dapat Dilalui Kendaraan	134
13.10. Keunikan Gibraltar International Airport	136
13.11. Jumlah Penumpang di Gibraltar International Airport yang Cenderung Naik dari Tahun ke Tahun	137
13.12. Jalan Winston Churchill Avenue	138
14.1. Sungai Tumen	142
15.1. Letak Perbatasan Belgia-Belanda	149
15.2. Letak Perbatasan Belgia-Belanda	150
15.3. <i>Postal Service</i> Dua Negara yang Saling Berdekatan	150
15.4. Ruang Meeting dengan Sebuah <i>Borderline</i> Didalamnya	151
15.5. Letak Perbatasan Belgia-Belanda di Sebuah Supermaret	151
15.6. Letak Perbatasan Belgia-Belanda di Sebuah Galeri	152
15.7. Palang Putih sebagai <i>International Border</i>	153
16.1. Perbatasan Maroko dan Spanyol yang Dibatasi Tembok	159
16.2. Enclave Negara Spanyol	159
16.3. Pagar Perbatasan Di Melilla Berupa Dua Pagar Setinggi Enam Meter	160
16.4. Perbatasan Maroko dan Spanyol Merupakan yang Terpendek di Dunia	161
16.5. Ceuta dengan Penduduk 76.000 Orang	161
16.6. Perbatasan Spanyol dan Gibraltar	165
16.7. Perbatasan Spanyol dan Prancis	166
16.8. Spanyol dan Prancis sepakat saling bertukar kepemilikan pulau setiap enam bulan	167
16.9. Perbatasan Spanyol dan Prancis	167
17.1. Letak Geografis RRT dan Nepal	170
17.2. Letak Perbatasan RRT (Tibet) dan Nepal	171
17.3. Jalur berupa jalanan tanah menuju Lo Manthang di Upper Mustang di Kawasan Himalaya. Jalur ini penghubung Nepal dan Tibet	171
17.4. Truk sebagai salah satu alat transportasi untuk menyeberangi perbatasan Nepal-Tiongkok	172
17.5. Truk sebagai salah satu alat transportasi untuk menyeberangi perbatasan Nepal-Tiongkok	173
17.6. Truk sebagai salah satu alat transportasi untuk menyeberangi perbatasan Nepal-Tiongkok	173
17.7. Jalur Berbahaya yang Harus di Tempuh Antara Tibet dan Nepal	174
17.8. Geografis Wilayah RRT dan Nepal	175
18.1. Border di Dalal Perpustakaan	178
18.2. Pot Bunga yang Berjejer Sebagai Tanda <i>Border</i>	179

18.3. Garis hitam tebal memotong secara diagonal di kursi sebagai tanda perbatasan negara	180
18.4. Wilayah Perbatasan Tanpa Ada Pembatas	181
18.5. Kapal-Kapal dari Alaska yang Mengambil Ikan Memicu Kemarahan Nelayan Kanada	185
18.6. Dixon Entrance mengarah ke pantai berbatu dan hutan hijau Pulau Pangeran Wales dan daratan utama	186
18.7. Penangkapan ikan salmon memutar perekonomian kawasan barat laut Pasifik	187
18.8. Ikan Salmon yang Dikeringkan oleh Penduduk Alaska untuk Bahan Pangan	188
19.1. Wilayah Kedaulatan Britania Raya	191
19.2. United Kingdom dan Republik Irlandia	192
19.3. Letak Strabane	193

BAB 1 PERBATASAN KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

1.1. *Korean Demilitarized Zone (DMZ)*

Semenanjung Korea adalah *the most heavily armed region* di dunia dan satu-satunya negara yang masih terpecah sebagai sebuah *visible extension* akibat dari era perang dingin (Young Song, 2016). Kondisi ini ditandai dengan adanya DMZ. Zona demiliterisasi adalah perbatasan wilayah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Perbatasan ini sekaligus juga menjadi zona penyangga perbatasan antara kedua negara sepanjang dua km di kedua sisi garis gencatan senjata dimana peralatan dan personel militer dilarang. DMZ ini dijaga oleh satu juta tentara dan satu juta ranjau darat yang berkisar di sepanjang jalur 248 km (154,1 mil). DMZ ini adalah sisa peninggalan perang dingin dan merupakan perbatasan yang memiliki penjagaan militer paling ketat di dunia. Oleh karena itu, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan DMZ ini sebagai *the scariest place on earth* (Williamson, 2012).



Gambar 1.1. Sebuah Pagar Kawat Bersilet Membatasi Kedua Sisi, Ditandai dengan Nomor Khusus

Sumber: (Williamson, 2012)

Pada bagian DMZ Korea Utara terdapat sebuah tempat yang ditaburi pasir halus yang dibuat oleh pihak pemerintah Korea Utara untuk mengetahui para pembelot dari negara tersebut. Masih banyaknya ladang ranjau diberbagai tempat sebagai peninggalan Perang Korea yang belum sempat dibersihkan. Untuk di wilayah DMZ Korea Selatan, pihak pemerintah telah menandai kawasan ladang ranjau dengan kawat-kawat merah yang diselingi lambang segitiga warna berhuruf merah “ranjau”.



Gambar 1.2. Kunjungan Turis Domestik dan Mancanegara ke area DMZ
Sumber: (Santi, 2018)

Pada sisi Korea Selatan, pemerintah negara tersebut mengubah perbatasan ini menjadi zona eko-pariwisata. Perbatasan tersebut diawasi menggunakan persenjataan lengkap dan perangkap tank. Jadi meski menakutkan, banyak turis mancanegara dan domestik dari Korea Selatan yang berkunjung ke DMZ ini sebagai salah satu objek wisata untuk menguji adrenalin. Jumlah pengunjung berjumlah sekitar 6,5 juta orang yang datang setiap tahun di area tempat wisata tersebut (Williamson, 2012). Beberapa kawasan memberikan kesempatan kepada para turis untuk mengintip melalui teropong ke Korea Utara yang penuh dengan ketertutupan sehingga menimbulkan rasa penasaran.



Gambar 1.3. Kawasan yang Memberikan Kesempatan kepada Turis untuk Menggunakan Teropong

Para pengunjung juga masuk ke terowongan infiltrasi dan mengambil foto di depan monumen dan berbagai peninggalan sejarah pada masa perang Korea. Selain itu, para turis juga dapat mengamati satwa liar yang ada di perbatasan tersebut dari jarak yang telah ditentukan.



Gambar 1.4. Kuburan Tentara Korea Utara dan China
Sumber: (Williamson, 2012)

Batang Putih pada gambar diatas sebagai penanda kuburan tentara Korea Utara dan Tiongkok yang terbunuh selama perang Korea. Penanda ini juga sebagai pengingat bahwa antara Korea Utara dan Korea Selatan terikat oleh gencatan senjata yang sangat sulit untuk dicapai dan bukan kesepakatan damai.

1.2. *Joint Security Area*



Gambar 1.5. Panmunjeom (*Joint Security Area*)
Sumber: (ImagineYourKorea, 2020)

Panmunjeom adalah salah satu saksi bisu dari serangkaian insiden militer dan diplomasi yang terjadi antara kedua negara. Panmunjeom atau yang dikenal sebagai desa perdamaian adalah

kompleks bangunan berwarna biru muda yang cerah. Tempat ini terletak di zona demiliterisasi (DMZ) yaitu sekitar 50 kilometer utara Seoul dan 10 kilometer timur dari kota Gaeseong, sebuah kota di Korea Utara. Daerah ini terkenal karena menjadi tempat diadakannya pembicaraan perdamaian pada tanggal 25 Oktober 1951 dan pada tanggal 27 Juli 1953 ketika perjanjian gencatan senjata ditandatangani oleh Jenderal Nam II dari Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dan Letnan Jenderal William Harrison Jr. sebagai wakil komando militer Perserikatan Bangsa-Bangsa di sebuah paviliun yang dibangun dengan terburu-buru. Mereka masing-masing berdiri dan keluar melalui pintu keluar yang berbeda tanpa mengatakan sepatah katapun dan tanpa bersalaman pada hari bersejarah lahirnya DMZ (Kwang-bok, Hong-beom, & Sang-young, 2016). Pusat konferensi di Panmunjeom di kelilingi oleh area keamanan bersama dan berdiameter 800 meter (ImagineYourKorea, 2020). Ini adalah satu-satunya bagian dari zona demiliterisasi di mana pasukan Korea Utara dan Korea Selatan saling bertatapan muka.



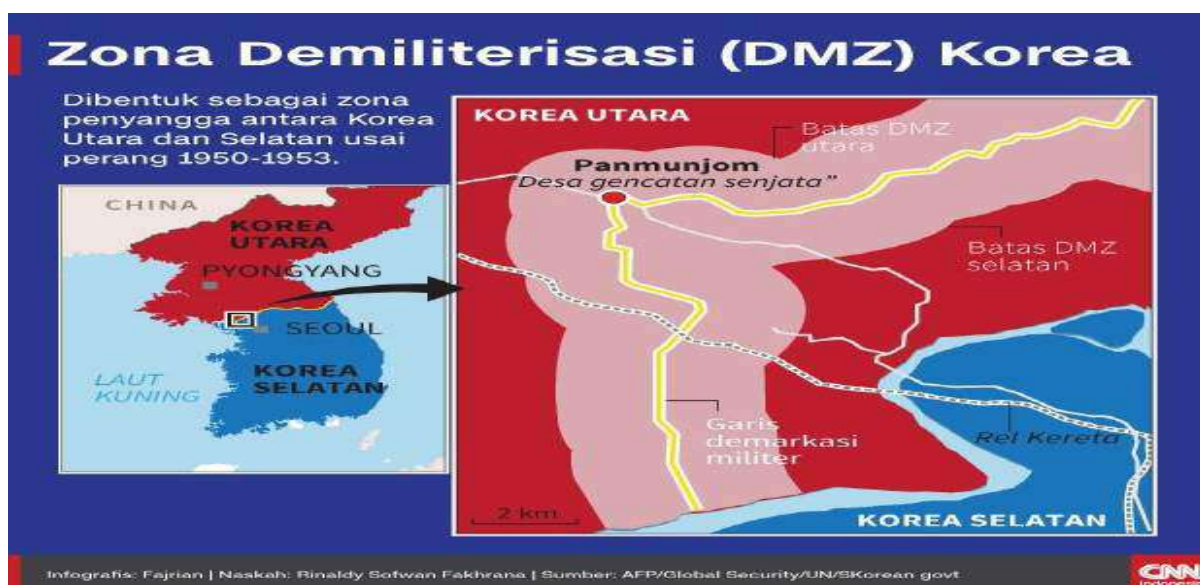
Gambar 1.6. Tentara Korea Selatan dan Korea Utara berdiri saling berhadapan di kedua sisi garis demarkasi militer yang melintasi area keamanan bersama di desa gencatan senjata Panmunjom. bangunan di seberang adalah Panmungak yang terletak di Korea Utara, dan gedung biru di sisi kiri adalah ruang konferensi JSA
Sumber:(Kwang-bok et al., 2016)

Daerah tersebut juga merupakan situs negosiasi militer antara Korea Utara dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC). Komando PBB dan militer Korea Utara diizinkan mengirim tak lebih dari 35 tentara ke JSA dan masing-masing negara hanya diizinkan membawa satu pistol atau senapan non-otomatis berdasarkan kesepakatan 1953. Meskipun demikian, perjanjian militer tahun 1953 ini tidak memberikan banyak arti karena konflik yang terjadi antara kedua negara masih berlangsung sampai sekarang seperti konflik di sektor ekonomi, politik dan senjata nuklir.



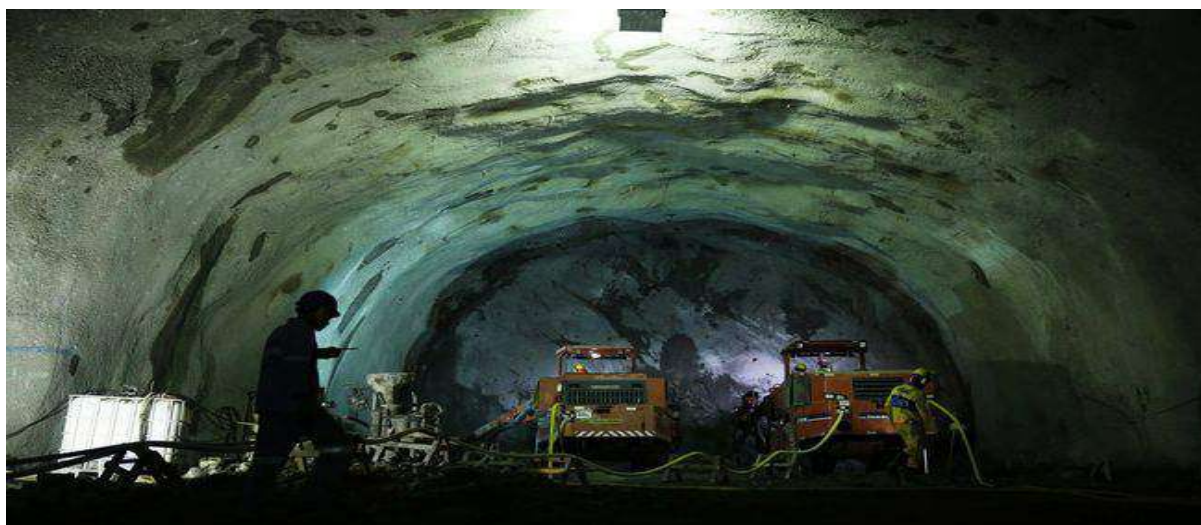
Gambar 1.7. Letak Desa Panmunjom
Sumber:(Kwang-bok et al., 2016)

Saat ini, lokasi ini menjadi salah satu tempat wisata yang paling digemari para turis (ImagineYourKorea, 2020). Kedua Korea memiliki kantor penghubung dan ruang konferensi masing-masing di tiap sisi Garis Demiliterisasi Militer (MDL). Area ini juga memiliki rumah perdamaian yang digunakan Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong-un untuk bertemu.



Gambar 1.8. Letak Desa Panmunjom
Sumber: (Santi, 2018)

Gambar diatas adalah letak desa Panmunjom yang menjadi saksi bisu puluhan putaran perundingan antar-pemerintah, militer serta upaya kemanusiaan yang dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1971. Tempat ini juga menjadi saksi dari tragedi pembunuhan dua tentara Amerika Serikat yang dibunuh oleh tentara Korea Utara dengan sebilah kapak pada saat mereka sedang menebang pohon poplar. Koh Yu-hwan sebagai seorang ilmuwan kajian Korea Utara di Universitas Dongguk Seoul mengatakan bahwa desa Panmunjom adalah lambang pemisahan nasional dan merupakan tempat yang sangat tepat untuk dilaksanakannya KTT Inter-Korea ketiga untuk mengubah tatanan gencatan senjata di masa depan (Santi, 2018).



Gambar 1.9. Terowongan yang Dibangun Korea Utara Menuju Korea Selatan
Sumber: (Samutra, 2014)

Gambar diatas adalah salah satu terowongan yang dibangun Korea Utara dari empat buah terowongan sekitar tahun 1990. Pihak Korea Selatan menganggap pembangunan terowongan ini adalah suatu invasi terselubung dari pihak Korea Utara. Sementara pihak Korea Utara berkilah kalau ini adalah penambangan. Kim Min-Seok, Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa Pyongyang tidak akan mampu menggali terowongan hingga Seoul karena ketatnya pengawasan di perbatasan kedua negara. Selain itu, untuk menggali terowongan puluhan kilometer, harus punya kemiringan yang benar, dan tidak mudah untuk membuat terowongan tersebut karena banyak air tanah di semenanjung Korea yang bakal menghambat penggalian (Samutra, 2014).

Pengakuan lain dari seorang mantan pejabat intelijen Korea Utara yang membelot mengatakan bahwa terowongan ini menuju Korsel adalah suatu hal yang benar. Para penggali biasanya mengeluarkan tanah dan batu pada malam hari dan operasi tersebut dimulai sejak tahun 1980-an. Pyongyang melindungi beberapa terowongan tersebut selama beberapa dekade.

Terowongan ini tidak langsung terhubung ke jalanan utama kota Seoul agar tidak terdeteksi. Terowongan ini tidak digunakan untuk menyerang Korsel melainkan untuk menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat pada saat perang terjadi nanti (Samutra, 2014).



Gambar 1.10. Wilayah DMZ
Sumber: (Young Song, 2016)

Bentrokan militer terus terjadi antara kedua negara. Kemudian pada tahun 1998, mantan Presiden Korea Selatan, Dae Jung Kim mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah *Sunshine Policy* (Young Song, 2016). Kebijakan ini meminta Korea Utara untuk secara proaktif menciptakan perdamaian di wilayah Korea dengan membuat atau mengeluarkan kebijakan rekonsiliasi, reformasi dan kerjasama. Kerjasama ini hanya bertahan beberapa dekade, selanjutnya hubungan kedua negara kembali memanas.



Gambar 1.11. Pemandangan Korea Utara Dilihat dari *the Cheorwon Peace Observatory*
Sumber: (Kennedy, 2016)

Tempat-tempat lain yang dapat dikunjungi adalah tempat-tempat bekas pertempuran yang tidak memiliki bangunan tersisa lagi. Untuk mengenang sejarah tempat ini, pemerintah membuat plang yang berisi foto-foto dan informasi tentang pertempuran yang terjadi antar kedua negara, jumlah orang yang tewas baik dari Korea Selatan beserta negara sekutunya yaitu Amerika Serikat dan juga negara Korea Utara dan negara sekutunya yaitu Rusia dan China. Meskipun demikian, Thorpe dalam artikelnya mengatakan bahwa DMZ adalah masih bukan situs bersejarah (Kennedy, 2016), hal ini karena perang antara Korea Utara dan Selatan tidak pernah berakhir dengan kesepakatan damai hanya gencatan senjata yang terjadi pada tahun 1953 dan masih berlaku sampai sekarang.

Selain itu, masih diarea ini, para turis dapat mengunjungi bekas markas besar Partai Buruh Korea di Cheorwon. Keunikan tempat ini karena gaya bangunannya mengambil gaya negara Rusia. Tangga pada bangunan ini meninggalkan jejak bekas tank Korea Selatan dan bekas lubang peluru pada temboknya.

1.3. DMZ Cultural Center

Perjanjian gencatan senjata seperti yang telah dijelaskan diatas telah menetapkan masing-masing dua kilometer dari garis demarkasi militer ke bagian selatan dan utara Korea sebagai DMZ, di mana garis demarkasi militer tersebut dimulai dari mulut sungai Imjin di Laut Barat dengan plang tanda nomor 0001, menjalar hingga ke Myeongho-ri di Laut Timur dengan plang tanda nomor 1292. Artinya, DMZ adalah garis panjang yang membentang dari Timur ke Barat di pinggang semenanjung Korea. Kejadian-kejadian yang terjadi di DMZ seperti kebakaran hutan, perang ranjau, perang merebut tanah dengan cara memajukan pagar kawat berduri

sedikit demi sedikit, penggalian tanah terowongan dari Korea Utara, dan penyiaran propaganda dengan pengeras suara. Sementara itu jumlah penduduk daerah Hwacheon di provinsi Gangwon yang letaknya berdekatan dengan DMZ pada tahun 2015 adalah sekitar 27.000 jiwa (Kwang-bok et al., 2016).



Gambar 1.12. Tentara yang Ditempatkan di Unit Pusat Garis Depan Sepanjang DMZ
Sumber: (Kwang-bok et al., 2016)

Jumlah penduduk yang tinggal di DMZ lebih sedikit dibanding jumlah rata-rata penduduk yang tinggal di area lain di Korea Selatan. Meskipun demikian, harus ada upaya untuk mengembalikan kedamaian di kawasan ini. Ada beberapa alasan sehingga perlu diupayakan perdamaian di DMZ, yaitu :

- DMZ adalah museum perang yang hidup

Perang Korea yang dimulai pada bulan Juni 1950 adalah perang dunia secara *de facto*. Dalam perang internasional ini, sekitar 60-an negara ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kurang lebih 10 negara komunis juga ikut serta. Peristiwa ini menjadi sejarah tersendiri karena begitu banyak negara yang terlibat dalam perang di satu

tempat yang sama. DMZ menjadi bukti perebutan kekuasaan antara Timur dan Barat dan menjadi sebuah dokumenter dari era perang dingin (Kwang-bok et al., 2016).

- DMZ adalah laporan antropologi dan sejarah Korea

Greg Brown sebagai tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea menemukan kapak tangan Acheulean di tepi sungai Hantan, daerah Yeoncheon, provinsi Gyenggi pada tahun 1978. Penemuan ini menjadi bukti bahwa 300.000 tahun yang lalu di daerah DMZ ini telah hidup manusia yang jauh lebih tua dari pada manusia modern. Terdapat juga sisa peninggalan perang kuno di sepanjang tepi sungai Hantan dan Imjin sekitar 2.000 tahun yang lalu, seperti benteng pertahanan gunung yang membuktikan adanya medan perang tiga kerajaan di Korea yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Selanjutnya, telah berdiri Kerajaan Taebong di tengah DMZ yang saat ini dikenal dengan nama daerah Cheorwon pada periode akhir tiga kerajaan Korea pada tahun 901. Kemudian, telah berdiri juga Kerajaan Goryeo di kawasan ini pada tahun 918. Pada tahun 1392 berdiri Dinasti Joseon di Gaeseong ibu kota Goryeo. Ini berarti DMZ adalah tempat berdirinya tiga kerajaan di Korea (Kwang-bok et al., 2016).

- DMZ memiliki peninggalan sejarah yang kaya

Kota tua Cheorwon yang telah runtuh memiliki jumlah penduduk sekitar 37.000 orang pada tahun 1940-an. Kota yang telah dirancang oleh kolonial Jepang ini hancur karena ledakan bom ketika perang Korea berlangsung. Sisa-sisa gedung yang dapat dilihat adalah kantor polisi, kantor daerah, gereja, sekolah, pusat pemeriksaan hasil panen, asosiasi keuangan, gudang es, stasiun kereta api, dan kantor pusat Partai Buruh Korea Utara menjadi saksi akan keberadaan kota ini di jaman dulu. Cheorwon pada awalnya adalah bagian dari Korea Utara sejak merdeka dari kolonial Jepang pada tahun 1945 hingga Perjanjian Gencatan Senjata pada tahun 1953 di tandatangani. Korea Utara membangun jembatan Seungil yang melewati sungai Hantan pada tahun 1948, dan sejajar di sampingnya berdiri juga jembatan Hantan yang dibangun oleh Korea Selatan pada tahun 1996 (Kwang-bok et al., 2016).

- DMZ adalah *a melting pot*.

Setelah gencatan senjata ditandatangani, ada sekitar 100 desa kosong tanpa penghuni di zona pengontrolan sipil (*Civilian Control Zone*) yang terletak di luar DMZ (Kwang-bok et al., 2016).

Kebijakan imigrasi menjadi salah satu alternatif agar desa-desa tersebut tidak kosong. Akhirnya pada tahun 1983 dimana zona pengontrolan sipil ini mencapai wilayahnya yang

terluas, terdapat sekitar 39.725 orang dengan 8.799 kepala keluarga yang tinggal di 81 desa. Selanjutnya, garis control sipil ini digeser jauh ke arah utara sampai beberapa desa terlepas dari pengontrolan (Kwang-bok et al., 2016). Penduduk migran ini kemudian menciptakan sebuah budaya yang unik dengan adat-istiadat, silsilah keluarga, gaya pikirian, bahasa dan budaya militer yang berbeda.

Kemudian, pemerintah juga berusaha mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di semenanjung Korea dengan melalui pendekatan sosial-budaya. *DMZ Cultural Center* kemudian melakukan sebuah project rekonsiliasi inter-Korea yang baru dan didasarkan pada ‘ruang bersama’ dengan mempertimbangkan beberapa strategi seperti:

- Manifestasi Citra Masa Depan.

Hal ini berarti ruang bersama menjadi sebuah referensi untuk masa yang akan datang melalui arsitektur representasi komunikasi dan penghargaan timbal balik dibanding representasi fisik dari suatu ide.

- Peningkatan Interaksi

Program kebudayaan diisi dengan program dan acara yang beragam dengan perencanaan yang fleksibel.

- Perlawanan Terhadap Kontroversi

Hal ini berarti adanya interaksi timbal balik yang menjadi bingkai untuk penyatuan kembali (Young Song, 2016).

Program ini lebih berfokus pada komunikasi partisipatif yang lebih berfokus pada pendekatan program-program kebudayaan. Seni budaya yang terus dibina dan dikembangkan akan menciptakan suasana yang tenteram, damai, bersatu dan semakin maju dalam hidup berbangsa dan bernegara. Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan suatu perdamaian sekalipun terkadang suasana tegang dan sulit untuk dihindari. Pendekatan kebudayaan akan melihat musuh sebagai teman yang perlu diajak untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan.



Gambar 1.13. Dua Tentara Memandang DMZ dari Pos Jaga yang Terletak di Pusat Garis Depan

Sumber: (Kwang-bok et al., 2016)

Ada beberapa program dalam proyek tersebut, seperti bukti perang dan akibatnya yang kemudian menjadi peringatan bahwa perdamaian sangat penting. Kemudian, area di perbatasan antara kedua negara memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk menyaksikan secara langsung akibat dari konflik kedua negara tersebut. Adapula program yang dilakukan dalam proyek ini yaitu untuk penyambungan kembali jalur kereta api sehingga DMZ akan menjadi tempat pertukaran yang memiliki arti antara kedua negara di semenanjung Korea. Dan program lain untuk ruang bersama adalah perumahan untuk keluarga yang terpisah akibat dari perang Korea. Meskipun budaya Korea Selatan dan Korea Utara telah tumbuh terpisah sejak awal, akan tetapi budaya makanan dapat dijadikan sebagai identitas bersama di Semenanjung Korea. Seperti halnya di Korea Selatan, dimana ada sebuah restoran yang berasal dari kota Pyongyang dan Hamhung di Korea Utara. Walaupun tidak terlalu dianggap penting sebagai suatu identitas bersama, akan tetapi budaya makanan tersebut dapat menjadi sebuah kenangan dan mendapat respon positif dari publik. Bahkan Pusat Budaya DMZ juga menyebutkan bahwa pada tahun 2015, telah menunjukkan adanya potensi besar untuk mencapai perdamaian yaitu melalui ‘Parade Damai’, dimana ada sekitar 2.000 orang lebih yang berpartisipasi untuk bersepeda di sepanjang DMZ Korea di pantai timur (Young Song, 2016).

Dari strategi perencanaan dan desain tersebut oleh Pusat Budaya DMZ menunjukkan bahwa *space* dapat dilihat sebagai peristiwa, bukan hanya sebagai tempat fisik. Pertemuan yang tidak terduga, acara budaya, maupun hiburan lainnya dapat terjadi di sepanjang wilayah DMZ tersebut. Penggunaan ruang publik untuk meningkatkan interaksi dan menciptakan peluang untuk saling menghormati dengan berbagai budaya merupakan syarat penting dalam proses

rekonsiliasi. Maka dari itu, konflik yang terjadi di Semenanjung Korea merupakan peluang besar untuk membahas bagaimana perencanaan yang baik untuk membentuk masa depan yang damai melalui modal sosial-budaya (Young Song, 2016).

1.4. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini ingin melihat penerapan teori realisme pada kasus yang dibahas. Bagi kaum realis, hukum internasional dan organisasi internasional sebagian besar tidak relevan dengan politik internasional. Keduanya mencerminkan kepentingan negara-negara kuat dalam politik internasional, dan lembaga-lembaga internasional tidak membatasi kekuatan besar tetapi hanya menyediakan tempat tambahan untuk latihan kekuatan. Keduanya memainkan peran hanya dalam masalah politik rendah, dalam mengatur transportasi, komunikasi, dan pertukaran ekonomi, dan bukan dalam masalah politik tinggi, terutama keamanan militer. Kaum realis juga mempertimbangkan syarat untuk bertahan hidup untuk mendominasi pertimbangan moral apa pun. Syarat-syarat untuk bertahan hidup lebih penting daripada pertimbangan etis apa pun (Stein, 2015).

Untuk kasus perbatasan wilayah Korea Utara dan Korea Selatan dimana adanya zona demiliterisasi di perbatasan tersebut karena hasil dari konflik masa lalu dari dua wilayah yang terpecah di Semenanjung Korea tidak terlihat adanya penerapan teori realisme. Setelah terjadinya PD II, wilayah ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak akibat dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta dengan sekutunya. Pada akhirnya, perang pecah di semenanjung Korea pada tahun 1950 hingga 1953 dan menewaskan banyak korban jiwa. Hasil dari perang itu adalah terjadinya gencatan senjata sementara pada tahun 1953 dan juga menghasilkan zona demiliterisasi atau DMZ Korea yang menjadi zona netral dan memisahkan wilayah kedua negara tersebut. Meskipun perang Korea secara resmi telah terhenti sejak tahun 1953, akan tetapi konflik antara kedua negara tersebut masih juga terus berlanjut hingga saat ini. Maka dalam teori realisme, upaya penyelesaian konflik tidak akan pernah diakui termasuk gencatan senjata. Pada kenyataannya, antara kedua negara berusaha melakukan gencatan senjata dengan bantuan sekutu Korsel yaitu Amerika Serikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pecahnya perang antara kedua negara tersebut karena mereka percaya bahwa dengan *power*, mereka dapat mencapai kepentingan negara mereka yaitu untuk mempertahankan wilayah, sehingga kedua negara tersebut masing-masing menggunakan kekuatan militernya. Seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana realisme menekankan bahwa negara akan berperan karena adanya sifat yang kompetitif dan konflikual, dalam hal ini baik itu Korea Utara maupun Korea Selatan tidak ada yang ingin kalah dari lawan apalagi jika sampai ada salah satu negara yang mendominasi. Meskipun demikian, telah ada

banyak upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk mengakhiri gencatan senjata seperti *Sunshine Policy*, sekalipun pada akhirnya gagal tapi ini membuktikan ada usaha yang melibatkan negara lain yaitu Amerika Serikat dalam upaya perdamaian antara kedua negara. Meskipun zona demiliterisasi atau DMZ Korea didirikan untuk memastikan keamanan negara mereka, namun ada upaya *DMZ Cultural Center* yang terus berusaha dalam menggapai perdamaian.

BAB 2

PERBATASAN HAITI DAN REPUBLIK DOMINIKA

Haiti dan Republik Dominika adalah negara kecil yang terletak pada satu pulau yang sama di Laut Karibia. Haiti memiliki ketidakstabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Sementara itu, Republik Dominika memiliki sistem perpolitikan yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih makmur. Apa yang tepat digambarkan oleh Samuel Martínez sebagai "model konflik yang fatal," yakni berkaitan dengan hubungan Haiti dan Republik Dominika yang sering dibedakan secara linguistik dan demografis. Perbedaan-perbedaan tersebut yang telah memunculkan perselisihan di pulau itu (Derby, 2019).

2.1. Sejarah

Haiti dan republik Dominika berada di satu daratan Hispaniola. Hispaniola adalah pulau terbesar kedua di gugusan kepulauan Laut Karibia, Amerika Tengah. Sebagai negara kepulauan, Republik Dominika menguasai 2/3 Hispaniola dan Haiti menguasai 1/3 bagian lainnya. Luas wilayah Republik Dominika hampir sama dengan luas provinsi Jawa Timur. Pada tahun 1492, Christopher Columbus menemukan pulau ini dan dia memberi nama 'la Isla Española'. Diego putra Columbus menjadi raja muda pertama di wilayah tersebut. Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 1496, saudara Columbus yaitu Bartholomew Columbus mendirikan kota Santo Domingo untuk menghormati kesucian hari Minggu dan tokoh agama mereka Domingo de Guzman. Kota yang pernah menjadi ibukota Republik Dominika seperti Capitania General de Santo Domingo. Sejak saat itu, pulau ini dikenal dengan dengan nama Santo Domingo dan penduduknya dikenal dengan istilah dominicanos (orang Dominika) (TitikNol, 2017).



Gambar 2.1. Haiti (Saint-Domingue) dan Republika Dominika (Santo Domingo)
Sumber: (Fong, 2017)

Ternyata, Prancis juga tertarik dengan pulau ini karena memiliki sumber daya alam yang subur seperti kopi dan gula. Kedua negara ini, Prancis dan Spanyol kemudian berperang dan akhirnya mereka membagi pulau ini. Pada tahun 1697, Spanyol secara resmi menyerahkan sepertiga barat pulau itu kepada Prancis. Sementara Spanyol, lebih banyak berinvestasi (Silver, 2010).

Meskipun berada di satu daratan yang sama, kedua negara ini dijajah oleh dua negara yang berbeda seperti yang telah dijelaskan di atas. Haiti dijajah oleh Prancis dengan tujuan untuk menjadikan wilayah tersebut daerah penghasil sumber daya alam yang membawa keuntungan bagi daerah jajahan Prancis lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Prancis membawa banyak budak dari Afrika yang berjumlah sekitar 500.000 budak sebagai tenaga kerja tambahan (Silver, 2010). Sebaliknya, Republik Dominika yang dijajah oleh Spanyol dengan tujuan untuk menjadikan negara ini sebagai replika dari Kota Santo Domingo seperti yang telah dijelaskan di atas untuk menghormati kesucian hari Minggu dan tokoh agama mereka Domingo de Guzman.

Ketika revolusi berkobar di Prancis pada tahun 1790-an, budak-budak kolonialnya di Hispaniola memberontak. Haiti mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1804. Haiti menjadi negara pertama yang memperoleh kemerdekaannya di Amerika Latin pada awal tahun 1800. Haiti juga menyatakan diri sebagai republik kulit hitam berdaulat pertama di dunia. Haiti dinamai juga dengan kata Taino atau tanah pegunungan (Silver, 2010). Dengan alasan ini pula, Amerika Serikat pada awalnya tidak mengakui kemerdekaan Haiti. Pemerintah AS khawatir bila Haiti akan menjadi kerajaan budak dan dapat melakukan balas dendam kapan saja. Setelah Haiti menyatakan kemerdekaannya, penjajah Prancis muncul di pantai Haiti untuk meminta uang pengganti atas semua pembangunan infrastruktur yang telah dibangunnya. Prancis menjadikan permintaannya ini sebagai utang bagi Haiti yang harus dibayar selama 30 tahun. Utang inilah yang kemudian melumpuhkan perekonomian Haiti selama bertahun-tahun, dan benar-benar menghambat perkembangannya. Sejarah ini secara tidak langsung juga berhubungan dengan penjelasan adanya pemimpin yang diktator dan politisi korup yang sekiranya telah mengganggu pembangunan Haiti. Embargo dan utang kemerdekaan, serta kurangnya moral dan investasi di lembaga pemerintah, sudah menjamin kegagalan Haiti sejak lahir, dan dunia rasis memperparahnya. Rasisme itu juga tidak hanya tertanam dalam sejarah Haiti, tetapi sebenarnya masih ada dan berkembang hingga saat ini.

Kemudian, Haiti memiliki keinginan yang besar untuk menjadikan daratan Hispaniola di bawah administrasinya. Dampak dari usaha Haiti ini, muncullah sentimen anti-Haitianisme di Republik Dominika. Rakyat yang didukung oleh pemerintah di Dominika selalu melakukan kampanye anti-Haitianisme yang berlangsung sejak pemerintahan Rafael Trujillo yang dikenal

sebagai bapak kemerdekaan Dominika. Pihak Dominika menjadikan proses internalisasi sentimen anti-Haitianismo ini sebagai alasan yang kuat untuk lepas dari okupasi Haiti. Alasan yang lain karena rakyat Dominika merasa lebih terhormat karena mereka adalah keturunan kulit putih (Spanyol) dari pada warga Haiti yang dominan berkulit hitam dan keturunan budak.

Pada tanggal 27 Februari 1844, penduduk Dominika menyatakan berpisah dari Haiti setelah 22 tahun pendudukan Haiti dan menyatakan diri sebagai negara baru dengan nama Republik Dominika. Republik Dominika adalah negara yang mengakui dan menyebut penduduk mayoritasnya sebagai nama resmi yaitu orang Dominika. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengenai denasionalisasi dan restorasi kewarganegaraan serta naturalisasi dan memperjelas usaha-usaha legal yang dilakukan oleh Republik Dominika dalam membatasi orang-orang yang pantas untuk menjadi warga negaranya. Keadaan ini menjadikan status kewarganegaraan sebagai suatu hal yang privilese dan bukan sebagai suatu hak. Republik Dominika lebih memilih untuk mempertahankan kedaulatannya dibanding memberikan hak kepada warga keturunan Haiti yang tidak memiliki status kewarganegaraan.



Gambar 2.2. Parade Kemerdekaan Republik Dominika
Sumber: (TitikNol, 2017)

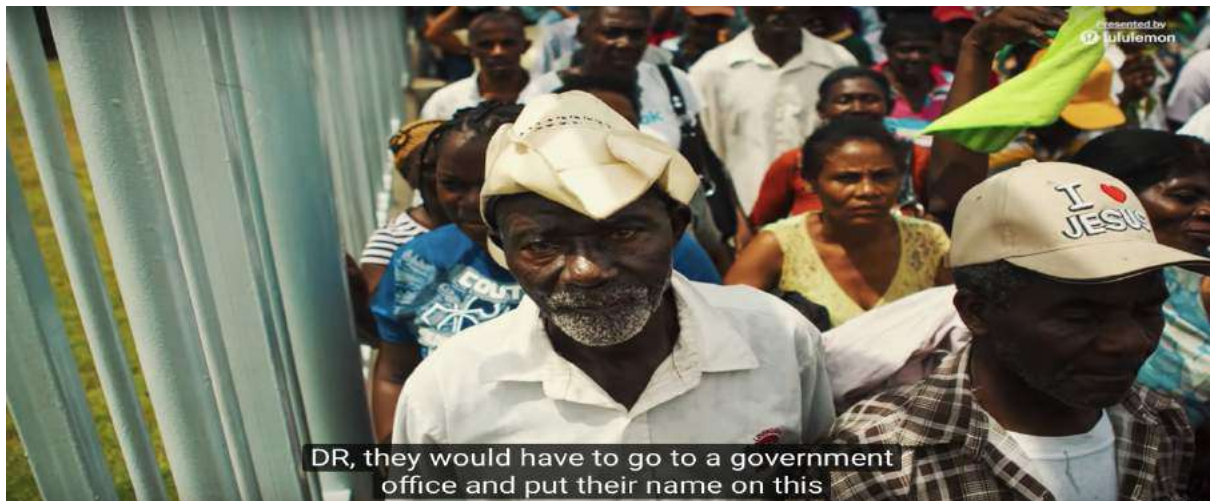
Program regularisasi adalah kebijakan untuk menargetkan siapa saja yang keturunan Haiti, bahkan warga negaranya dan mengumpulkan mereka kemudian mendeportasi mereka. Selalu ada sentimen anti-Haiti di Republik Dominika. Dimana hal ini biasanya berujung pada kekerasan atas rasis. Tetapi sejak 2010, sentimen itu telah dimasukkan ke dalam undang-

undang. Konstitusi Dominika yang dirancang pada tahun 1929, mengatakan bahwa siapa pun yang lahir di negara ini secara otomatis adalah warga negara, bahkan jika orang tuanya adalah imigran yang tidak berdokumen. Jadi dapat dikatakan bahwa aturan ini sama dengan tempat-tempat seperti AS. Tetapi kemudian Republik Dominika mengamandemen konstitusinya pada tahun 2010, yang hanya memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang lahir di tanah Republik Dominika adalah penduduk yang sah. Kemudian, pada tahun 2013 pengadilan tinggi di Republik Dominika memutuskan bahwa definisi baru ini akan diterapkan lebih fleksibel. Sepanjang pengimplementasiannya kembali ke tahun 1929, berarti setiap warga negara yang telah dilahirkan di Republik Dominika untuk orang tua yang tidak berdokumen akan dicabut kewarganegaraannya. Dampaknya, lebih dari 200.000 warga Dominika, tiba-tiba tanpa kewarganegaraan.



Gambar 2.3. Protes Warga Republik Dominika (DR) Keturunan Haiti yang Ditolak Kewarganegaraannya oleh DR
Sumber: (Fong, 2017)

Hukum di Dominika mengatakan bahwa jika orang-orang tanpa kewarganegaraan ini ingin tinggal di Republik Dominika, mereka harus ke kantor pemerintah dan memasukkan nama mereka ke dalam daftar orang asing. Pemerintah memberikan orang-orang ini waktu satu tahun untuk mendaftarkan nama mereka di registrasi atau mereka akan dideportasi. Lebih dari 55.000 orang telah secara resmi dideportasi sejak batas waktu Juni 2015 (Fong, 2017).



Gambar 2.4. Antrian Warga Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan yang Harus Mendaftar Untuk Mendapatkan Kewarganegaraan DR
Sumber: (Fong, 2017)

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 128.000 orang telah secara sukarela melarikan diri ke Haiti yakni sebuah negara yang belum pernah mereka tinggali sebelumnya. Beberapa dari mereka datang ke kamp di perbatasan, dimana mereka tinggal di Limbo (nama tempat penampungan pengungsi) selama bertahun-tahun. Tanah dan masyarakat Haiti telah dieksploitasi sejak masa koloni Prancis. Negara-negara di dunia banyak yang mengabaikan Haiti dan memberikan embargo serta Prancis dengan menagih utang kemerdekaan ketika negara itu baru merdeka, dan sekarang orang Haiti di Republik Dominika mengalami rasisme yang sangat terbuka dan kemudian diabadikan dalam hukumnya (Fong, 2017).



Gambar 2.5. Limbo (Lokasi Penampungan Pengungsi) yang Sangat Memprihatinkan
Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.6. Salah Seorang Pengungsi di Limbo yang Meninggalkan Rumahnya karena Dibakar
Sumber:(Fong, 2017)



Gambar 2.7. Salah Seorang Pengungsi yang Telah Tinggal di Limbo Selama Dua Tahun
Sumber:(Fong, 2017)



Gambar 2.8. Seorang Pengungsi di Limbo yang Meninggalkan Rumahnya karena Telah Dibakar
Sumber:(Fong, 2017)

Sebuah film tentang kisah perbatasan yang memisahkan dua negara yang sangat berbeda. Film ini lebih banyak berfokus pada kisah bagaimana kebijakan pemerintah yang sangat rasis selama berabad-abad, mulai dari pemerintahan Prancis dan Republik Dominika. Rasis ini dapat menahan suatu negara untuk mundur dari kemajuan. Haiti, republik kulit hitam pertama ini, telah mengalami beberapa kebijakan yang paling ganas dan rasis dari negara luar. Bagi warga Haiti, kisah ini bukan hanya sejarah mereka, ini adalah kisah mereka, ini adalah tahap di mana mereka menjalani hidup mereka (Fong, 2017).



Gambar 2.9. Perbatasan Haiti dan Republik Dominika (DR)
Sumber: (Fong, 2017)

Gambar diatas adalah DR dan Haiti. Gambar tersebut menjelaskan keberadaan pasar yang letaknya di negara DR. Warga Haiti yang ingin berjualan atau membeli sesuatu di pasar tersebut harus mengantri paling kurang satu jam.



Gambar 2.10. Warga Haiti Antri Dengan Membawa Barang yang Akan di Jual di Pasar DR

Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.11. Warga Haiti Antri Dengan Membawa Barang yang Akan di Jual di Pasar DR

Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.12. Warga Haiti Antri Dengan Membawa Barang yang Akan di Jual di Pasar DR
Sumber: (Fong, 2017)



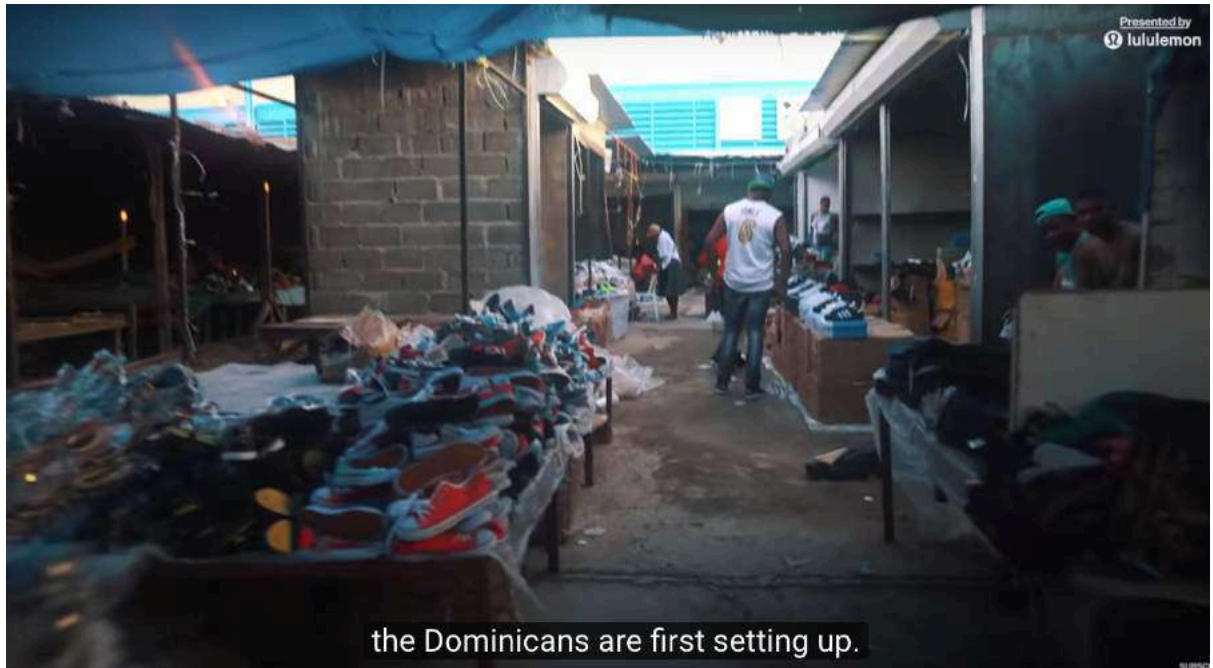
Gambar 2.13. Letak Perbatasan di Mana PBB dan Uni Eropa Membangun Pasar untuk Warga DR dan Haiti
Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.14. Letak Perbatasan di Mana PBB dan Uni Eropa Membangun Pasar untuk Warga DR dan Haiti
Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.15. Kondisi Pasar di Perbatasan di Mana PBB dan Uni Eropa Membangun untuk Warga DR dan Haiti
Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.16. Penjual Berwarga Negara DR Dapat Mengatur Lebih Dahulu Barang Jualannya
Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.17. Antrian warga haiti yang harus menunggu sebelum masuk di pasar yang telah dibangun PBB dan Uni Eropa, beberapa orang harus membayar untuk masuk lebih awal
Sumber: Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.18. Antrian Warga Haiti Yang Harus Menyebrang dan Menunggu Sebelum Masuk Di Pasar yang Telah Dibangun PBB Dan Uni Eropa
Sumber: Sumber: (Fong, 2017)



Gambar 2.19. Antrian Warga Haiti Yang Harus Menyebrang dan Menunggu Sebelum Masuk Di Pasar yang Telah Dibangun PBB Dan Uni Eropa
Sumber: Sumber: (Fong, 2017)

Derby dalam artikelnya menjelaskan tentang kisah perjalanan abad ke-18 dalam suatu karya seni, sastra, dan ilmu sosial kontemporer yang digunakan untuk menjelajahi wilayah perbatasan sebagai zona kontak antara Haiti dan Republik Dominika, tempat orang-orang tinggal di perbatasan selama berabad-abad. Kehidupan sehari-hari masyarakat di perbatasan ada di dalam novel Victor Hugo dan Jean-Baptiste Picquenard tentang revolusi Haiti. Novel tersebut mengungkapkan cerita perbatasan yang dibahas dalam multibahasa, termasuk mengenai senjata ilegal yang diselundupkan ke pemberontak kulit hitam (Derby, 2019).

Derby lebih lanjut membuat argumen kuat bahwa "nasionalisme xenophobia" Dominika ultranasionalis yang telah lama menjadi elit kota sebagai bentuk modal politik. Selain itu, isu lain yang dibahas oleh Derby adalah persoalan di perbatasan yang seringkali menimbulkan korban seperti pembantaian tragis tahun 1937 atau kehancuran ekologi yang diterjadi karena pembuangan abu batu di Montecristi yang menimbulkan penyakit dan meluas pada tahun 2003. Tetapi perbatasan ini juga sering mendefinisikan jalur politiknya sendiri, seperti ketika politik Partai Pro-Haiti yang menyatakan kemerdekaan di kota-kota perbatasan Spanyol Dajabón dan Monte Cristi (Derby, 2019).

Sejarah budaya juga menampilkan film dokumenter fotografer Polibio Díaz dan David Pérez Karmadavis, seorang seniman pertunjukan yang provokatif dimana karyanya secara tidak langsung untuk menentang perwakilan resmi Haiti dan menunjukkan secara resmi ketakutan dan kebencian yang diajukan oleh anti-Haiti. Ketika deklarasi kemerdekaan Dominika ditandatangani, mereka sudah sangat bertindak rasial anti-kulit hitam. Dimana Haiti dan Dominikan, sejak masa kolonial sudah berasal dari ras yang berbeda. Banyaknya perlakuan rasial terhadap pekerja Haiti di Republik Dominika membuat para pekerja menderita. Selain itu, pemuda kulit hitam Dominika yang miskin juga mengalami kekerasan dari pemerintahan yang otokratis yang digambarkan dalam masalah kewarganegaraan dan demokrasi yang tidak efektif, penyalahgunaan wewenang polisi, dan kekerasan struktural. Gelombang anti-Haitianisme sudah ada sejak lama dan masih bertahan hingga saat ini dalam narasi hubungan antara Haiti dan Dominika (Derby, 2019).

Saga's dalam artikelnya mengatakan bahwa antihaitianismo (anti-Haitianisme) adalah warisan mentalitas kolonial Spanyol abad ke-19 yang rasial dan neorasisme budaya abad ke-20 yang membangun sebuah jaringan sikap anti-Haiti, stereotip rasial dan sejarah distorsi. Ideologi hegemonik ini selain mempengaruhi para migran Haiti di Republik Dominika, secara tradisional juga digunakan sebagai senjata ideologis untuk menaklukkan *the black and mulatto Dominican* yang dianggap berasal dari kelas rendah dan sekaligus juga untuk mempertahankan keberadaan politik mereka (Tavernier, 2008). Kasus-kasus anti-Haitianisme seperti pada tanggal 23 September 2013, Mahkamah Konstitusi Republik Dominika, menjatuhkan putusan *Sentencia* (keputusan hukum) pada kasus Juliana Deguis Pierre. Mereka memutuskan bahwa dikarenakan orang tua Deguis tidak memiliki dokumen dan kewarganegaraan, sehingga ketika Deguis lahir, ia kemudian dianggap sebagai imigran ilegal di mata negara dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Dominika. Keputusan inilah yang menandakan berlakunya UU Migrasi 285-04 pada tahun 2004, yang menyatakan bahwa orang asing yang memasuki wilayah Republik Dominika tidak secara hukum dianggap sebagai imigran ilegal. Dalam

penerapan preseden hukum, pengadilan memerintahkan *Junta Central Electoral* (JCE), yakni Dewan Pemilihan Umum Pusat, untuk memeriksa semua catatan kelahiran orang asing dari tahun 1929 dan menerapkan *Sentencia* untuk setiap warga Dominikan yang lahir dari orang tua yang tidak berdokumen kewarganegaraan sejak tanggal tersebut. Diperkirakan terdapat 200.000 dan 300.000 orang Dominikan keturunan Haiti, yang mencapai hingga empat generasi akan segera didenasionalisasi (Morgan, 2019).

Meija dalam bukunya mengatakan bahwa Dominika mengubah konstitusi Dominika pada tanggal 26 Januari 2010 dan berlaku sampai sekarang, sebelumnya konstitusi mengakui *jus soli* (right of the soil atau hak tanah) yang mengakui siapa pun yang lahir di Dominika maka akan diakui sebagai warga negaranya menjadi *jus sanguinis* (right of blood atau keturunan) yang berarti anak memiliki kewarganegaraan berdasarkan orang tuanya (Morgan, 2019). Perubahan konstitusi ini semakin mendukung upaya-upaya yang digunakan oleh pemerintah dalam menindas orang Haiti secara politis, ekonomis dan ideologis dan semakin mempertajam antihaitianismo (Sagás, 2000).



Gambar 2.20. Orang-Orang yang Dideportasi dari DR Karena Ditolak Status Kewarganegaraannya
Sumber: (Fong, 2017)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Antihaitianismo terbentuk dari bagian ideologis yang memberikan gambaran tentang sikap Dominikan atau orang Dominika yang cenderung merendahkan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral terhadap orang-orang Haiti yang tinggal di wilayah Dominika (Tavernier, 2008). Pemimpin Republik Dominika

memanfaatkan bentuk-bentuk rasisme ideologis terhadap migran Haiti serta warga Dominikan keturunan Haiti sejak Dominika memisahkan diri dari Haiti (Tavernier, 2008). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa diskriminasi sosial ini ada diberbagai sektor baik sektor politik, ekonomi dan sosial karena adanya dukungan dari pemerintah Republik Dominika. Bukan hanya sampai disini, bahkan negara tetangga seperti Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, Trump menyebut orang-orang Haiti sebagai orang-orang yang berasal dari lubang kotoran (Plansari, 2018)

Ernesto Sagás percaya bahwa esensi dari stigmatisasi ini merupakan fenomena yang dapat ditemukan dalam warisan kolonial Spanyol yang sejak awal bermentalitas rasis. Ideologi hegemonik ini telah digunakan untuk memastikan penaklukan yang berkelanjutan terhadap kulit hitam dan masyarakat kelas bawah Dominika untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, membiarkan kemiskinan dan ketimpangan sosial sambil mempertahankan keuntungan politis mereka. Interaksi politik, ras, dan kebencian terhadap kelas ini sekarang sudah mengakar dalam cerita rakyat Dominika, sejarah dan mitologi identitas nasionalistis pro-Dominika didefinisikan dengan pernyataan antihaitianismo (Morgan, 2019).

Deguis yang lahir tahun 1984 di Republik Dominika berasal dari orang tua Haiti. Sebelumnya, ia dilahirkan, dibesarkan dan bertempat tinggal di Los Jovillos, sepanjang hidupnya, salah satu dari banyak komunitas yang mengelilingi perkebunan besar di Republik Dominika, ia terdaftar sebagai warga Dominika. Pada tahun 2008, ia berusaha mengajukan kartu identitasnya untuk masuk sebagai tenaga kerja legal dan mendaftarkan kelahiran anaknya yang akan datang. Tetapi, ketika dia menyerahkan surat kelahirannya ke JCE, dia pun diberitahu bahwa identitasnya tidak valid dan kartu identitasnya ditolak karena namanya muncul sebagai warga Haiti. Deguis pun menuntut peninjauan kembali konstitusional tersebut, dengan mengupayakan haknya untuk status kewarganegaraan bersama dengan ratusan ribu warga lainnya. Sejak *Sentencia* diberlakukan, tindakan pemerintah Dominika masih terus berlanjut yang kemudian pada akhirnya menimbulkan krisis kemanusiaan (Morgan, 2019).



Gambar 2.21. Antrian Warga Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan yang Harus Mendaftar Untuk Mendaftarkan Kewarganegaraan DR
Sumber: (Fong, 2017)

Pada bulan Mei 2014, di bawah tekanan dunia internasional, Republik Dominika memberlakukan rencana *Nacional de Regularización de Extranjeros* (PNRE) atau Rencana Nasional Pengaturan Orang Asing yakni suatu program yang meninjau kembali tuntutan atau sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan kewarganegaraan bagi banyak Dominikan keturunan Haiti yang sebelumnya tanpa kewarganegaraan. PNRE ini berdasarkan pada hukum naturalisasi baru dan ditandatangani oleh presiden Dominika. Akan tetapi, hanya sekitar 20.000 dari lebih dari 200.000 warga Dominikan keturunan Haiti yang bisa masuk dalam program ini. (Morgan, 2019). Keadaan ini menjadikan warga Dominika keturunan Haiti menjadi semakin miskin karena krisis kemanusiaan yang telah tertanam dalam sistem perpolitikan Domika.

2.2. Lingkungan



Gambar 2.22. Perbatasan Negara Haiti dan Republic Dominika
Sumber: (BangkaPos, 2019)

Pada awalnya, Prancis sebagai penjajah di Haiti memiliki keinginan untuk memanen tanaman yang sama setiap tahunnya sehingga menyebabkan tanah di wilayah jajahannya ini menjadi rusak. Tanaman hasil eksploitasi ini menghancurkan kesuburan tanah. Hasil tanaman ini akan digunakan untuk kepentingan ekonomi Prancis. Sebaliknya, orang Spanyol memiliki pendekatan yang berbeda. Mereka membangun koloninya dengan membantu penduduk asli, mereka tidak mengeksploitasinya seperti yang dilakukan Prancis. Sebaliknya, mereka pergi ke tempat-tempat seperti Meksiko dan Peru, untuk mencari emas. Jadi mereka tidak membawa budak sebanyak mungkin ke pulau ini, dan sebagai hasilnya mereka tidak memberikan keuntungan bagi induk koloni. Spanyol lebih terintegrasi dengan penduduk asli yang tersisa, dengan mengakui otoritas pemimpin asli dan menikah dengan penduduk setempat. Hasilnya adalah populasinya terus bertambah, dengan ekonomi dan sistem politik yang berkelanjutan, sesuatu yang sama sekali tidak ada pada koloni Prancis.



Gambar 2.23. Ilustrasi Mengenai Tindakan Prancis yang Menanam Tanaman di Haiti sampai Tanah di Negara Tersebut Menjadi Rusak
Sumber: (Fong, 2017)

Seiring berjalannya waktu, Republik Dominika selalu berjuang untuk menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu negara ini menjadi salah satu negara yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hutan dan mendapat julukan sebagai negara yang memiliki cadangan hutan yang melimpah. Sebaliknya Haiti tidak memiliki hutan yang terjaga dengan baik dalam artian hutan yang ada di wilayah Haiti hampir semua mengalami penggundulan dan tinggal 2 persen dari wilayah negara Haiti yang masih memiliki pohon, sisanya habis ditebang sampai perbatasan Dominika (BangkaPos, 2019).

2.3. Politik

Perpolitikan kedua negara penuh dengan kudeta, pemberontakan dan diktator. Salah satu contohnya adalah Rafael Trujillo di Republik Dominika dan François dan Jean-Claude Duvalier di Haiti yang digulingkan pada tahun 1986. Juan Bosch, Presiden Republik Dominika yang terpilih secara demokratis pada tahun 1962, segera digulingkan setelah menjabat pada tahun 1963. Jean-Bertrand Aristide menjadi Presiden Haiti pertama yang terpilih secara demokratis pada tahun 2004. Dia kemudian digulingkan oleh gerakan oposisi yang kecil namun terorganisir dan didanai dengan baik oleh anggota dari komunitas internasional seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis. Tak lama setelah itu dikembalikan lagi pada posisinya. Pada akhirnya digulingkan lagi. Pada tahun 1965, bahkan ketika Republik Dominika terlibat dalam perang saudara, orang-orang Haiti bekerja di ladang-ladang Dominika dan bukan sebaliknya. Dan sementara Trujillo setidaknya mendorong pembangunan ekonomi di negaranya, Duvalier père et fils pada dasarnya menjual orang-orang mereka sebagai pemotong tebu murah ke Republik Dominika. (Silver, 2010).

2.4. Kesimpulan

Haiti telah lama dieksploitasi, oleh kekuatan asing, tetangga dan penguasanya sendiri. Prancis tidak hanya memerah susu Haiti untuk produksi kopi dan gula tetapi juga mengekstraksi ganti rugi darinya. Negara muda itu harus membayar jumlah yang memberatkan kepada mantan penjajahnya untuk mencapai pengakuan diplomatik Prancis. Penduduk Dominikan yang berkulit terang memandang rendah orang-orang Haiti yang berkulit lebih gelap. Dalam kasus ini, terdapat ancaman *human security* karena telah berkaitan dengan kelangsungan hidup dan martabat individu sebagai manusia. Ancaman *human security* juga terjadi karena adanya ancaman pada pemenuhan nilai-nilai dasar kehidupan manusia (Gasper & Gómez, 2015). Ancaman *human security* merupakan bagian dari *community security* karena keberadaan orang-orang Dominika keturunan Haiti terancam tidak memiliki kewarganegaraan dan kejahatan diskriminasi terhadap orang-orang Haiti mendapat dukungan dari pemerintahan Dominika.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa harus ikut bertanggung jawab untuk melindungi dan mencari solusi atas permasalahan ini. Tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dalam tingkat global dengan menggunakan salah satu inisiatif yang paling kontroversial adalah tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect atau R2P) yang diperkenalkan pada tahun 2001 oleh komisi internasional untuk intervensi dan kedaulatan negara dan kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005. R2P digambarkan sebagai

norma yang menuntut perlindungan populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mendorong dan membantu orang lain untuk memenuhi tanggung jawab mereka, dan mengambil tindakan tepat waktu dan menentukan kapan perlu dan sesuai dengan Piagam PBB untuk melindungi populasi dari kejahatan ini. R2P juga digambarkan sebagai cara kontemporer dalam membingkai intervensi kemanusiaan dan untuk perlindungan manusia atau komunitas dari penyalahgunaan kekuatan negara (Caballero-Anthony, 2015).

BAB 3

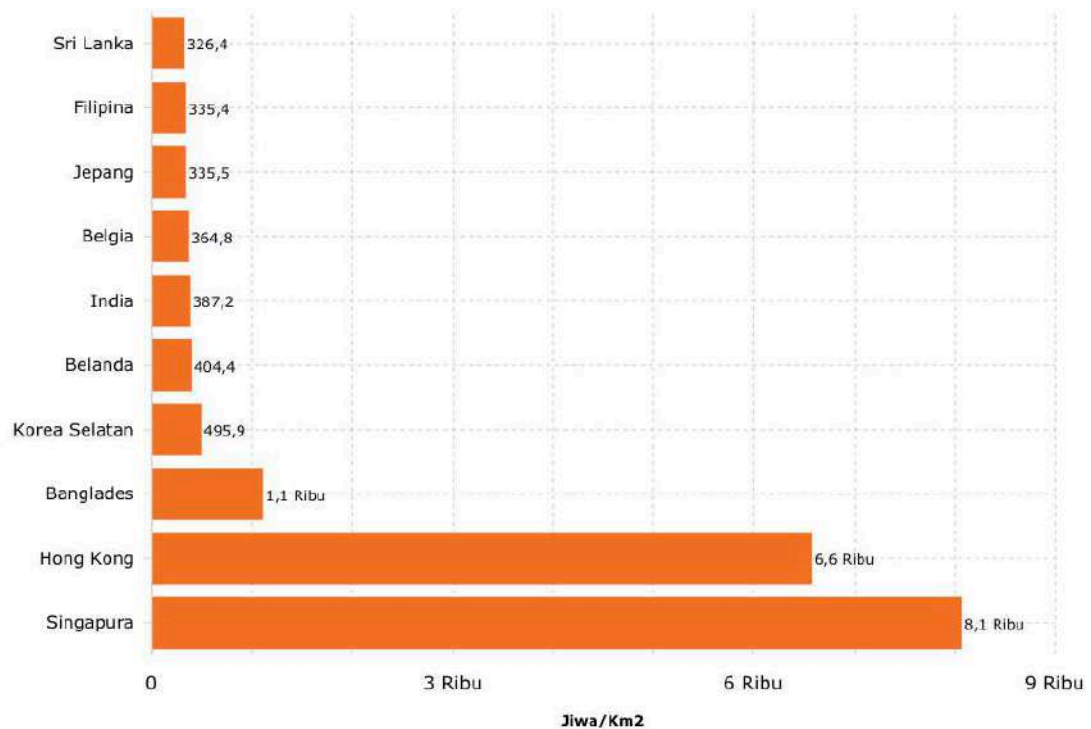
PERBATASAN ANTARA INDIA DAN BANGLADESH

3.1. *Internatonal Migrants*

Salah satu yang dihadapi daerah perbatasan adalah masalah migran. Organisasi internasional untuk migrasi melaporkan bahwa jumlah *international migrants* sekitar 214 juta, pada tahun 2010 jumlah migran ilegal diperkirakan sekitar 30-50 juta di seluruh dunia. Kemudian, diperkirakan pada akhir abad ke-20 terdapat sekitar 150 juta orang tinggal di luar negara kelahiran mereka dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 405 juta pada tahun 2050 (Mayilvaganan, 2019). Oleh karena itu, migrasi menjadi fenomena sosial yang terjadi karena dipicu beberapa permasalahan seperti perubahan iklim, kekacauan dibidang politik, kelesuan ekonomi, lingkungan, dan peperangan. Seseorang atau sekelompok orang berani mengambil resiko untuk mencari peluang yang lebih baik di bidang pendidikan, *family reunification* atau mengikuti kehadiran teman atau anggota keluarga yang telah lebih dahulu ada di sana, kerja atau mencari mata pencaharian yang lebih baik, dan rasa takut akan pembunuhan atau kekerasan yang terjadi di negara asalnya. Permasalahan ini pula yang terjadi antara India dan Bangladesh yang masih berlangsung sampai sekarang. Migran Bangladesh lebih memilih India karena faktor geografis yaitu karena wilayah yang lebih dekat, selain itu juga karena faktor bahasa dan budaya. Tempat tujuan migran ini adalah di daerah bagian Benggala Barat dan Assam.

India dan Bangladesh adalah dua negara yang dibatasi perbatasan darat sepanjang 4.095 km (Datta, 2004), yang terbagi atas Benggala Barat (2217 km), Assam (262 km), Meghalaya (443 km), Tripura (856 km) dan Mizoram (318 km). Sebagian besar perbatasan ini dibatasi dengan menggunakan kawat berduri dan diawasi oleh BSF (Pasukan Keamanan Perbatasan), organisasi paramiliter India yang bertanggung jawab untuk mengamankan perbatasan negara India-Pakistan dan India-Bangladesh. Bangladesh adalah negara muslim terbesar yang terletak di Asia Selatan dengan jumlah umat Islam sekitar 149 juta jiwa atau 90,6% dari jumlah penduduknya (Dakwah, 2018). Permasalahan yang sering muncul diperbatasan kedua negara ini seperti migran ilegal dari Bangladesh dan perpindahan lintas batas pemberontak separatis bersenjata sejumlah kelompok pemberontak dari negara bagian timur laut India dan Benggala Barat. Pada awalnya, migrasi yang terjadi ini dianggap sebagai suatu hal yang umum dengan alasan sejarah dan budaya. Seiring berkembangnya waktu, dengan alasan faktor perekonomian yang lagi lesu akibat seringnya terjadinya peperangan, kekacauan dan kekerasan di Bangladesh, akhirnya terjadilah migrasi besar-besaran dari Bangladesh ke India. Bangladesh memang dicirikan sebagai salah satu negara termiskin di dunia dengan tingkat kepadatan

penduduk yang tinggi. Bangladesh memiliki sekitar 160 juta penduduk dan kepadatan penduduk lebih dari 1000 orang per kilometer persegi sehingga menjadikan Bangladesh adalah salah satu negara terpadat di dunia (DW, 2020).



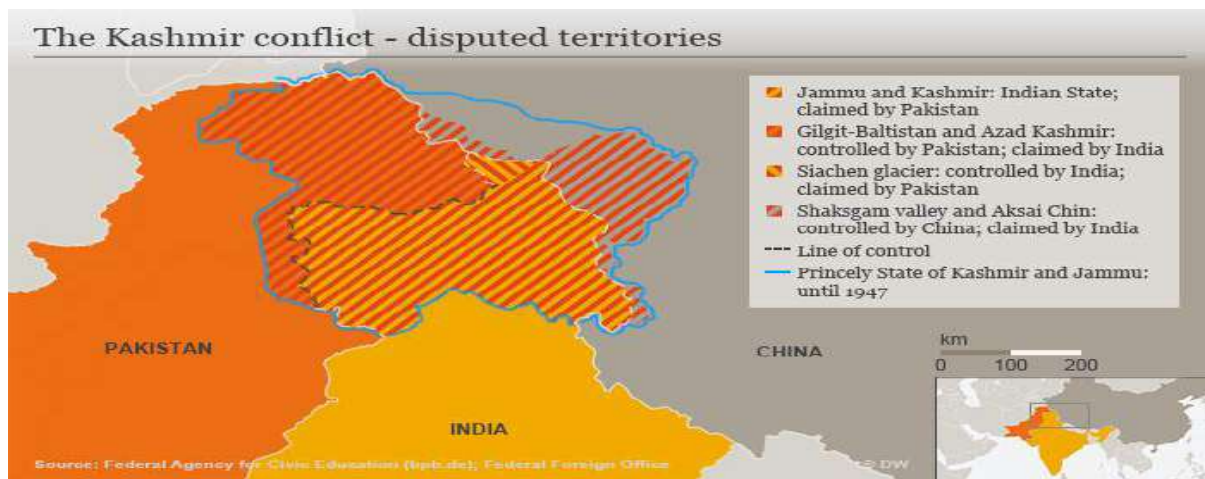
Gambar 3.1. Bangladesh Menduduki Urutan Ketiga untuk Tingkat Kepadatan Penduduk pada Tahun 2016
Sumber:(Databoks, 2016)

Imigran ilegal adalah salah satu permasalahan yang terjadi di perbatasan India dan Bangladesh dan telah menimbulkan kecemasan di pihak pemerintah India sehingga pemerintah India lebih memperketat lagi pengawasan di perbatasan (Ghosh, 2019).

3.2. Sejarah Kemerdekaan dan Perpolitikan di Bangladesh

India, Pakistan, dan Bangladesh pada awalnya bersatu di bawah jajahan Inggris. Pada tahun 1947, Pakistan dan India merdeka dari Inggris. Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947, India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Umat Islam memilih bersatu di negara Pakistan dan Umat Hindu memilih negara India. Jutaan muslim melarikan diri meninggalkan rumah mereka di India untuk mencari keamanan di Pakistan. Sebaliknya, jutaan warga yang beragama Hindu yang awalnya tinggal di area wilayah Pakistan kemudian memilih untuk pergi dan tinggal di India. Kemudian India dan Pakistan berselisih tentang kepemilikan daerah Kashmir yang juga mencakup daerah Jammu. Kashmir dan Jammu dipimpin oleh Maharaja Hindu, sementara umatnya mayoritas beragama Islam. Pakistan kemudian

melakukan invasi ke India yang juga dibalas oleh India. Perang ini terjadi sampai tahun 1948 yang berakhir dengan terpisahnya wilayah Kashmir dan Jammu. Pakistan menguasai Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan, sementara India menguasai lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh. Sampai sekarang masih sering terjadi konflik kecil di daerah perbatasan tersebut seperti pemberontakan yang terjadi pada tahun 2016 yang menyebabkan 18 tentara India tewas (Nathaniel, 2020).



Gambar 3.2. Konflik Pakistan dan India Memperebutkan Kashmir dan Jammu
Sumber: (DW, 2019)

Masyarakat Bengali yang tinggal di bagian barat dan timur Benggala (Bengal) awalnya tidak terpengaruh hubungan Pakistan dan India yang kerap kali diwarnai konflik. Tanpa melalui perang, Benggala Barat yang mayoritas Hindu bergabung dengan India dan Benggala Timur yang mayoritas beragama Islam bergabung dengan Pakistan. Meskipun Benggala Timur berbatasan langsung dengan India, bukan dengan dengan Pakistan tapi Benggala Timur lebih memilih Pakistan karena faktor agama. Berada dibawah Pakistan, Bengal Timur disebut sebagai Pakistan Timur. Dengan demikian, Pakistan memiliki dua bagian wilayah yang terpisah sejauh 1.000 mil (1.600 kilometer). Ibukota negara berada di Karachi dan sekitar 90 persen kekayaan negara di pusatkan di Pakistan Barat, sebaliknya sebagian kecil penduduk tinggal di Pakistan Timur yang relatif memiliki perekonomian menengah kebawah (Fathoni, 2018).

Kedua wilayah ini memiliki perbedaan bahasa meskipun berada dalam satu wilayah negara. Pakistan Barat menyarankan untuk menggunakan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional sedangkan bahasa Bengali yang dominan di Pakistan Timur dijadikan sebagai bahasa kedua. Setelah penetapan bahasa nasional ini, muncullah permasalahan yang mengarah pada konflik, karena banyak masyarakat di Pakistan Timur tidak memahami bahasa Urdu. Pada tahun 1952, terjadi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa di Pakistan Timur. Demonstrasi ini berakhir

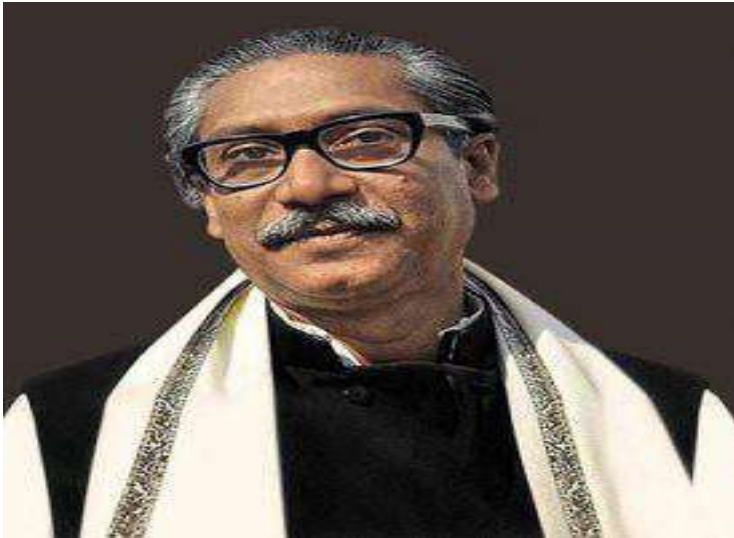
dengan kekerasan dimana polisi membunuh dua demonstrasi. Berkat usaha Pakistan Timur, dua tahun kemudian, pemerintah pusat di Karachi mengakui bahasa Bengali dan Urdu sebagai bahasa resmi negara Pakistan (Fathoni, 2018).

Setelah Pakistan meraih kemerdekaannya, Liga Muslim menjadi partai politik. Pada tahun 1954, Pakistan Timur menolak Liga Muslim. Pakistan Timur kemudian lebih memilih partai lokal yaitu Partai Sosialis Petani dan Pekerja dan Partai Liga Awami atau bisa disebut Partai Liga Rakyat. Kedua partai ini lalu berkoalisi untuk menentang dominasi Pakistan Barat. Masalah lain karena persoalan bantuan dari pihak luar negeri yang lebih banyak diberikan kepada Pakistan Barat dibanding ke Pakistan Timur. Pada tahun 1966, Sheik Mujibur Rahman yang dikenal dengan panggilan Mujib sebagai pemimpin Liga Awami mengeluarkan enam tuntutan untuk memperbaharui program politik dan ekonomi untuk wilayah Pakistan Timur. Tuntutan ini bertujuan untuk meningkatkan otonomi Pakistan Timur. Presiden Mohammad Ayub Khan dari Pusat, tidak menyetujui tuntutan tersebut yang berakhir dengan ditangkapnya Mujib pada tahun 1968. Akibatnya, pemogokan, kekerasan dan demonstrasi dari Pakistan Timur terus terjadi. Pada tahun 1969, Ayub mengundurkan diri dan Jenderal Agha Mohamad Yahya Khan mengambil alih kendali pemerintah Pakistan. Sebagai seorang Jenderal, Yahya Khan kemudian menerapkan darurat militer untuk meredakan kekacauan yang terjadi. Pada tanggal 12 November 1970, terjadi topan yang dasyat dan menghancurkan Pakistan Timur sehingga mengakibatkan seperempat juta orang meninggal. Dua hari setelah kejadian tersebut, Jenderal Yahya Khan mengunjungi wilayah Pakistan Timur untuk melihat langsung dampak yang ditimbulkan topan dasyat tersebut. Meskipun demikian, Jenderal Yahya Khan tidak memberikan bantuan yang berarti kepada masyarakat yang tengah dilanda bencana. Akibatnya, rakyat Pakistan Timur semakin marah. Perpecahan politik mulai nampak pada pemilihan bulan Desember 1970, dimana pemerintah pusat di Karachi mengirim tentara yang lebih banyak ke Pakistan Timur. Penggunaan militer untuk meredam kekacauan menjadi solusi bagi Jenderal Yahya Khan yang dimulai pada tanggal 25 Maret 1971. Esok harinya, pada tanggal 26 Maret 1971, Pakistan Timur mengumumkan kemerdekaannya dari sebuah radio stasiun yang disita di Chittagong dan menamakan negaranya Bangladesh yang berarti Bengali untuk negara Benggala. Jenderal Yahya Khan terus menggunakan pemaksaan menggunakan militer untuk menundukkan Pakistan Timur. Akibatnya ratusan orang tewas yang diperkirakan satu juta orang dan ratusan infrastruktur rusak dalam perang mempertahankan kemerdekaan tersebut yang berlangsung selama sembilan bulan (Fathoni, 2018).



Gambar 3.3. Letak Negara Bangladesh

Pengungsi tidak dapat dihindari akibat perang yang terjadi. Banyak penduduk di Pakistan Timur mengungsi ke India. Kondisi ini membuat Parlemen India mengutuk militer Pakistan dan memberikan dukungan kepada pemberontak di Bangladesh. Pada tanggal 4 Desember 1971, tentara India menyerang Pakistan Timur dengan dibantu pejuang kemerdekaan Bangladesh dan mengambil alih kota Dhaka setelah berhasil memukul mundur tentara Pakistan. 16 Desember 1971, kemerdekaan Bangladesh dijamin setelah pasukan Pakistan menyerah di wilayah Bangladesh kepada gabungan pasukan Bangladesh dan India (Datta, 2004). Pada tanggal 4 November 1972, Konstitusi Bangladesh diadopsi dengan mencontoh Konstitusi India dan membentuk sebuah pemerintahan parlementer. Sheikh Mujib Rahman kemudian menjadi perdana Menteri pertama dan Dhaka menjadi ibukota. (Fathoni, 2018).



Gambar 3.4. Perdana Menteri Sheikh Mujib Rahman sebagai PM Pertama
Sumber: (Fathoni, 2018)

Pemerintahan baru menghadapi tugas yang besar karena kondisi Bangladesh yang hancur akibat kekacauan dan perang yang baru saja selesai. Pada tahun 1974, kelaparan besar terjadi yang mengakibatkan 26.000 orang meninggal. Untuk menghadapi ini semua, PM Mujib Rahman kemudian menghentikan partai politik, melarang media dan kebebasan pribadi dibatasi. PM Mujib Rahman hanya mengakui satu partai dimana dirinya sebagai penguasa. Akibat kebijakannya ini, muncullah kudeta terus-menerus yang berusaha menjatuhkan kepemimpinannya. Pada tanggal 15 Agustus 1975, seorang perwira militer muda yang bernama Mayor Jenderal Ziaur Rahman memimpin kudeta yang berakhir PM Mujib dan keluarganya dibunuh. Mayor Jenderal Ziaur Rahman kemudian menjadi perdana Menteri dari tahun 1975 sampai tahun 1981 (Fathoni, 2018).



Gambar 3.5. Mayor Jenderal Ziaur Rahman Sebagai Penggagas Reformasi Bangladesh
Sumber: (Fathoni, 2018)

Kepemimpinan Mayor Jenderal Ziaur Rahman berfokus pada pemulihan hukum dan ketertiban untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi di Bangladesh. Usaha lain yang dilakukannya adalah membentuk partai politik dan mengadakan pemilihan umum. Meskipun demikian, usaha kudeta untuk membunuh dirinya tidak pernah berhenti. Akhirnya pada bulan Mei 1981, Rahman terbunuh di Chittagong dalam kudeta yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Manzur Ahmed. Kemudian, Wakil PM mengambil alih kepemimpinan di Bangladesh. Tetapi pada tahun 1982, Hussain Mohammed Ershad mengambil alih kekuasaan dan menjadikan dirinya sebagai perdana menteri dan mengumumkan darurat militer. Rakyat tidak menyukai pemerintahannya yang tidak melalui proses reformasi dan menjadikan dirinya sebagai diktator militer. Ia menjadikan Islam sebagai agama resmi. Pemerintahannya kemudian berakhir setelah tentara menarik dukungannya dan mendukung demokratisasi. Ershad kemudian mengundurkan diri pada bulan Desember 1990 (Fathoni, 2018).



Gambar 3.6. Khaleda Zia
Sumber: (Fathoni, 2018)

Pada awal 1991, pemilihan bebas diadakan dan parlemen kemudian memilih Khaleda Zia sebagai perdana menteri. Zia adalah istri Ziaur Rahman yang mendapat suara banyak karena kepopulerannya. Ia menjadi perdana menteri sampai tahun 1996 dan menjadikan bidang pendidikan sebagai sebuah lembaga reformasi dan membuat negara Bangladesh menjadi lebih demokratis. Zia kemudian digantikan oleh oposisi yang dipimpin oleh Sheikh Hasina Wajed yang menjabat dari tahun 1996 sampai 2001. Ia berkontribusi besar pada pelayanan kesehatan. Pada tahun 2001, Zia kembali menjadi perdana menteri (Fathoni, 2018).

3.3. Isyu Migran Ilegal

Organisasi Internasional untuk migrasi mendefinisikan migrasi adalah pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang melintasi perbatasan internasional suatu negara. Ini adalah gerakan populasi yang mencakup segala jenis pergerakan manusia apapun penyebabnya

misalnya migrasi para pengungsi, orang-orang terlantar, migran ekonomi, dan orang-orang yang bergerak untuk keperluan lain, termasuk *family reunification* (Mayilvaganan, 2019). Jadi imigrasi ilegal adalah migrasi orang atau sekelompok orang yang melintasi batas suatu negara untuk tinggal di negara tujuan tanpa memiliki dokumen yang lengkap. Seseorang melakukan migrasi ilegal karena percaya daerah atau negara yang akan didatangi akan memberikan manfaat ekonomi atau kehidupan yang lebih baik dibanding di negara tempat asalnya sehingga ia siap dengan resiko apapun dalam menyebrang ke negara tujuan.

Isyu migran ilegal menjadi salah satu permasalahan tersendiri antara Bangladesh dan India yang tidak berujung. Berdasarkan sensus pemerintah India tahun 2001 tentang data migrasi di India menunjukkan bahwa jumlah total migran adalah sekitar 314 juta orang. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 10-20 juta migran Bangladesh. World Migration Report tahun 2010 melaporkan bahwa terdapat 17 juta orang Bangladesh yang tidak memiliki dokumen yang lengkap di India, sementara jumlah migran dalam jumlah kecil yang berjumlah ribuan berasal dari Sri Lanka, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Afrika, dan Tibet (Mayilvaganan, 2019). Oleh karena itu, pemerintah India mengeluarkan aturan tentang migran ilegal yang tertuang dalam UU kewarganegaraan tahun 1955. Bagian 2(b) dari UU tersebut menyebutkan tentang *illegal migran* adalah orang asing yang telah masuk ke India adalah orang-orang yang memiliki syarat-syarat dibawah ini:

- a. Tanpa paspor yang masih berlaku atau dokumen perjalanan lainnya dan dokumen semacamnya sebagaimana ditentukan oleh atau dibawah hukum; atau
- b. Dengan paspor yang masih berlaku atau dokumen perjalanan lainnya sebagaimana ditentukan atau berdasarkan hukum atas nama itu tetapi tetap ada di luar yang diizinkan dalam periode waktu yang telah ditentukan (Das & Talukdar, 2016).

Jadi migran ilegal adalah orang yang tidak memiliki dokumen yang sah yang memasuki wilayah negara lain dengan tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan politik di negara tujuan. Lebih lanjut, Assam Accord mendefinisikan migran ilegal adalah mereka yang menyusup secara ilegal setelah tanggal 24 Desember 1971. Jadi mereka yang menyusup antara 1 Januari 1966 dan 24 Desember 1971 tidak akan dideportasi dan diberikan kewarganegaraan India setelah selang sepuluh tahun (Das & Talukdar, 2016).

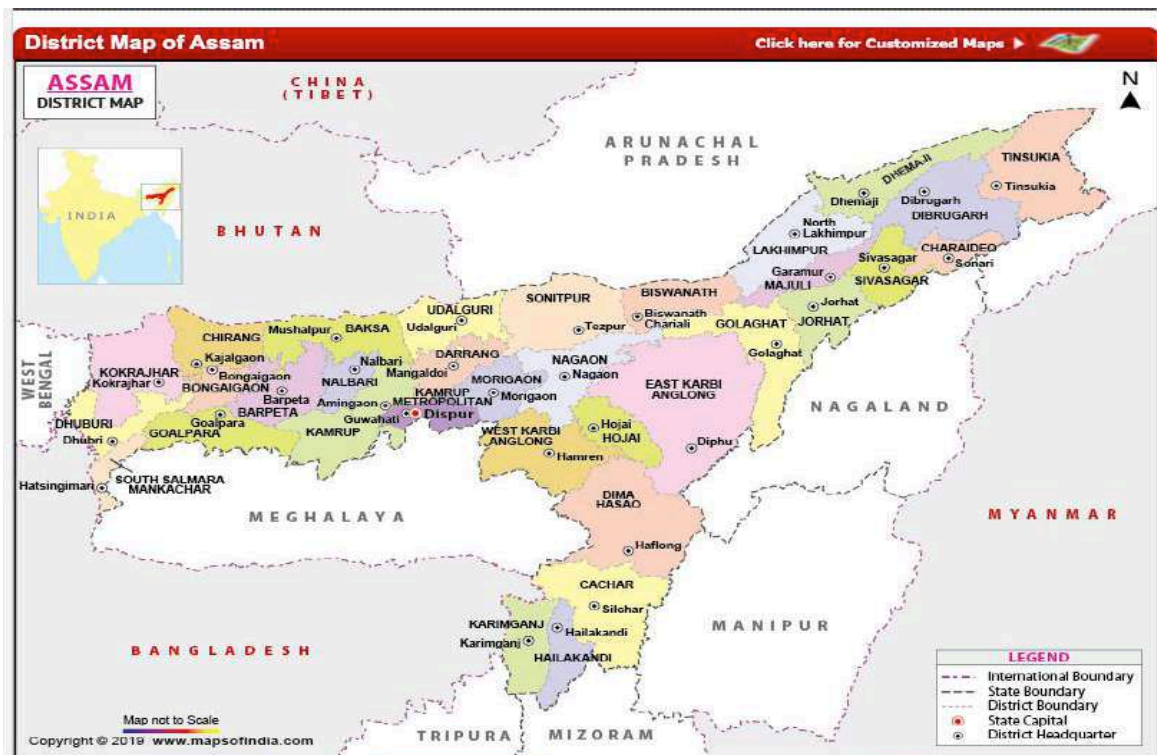
Faktor-faktor penyebab terjadinya migran ilegal dari Bangladesh ke India adalah:

- a. Tekanan dan pengangguran yang terus meningkat di Bangladesh karena populasi yang terus meningkat dan kepadatan penduduk yang tinggi.
- b. Perbatasan yang dibatasi dengan pagar yang rapuh karena masih terdapat pagar yang belum selesai.

- c. Kesempatan ekonomi yang lebih baik di India.
- d. Kompetisi politik dari *vote-bank* dan *the partronage extended* untuk migran yang dijanjikan oleh partai-partai politik atau kelompok-kelompok politik yang bersifat pribadi.
- e. Kehadiran lobi yang pro-Bangladesh yang kuat di India yang sering menciptakan mitos dan membingungkan masyarakat India tentang permasalahan krusial yang sedang terjadi.
- f. Bencana alam yang sering terjadi di Bangladesh seperti banjir dan topan (Das & Talukdar, 2016).

Orang-orang yang melakukan migran ilegal tidak akan merasa sulit untuk melewati bukit, hutan, sawah, atau sungai yang umumnya membatasi Bangladesh dan India. Mereka juga memilih daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan. Hal ini menjadi sulit untuk pos perbatasan yang berada di tepi sungai karena terkadang terjadi banjir atau erosi sehingga garis perbatasan menjadi tergeser. Kumar dalam artikelnya mengatakan bahwa dalam beberapa kasus perbatasan antara kedua negara terdapat masalah apabila melewati tengah-tengah beberapa desa, sementara satu bagian rumah ada di satu negara, yang lain ada di negara lain. Misalnya di Benggala Barat, ada lebih dari 100 desa yang terletak tepat di garis nol, dan dibanyak desa, ada rumah-rumah di mana pintu depan berada di India, dan pintu belakang lainnya membuka ke Bangladesh (Mayilvaganan, 2019). Keadaan ini tentu memberikan kesulitan sendiri bagi negara khususnya BSF pasukan khusus yang ditunjuk untuk mengawasi daerah perbatasan.

3.4. Nasib Imigran Ilegal Bangladesh di India



Gambar 3.7. Assam District Map
Sumber: (MapsofIndia, 2019)

Pada tahun 2018, gugatan hukum terhadap keluarnya *National Register of Citizens* di negara tersebut diajukan oleh sejumlah muslim di India karena mayoritas muslim di wilayah India tidak diakui atau menjadi bagian dari daftar tersebut. Kekacauan di masyarakat disebabkan pendataan *National Register of Citizens* (NRC) di negara bagian Assam dimana India tidak memasukkan sekitar empat juta orang sebagai warga negara pada bulan Juli 2018. Bukan hanya itu, adanya kampanye “deteksi-hapus-deportasi” untuk hampir 20 juta imigran gelap dari Bangladesh yang sebagian besar Muslim (Fadhilah & Nursalikah, 2018). Assam terletak di India Timur Laut, dengan ibukotanya Dispur. Negara bagian ini terkenal dengan teh, produksi sutera, produk minyak bumi tua, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Terdiri dari lembah Brahmaputra dan Sungai Barak, Assam adalah salah satu dari tujuh negara bagian di India timur laut. Guwahati adalah kota terbesar Assam dan merupakan pusat komersial dan pendidikan yang penting. Populasi Assam adalah 31.169.272 (sensus 2011) dan luas negara meliputi area 78.550 km persegi.



Gambar 3.8. Gugatan Warga India yang Namanya Tidak Masuk Dalam NRC
Sumber: (Fadhilah & Nursalikhah, 2018)

Setelah keluarnya NRC, Pemerintah India melakukan operasi besar-besaran untuk mendeteksi dan mendeportasi imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap dari Bangladesh. Kebencian terhadap imigran dari Bangladesh telah terjadi selama bertahun-tahun di Assam. Penduduk Assam menuduh imigran tersebut telah merebut pekerjaan dan tanah mereka. Sementara itu, sejak 1971, jutaan imigran Bangladesh baik yang beragama Islam maupun Hindu telah tiba di India setelah perang kemerdekaan negara tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas. Kedatangan imigran ke Assam terus berlanjut sehingga memicu kekerasan kampanye anti-imigran sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang. Sebaliknya, pemerintah India selalu menyatakan telah melakukan berbagai usaha untuk mendeteksi dan mendeportasi imigran gelap dari Bangladesh. Salah satu upaya ini adalah dengan menerapkan sistem NRC yang telah disiapkan sejak tahun 1951. Jadi imigran yang telah tinggal sejak tahun 1951, namanya akan muncul dan keturunannya. Daftar ini juga akan mencakup mereka yang telah masuk daftar pemilih India hingga 24 Maret 1971 atau dalam dokumen lain yang disetujui oleh pemerintah (Handayani & Nursalikhah, 2019).



Gambar 3.9. Warga memeriksa nama mereka dalam daftar warga negara NRC dan mencetaknya di desa Pabhokat, distrik Morigaondi negara bagian Assam, India pada bulan Agustus 2019

Sumber:(Handayani & Nursalikhah, 2019)

Daftar NRC terbaru yang dipantau Mahkamah Agung telah dimulai pada tahun 2015. Hasil pendataan ini dikeluarkan pada bulan Juli 2019 yang mengeluarkan lebih dari empat juta orang di negara bagian timur laut tersebut dari daftar draft final warga yang diterbitkan oleh *Registrar General of India*. Assam yang memiliki populasi 33 juta orang kemudian melakukan siaga tinggi dan pasukan keamanan tambahan telah dikerahkan untuk mengantisipasi situasi yang mungkin akan menjadi kacau setelah penerbitan daftar NRC (Handayani & Nursalikhah, 2019).

Seperti cerita seorang warga yang bernama Mijanur Rahman yang memiliki profesi sebagai petani dan berumur 47 tahun. Ia menceritakan bahwa dirinya, putranya yang berusia 21 tahun dan dua putrinya yang berusia 16 dan 14 termasuk dalam daftar. Tetapi istrinya dan tiga putrinya yang berusia dibawah 10 tahun dikeluarkan dari daftar (Handayani & Nursalikhah, 2019). Kekhawatiran muncul dalam diri Rahman dan berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan. Lalu apa yang terjadi dengan mereka yang tidak ada dalam daftar NRC? Kemungkinan besar mereka akan menghadapi penjara atau deportasi, tidak memiliki lagi hak untuk memilih, dan akan kehilangan hak-hak sipil lainnya. Sementara itu pemerintah India mengeluarkan pengumuman tentang rencananya menambah pembangunan 10 pusat penahanan lagi yang awalnya hanya terdiri dari enam pusat penahanan di Assam dan saat ini telah menahan sekitar 1.000 migran yang tidak memiliki dokumen yang lengkap (Handayani & Nursalikhah, 2019).



Gambar 3.10. Demo Tolak UU NRC di Gauhati, Assam, India
Sumber: (Ariyanti, 2019)

Gambar diatas menunjukkan ribuan pengunjuk rasa yang melakukan protes penolakan terhadap UU Amandemen Kewarganegaraan yang telah disahkan pada bulan Desember 2019. Selain di jalan-jalan, unjuk rasa yang disertai kekerasan juga terjadi di beberapa universitas yang melibatkan mahasiswa. Akibat dari aksi demonstrasi ini menyebabkan beberapa demonstran tewas, puluhan orang terluka, banyak bus yang dibakar dan infrastruktur yang hancur. Ada beberapa alasan mengapa UU Amandemen Kewarganegaraan ini diprotes, yaitu:

- UU ini adalah amandemen dari UU Kewarganegaraan India, yang berusia 64 tahun yang melarang imigran ilegal menjadi warga negara India. Di bawah UU lama, siapapun yang dianggap imigran ilegal bisa dideportasi atau dipenjara.
- UU lama juga mengatur ketentuan bahwa seseorang harus tinggal di India atau bekerja untuk pemerintah federal setidaknya 11 tahun sebelum mereka memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan.
- UU Amandemen Kewarganegaraan yang telah disahkan akan mempercepat pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama; Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari negara tetangga seperti Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, jika mereka datang ke India sebelum tahun 2015 (Ariyanti, 2019).



Gambar 3.11. Beberapa Demonstrasi yang Terluka
Sumber: (Ariyanti, 2019)

UU yang baru mendapat banyak penentang karena dianggap telah melakukan diskriminatif dengan tidak memberikan hak yang sama bagi warga muslim. UU tersebut juga telah melanggar institusi sekuler India yang melarang diskriminasi agama dan menegaskan warga setara dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama dibawah hukum. PM India, Narendra Modi yang berasal dari partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan bahwa UU ini tidak mengandung bias agama dan menyebut UU tersebut dapat menolong warga minoritas yang mengalami persekusi di negara-negara muslim di dekat India (Ariyanti, 2019). Kemudian Amit Shah yang menjabat Menteri Dalam Negeri India mengatakan bahwa UU itu tidak anti-muslim, karena tidak mempengaruhi jalur yang harus dilalui untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi semua komunitas. Ini adalah salah satu usaha untuk mengatasi kesulitan umat Hindu dan minoritas lain yang telah menderita akibat penganiayaan di Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan yang mayoritas muslim (Ariyanti, 2019).

3.5.Kesimpulan

Berbicara mengenai keamanan nasional terdapat dua faktor penting yaitu pertama, semua aspek keamanan nasional yang bersifat domestik berubah secara nyata bersamaan dengan adanya sekuritisasi tantangan yang bersifat transnasional, refugees dan isu lingkungan yang telah menjadi permasalahan dunia. Kedua, adanya rezim-rezim atau organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan atas isu keamanan nasional (Sussex, Clarke, & Medcalf, 2017). Jadi, faktor-faktor keamanan nasional ini menjelaskan bagaimana tantangan-tantangan suatu negara dalam mengatasi keamanan nasional. Faktor kedua, melihat bagaimana

negara dapat mengatasi masalah dalam negerinya tanpa adanya campur tangan dari suatu rezim internasional yang ada.

Kondisi ini juga yang terjadi dalam mengatasi migran ilegal antara dua negara yaitu Bangladesh dan India. Migran ilegal dari Bangladesh ke India menjadi satu masalah yang tidak pernah berhenti sampai saat ini yang akan berdampak pada masalah keamanan, sosial-politik, kesenjangan ekonomi masyarakat, dan demografis. Masalah migrasi dimulai pada masa kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 yang awalnya dikuasai Pakistan dengan nama Pakistan Timur menjadi wilayah yang berdaulat. Tentara Pakistan yang melakukan kekerasan dan penganiayaan pada penduduk muslim Bengali mendorong mereka untuk melakukan migrasi ke India. Ketidakmampuan pemerintah India dalam mengatasi migran ilegal kemudian mencapai puncaknya dengan diterbitkannya Undang-Undang Amandemen Kemerdekaan pada tahun 2019. Pada akhirnya masalah tersebut memaksa dimensi internasional untuk ikut campur karena telah berkaitan dengan faktor pelanggaran hak asasi manusia. Disisi lain, imigrasi menjadi salah satu solusi bagi warga Bangladesh untuk menghindari peperangan, kekacauan dan kekerasan yang terjadi di negaranya dan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Meskipun demikian, migran ilegal lebih cenderung memberikan kontribusi negatif karena menimbulkan ancaman bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, harmoni sosial menjadi terganggu dan keamanan nasional diantara dua negara yang akan berdampak pada terganggunya hubungan bilateral kedua negara.

BAB 4 PERBATASAN INDONESIA DAN PAPUA NUGINI

4.1. Kegiatan Perekonomian di Daerah Perbatasan

Suatu negara memiliki batas-batas sejauh mana suatu negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat terhadap wilayahnya baik darat maupun lautan. Area perbatasan mempunyai definisi yang vital dalam peraturan suatu pemerintahan demi *national interest*. Adapun Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangganya dan salah satunya adalah Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG). Suasana penduduk pada area perbatasan Indonesia - Papua Nugini bisa dibilang rata-rata berada dalam tingkat ekonomi yang sangat kurang, ketinggalan dan terbelakang. Penduduk di area perbatasan Indonesia - Papua Nugini terus-menerus terbiasa melintasi batas dengan terencana. Hal itu dilakukan oleh penduduk setempat sebagai wujud kedaerahan karena norma dan tradisi yang sama. Kegiatan penduduk di area perbatasan Indonesia - Papua Nugini melintasi perbatasan dilakukan atas dasar kekeluargaan penduduk Papua (Indonesia) ke Papua Nugini maupun Papua Nugini ke Papua (Indonesia). Aktivitas perdagangan kedua negeri ini dilakukan lewat pintu batas.



Gambar 4.1. SKOUW, Perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini
Sumber: (Ayu, 2019)

Distrik Sota adalah salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Di perbatasan Distrik Sota, kegiatan perdagangan dan ekonomi dilakukan oleh warga kedua negara dalam hal ini PNG dan Indonesia. Terdapat sebuah pasar tradisional di area perbatasan yang kenal oleh penduduk sekitar dengan “Pasar perdagangan internasional ” karena melibatkan dua negara (KompasTV, 2019).



Gambar 4.2. Perbatasan RI-PNG di Kab.Merauke

Pasar perdagangan internasional ini berada di Distrik Sota. Di area Distrik Sota, warga Papua New Guinea dan Papua dalam hal ini Indonesia melakukan aktivitas berbelanja dan bersekolah maupun berjualan dan bermain di daerah perbatasan. Penduduk setempat menggunakan sepeda untuk alat transportasi sehari-hari dalam mendukung kegiatan perbelanjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam melaksanakan pasar perdagangan tradisional di area sekitar perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, penduduk sekitar sering melakukan transaksi perdagangan yang disebut “hari pasar”. “Hari pasar” merupakan sebuah hari yang dimana penduduk kedua negara saling bertemu dan melakukan kegiatan berdagang seperti menjual dan membeli. Pasar tersebut banyak digunakan oleh penduduk kedua negara untuk membeli kebutuhan sehari-hari (KompasTV, 2019).



Gambar 4.3. Perbatasan RI-PNG di Kab.Merauke

Hari pasar selalu dilakukan dua hari dalam hal ini dua hari selama sepekan, yaitu pada hari Selasa dan Kamis. Mereka yang belanja tak hanya dari warga sekitar, tapi juga ada warga negara Papua New Guinea. Penduduk Papua New Guinea yang ingin memasuki wilayah Indonesia untuk melakukan aktivitasnya harus melalui pengecekan para petugas keamanan dalam hal ini Bea Cukai dan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas). Penduduk dicek atau diperiksa satu - persatu agar dapat memasuki area ini untuk masuk ke dalam pasar. Pengecekan ini dilakukan dengan memeriksa barang bawaan, dokumen- dokumen atau surat - surat yang diperlukan untuk melintasi batas negara. Kebanyakan penduduk yang datang membawa kartu yang berwarna kuning yang dimana kartu itu adalah kartu tertentu atau khusus untuk alternatif atau sebagai ganti paspor untuk penduduk setempat Papua New Guinea yang menetap di area perbatasan. Pengaplikasian dan pemakaian kartu berwarna kuning ini untuk penduduk Papua New Guinea persis dengan pengaplikasian kartu berwarna merah untuk penduduk setempat Skouw yang ingin mendatangi negara Papua New Guinea. Ketika para

penduduk telah dicek oleh badan pemeriksa, para penduduk tersebut baru bisa berbelanja maupun menjual berbagai keperluan di wilayah Indonesia . Adapun kebutuhan sehari-hari yang ada di jual di pasar tersebut antara lain: minyak goreng, pakaian, tepung terigu, gula pasir, makanan, dan minuman (KompasTV, 2019).

Perkembangan ataupun pertumbuhan kegiatan perdagangan ekonomi yang melintasi batas negara terlihat dari bertambahnya pergerakan mobilitas arus barang, jasa dan manusia antar kedua negara. Adapun yang diperjual belikan yakni sandang, pangan/ makanan, hasil dari pertanian dan peternakan. Namun di berbagai sudut lain, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh para pembeli maupun penjual yaitu ketersediaan/ keberadaan alat atau sarana perdagangan jasa yang hanya sedikit dan memiliki jumlah yang terbatas, tidak tersedianya alat transportasi untuk mengangkut banyak orang (dalam hal ini yang berbasis angkutan umum) di area perbatasan dan manajemen yang belum maksimal / optimal.

Gambaran diatas memberi penjelasan bahwa keadaan penduduk setempat yang menetap di area perbatasan memiliki kendala yang sangat umum yaitu terjadinya kesenjangan sosial seperti kemiskinan, sarana dan prasana yang kurang meskipun pengawasan semakin meningkat dengan diperbaikinya bangunan yang menjadi pengawas di daerah perbatasan. Meskipun demikian, untuk area perbatasan Indonesia - PNG perlu mendapat perhatian secara khusus oleh kedua pemerintahan. Dalam mengoperasikan area perbatasan oleh Indonesia dan PNG secara baik dan maksimal, kedua negara harus bekerja sama dalam mewujudkan pengelolaan dan pengoperasian tersebut. Pengoperasian area perbatasan tersebut juga didasari landasan yuridis dalam melakukan mekanisme prosedur dan sistem manajemen area perbatasan, serta diperlukan pendekatan atau cara yang benar.

Pengoperasian area perbatasan adalah suatu hal yang sangat vital bagi suatu pemerintahan negara. Tentu ini bisa terjadi oleh karena area perbatasan memiliki pengaruh penting bagi negara dalam hal ini kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat, memiliki faktor pendorong untuk pertumbuhan bidang sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar area , memiliki hubungan yang saling berdampak dengan aktivitas yang dilakukan di area lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar negara, dan memiliki pengaruh terhadap keadaan pertahanan dan keamanan dalam bentuk regional maupun nasional. Kegiatan pengamanan area perbatasan adalah cara untuk melindungi eksistensi negara karena bersinggungan tentang kedaulatan, penduduk dan area dari berbagai masalah. Pengoperasian batas wilayah negara dibutuhkan pula perhatian spesial terhadap upaya pembangunan area dikawasan perbatasan bagi menjamin tetap terciptanya kedaulatan, keamanan, kesejahteraan dan pertahanan negara.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan harmonisasi atau penyelarasan antar lembaga pemerintahan yang terkait dalam pengamanan dan pertahanan area perbatasan seperti Tentara Nasional Indonesia, Polisi, Kementerian yang terkait, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu juga meningkatkan pengawasan atau pengecekan di pos-pos lintas batas terhadap barang bawaan dan para penduduk yang akan melintasi atau memasuki negara. Mengadakan sarana dan prasana dalam hal ini jalan dan transportasi untuk memudahkan mobilitas atau pergerakan penduduk setempat.

4.2. Hambatan Dalam Pengelolaan Perbatasan Papua dan PNG

Salah satu faktor yang menjadi penghambat di perbatasan antara Papua dan PNG adalah karena sumber daya manusia yang terbatas disebabkan akses pendidikan dan kesehatan yang relatif masih sulit di jangkau. Selain itu, dalam kaitannya dengan keamanan, kedua negara masih harus menghadapi cara mengatasi separtisme (Purwanto & Mangku, 2017). Salah satu contohnya adalah saling tembak yang terjadi antara orang Papua Barat dan Tentara Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 06.45 di daerah perbatasan (Sekenyap, 2019). Akibatnya, rakyat Papua Nugini yang tinggal di sepanjang perbatasan diminta untuk menjauh dari perbatasan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Akibat yang lain, akses jalan darat ke perbatasan Papua-PNG telah diblokir oleh penduduk desa. Sekolah-sekolah di sepanjang jalan menuju perbatasan juga ditutup. Penduduk desa dilarang untuk pergi ke kebun dan ke laut. Akses ke pasar batas juga telah ditutup.



Gambar 4.4. Perbatasan Papua dan PNG di Kab.Merauke

4.3. Pengelolaan Perbatasan Papua dan PNG

Salah satu strategi pemerintah dalam mengelola perbatasan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang batas wilayah negara Indonesia termasuk salah satunya adalah Papua Nugini. Dalam UU tersebut pada pasal 10 menjelaskan tentang kewenangan pemerintah pusat, diantaranya:

- menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- membangun atau membuat tanda batas wilayah negara;
- melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial;
- menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali, dan
- menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan Perbatasan (Indonesia, 2009).



Gambar 4.5. Perbatasan Papua dan PNG dengan Latar Belakang Masyarakat PNG

Sementara itu, ada tiga pendekatan dalam pengelolaan perbatasan yaitu 1. Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan tiga dimensi secara komprehensif; 2. Pengelolaan kesejahteraan, keselamatan, dan lingkungan perbatasan negara dan wilayah; 3. Dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, yang dilaksanakan selaras dengan dua pendekatan lainnya yang berorientasi keselamatan dan lingkungan (Endes Teturan,

Suwitri, Warella, & Warsono, 2019). Tiga dimensi yang dimaksud diatas adalah 1. *Dimension approach to welfare (prosperity approach)* yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian dan perdagangan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan, diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan perbatasan masing-masing daerah dan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki; 2. *Dimension approach to security (security approach)*. Memandang wilayah perbatasan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Selain itu, peran batas perairan sangat vital bagi perekonomian banyak negara karena menjadi jalur perdagangan dunia sekaligus menghemat sumber daya alam yang sangat besar; 3. *Dimension approach to the environment (environment approach)*. Memandang dan memperhatikan aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan adalah penting (Endes Teturan et al., 2019).



Gambar 4.6. Berfoto Bersama Anak PNG di Perbatasan Papua dan PNG

Untuk *prosperity approach*, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian di daerah perbatasan adalah Festival Crossborder Sota 2019 yang diadakan pada tanggal 14-16 Juni 2019 dengan tema *Indonesia Incorporated* dengan menghadirkan pasar rakyat yang menjual produk khas Merauke dan Papua Nugini. Muh.Ricky Fauziyani sebagai asisten Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran I Regional III mengatakan bahwa event Festival Crossborder Sota 2019 memberikan peluang untuk menghidupkan ekonomi masyarakat karena para pelaku ekonomi lokal bisa men-*display* seluruh produknya lalu menciptakan transaksi sehingga ada nilai ekonomi yang bisa dinikmati warga di perbatasan karena dapat menguatkan roda perekonomian di perbatasan (Maris, 2019).

Kegiatan Festival Crossborder Sota 2019 melibatkan bukan hanya produk-produk dari Indonesia tetapi juga dari PNG. Produk yang diikutkan dalam festival ini dominan produk hasil bumi dan hortikultura seperti kacang panjang dan cabai, buah-buahan dan hasil ternak serta produk olahan dengan bahan baku ubi jalar yang diolah menjadi camilan basah dan kering, selai, dodol, permen, saos, tepung granule dan tapioka. Kemudian ada juga beragam barang kerajinan tangan seperti produk noken. Kegiatan festival ini bukan hanya menghidupkan sektor perekonomian tetapi juga industri pariwisata ikut terkena dampak positifnya karena kegiatan festival tersebut menarik kunjungan wisatawan mancanegara dari negara tetangga (Papua Nugini). Terciptanya *border tourism* menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan karena adanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan PNG.

4.4. Kesimpulan

Teori yang akan diterapkan dalam pembahasan pada bab ini adalah *Regional Security Complex Theory*. Teori tersebut terfokus pada komponen regional atau kawasan. *Regional Security Complex Theory* ini adalah teori keamanan regional yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Waever di buku mereka yang berjudul "*Regions and Powers: The Structure of International Security*". Pengertian kawasan pada *Regional Security Complex Theory* ini lebih menitikberatkan pada sudut pandang keamanan yang berarti satu area dapat memberikan dampak pada masalah keamanan atau sebuah proses keamanan. Buzan dan Waever mendefinisikan *Regional Security Complex* merupakan persatuan dari proses *securitization*, *desecuritization*, atau keduanya yang saling terkait satu sama lain. Buzan dan Waever berpendapat bahwa istilah *securitization* adalah suatu cara menyelesaikan kendala dimana negara yang memiliki *power* untuk mengatasi masalah dapat berdampak pada kedaulatan negara. Buzan dan Waever mengusulkan pendekatan analisis keamanan yang menjadi lima

sektor yang digunakan untuk analisis keamanan: militer, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik (Kilroy, Rodriguez, & Hataley, 2017).

Selain itu, analisis *Regional Security Complex Theory* melingkupi elemen-elemen seperti ras/ suku, keadaan alam dan budaya penduduk yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea yang semuanya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan politik dan pada titik terakhir muncul rasa dependensi antara Indonesia dengan Papua New Guinea dalam pertahanan keamanan. Barry Buzan menganggap bahwa elemen yang paling vital dalam penciptaan *Regional Security Complex* adalah munculnya dependensi dan jalinan kerjasama keamanan antar negara satu dengan yang lainnya dalam regional tersebut. Itu terbukti dimana kita mengetahui bahwa Indonesia dan Papua New Guinea berada dalam satu kawasan yang dikenal Pasifik Barat Daya menciptakan forum kerja sama. Namun, Buzan mengatakan dalam kerja sama *Regional Security Complex* ini akan selalu ada *power* dari luar yang ikut kedalamnya (Kilroy et al., 2017). Ini terbukti dengan Australia selalu ikut campur dalam forum tersebut.

Munculnya dependensi diantara dua negara dalam suatu kawasan akan memberikan kesadaran untuk menciptakan kerja sama dalam sektor pertahanan keamanan yang dilandasi pemahaman bahwa konsistensi tatanan keamanan dalam suatu wilayah akan berdampak ke wilayah lainnya yang berada pada region yang sama dan keunggulan state yang adidaya dalam tatanan global bisa menjadi momok pertahanan kawasan yang bisa menyebabkan masalah dalam region itu. *Regional Security Complex Theory* ini menciptakan *security management* menjadi wujud keamanan berdasar pada keamanan region.

Dengan memandang letak geografis, hal tersebut memang mengambil andil dalam menjabarkan keadaan suatu wilayah dan korelasi dengan area lainnya di dalam region. Selain itu, persamaan budaya membuat negara-negara yang berada di kawasan yang sama memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi serta kokoh. Letak geografis dan persamaan budaya adalah indikator yang menjadi tolak ukur internal dari *Regional Security Complex*. Selanjutnya, tolak ukur dari eksternal adalah keadaan perbatasan dan masalah-masalah yang tengah terjadi di perbatasan Papua New Guinea dan Indonesia untuk perlu diadakannya kerja sama terutama dalam hal pertahanan keamanan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan hambatan yang berada dalam proses *securitization*. Segala kendala keamanan masing-masing wilayah dalam hal ini negara memang berbeda-beda.

BAB 5 PERBATASAN AMERIKA SERIKAT DAN MEKSIKO

5.1. Sejarah



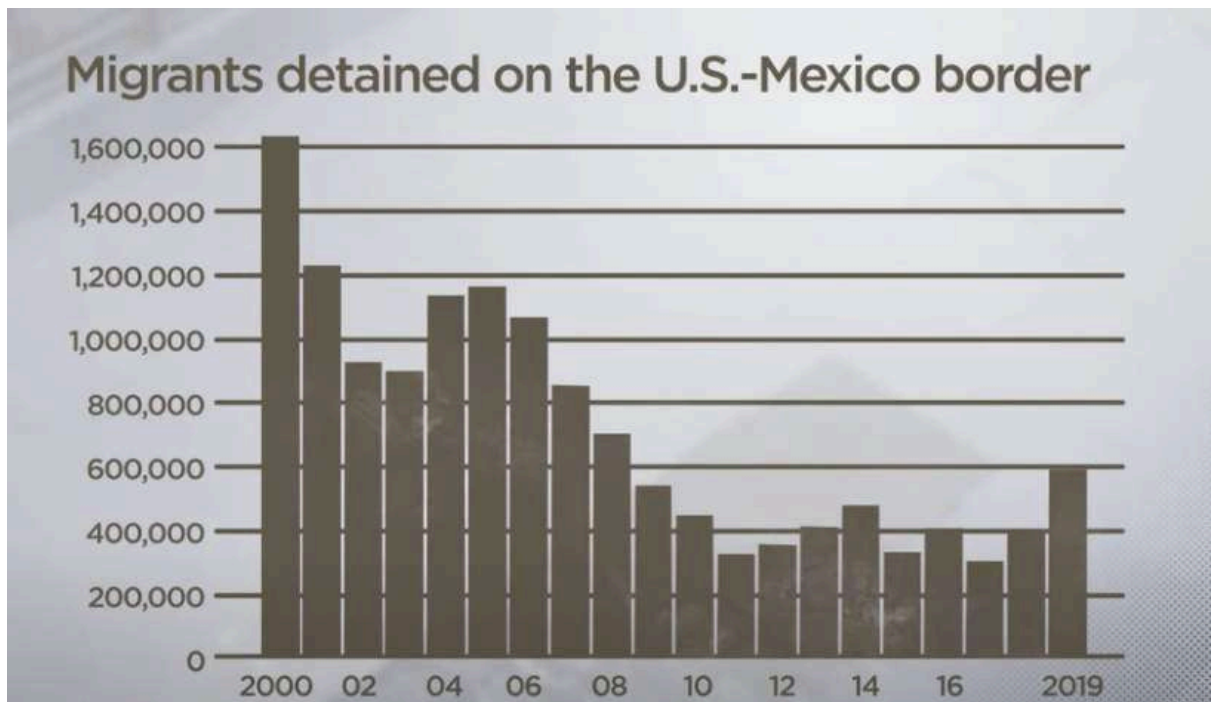
Gambar 5.1. Perbatasan AS dan Meksiko

Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko telah menjadi isu internasional seiring perkembangannya. Setelah kemerdekaan Meksiko pada tahun 1810, Meksiko dan Amerika Serikat memiliki banyak sengketa wilayah. Pergolakan politik di Meksiko dan peluang ekonomi melintasi perbatasan mendorong arus migrasi ke Amerika Serikat setelah Revolusi Meksiko. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) membuka jalan bagi hubungan AS-Meksiko yang lebih dekat dalam keamanan, perdagangan, dan *counternarcotics*. Namun, pembukaan jalan terhadap hubungan AS-Meksiko ternyata memicu timbulnya konflik. Hal ini dikarenakan tingginya arus migrasi. Migrasi adalah akar dari perselisihan pertama antara AS dan Meksiko. Pada tahun 1830, Meksiko melarang imigrasi ke Texas dari Amerika Serikat dalam upaya untuk membendung masuknya pemukim berbahasa Inggris (GlobalNews, 2019).

Presiden Meksiko Antonio Lopez de Santa Anna mencoba menegakkan hukum dengan menghapus perbudakan dan menegakkan bea cukai. Pada Maret 1836, Santa Anna ditahan dan menandatangani perjanjian yang mengakui kemerdekaan Texas. Pada tahun 1845, Texas menjadi bagian dari Amerika Serikat sebagai *Country Slaves*. Hal tersebut membuat Meksiko

kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Eskalasi konflik yang terus meningkat, akibat ketidakstabilan demografi Meksiko, menghasilkan konflik yang sampai saat ini terus terjadi (GlobalNews, 2019).

5.2. Kebijakan Donald Trump



Gambar 5.2. Jumlah Migran yang Ditahan
Sumber: (GlobalNews, 2019)

Perbatasan AS dan Meksiko pada perkembangannya tetap berada pada pusaran permasalahan imigran. Pergantian presiden di AS tidak mematahkan jumlah maupun arus imigran yang terus meningkat di perbatasan AS-Meksiko. Dimulai dari Era Presiden Bill Clinton hingga Obama, konflik antara AS-Meksiko tetap terjadi. Namun, sejak masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, perbatasan AS-Meksiko mengalami penegasan. Hal ini terkait dengan kebijakan Donald Trump mengenai perbatasan yang ada, dimana sekitar 1.500 km selatan garis antara AS dan Amerika Utara, Donald Trump mengeluarkan kebijakan pembangunan tembok (*Hard Border*). Terkait dengan hal tersebut, Meksiko segera bertindak melakukan pengendalian imigrasi. Dengan cara menghentikan ratusan ribu orang Amerika Tengah untuk bepergian ke utara. Hal ini dibuktikan dimana *detention centre* telah mendeportasi lebih banyak imigran sejak 2015 (GlobalNews, 2019). Bagi Meksiko, kontrol

atas perbatasan selatannya menawarkan perlindungan bagi wilayahnya. Tetapi, karena sebagian masyarakat Amerika Tengah terus melarikan diri dari konflik sosial di daerahnya, maka, penyangga perbatasan Meksiko berubah menjadi kemacetan imigran. Xenophobia dan kriminalitas membuat Meksiko selatan semakin berbahaya bagi para pengungsi dan migran. Pemerintah Meksiko, dengan dukungan dari negara-negara Amerika Tengah, Uni Eropa (UE) dan Washington sendiri, harus berusaha untuk memperkuat perlindungan pengungsi, pencegahan kejahatan dan pembangunan di daerah tersebut.

Dikenal dengan sikap anti-imigrasinya yang keras, Trump telah menanamkan ketegasan terhadap setiap imigran yang ingin memasuki AS, dengan meningkatkan keamanan perbatasan dengan pembangunan *Hard Border* seperti yang telah dijelaskan diatas. Pada tahun 2017, penangkapan patroli perbatasan AS terhadap imigran kembali meningkat. Para volunteer kemanusiaan dan migran sendiri melaporkan kecemasan yang besar atas apa yang menunggu mereka setelah melakukan persilangan (berusaha menembus perbatasan). Jumlah orang dari Amerika Latin yang mengajukan status pengungsi di Meksiko melonjak 66 persen pada 2017. Tingginya kasus imigran mengakibatkan beban yang besar bagi pemerintah Meksiko sehingga sistem hukum Meksiko untuk mengadili kasus-kasus suaka hampir runtuh. Permasalahan lain, ketika dua gempa bumi melanda Meksiko pada bulan September 2017 menyebabkan badan pengungsi nasional sempat lumpuh. Dampaknya, banyak para imigran, termasuk anak-anak terlantar di pusat penahanan, menunggu putusan, apakah mereka akan diberikan perlindungan atau tidak (GlobalNews, 2019).

5.3. Hak Asylum

Dalam kasus perbatasan AS-Meksiko penting untuk mengidentifikasi apa sebetulnya yang menyebabkan tingginya jumlah imigran di tengah kebijakan Trump yang tegas. Berdasarkan laporan UNHCR semenjak 2014, sebagian warga Meksiko yang ingin bermigrasi ke A.S di tengah tegasnya kebijakan Trump, didorong oleh faktor bahwa mereka ingin menggunakan hak asyulmnya. Hak asylum merupakan hak bagi para pencari suaka untuk dapat bermigrasi akibat ketidak terpenuhinya kebutuhan mereka di negara asalnya. Hak asylum inilah yang menjadi pegangan para imigran Meksiko hingga saat ini.

Hak asylum yang menjadi harapan para imigran Meksiko, ini sebagian besar di dorong oleh faktor ekonomi yang tidak dapat dikesampingkan dalam permasalahan krisis imigran di perbatasan AS-Meksiko. Tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, dan rendahnya tingkat pendidikan, membuat beberapa warga Meksiko menggunakan hak asylumnnya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi membuat sebagian besar orang Meksiko harus mencari suaka. Namun, dibawa pemerintahan Trump, hak asylum telah dipertanyakan. Berdasarkan laporan CNN, untuk pertama kalinya, AS mengembalikan pencari suaka dari Amerika Tengah ke Meksiko agar menunggu proses di Meksiko sejak tanggal 29 Januari 2019. Sebagai contohnya adalah seorang warga Honduras bernama Carlos Gomez. Ia tiba di Meksiko untuk melanjutkan perjalanan ke AS pada tahun 2018. Ia kemudian tinggal di AS selama menunggu proses pengajuan suaka. Namun, aturan tersebut tidak berlaku lagi karena dibawah pemerintahan Presiden Donald Trump, aturan tersebut berubah yaitu Protokol Perlindungan Migran (MPP) yang memungkinkan pengembalian pencari suaka non-meksiko untuk menunggu proses suaka di Meksiko. Aturan ini membuat Gomez harus menunggu di Meksiko sekalipun ia sudah mendapatkan visa kemanusiaan untuk menunggu proses suakanya. Surat undangan untuk hadir ke persidangan akan diterima Gomez untuk memberitahu mengenai permintaan suaka sudah masuk tahap pertimbangan pengadilan imigrasi. Gomez akan tinggal di Meksiko selama proses pengadilan. Jika ia kalah di pengadilan, ia akan dipulangkan ke negara asalnya (CNNIndonesia, 2019).

Keadaan diatas memberikan penjelasan bahwa kebijakan AS terkait Protokol Perlindungan Migran, mengamanatkan bahwa suaka non-Meksiko kembali ke Meksiko ketika mereka menunggu audiensi hak asylumnnya di Amerika Serikat. Hal tersebut ternyata telah menghasilkan pembentukan kamp sementara di mana ratusan migran telah menunggu selama berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan, dan dalam kondisi yang tidak pantas dan tidak aman. Sehingga dalam beberapa kasus, keluarga migran lebih memilih untuk mengirim anak-anak melintasi perbatasan AS-Meksiko, daripada menunggu keputusan peradilan. Apa yang dihasilkan dari kasus tersebut, membuat Trump mengeluarkan kebijakan *Zero-tolerance policy*. Kebijakan *Zero tolerance policy* ini dimaksudkan untuk meningkatkan penuntutan pidana terhadap orang-orang yang tertangkap memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Selain itu kebijakan ini juga terkait dengan penahanan terhadap anak-anak di bawah umur yang dikirim di perbatasan oleh orang tuanya, akan di pisahkan dalam *detention centre*. Kebijakan pemisahan keluarga dan perlakuan terhadap keluarga yang datang ke AS telah menimbulkan perhatian dan

kecaman publik. Berdasarkan hal tersebut, timbul banyak pertanyaan, apakah kebijakan hard border maupun *Zero tolerance policy* efektif terhadap kasus krisis imigran.

Melalui kaca mata AS, kebijakan penegasan di perbatasan AS-Meksiko terhadap kasus imigran merupakan kebijakan yang berpusat pada *national security*. Kebijakan yang dibuat tersebut terlahir dari adanya ancaman terhadap keamanan nasional AS. Tingginya tingkat kriminalitas di perbatasan AS-Meksiko, membuat AS harus mempertegas kembali stabilitas keamanannya. Presiden Trump dan anggota pemerintahannya telah memperingatkan setiap anggota kejahatan yang terstruktur maupun tidak terstruktur, baik dari Amerika Tengah, Asia Selatan dan Timur Tengah untuk tidak menyusup ke Amerika Serikat. Tingkat kriminalitas semakin meningkat terkait jumlah *drug trafficking* dan *organized crime*, membuat pemerintah AS harus membendung perbatasannya. Presiden Trump menyatakan kartel narkoba Meksiko sebagai "organisasi teroris", karena itu pemerintah AS harus lebih tegas dalam menjaga keamanan di daerah perbatasan. Penegasan ini tentunya berdampak pada kebijakan perbatasan yang ada, dengan tingginya arus imigran yang mencari suaka di AS, membuat Trump lebih sepekat dengan opsi *Hard Border*.

5.4. Pandangan Demokrat dan Republik

Pada dasarnya kontrol perbatasan adalah tugas utama dari sebuah negara, dan hal tersebut merupakan elemen konstitutif yang tidak luput dari kedaulatan negara. Menurut Max Weber, perbatasan berfungsi untuk membatasi otoritas mana yang secara sah bagi negara, kelompok, dan individu. Dimana kesemuanya dapat menggunakan kekuatan koersif yaitu, menggunakan kekuatan dan memungut pajak dalam suatu wilayah (Gravelle, 2018). Bercermin pada langkah-langkah yang diambil oleh AS, penggunaan kekuatan koersif untuk menetapkan kedaulatannya menjadi kebijakan utama AS. Studi kontemporer tentang politik dan kebijakan AS pada perkembangannya telah menegaskan bahwa suatu perbatasan memang penting. Setelah serangan teroris 11 September 2001, AS meningkatkan pengawasan perbatasan darat dan wilayah udaranya lebih ketat lagi. Hal ini menggambarkan adanya kontrol terhadap wilayah AS karena bukan hanya berhubungan sektor keamanan tetapi juga perdagangan.

Gravelle dalam tulisannya yang berjudul *Politics, time, space, and attitudes toward US–Mexico border security* berpendapat bahwa, *Border Proximity* yang dihasilkan dari sikap kebijakan imigrasi Amerika lebih cenderung mengidentifikasi imigrasi sebagai "masalah paling penting" dalam survei politik. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta

bahwa Partai Demokrat lebih terbuka dengan masalah perbatasan AS-Meksiko, sehingga memungkinkan untuk Partai Demokrat mendukung inisiatif perbatasan. Kemudian, Gravelle menemukan bahwa kedekatan dengan Demokrat dengan masalah perbatasan AS-Meksiko, telah memperkuat kesenjangan partisan antara Demokrat dan Republik mengenai masalah imigrasi ilegal. Di antara Demokrat, kedekatan masalah perbatasan meningkatkan dukungan untuk memungkinkan imigran tidak berdokumen untuk tinggal di AS, sedangkan dari kalangan Republikan, dukungan terhadap hal tersebut sangatlah kurang. Selain hal tersebut, keamanan perbatasan AS telah ditangani hanya secara tangensial dalam penelitian opini publik. Misalnya, hasil dari *World Values Survey* tahun 2000 menemukan bahwa hanya 18 persen orang Amerika mendukung penghapusan perbatasan AS-Meksiko. Sebaliknya, 42 persen mendukung penghapusan perbatasan Kanada-AS. Setelah 9/11, survei tahun 2002 menemukan bahwa 69 persen publik Amerika mendukung kebijakan keamanan perbatasan bersama dengan Kanada. Ketika ditanya alasan lebih mendukung kebijakan perbatasan dengan Kanada, publik AS mengatakan lebih memilih prospek perdagangan (di satu sisi) dan meningkatkan keamanan perbatasan (di sisi lain). Berdasarkan hal tersebut 72 persen orang Amerika memprioritaskan keamanan perbatasan atas perdagangan (Gravelle, 2018).

Keamanan perbatasan telah menjadi masalah yang berulang dalam politik AS dalam beberapa tahun terakhir, seperti kebijakan mengenai imigran ilegal, reformasi imigrasi, terorisme, dan hubungan perdagangan kontinental. Politik keamanan perbatasan sangat diperdebatkan sejak janji Presiden Trump untuk membangun tembok sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Sikap Amerika terhadap keamanan perbatasan AS-Meksiko ditandai oleh polarisasi partisan dan ideologis, dengan Partai Republik. Hal tersebut secara signifikan lebih mendukung langkah-langkah keamanan yang lebih besar di perbatasan selatan AS. Lebih jauh, sikap Amerika terhadap keamanan perbatasan AS-Meksiko baru-baru ini menjadi semakin terpolarisasi. Apakah hasil dari peningkatan isyarat atau aktivasi identitas sosial politik, Partai Republik dan konservatif yang diidentifikasi sendiri relatif stabil selama dekade terakhir dalam tingkat dukungan mereka untuk pagar atau dinding di perbatasan AS-Meksiko. Demokrat dan liberal yang mengidentifikasi diri telah pindah dari ambivalensi menjadi sangat menolak proposal tersebut. Temuan-temuan ini dengan demikian menyoroti bahwa opini publik dan faktor-faktor politik telah membentuk kebijakan perbatasan AS dalam konteks kontemporer (Gravelle, 2018).

Pendapat berbeda juga datang dari Carter dan Poast dalam tulisannya yang berjudul *Why Do States Build Walls? Political Economy, Security, and Border Stability*. Keduanya mengatakan bahwa perbatasan merupakan sistem bagi setiap negara dalam tatanan internasional. Pada prinsipnya, perbatasan dengan jelas dan efisien membatasi pergeseran tanggung jawab yurisdiksi negara. Meskipun ada klaim bahwa proses politik dan ekonomi transnasional membuat perbatasan menjadi usang, manajemen perbatasan tetap sangat relevan. Perbatasan dapat gagal dalam fungsi konstitutifnya. Pertama, ada perselisihan teritorial atas demarkasi perbatasan. Literatur pada umumnya sebagian besar menunjukkan konsekuensi mendalam untuk pola konflik dan kerja sama ketika lokasi perbatasan diperselisihkan. Kedua, para pemimpin dan warga khawatir tentang imigrasi ilegal, perdagangan narkoba, dan arus pengungsi. Tetapi tidak seperti sumber ketidakstabilan pertama, literatur hubungan internasional hanya menaruh sedikit perhatian pada ketidakstabilan dari aliran lintas batas yang tidak diinginkan dan kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk mengatur arus tersebut. Negara-negara yang mengalami kesulitan mengatur arus lintas perbatasan kadang mengambil langkah yang agresif untuk mengamankan perbatasan. Salah satu strategi paling agresif adalah pembangunan hambatan fisik, yang disebut sebagai "*Boder Walls*". Seperti penjelasan di atas, kebijakan yang tegas dengan membangun tembok dapat dilihat pada kebijakan perbatasan AS (Carter & Poast, 2016).

Carter dan Poast lebih jauh mengeksplorasi strategi manajemen Border Wall. Argumen sentral keduanya adalah bahwa border wall telah menghasilkan ketimpangan ekonomi lintas batas, dimana hal tersebut menciptakan insentif bagi individu untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi terlarang. Perbatasan yang memisahkan ekonomi dengan tingkat pembangunan yang sangat berbeda cenderung tidak stabil. Ketidakstabilan ini terkait dengan kemungkinan konstruksi dinding yang jauh lebih tinggi. Selain itu, Carter dan Poast berpendapat bahwa negara sering meningkatkan upaya patroli perbatasan sebelum mengambil langkah yang relatif mahal untuk membangun tembok fisik. Amerika Serikat memulai pembangunan tembok perbatasan sepanjang bentangan perbatasan AS-Meksiko pada tahun 2005, sementara militerisasi manajemen perbatasan secara umum dimulai pada pertengahan hingga akhir 1990-an. Negara membangun tembok untuk mengekang aliran orang dan barang yang tidak diinginkan melintasi perbatasan. Namun, tidak ada studi sistematis untuk menyelidiki apakah hal tersebut merupakan strategi yang efektif. Kebijakan Border Wall Karena meningkatkan kesulitan dan biaya untuk menyeberangi perbatasan, mereka sebenarnya

dapat meningkatkan permintaan penyelundup 'profesional' atau organisasi dengan kapasitas untuk mengendalikan kontrol dan menemukan cara masuk. Dengan demikian, langkah-langkah keamanan yang keras dapat menciptakan pasar yang lebih kuat untuk penyelundup manusia dan barang yang terorganisir dengan baik, didanai, dan sering dipersenjatai. Hal ini dapat mengarah pada tindakan keras keamanan lebih lanjut di perbatasan, meningkatkan kemungkinan konfrontasi dengan kekerasan. Sebagai akibatnya, langkah-langkah keras meningkat di organisasi yang berspesialisasi dalam perdagangan di perbatasan dan meningkatkan kemungkinan bentrokan bersenjata antara organisasi-organisasi ini dan pasukan keamanan negara. Meningkatnya insiden konflik bersenjata di perbatasan, bahkan jika terutama antara organisasi non-negara dan pasukan keamanan dari satu atau negara lain, juga meningkatkan risiko bentrokan bersenjata antara pasukan keamanan kedua negara (Carter & Poast, 2016).

Perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko memberikan ilustrasi tentang bagaimana tindakan keamanan yang keras memberdayakan para aktor dengan kepentingan pribadi pada ketidakstabilan perbatasan yang berkelanjutan. Peter Andreas (2000) mencatat bahwa 'kampanye kontrol perbatasan yang intensif telah mengubah tindakan yang sebelumnya relatif sederhana untuk melintasi perbatasan menjadi sistem praktik ilegal yang lebih kompleks' (Carter & Poast, 2016). Faktanya, meskipun individu pernah melintasi perbatasan secara mandiri tanpa terlalu banyak masalah, pada akhir 1990-an, hampir 75 persen orang yang secara ilegal melintasi perbatasan melakukannya dengan "jasa penyelundup" (Carter & Poast, 2016). Maka berdasarkan kedua penjelasan mengenai kondisi perbatasan AS - Meksiko yang mengarah pada *Hard Border*, dapat dikatakan pada perkembangannya tidak menyelesaikan konflik yang ada.

5.5. Kesimpulan

Perbatasan antara Amerika Serikat Selatan dan Meksiko terbentang sekitar 650 mil dengan penghalang berupa *Hard Border*. Administrasi Presiden Donald Trump yang memasang kebijakan yang jauh lebih tegas daripada sebelumnya, pada perkembangannya telah menimbulkan kontroversi. Kebijakan baru yang meliputi *Hard Border* dengan tembok yang mencapai ketinggian 18 hingga 30 kaki telah berujung pada "zona penegakan" yang diperluas. Kebijakan yang tegas terhadap perbatasan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengidentifikasi kebijakan Trump tersebut dengan menggunakan pendekatan Sekuritisasi (*Securitization*).

Selama dekade terakhir, bidang studi keamanan telah menjadi salah satu bidang yang paling dinamis dan erat kaitannya dengan studi perbatasan dalam Hubungan Internasional. Teori keamanan *securitization*, berawal dari sejarah Copenhagen School (CS) yang menetapkan pendekatan tersebut pada akhir 1980-an. Pendekatan 'sekuritisasi' ini merujuk pada konstruksi linguistik masalah keamanan yang telah berdampak besar pada tatanan politik suatu negara baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dengan kata lain, konsep teori *securitization* menggabungkan model desain politik dengan manajemen ancaman. Hal tersebut sebagaimana setiap negara membutuhkan konsep yang dapat mencegah terjadinya ketidak stabilan keamanan. Teori *securitization* dibangun berdasarkan pada premis bahwa kata 'keamanan' memiliki karakter yang performatif yaitu, ia tidak hanya menggambarkan keamanan terhadap dunia internasional, tetapi juga dapat mengubah realitas sosial (Balzacq, Léonard, & Ruzicka, 2016).

Dalam tulisannya yang berjudul “*‘Securitization’ revisited: theory and cases*”, Balzacq et.al. berpendapat bahwa teori *securitization* membahas pokok-pokok pertanyaan yang meliputi: apa yang menjadikan sesuatu masalah keamanan? respons macam apa yang dituntut dari hal tersebut? Apa konsekuensi spesifik dari menyetujui bahwa sesuatu itu ancaman?. Untuk menyederhanakannya, Balzacq et.al. berpendapat sama dengan realisme dan neorealisme yang mengasumsikan bahwa rasa tidak aman berasal dari subjek yang mengancam dari isu-isu tertentu. Isu-isu tersebut menuntut penggunaan kekuatan dan membuat negara-negara melahirkan rasa saling curiga satu sama lain. Balzacq mengutip dari Stephen Walt, mendefinisikan studi keamanan sebagai ‘studi tentang ancaman, penggunaan dan kontrol kekuatan militer’. Sebaliknya, ia menekankan untuk teori sekuritisasi, entitas suatu ‘keamanan’ tidak tergantung pada fitur-fitur obyektif, melainkan berasal dari interaksi antara aktor sekuritisasi dan audiensnya. Untuk alasan ini, kemungkinan menunjuk sesuatu sebagai masalah keamanan ada di setiap sektor kehidupan sosial. Dengan demikian, domain keamanan tidak hanya terdiri dari masalah militer. Namun, teori sekuritisasi juga meliputi isu- isu lain seperti ekonomi, sosial dan budaya (Balzacq et al., 2016).

Lain halnya dengan Balzacq, pendapat berbeda muncul dari Michael C. William dalam tulisannya yang berjudul “*Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics*”. William berpendapat bahwa teori *securitization* selama ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan nasional dirancang dengan cermat oleh para politisi dan pembuat keputusan. Menurut teori sekuritisasi, isu-isu politik merupakan masalah keamanan ekstrem yang harus

ditangani segera ketika mereka dicap sebagai ‘dangerous’, ‘threatening’, dan sebagainya oleh ‘aktor sekuritisasi’ yang memiliki kekuatan sosial dan kelembagaan. William mengambil contoh dalam kasus krisis, yang dimana imigran disebut sebagai ‘ancaman terhadap keamanan nasional’. Hal ini pun membuat masalah imigran yang tadinya dari masalah politik prioritas rendah berubah menjadi masalah prioritas tinggi yang memerlukan tindakan, seperti mengamankan perbatasan. Teori *securitization* menantang pendekatan tradisional terhadap keamanan di IR dan menegaskan bahwa masalah pada dasarnya tidak mengancam diri mereka sendiri; alih-alih, dengan menyebut mereka (isu- isu tertentu) sebagai masalah 'keamanan'. Lebih jauh William menyatakan bahwa inti dari teori sekuritisasi adalah menunjukkan struktur retorika para pembuat keputusan ketika membingkai suatu masalah dan berusaha meyakinkan audiens untuk mengangkat isu tersebut di atas politik. Mengkonseptualisasikan sekuritisasi sebagai tindak tutur adalah penting karena menunjukkan bahwa kata-kata tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi merupakan realitas, yang pada gilirannya memicu respons tertentu (Williams, 2003).

Terkait dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Trump terkait penegasan perbatasan antar AS-Meksiko, kesemuanya memperlihatkan esensi sekuritisasi. Sekuritisasi terhadap kasus imigran pada perkembangannya terkait erat dengan kestabilan suatu negara. Studi kasus khusus mengenai perbatasan AS-Meksiko menunjukkan bagaimana kebangkitan imigrasi tidak teratur dalam konteks era keamanan baru, di mana melawan kejahatan terorganisir dan terorisme adalah prioritas utama, mengarah pada kebijakan publik yang lebih ketat, pengawasan baru dan kontrol perangkat, dan kontrol perbatasan eksternal yang lebih ketat. Masalah utama yang dikaitkan dengan proses sekuritisasi adalah ketidakmampuan aktor sekuritisasi untuk melihat migran sebagai individu manusia. Sebaliknya kasus imigran digabung ke dalam kategori ancaman.

BAB 6

PERBATASAN SINGAPURA DAN INDONESIA

6.1. *Family from The Sea*

Batas maritim antara Singapura dan Indonesia ditentukan ketika Singapura menjadi sebuah negara berdaulat pada tahun 1965. Jauh sebelum Singapura berdiri sendiri menjadi sebuah negara, di wilayah bagian selatan Singapura yang berbatasan laut dengan kepulauan Riau, masyarakat hidup dengan berbagi budaya yang sama, sebagai bangsa pelaut. Tradisi mereka dikenal sebagai *Koleks boat racing*. Damar laut dulunya adalah tempat masyarakat Singapur merayakan festival tersebut. Namun, perlombaan balap perahu itu terhenti pada tahun 1975. Sementara masyarakat seberang di kepulauan Batam masih melaksanakannya setiap tahun. Untuk melihat festival tahunan ini, banyak dari masyarakat Singapura berbondong-bondong datang ke Batam. Bagi mereka, berpisah negara bukan berarti tidak lagi menjadi saudara. Mereka menyebut diri mereka sebagai “*Family from the sea*” (CNA, 2019).

Ada kekerabatan yang kuat dan harmonis di perbatasan Singapura dan juga Indonesia. Kesamaan budaya menyatukan kedua wilayah yang berbatasan laut ini. Kemudian, kepentingan ekonomi memperkuat hubungan keduanya. Sebagai wilayah pelayaran internasional, Indonesia dan Singapura tidak ingin kehilangan kesempatan emas. Dibanding bersengketa memperebutkan wilayah maritim, keduanya lebih memilih melakukan kerjasama di bidang ekonomi melalui kerangka *Free Trade Zone* (FTZ). Melihat dari aspek historis, Singapura telah menjadi “*colonial free enterport*” sejak zaman Kesultanan Melayu. Keadaan tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi di Batam karena kedua pulau tersebut memiliki jarak yang sangat berdekatan. Pulau Batam terletak di sebelah timur laut pulau Singapura. Keduanya mengapit Selat Malaka sehingga memiliki posisi geografis yang sangat strategis.

6.2. *Free Trade Zone* (FTZ)

Pulau Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karena pengembangan wilayah regional dianggap penting untuk mendorong peningkatan frekuensi perdagangan internasional, karena arus lalu lintas yang lancar. Tujuan yang ingin dicapai dari penciptaan Kawasan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) ini adalah tersedianya lapangan kerja, peningkatan sektor pariwisata, serta masuknya investasi dari dalam maupun luar negeri. FTZ Batam bersama dengan dua wilayah lain, yaitu Bintan dan Karimun, ditandatangani pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun baru

diresmikan pada tahun 2009. FTZ merupakan kebijakan mempermudah fiskal untuk pengembangan industri dalam negeri untuk tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Detikcom, 2009). FTZ adalah suatu wilayah yang akan menghapuskan beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dengan tujuan seperti yang telah disebutkan diatas yang secara garis besarnya untuk menarik investor asing agar mau berinvestasi di wilayah FTZ ini.



Gambar 6.1. FTZ Batam
Sumber: (Rachman, 2013)

Uraian pada paragraf sebelumnya tentu merupakan harapan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah daerah Batam. Akan tetapi, laju pertumbuhan ekonomi Batam sejak tahun 2010 hanya Rp 80 triliun per tahun dan terus merosot. Sedikitnya sudah ada 169 perusahaan meninggalkan Batam sejak tahun 2015. Selain itu, jumlah pengangguran terus bertambah hingga 4.000 orang (Tempo, 2018). Mengatasi memburuknya perekonomian Batam, pemerintah berniat untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam (IndonesiaBusinessForum, 2019). Keadaan ini berbanding terbalik dengan tujuan diresmikannya FTZ Batam. Hubungan Paradiplomasi Pemerintah Batam kembali dipertanyakan. Benarkah ada hubungan Paradiplomasi antara Pemerintah Batam dengan Singapura atau, apakah pemerintah daerah hanya berperan sebagai penyedia tempat bertemunya dua kepentingan negara?.

Aktor memiliki peran penting karena aktor bertugas untuk melakukan hubungan luar negeri. Dalam konsep paradiplomasi, yang menjadi aktor adalah *sub-state* seperti pemerintah daerah, kota, maupun kabupaten. Paradiplomasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri, seperti investasi dan perdagangan. Ketentuan

tersebut termaktub dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Efektivitas dari tata kelola paradiplomasi dapat diketahui dengan melihat dari tiga aspek, berikut yaitu: (1)terdapat kesamaan dalam tingkat pembangunan ataupun saling membutuhkan satu sama lain dalam hal sumber daya alam, modal, dan pekerja; (2) pemerintah daerah berperan sebagai *interlocutor*, yaitu penghubung dari semua kepentingan di wilayah tersebut; (3) daerah memiliki kewenangan dan kekuatan yang seimbang untuk pelaksanaan kerjasama (Putri, 2019).

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penerapan paradiplomasi dalam lingkup FTZ Batam menjadi kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peranan aktor daerah akibat dari dominasi aktor pusat. Aktor daerah hanya memfasilitasi penyelenggaraan hubungan kerjasama internasional dalam cakupan FTZ. Sesuai aturan perundang-undangan, pemerintah daerah merupakan *stakeholder* dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam menangani masuknya investor asing. Pihak yang menjadi gerbang utama dalam pemanfaatan peluang ekspor-impor haruslah dari pihak daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mencari dan mengelola investasi asing bagi pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjalankan peran otonomnya untuk aktif berdiplomasi dan berbisnis internasional. Andil pemerintah pusat adalah mengurangi perannya agar proses “mempermudah” yang menjadi nafas dari FTZ dapat diterapkan.

Kawasan industri dari FTZ seharusnya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pengelolaan yang masih kurang efektif menyebabkan FTZ tidak memberi dampak signifikan. Iklim investasi menjadi terhambat akibat negara tidak memberikan keleluasaan bagi investasi asing, karena dalam tata kelola perdagangan bebas masih bersifat disinvestasi dibanding pro-investasi. Regulasi pemerintah pusat yang seperti itu tentu mempengaruhi minat investasi ke dalam negeri. Tindakan yang harus dilakukan adalah penerapan paradiplomasi dengan prinsip yang benar, yaitu memberikan wewenang dan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama. Negara hanya bertugas untuk memfasilitasi kebutuhan daerah seperti infrastruktur dan transportasi agar dapat menekan biaya produksi. Dengan begitu, daerah dapat bersaing dengan wilayah lain, terutama antara Batam dan Singapura. Pemerintah pusat juga harus lebih fokus pada perbaikan undang-undang yang menyulitkan investasi. Apabila pusat dan daerah dapat melakukan peran sesuai porsi masing-masing, maka wilayah Batam dapat bersaing dengan negara seberang, yaitu Singapura. Setidaknya untuk beberapa tahun mendatang, penerapan prinsip paradiplomasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam.

Tujuan *Free Trade Zone* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam belum tercapai maksimal akibat pemerintah pusat yang tidak bisa menempatkan posisinya sebagai fasilitator. Pemerintah daerah tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan kerjasama langsung dengan pihak asing, yaitu Singapura karena daerah tidak diberi kewenangan penuh oleh pemerintah pusat. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kekuatan kepada pemerintah daerah Batam untuk melakukan tugas diplomasi dengan negara tetangganya yaitu Singapura, maka pemerintah pusat bisa fokus untuk melengkapi fasilitas infrastruktur dan transportasi yang dibutuhkan daerah untuk menekan biaya produksi. Dengan demikian, investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi karena biaya produksi yang rendah. Semakin banyak investasi masuk, semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat. Hal ini tentu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah pengangguran. Pemerintah pusat hanya perlu membiarkan pemerintah daerah bekerja sesuai amanat Undang-Undang, dan melakukan tugasnya sebagai fasilitator.

6.3. Paradiplomasi Dalam Studi Perbatasan Indonesia Dengan Singapura

Substansi pembahasan dalam isu hubungan internasional beberapa dekade terakhir telah bertambah dari isu *high politic* seperti perang dan perdamaian, menjadi isu *low politic* seperti kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan substansi lain yang tidak berhubungan dengan politik tingkat tinggi. Oleh sebab itu, diplomasi merupakan ‘senjata utama’ yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mencapai kepentingannya, yaitu kerjasama. George Kennan mengemukakan pendapatnya bahwa diplomasi merupakan seni dan manifestasi utama dalam konteks yang bersifat universal (Surwandono, 2019).

Ada tiga paradigma dalam diplomasi. Pertama, paradiplomasi *transborder*, yaitu hubungan diplomasi antar sub-state baik formal maupun informal yang berada di region yang sama, serta memiliki perbatasan geografi secara langsung. Kedua, paradiplomasi *transregional*, yaitu hubungan diplomasi antar substate yang berada di region yang sama, namun tidak memiliki perbatasan geografi secara langsung. Ketiga, paradiplomasi global, yaitu hubungan diplomasi antar sub-state yang berada di region berbeda. Ketiga aspek ini lahir karena globalisasi semakin mempermudah akses komunikasi dan transportasi (Surwandono, 2019).

Hubungan paradiplomasi dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah pusat dapat memfasilitasi keperluan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam hal mempromosikan perdagangan, menarik investasi asing maupun

lokal, serta berbagai potensi kerjasama dengan pihak asing. Paradiplomasi digunakan untuk berkompetisi dalam dunia global, dan tidak ada unsur politik tingkat tinggi di dalamnya. Diplomasi jenis ini awalnya berkembang di Eropa, namun telah menjadi fenomena yang lazim diterapkan di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia dengan salah satu negara tetangganya, yaitu Singapura.

Sejak jatuhnya rezim Soeharto, politik dalam maupun luar negeri Indonesia mengalami transformasi yang sangat signifikan. Paradiplomasi dijadikan model baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama luar negeri. Lebih lanjut, pemerintah daerah diberi kewenangan dan kekuatan dalam Undang-Undang untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing. Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang diberi hak istimewa untuk melakukan hubungan langsung dengan negara lain. Pemberian hak istimewa tersebut didasari atas dua hal yaitu pertama, posisi Kepulauan Riau yang strategis karena berbatasan maritim dengan Singapura. Kedua, wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis untuk meningkatkan keamanan nasional. Berdasarkan paradigma liberal, menjalin kerjasama dengan negara tetangga justru akan meminimalkan resiko sengketa, dan dilain sisi dapat meningkatkan perekonomian apabila kerjasama kedua pihak dapat menarik masuknya kegiatan perdagangan dan investasi asing.

Paradiplomasi pemerintah daerah Riau dengan Singapura (sub-state) telah membawa era baru dalam perdagangan Indonesia, yaitu *Free Trade Zone* (FTZ) dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam, Bintan, dan Karimun yang merupakan wilayah pelayaran internasional di Selat Malaka, berbatasan langsung dengan negara Singapura dan juga Malaysia. KPBPB merupakan hasil dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura untuk tujuan mempermudah mengurangi hambatan perdagangan. Sebagai negara yang bertetangga, tidak dapat dihindari bahwa masyarakat kedua negara selalu melakukan komunikasi dan transaksi. Oleh karena itu, pemberlakuan KPBPB dianggap sebagai solusi untuk menghindari konflik kedua negara sekaligus sebagai solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 6.2. FTZ Batam-Bintan-Karimun
Sumber: (Kurnia, 2020)

Meskipun pada awal-awal implementasi KPBPB belum mampu mendongkrak perekonomian di Riau, namun pada tahun 2017, total investasi yang masuk di Kepulauan Riau meningkat drastis mencapai Rp 12,3 triliun dari 27 investor asing yang sebagian besar berasal dari Singapura. Perusahaan Asing yang banyak berinvestasi di bidang pariwisata adalah Gallant Venture Group (Surwandono, 2019).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa penting membahas tentang paradiplomasi dalam studi perbatasan Indonesia dengan Singapura? Jawabannya adalah karena paradiplomasi merupakan strategi untuk mempererat hubungan kedua negara. Perbatasan merupakan wilayah yang rawan akan konflik keamanan karena berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Dengan diterapkannya paradiplomasi, maka hubungan yang baik antar negara dapat terjalin. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan paradiplomasi di bidang ekonomi terhadap hubungannya dengan Singapura. FTZ merupakan bentuk paradiplomasi di bidang ekonomi.

6.4. Integrasi Informal di Wilayah Perbatasan

Studi yang dilakukan oleh Chen dalam Pasific Rim menunjukkan bahwa region Asia Tenggara cenderung menggunakan integrasi informal dibanding integrasi formal. Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk diketahui perbedaan antara integrasi formal dan informal. Integrasi formal dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk mengontrol hubungan kedua negara dan lebih bersifat politis. Sementara integrasi informal digerakkan oleh aktivitas atau kebutuhan pasar, dimana peran pemerintah tetap dibutuhkan untuk bersinergi dengan individu, perusahaan, atau investor yang berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di

wilayah terkait (Nadalutti, 2015). Dalam kasus perbatasan Indonesia-Singapura, Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) adalah wilayah tempat integrasi informal terjadi.

Integrasi merupakan kemungkinan positif yang dapat terjadi pada wilayah perbatasan. Sementara kemungkinan negatif yang dapat muncul adalah sengketa perbatasan. Indonesia berbatasan dengan beberapa negara lain selain Singapura. Contohnya adalah Malaysia. Negara yang juga berbagi beberapa kebudayaan yang sama, seperti halnya Singapura tersebut justru sering terlibat masalah perebutan wilayah atau sengketa dengan Indonesia. Misalnya sengketa Sipadan dan Ligitan. Sementara dengan Singapura, Indonesia lebih bisa bersikap tenang karena hubungan kedua negara cenderung harmonis dan berorientasi kerjasama ekonomi.

Pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam pengembangan FTZ selain dari pemerintah daerah di Batam dan pemerintah pusat Indonesia, adalah Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura dan perusahaan-perusahaan multinasional asal Singapura yang telah mewakili negaranya. Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Batam sebagai kota industri. Kepulauan Riau telah dikembangkan melalui pembangunan industri dan telekomunikasi oleh agensi-agensi asal Singapura bekerjasama dengan pemerintah dan bisnis lokal Indonesia. Sebagai contoh, Gallant Venture Group membangun Batamindo Industrial Park di Batam dan Bintan Industrial Estate di Bintan, serta melakukan investasi di bidang property. Dalam hal ini, Gallant Venture bermitra dengan perusahaan asal Indonesia yaitu Salim Grup.

Berdasarkan data dari *Investment Coordinating Board* (BKPM), jumlah perusahaan asal Singapura yang berinvestasi di Indonesia terus meningkat dengan total 39 miliar dollar AS dari tahun 2012 sampai 2017 (BKPM, 2018). Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi pertumbuhan ekonomi Batam. Masalah yang kemudian muncul bukan berasal dari Singapura, melainkan dari dalam negeri, yaitu regulasi pemerintah Indonesia yang memberatkan dalam iklim investasi. Dualisme kepemimpinan di Batam adalah hal yang paling menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan karena adanya dua kepemimpinan yang saling berbeda pandangan. Bahkan, investasi perusahaan asal Singapura sempat menurun total sebelum akhirnya menunjukkan kemajuan seperti saat ini.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa penting membahas FTZ dalam studi perbatasan antara Indonesia dan Singapura? Jawabannya karena FTZ merupakan bentuk kebijakan dari integrasi di wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura. Kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama perdagangan dan investasi untuk mencapai kepentingan kedua negara, yaitu pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini berbatasan dengan Singapura memberikan keuntungan secara ekonomi.

6.5. Kesimpulan

Regionalisme baru berorientasi ke luar, yaitu integrasi antara dua atau lebih negara, dimana wilayah geografis diubah dari sekedar objek pasif menjadi subjek aktif, melalui kegiatan ekonomi, budaya, dan aktor pemerintahan di berbagai level. Regionalisme baru fokus pada proses negosiasi dan interaksi yang terjalin antar aktor, dimana unit analisisnya bervariasi. Mulai dari level individu, sub negara, dan negara. Isu yang diangkat pun bermacam-macam, mulai dari isu pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan lain-lain. Di Asia Tenggara contohnya, isu regionalisme yang sering diangkat adalah isu pariwisata dan budaya, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Inti dari pendekatan ini adalah adanya kegiatan lintas batas untuk tujuan kerjasama pembangunan atau disebut sebagai *cross-border cooperation*.

Berdasarkan studi dari jurnal "*Is Cross-Border Cooperation Underpinned by an Ethical Code Values? A theoretical Analysis*", isu *cross-border* tidak dapat diselesaikan dengan memasang *hard border* di wilayah perbatasan. Sebaliknya, dibutuhkan kerjasama antara masing-masing pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi. Wilayah perbatasan bukan sekedar benda mati, melainkan bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, harus dikelola dan diatur dengan cara yang etis. Memberikan batasan terhadap aktivitas dan gerak manusia di perbatasan dianggap sebagai sesuatu yang tidak manusiawi. Sen dan Benediktus berpendapat bahwa sekalipun dua komunitas masyarakat berbeda dari segi sistem kepercayaan, politik, maupun budaya, namun masih terdapat kesamaan yang beberapa dekade sebelumnya diabaikan dengan pemasangan tembok-tembok tinggi di perbatasan, Kesamaan tersebut adalah kepentingan. Kepentingan tersebutlah yang mampu menciptakan sistem dan prinsip baru yang harmonis diantara komunitas yang pluralis (Nadalutti, 2017).

Kepentingan ekonomi merupakan salah satu yang dapat menciptakan harmonisasi pada komunitas perbatasan. Sebagai contoh, Singapura memiliki banyak sumber modal namun kekurangan lahan. Sementara itu, Indonesia memiliki sumberdaya alam berupa lahan dan sumber daya manusia. Negara-negara ini memiliki perbedaan karakteristik dan kepemilikan atas sumber daya alam. Namun karena adanya kepentingan ekonomi, maka negara-negara ini bekerja sama dalam komunitas regional "*Growth Triangle*", dengan cara Singapura melakukan investasi di kedua negara (Indonesia dan Malaysia), dan Indonesia maupun Malaysia bertugas untuk menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan asal Singapura.

Integrasi ekonomi adalah apa yang didorong oleh *cross-border cooperation*. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara individu

maupun negara secara keseluruhan. Kedekatan wilayah secara geografi adalah faktor utama yang mendorong terciptanya kerjasama *cross-border* seperti yang selama ini diterapkan oleh Singapura dan Indonesia di Kepulauan Riau, tepatnya di Batam, Bintan, dan Karimun (KKB). Selain kedekatan wilayah secara geografis, adanya interaksi antar level pemerintahan atau sektor merupakan indikator yang menunjukkan adanya *cross-border cooperation*. Penerapan strategi paradiplomasi adalah contoh implementasi dari interaksi antar level ini. Konsep *cross-border* ini awalnya berkembang di Eropa, tepatnya di perbatasan negara-negara Uni Eropa. Globalisasi memiliki peran penting dalam membawa konsep ini sampai ke regional lain seperti Asia Tenggara. Isu yang diangkat pun tidak jauh berbeda dengan Uni Eropa, yaitu pariwisata untuk meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat di dalamnya.

BAB 7 PERBATASAN POLANDIA DAN UKRAINA

7.1. Terbentuknya Perbatasan Polandia-Ukraina

Bab ini membahas terbentuknya perbatasan Polandia-Ukraina pertama kali setelah perang Polandia-Ukraina pada tahun 1919. Tahun ini juga menandai berakhirnya sistem komunis di kedua negara. Perjanjian Warsawa tahun 1920 membagi wilayah yang disengketakan untuk kepentingan Polandia di sepanjang Sungai Zbruch. Setelah penandatanganan perjanjian Ribbentrop-Molotov dan invasi Polandia oleh Uni Soviet, wilayah yang sangat luas di Polandia timur dianeksasi ke Republik Sosialis Soviet Ukraina. Perbatasan baru berumur pendek karena Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet. Pada tahun 1945 setelah berakhirnya perang dan pendirian Republik Rakyat Polandia, perbatasan baru dibentuk antara SSR Ukraina dan Polandia dengan Polandia kehilangan wilayah luas yang menguntungkan Ukraina, termasuk kota Lviv. Perbatasan Polandia-Ukraina adalah perbatasan timur yang paling sering dilintasi Uni Eropa. Sebagian besar lalu lintas perbatasan dihasilkan oleh warga negara Ukraina (Graniczna, 2012).



Gambar 7.1. Perbatasan Polandia-Ukraina
Sumber: (TribunNews, 2012)

Polandia dan Ukraina adalah dua negara terbesar dan terpadat di Tengah dan Timur Eropa, sebagian besar wilayah kedua negara ini terletak di benua Eropa, sebagian lain terletak di antara Federasi Rusia di satu sisi dan Eropa Barat (khususnya Jerman) di sisi lain. Polandia memiliki luas 312.685 km² dan 38,5 juta penduduk, Ukraina masing-masing dengan luas

603.550 km² dan 44,4 juta orang. Kedua negara berbagi perbatasan 535 km², yang melewati timur bagian dari pegunungan Carpathian dan kemudian di sepanjang sungai Bug. Baik Polandia maupun Ukraina menggunakan bahasa Rusia, sementara sebagian besar di Ukraina Tenggara menggunakan bahasa Slavik (Szeptycki, 2016). Setelah perpisahan kedua negara pada tahun 1991, Polandia dan Ukraina mengembangkan kebijakan luar negeri dan keamanan yang berbeda. Polandia sukses bertransformasi dan melakukan integrasi dengan NATO dan UE, sementara Ukraina mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi serta rentan terhadap agresi Rusia.

Polandia adalah negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Ukraina setelah referendum kemerdekaan pada 1 Desember 1991. Pada tahun 1992 kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan dan kerja sama, yang secara khusus mengkonfirmasi perbatasan yang ada. Pada Maret 1994, Polandia dan Ukraina mengadopsi deklarasi yang mengandung prinsip hubungan bersama dan mengakui kepentingan strategis untuk kedua negara. Di bawah presiden Lech Wałęsa (1990 - 1995) dan Leonid Kravchuk (1991 - 1994) kerjasama bilateral tidak menjadi prioritas utama karena Polandia lebih fokus pada penguatan hubungan dengan Barat, sementara Ukraina meluncurkan *a difficult process of state-building* (Szeptycki, 2016).

Situasi berubah di bawah Aleksander Kwaśniewski (1995 - 2005) dan Leonid Kuchma (1994 - 2005). Polandia mengamankan aksesnya ke lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Barat, sementara Ukraina berhenti untuk dianggap sebagai *Saisonstaat*. Kedua negara kemudian lebih fokus pada hubungan bilateral seperti rekonsiliasi historis, proyek ekonomi, kerja sama dengan UE dan NATO. Polandia juga merupakan mitra berharga bagi Ukraina, karena hubungannya dengan Barat memburuk setelah tahun 2000. Sejak saat itu, istilah "kemitraan strategis" sering digunakan untuk menggambarkan hubungan bilateral. Setelah "Revolusi Oranye" Ukraina pada tahun 2004 yang berpihak pada kekuatan pro-Barat dan kekuatan demokratis, hubungan antara kedua negara semakin erat. Presiden Lech Kaczyński (2005-2010) dan Victor Yushchenko membatasi kerjasama kedua negara. Akibatnya, Ukraina tetap merupakan negara yang lemah dan tidak stabil antara EU / NATO dan Rusia, sementara Polandia tidak dapat secara efektif menolongnya. Di bawah Bronisław Komorowski (2010 - 2015) dan Victor Yanukovych (2010 - 2014), kedua negara berfokus pada *the association of Ukraine with EU*. Namun proses ini terhambat oleh pertumbuhan otoriterisme rezim Ukraina dan pemulihan hubungan dengan Rusia. Pada bulan November 2013, di bawah tekanan Rusia, rezim Ukraina menolak menandatangani asosiasi perjanjian dengan UE. Keputusan ini memicu protes besar-besaran di Ukraina, yang menyebabkan

jatuhnya Yanukovych. Otoritas baru menandatangani perjanjian asosiasi dengan UE pada tahun 2014, namun *revolution of dignity* Ukraina (dikenal juga sebagai "Euromaidan") memprovokasi agresi Rusia terhadap Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina telah menjadi tantangan besar bagi otoritas Ukraina baru dan Polandia, khususnya bagi kepala negara yang terpilih (Szeptycki, 2016).

7.2. Alasan Kerjasama Antara Kedua Negara

Ada beberapa alasan sehingga Polandia tertarik mengadakan kerjasama dengan Ukraina yaitu: pertama, faktor sejarah. Kedua negara telah melalui masa-masa kelam pada tahun 1943-1944, selama berabad-abad tanah Ukraina adalah milik *the Polish-Lithuanian Commonwealth*. Beberapa orang Polandia mengunjungi keluarga mereka di Warsaw, Cracow, dan Gdańsk yang kini telah menjadi wilayah Ukraina. Kedua, *the stability of the neighbourhood*. Polandia ingin Ukraina menjadi negara yang stabil, makmur, demokratis, dan masuk dalam wilayah Eropa yang tidak hanya dalam arti geografis. Ini akan melindungi Polandia terhadap beberapa ancaman seperti perang saudara di perbatasan, pengembangan kejahatan terorganisir atau kedatangan gelombang pengungsi dari Ukraina. Perbaikan situasi di Ukraina juga akan membatasi tekanan migrasi di Polandia dan membuka perspektif baru untuk eksportir dan investor Polandia yang hadir di Ukraina. Untuk beberapa tahun belakangan, LSM yang dibiayai oleh negara Polandia dan dengan sponsor Barat telah bekerja keras untuk mempromosikan demokrasi dan pembangunan masyarakat sipil di Ukraina, seperti Yayasan Kerjasama Polandia-Ukraina PAUCI. Sejak 2013, hibah negara untuk organisasi semacam ini telah disalurkan terutama oleh Dana Solidaritas PL - Polandia setara dengan Endowment Eropa untuk Demokrasi. Setelah *revolution of dignity*, Polandia berkomitmen untuk mendukung reformasi di Ukraina, yang keduanya diperlukan untuk memodernisasi negara Ukraina, meskipun sulit secara politik, karena kecenderungan separatis yang didukung oleh Rusia (Szeptycki, 2016).

Ketiga, integrasi progresif dan akses Ukraina ke EU dan NATO. Polandia menyadari tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mendukung transformasi Ukraina. Dengan alasan inilah, pilihan lebih difokuskan pada integrasi Ukraina ke lembaga-lembaga dan organisasi Barat, dengan alasan "to modernize the former and to move the border of the West more to the East" (Szeptycki, 2016). Keempat, hubungan dengan Rusia. Elit politik Polandia khawatir akan kebangkitan imperialisme Rusia. Ignacy Daszyński, salah satu bapak kemerdekaan Polandia pada tahun 1918, dan Zbigniew Brzeziński mengatakan bahwa "there will be no independent Poland without independent Ukraine" and "Without Ukraine, Russia ceases to be an empire" (Szeptycki, 2016). Oleh karena itu, Polandia selalu mendukung segala

kebijakan yang dapat memperkuat Ukraina. Keempat, posisi internasional Polandia. Polandia ingin menjadi negara terkemuka di *the EU Eastren policy* dan khususnya sebagai *advocate* Ukraina di *Western institutions* dan *organizations* (Szeptycki, 2016). Untuk mempertahankan posisi ini, Polandia berkeinginan untuk memperkuat posisi Polandia di arena internasional khususnya di Uni Eropa.

Sementara itu, alasan Ukraina tertarik untuk bekerjasama dengan Polandia karena pertimbangan *soft power*. Selama periode komunis, budaya Polandia dikenal dengan baik di Uni Soviet. Alasan yang lain, karena Polandia dipersepsikan lebih *Western*, lebih *European* dibanding Uni Soviet. Kesuksesan Polandia dalam bertransformasi ke EU dan perekonomian di negara tersebut lebih baik dari pada Ukraina sehingga tingkat pengangguran di negara Polandia rendah (Myślicki, 2016), membuat imigran Ukraina tertarik untuk datang ke negara tersebut. Alasan yang lain adalah karena dua negara ini memiliki bahasa dan budaya yang sama. Ukraina membutuhkan Polandia untuk alasan geopolitik (Szeptycki, 2016).

Orang-orang Ukraina dapat kerja di Polandia dengan hanya menunjukkan *Polish liberal visa* yang telah diperkenalkan sejak tahun 2006. Sementara untuk alasan lain, seperti berwisata kecuali transit, warga Ukraina berkewajiban untuk mendapatkan visa sebelum memasuki perbatasan EU. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Polandia membutuhkan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah Polandia mendukung imigrasi pada dua sektor utama yaitu imigrasi yang bertujuan untuk peningkatan pasar di Polandia. Mereka yang datang ke Polandia akan diberikan pelatihan dan kursus bahasa Polandia. Kondisi Ukraina yang tidak stabil karena *Maidan Revolution* dan *Russia's military intervention* tahun 2014 di Crimea dan Donbas yang menyebabkan imigrasi dari kedua wilayah tersebut ke Ukraina. Data *the internal migration* menyebutkan bahwa jumlah imigrasi telah mencapai angka 1,5 juta orang yang masuk ke wilayah Ukraina (Myślicki, 2016). Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Ukraina yang berkepanjangan sehingga pada akhirnya banyak penduduknya yang melakukan migrasi ke Polandia.

7.3. Menyambut Kejuaraan Eropa 2012

Petugas penjaga perbatasan selama beberapa waktu telah mempersiapkan diri untuk Euro 2012. Kejuaraan Eropa UEFA 2012 atau lebih dikenal dengan Euro 2012 menjadi kejuaraan sepak bola antar tim nasional negara Eropa ke-14 yang diselenggarakan oleh UEFA. Putaran final yang diselenggarakan oleh Polandia dan Ukraina pada tanggal 8 Juni hingga 1 Juli 2012. Ini adalah pertama kalinya bagi kedua negara (Polandia dan Ukraina) menyelenggarakan suatu turnamen besar. Pemilihan tuan rumah dilaksanakan oleh Komite Eksekutif UEFA pada tahun 2007 (Graniczna, 2012).



Gambar 7.2. Perbatasan yang unik antara Polandia dan Ukraina. Keunikannya terletak pada sebuah desain yang bergambar seekor ikan raksasa, sebagian tubuh ikan tersebut berada di Polandia dan sebagian lainnya berada di Ukraina

Sumber: (Liputan6, 2015)

Beberapa jalur perbatasan yang bisa digunakan untuk menyebrang seperti perbatasan di Dorohusk, beberapa persimpangan perbatasan dengan Ukraina, dan jalur khusus, yang disebut “koridor hijau”. Jalur-jalur ini dirancang untuk para wisatawan yang tidak memiliki barang – barang cukai dan pergi ke luar negeri melintasi perbatasan Polandia untuk bisnis atau hanya untuk bepergian. Perbatasan ini tidak memerlukan antrian dan izin yang ketat. Para wisatawan yang pergi ke pertandingan sepak bola baik dalam kelompok, terorganisir oleh pelatih dan di mobil pribadi akan diarahkan ke jalur-jalur ini yang memungkinkan mereka menyeberangi perbatasan dengan cara yang paling nyaman dan mereka dapat mencapai pertandingan tepat waktu. Untuk mendukung Euro 2012, telah dibangun sebuah infrastruktur di persimpangan jalan di Medyka. Perbatasan Medyka merupakan salah satu penyeberangan untuk perbatasan jalan utama antara Polandia dan Ukraina. Terdapat satu jalur kereta api utama antara Polandia dan Ukraina yang melewati desa dan melintasi perbatasan yang berada di sekitar wilayah desa tersebut. Selain itu dalam rangka mendukung Euro 2012, di perbatasan ini juga telah dibangun satu tempat kontrol yang diawasi oleh petugas Polandia dan Ukraina yang mengurus izin untuk keluar masuk perbatasan. Kemudahan pemberian izin ini untuk mendukung latihan gabungan Polandia-Ukraina dan untuk meningkatkan kedatangan jumlah wisatawan (Graniczna, 2012).

Polandia dan Ukraina memenangkan persaingan mendapatkan hak tuan rumah Euro 2012 terhadap Kroasia dan Hungaria, Yunani, Italia dan Turki. Kepastian mendapatkan hak tuan rumah Euro 2012 diumumkan UEFA pada tanggal 18 April 2007. Sebagai tuan rumah, Polandia dan Ukraina secara otomatis lolos ke putaran final Euro 2016. Hal inilah yang menjadi

salah satu pendorong sehingga perbatasan di kedua negara terus berbenah. Orang-orang yang akan melintasi daerah perbatasan diwajibkan membawa paspor termasuk anak-anak. Sementara itu, mereka yang akan pergi ke pertandingan sepak bola di Ukraina dengan menggunakan mobil pribadi, mereka harus membawa lisensi pendaftaran dan asuransi mobil serta asuransi yang sangat wajib di luar Uni Eropa adalah sebuah kartu berwarna hijau. Tetapi bagi yang menggunakan mobil sewa, harus membawa bukti surat pinjaman kendaraan. Selain itu, perbatasan juga masih mengenakan beacukai untuk rokok dan minuman beralkohol. Perbatasan ini juga melarang untuk membawa tumbuhan dan hewan yang dilindungi serta barang-barang peninggalan bersejarah. Untuk mempermudah bagi wisatawan, pemerintah di kedua negara menyediakan brosur yang berisi informasi tentang aturan-aturan dalam melintasi perbatasan. Brosur ini ditranslate dalam beberapa bahasa. Selain itu terdapat juga situs web yang berisi informasi tentang aturan di perbatasan.

7.4. Kesimpulan

Pembahasan pada bab ini menjelaskan adanya ketergantungan antara Polandia dan Ukraina. Teori ketergantungan menyebutkan bahwa ketergantungan terjadi karena adanya neokolonialisme. Neokolonialisme menjelaskan bahwa negara secara teori mandiri dan memiliki kedaulatan internasional tetapi dalam kenyatannya sistem ekonomi dan kebijakan politiknya dikendalikan dari luar negara tersebut (Enuka, 2018). Hal ini tentu disebabkan karena negara-negara tersebut tidak mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki dan kondisi politik yang tidak stabil karena seringnya terjadi konflik di wilayahnya. Ketidakstabilan politik dan ekonomi di Ukraina, mendorong negara tersebut bergantung pada Polandia. Meskipun demikian, kedaulatan negara Ukraina tetap terjaga karena negara tersebut masih dapat menentukan kebijakannya sendiri. Ketergantungan Ukraina pada Polandia seperti yang telah disebutkan diatas, salah satu sebabnya adalah karna faktor sejarah. Selain itu, Polandia juga bergantung pada Ukraina untuk beberapa hal seperti yang telah dijelaskan diatas, salah satu alasannya karena faktor politik yaitu untuk mencegah imigrasi yang semakin meningkat di daerah perbatasan.

BAB 8

PERBATASAN KAMBOJA DAN THAILAND

8.1. Kronologi Konflik Kuil Kuno

Persengketaan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja atas hak lahan di sekitar kuil berusia sekitar 900 tahun tersebut telah lama terjadi. Kedua negara mengklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 4,6 kilometer persegi yang mengelilingi candi. Pada tanggal 15 Juni 1962, Kuil Preah Vihear (Preah Vihear Temple/ PVT) ditetapkan sebagai milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional, namun keputusan ini tidak mencakup siapa yang berhak atas area di sekitar kuil. Pada tanggal 8 Juli 2008, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), salah satu badan PBB menganugerahi kuil Preah Vihear dari abad ke-11 dengan status Warisan Dunia (*World Heritage*). Sementara itu, kaum nasionalis Thai PAD mengklaim bahwa kuil ini adalah milik Thailand dan kedua negara mulai menempatkan pasukan di wilayah sengketa tersebut. PAD dan Partai Demokrat yang memproklamirkan diri sebagai pembela bangsa Thailand mengecam Thaksin yang telah mengorbankan wilayah Thailand dengan imbalan keuntungan pribadi (Chachavalpongpon, 2012).

Konflik PVT tidak hanya melibatkan antara dua pemerintah, tetapi politisi, diplomat, dan pasukan militer juga terlibat. Selain itu melibatkan agen-agen lain seperti berbagai supranasional organisasi dan berbagai aktor masyarakat sipil setempat yang bertindak sangat heterogen baik sebagai pendukung konflik, maupun pembangun perdamaian. Misalnya, pada 15 Juli 2008, tiga anggota Dharmayatra, yang mengaku sebagai kelompok ziarah perdamaian Buddha, melintasi perbatasan Kamboja dalam upaya untuk kembali mengibarkan bendera Thailand di atas wilayah yang disengketakan dan menuntut pengembalian PVT ke Thailand (Baaz & Lilja, 2017). Kondisi ini memberi gambaran begitu banyaknya aktor masyarakat baik sipil maupun non sipil dalam konflik PFV tersebut yang dipicu setelah kuil tersebut mendapat penegerahan dari UNESCO.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2008, Kamboja menangkap tiga orang demonstran karena melompati kawat berduri untuk mencapai kuil. Akibatnya, kedua negara mengerahkan ratusan tentara mengawasi kuil tersebut. Sementara itu, karena banyaknya ranjau yang dipasang oleh tentara Kamboja, menyebabkan seorang anggota pasukan khusus Thailand dari kesatuan Ranger kehilangan kaki. Pada tanggal 3 Agustus 2008, kontak senjata untuk pertama kalinya terjadi antara kedua pasukan selama 10 menit dan seorang tentara Kamboja terluka. Pada tanggal 16 Agustus 2008, pasukan dari kedua negara tersebut ditarik dari daerah perbatasan dan menyisakan 40 tentara di masing-masing pihak (Sidik, 2009).



Gambar 8.1. Bendera Kamboja berkibar saat kuil Preah Vihear menjadi warisan budaya dunia

Sumber:(BBCNews, 2013)

3 Oktober 2008, bentrokan kembali terjadi yang melibatkan kedua negara di perbatasan tersebut. 6 Oktober 2008, ranjau yang meledak di wilayah perbatasan menyebabkan dua tentara Thailand terluka. Dipicu kejadian ini, Thailand menuduh Kamboja telah menanam ranjau di Kawasan yang disengketakan tersebut. 15 Oktober 2008, bentrokan senjata kembali terjadi antara kedua pasukan tersebut yang menyebabkan tiga tentara Kamboja dan satu tentara Thailand tewas. 16 Oktober 2008, kesepakatan dicapai dengan patroli bersama di wilayah yang disengketakan tersebut. 24 Oktober 2008, kedua perdana menteri bertemu dan setuju untuk tidak melakukan bentrokan bersenjata lagi di masa akan datang. 10 November 2008, kedua negara melakukan perundingan di Kamboja yang diwakili oleh juru runding masing-masing negara dan berlangsung selama tiga hari. 25 Maret 2009, Kamboja menyatakan bahwa sekitar 100 tentara Thailand menyeberangi perbatasan dekat kuil tersebut. Meskipun tuduhan ini dibantah oleh Thailand. 31 Maret 2009, Hun Sen yang menjabat sebagai Perdana Menteri Kamboja menyatakan bahwa tentara mereka akan mengadakan pertempuran apabila tentara Thailand berusaha menyeberangi perbatasan tersebut. 2 April 2009, seorang tentara Thailand telah kehilangan kakinya karena menginjak ranjau darat yang ditanam di sekitar kuil. 3 April 2009, kedua pemerintahan mengeluarkan pernyataan bahwa terdapat dua tentara Kamboja dan seorang tentara Thailand tewas dalam pertempuran di perbatasan kedua negara (Sidik, 2009).



Gambar 8.2. Perbatasan Thailand dan Kamboja serta Wilayah yang diPersengketakan
Sumber:(BBCNews, 2013)

Pada tahun 2011, pemerintah Kamboja mengeluarkan pernyataan tentang putusan mengenai tanah di sekitar kuil setelah terjadi pertempuran antara kedua belah pihak di bulan April yang menewaskan 18 orang dan menyebabkan puluhan ribu warga lainnya mengungsi. Pada bulan Desember 2011, kedua negara sepakat menarik pasukan dari wilayah yang disengketakan tersebut. Pada tanggal 9 November 2013, kepala pasukan militer Kamboja di perbatasan Thailand mengadakan pertemuan darurat setelah pesawat Thailand terlihat terbang rendah di sekitar daerah sengketa tersebut (BBCNews, 2013).

8.2 Peran ASEAN

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pada tanggal 15 Juni 1962 adalah hari bersejarah bagi Kamboja dan rakyatnya dimana masyarakat Kamboja selalu mengingat hari ketika pengadilan internasional mengeluarkan keputusannya yang menyatakan bahwa di sini adalah tempat berdoa dan sekitarnya terletak berada di wilayah kedaulatan milik Kamboja. Pada tahun 1962 Kamboja mengajukan permintaan kepada Mahkamah Internasional untuk menafsirkan kembali keputusannya dan aturan tentang kepemilikan wilayah yang disengketakan. Pada tahun 1962 Mahkamah Internasional, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, memutuskan bahwa kuil itu, yang berada di Kamboja sebagai Preah Vihear, adalah milik negara itu. Dalam pengeluan keputusannya, pengadilan internasional hanya menentukan kepemilikan kuil dan mengabaikan untuk memutuskan kepemilikan wilayah sekitar kuil tersebut yang diklaim oleh kedua negara antara Kamboja dan Thailand. Seperti yang dapat kita

ketahui bahwa kepemilikan kuil tersebut sudah menjadi milik Kamboja namun adanya wilayah tanah seluas 4,6 km belum di tentukan atau ditetapkan pemiliknya oleh Mahkamah Internasional. Keputusan terkait wilayah tanah seluas 4,6 km itulah yang diperdebatkan antara Kamboja dan Thailand.

Dengan menganalisis sejarah hubungan Kamboja dan Thailand mengungkapkan bahwa itu adalah hubungan yang tidak saling bersahabat. Karena adanya banyak faktor yang menyebabkan dan menentukan hubungan Kamboja dan Thailand. Faktor-faktor tersebut, dapat kita lihat dari berbagai faktor, termasuk keberadaan berbagai ideologi dan agama, perbedaan pendapat dan kepribadian, perebutan wilayah, serta konflik terkait warisan dunia. Salah satu faktornya yaitu dapat kita ketahui bahwa Kuil Preah-Vihear melambangkan mitologi Hindu yang diwarisi dari masa lalu yang mulia dari peradaban Khmer dan telah menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu dan Buddha. Bahkan ribuan orang Kamboja sering pergi ke sana untuk tujuan ziarah dan melampirkan nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat tinggi ke kuil. Klaim agama ini tentu saja menambahkan faktor penentuan nasib sendiri yang menyeragamkan kepercayaan agama dan budaya Kamboja sehubungan dengan kuil dan dengan demikian menjalin hubungan yang lebih emosional namun penting untuk kedaulatan Kamboja atas Kuil Preah-Vihear.

Kemudian dengan menganalisis faktor atau penyebab terjadinya konflik antara Kamboja dan Thailand ini dimulai pada 7 Juli 2008 ketika Kamboja menetapkan kuil preah vihear sebagai warisan dunia di Quebec Canada dan ditulis oleh World Heritage Committe dan di tetapkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural (UNESCO) sebagai warisan dunia yang di miliki Kamboja dan setelah kuil preah vihear tersebut dimasukkan ke dalam warisan dunia disaat yang bersamaan negara Thailand merasa tidak terima dan berusaha menggunakan segala cara untuk melemahkan otoritas Kamboja atas kuil dan sekitarnya termasuk mengirim tiga warga untuk melakukan meditasi di kuil Preah Vihear tersebut bahkan sampai mengirim pasukan untuk menduduki daerah di sekitar kuil dan juga melancarkan agresi militer ofensif terhadap Kamboja pada berbagai kesempatan antara 2008 dan 2011 yang dimana tindakan militer Thailand ini telah menyebabkan kehancuran total pada wilayah yang terletak di kaki kuil Kuil preah. Dapat kita lihat banyaknya kerusakan sampai menyebabkan struktur candi dan dampak dari konfrontasi antara kedua negara telah meletus menjadi kekerasan beberapa kali antara 2008 dan 2011, ketika pasukan dari kedua belah pihak berdebat terkait kepemilikan kuil dan area di sekitar lokasi tersebut, menyebabkan kedua pihak antara Thailand dan Kamboja kehilangan banyak nyawa. Kemudian dengan adanya kerusakan dan dampak yang sangat besar di akibatkan oleh Thailand ini Kamboja menganggap bahwa tindakan agresi yang dilakukan oleh Thailand ini dianggap sebagai ancaman terhadap

perdamaian dan Keamanan Internasional. Menanggapi permasalahan dan penyerangan yang dilakukan Thailand, pemerintahan Kerajaan Kamboja dalam kapasitasnya sebagai anggota negara PBB mengajukan pengaduan dengan ICJ di Den Haag meminta pengadilan terkait masalah ini dan menafsirkan kembali keputusan pada tahun 1962.

Dalam kasus sengketa mengenai perebutan Kuil Preah Vihear ini Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan bahwa Kamboja tidak memiliki hak untuk mengibarkan bendera nasionalnya di atas wilayah perbatasan yang disengketakan yang bersinggungan dengan Kuil Preah Vihear. Namun Kamboja tetap bertahan dan bersabar dimana mereka tetap mempertahankan Kuil Preah Vihear ini karena mereka sudah memenangkan kasus tersebut pada tahun 1962 di bawah kepemimpinan Norodom Sihanok tapi karena adanya pelanggaran dan tidak jelasan terkait wilayah 4,6 km persegi, Kamboja perlu untuk mengajukan perundingan ulang dan menyerahkan kasus dan keputusan ini kepada ICJ terkait wilayah tersebut. Namun tampaknya Thailand mengabaikan tindakan agresi terhadap Kamboja dan ingin menolak interpretasi dari tahun 1962. Maka dalam hal ini Kamboja tidak punya pilihan selain meminta pengadilan menjelaskan makna dan ruang lingkup putusan 1962 pada 11 November 2013 ICJ di Den Haag mengumumkan putusan interpretasinya atas keputusan 1962. Kemudian, ICJ pada tanggal 18 Juli 2011 menyerukan untuk membangun "zona demiliterisasi sementara" di wilayah perbatasan yang diperebutkan. Yang lebih penting adalah pengumuman pengadilan bahwa pengadilan akan memberikan interpretasi terhadap putusan 1962, yang diharapkan dan telah diminta oleh Kamboja. Mungkin saja status teritorial area yang disengketakan akan diselesaikan. Sementara itu, Thailand telah menyatakan akan menerima interpretasi ICJ terhadap putusan 1962.

Untuk meredam konflik yang terjadi, diadakan pertemuan informan menteri luar negeri ASEAN di Jakarta untuk membahas permasalahan sengketa Kuil Preah Vihear pada tanggal 22 Februari 2011. Dalam pertemuan ini, Bangkok dan Phnom Penh berjanji akan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pertempuran bersenjata (Wagener, 2011). ASEAN memiliki Piagam ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* yang ditandatangani di Bali tahun 1976. Negara-negara anggota ASEAN melalui Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama menyepakati *code of conduct* atau aturan perilaku dalam pelaksanaan hubungan kerjasama antar negara anggota ASEAN dengan cara menempuh cara-cara damai dalam penyelesaian konflik antara mereka bukan dengan cara kekerasan atau penggunaan senjata.



Gambar 8.3. Perbatasan Thailand dan Kamboja dan Kuil Preah Vihear
Sumber: (Kristanti, 2013)

Pada tanggal 11 November 2013, perselisihan antara Thailand dan Kamboja terkait kepemilikan tanah di sekitar Kuil Preah Vihear telah diputuskan secara hukum oleh Mahkamah Internasional bentukan PBB di Den Haag, Belanda dan memutuskan pihak Kamboja sebagai pemenang. Konsekuensi dari keputusan ini, Thailand harus menarik tentara dan kekuatan kepolisian dari area sengketa tersebut (Kristanti, 2013).

8.3. Kesimpulan

Awal permasalahan perbatasan antara Kamboja dan Thailand ini dimulai karena adanya ketidakjelasan batas wilayah antara Kamboja dan Thailand dan juga terkait peresmian Kuil Preah Vhear sebagai warisan dunia yang membuat kedua negara berkonflik dan ingin berebut batasan wilayah. Konflik ini menjadi besar karena adanya agresi militer yang dilakukan oleh Thailand terhadap Kamboja. Perselisihan Preah Vihear memperjelas bahwa kesamaan budaya dan agama tidak dapat mencegah konflik. Dimana konflik di antara kedua negara ini berakhir dengan jalur diplomasi dan kepemilikan kuil Preah Vhear ini dimiliki oleh Kamboja.

Konflik PVT menunjukkan ada ikatan yang kuat antara sejarah, identitas, politik dan nasionalisme dengan materi (bangunan, batu, dan tanah). Seperti yang telah dijelaskan diatas, konflik ini membuktikan bahwa kesamaan agama dan budaya tidak akan dapat mencegah terjadinya konflik. Peran ASEAN juga tidak begitu berarti karena Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama tidak dapat menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja ini. Kedua negara ini lebih memilih lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag.

BAB 9 PERBATASAN UNI EMIRAT ARAB DAN YAMAN

9.1. Pulau Socotra

Secara mengejutkan, pasukan Uni Emirat Arab (UEA) tiba di pulau Socotra, dalam kunjungan tak terduga ke pulau tersebut, bertepatan dengan kunjungan Presiden Yaman Abd Rabbu Mansour Hadi dan Perdana Menteri Ahmed Ben Dagher ke pulau itu. Sumber Al-Jazeera mengkonfirmasi bahwa sehubungan dengan kunjungan Ben Dagher, empat pesawat UEA mendarat di bandara dengan membawa seratus tentara UEA, empat baju besi yang berbeda, dan berbagai senjata lainnya. Menurut sumber Al-Jazeera, pasukan UEA mengusir pasukan Yaman yang ditugaskan untuk melindungi bandara (Al Jazeera, 2018).



Gambar 9.1. Letak Pulau Socotra
Sumber: (Rejeki, 2019)

Ben Dagher mengunjungi Socotra bersama sejumlah jajaran menteri kabinetnya untuk meluncurkan beberapa proyek pembangunan dan meninjau pulau yang terletak antara Teluk Aden dan Samudra Hindia tersebut. Pejabat keamanan Yaman di pulau itu menyebut bahwa UEA memperkuat kehadirannya di pulau Socotra. Pasukan UEA di Socotra bertindak seolah-olah pulau itu adalah bagian dari wilayah mereka sendiri, dan menyatakan penghinaan terhadap pemerintah Hadi, serta mengklaim legitimasi. Pesawat kargo UEA menurunkan tank, kendaraan lapis baja dan alat berat di Socotra, menurut pejabat Yaman di pulau itu. Pemerintah Hadi berselisih dengan UEA, meskipun secara resmi bersekutu dalam perang melawan Ansarullah, yang juga dikenal sebagai Houthi di Yaman (Al Jazeera, 2018). Pasukan UEA ini

kemudian disebar di berbagai wilayah di Socotra. Sementara itu, Yaman masih dilanda kemiskinan sejak kekerasan meletus pada tahun 2014 ketika Houthi menguasai sebagian besar wilayah negara termasuk ibu kota, Sanaa.



Gambar 9.2. Pulau Socotra
Sumber: (Republika, 2018)

Di sisi lain, konflik di Yaman menempatkan pulau Socotra di jantung konflik baru antara pemerintah Hadi dan ambisi sekutunya, UEA. Socotra adalah sebuah pulau yang berjarak 300 kilometer di lepas pantai Yaman di Teluk Aden. Pulau tersebut terkenal karena pantainya yang putih dengan flora dan fauna unik yang membuatnya mendapatkan gelar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2008. Hal inilah yang menjadi pemicu perebutan kepemilikan antara mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi dan sekutunya, UEA. Beberapa laporan menyebutkan bahwa bekas pemerintah Yaman menyewakan pulau Socotra dan Abd al-Kuri ke UEA selama 99 tahun sebelum mengundurkan diri dan melarikan diri ke Arab Saudi pada tahun 2014. Socotra adalah sebuah pulau dari empat pulau yang merupakan bagian dari Yaman. Otoritas pariwisata Yaman telah meminta PBB untuk mencegah pasukan UEA menghancurkan keindahan alam pulau itu (Al Jazeera, 2018).

Pendukung Hadi menuduh UEA telah menjadi bagian dari koalisi pimpinan Saudi yang memukul Yaman sejak tahun 2015, dan mengabaikan memerangi gerakan Houthi Ansarullah. Pendukung tersebut lebih lanjut mengatakan pasukan Emirat memberikan dukungan kepada mereka yang mencari pemisahan wilayah dari Yaman. Sementara itu, UEA telah meningkatkan pasukan militernya di Socotra di tengah ketegangan yang berkelanjutan dengan Hadi.

Penerbangan kargo UEA memiliki tank yang menurunkan kendaraan lapis baja dan alat berat di pulau Socotra (Al Jazeera, 2018).

UEA berusaha mempengaruhi penduduk Socotra dengan membangun pangkalan militer, pusat komunikasi intelijen dan melakukan sensus. Menurut laporan beberapa media lokal, warga diminta secara sukarela menyebutkan nama mereka dan perincian lainnya, mereka mungkin ditawarkan uang di masa depan. Bahkan UEA berencana mengadakan referendum mengenai apakah penduduk pulau itu ingin memisahkan diri dari daratan dan secara resmi menjadi bagian dari UEA dalam pemungutan suara (Al Jazeera, 2018).

Sementara itu, sebagian besar dari sekitar 60.000 penduduk Socotra menuduh UEA mencuri sumber daya alam pulau itu, termasuk tanaman dan benih untuk dibawa kembali ke UEA. Warga setempat menyalahkan UEA karena menggunakan armada penangkap ikan yang menghabiskan stok ikan dan mendorong para nelayan asli keluar dari pekerjaan mereka. Ikan tersebut kemudian diduga diekspor dengan kapal militer dengan pesawat terbang ke restoran dan supermarket UEA (Al Jazeera, 2018).

Sementara itu, beberapa tebing batu kapur dan granit di sepanjang jalan pesisir Socotra memang baru-baru ini diambil oleh JCB yang diimpor oleh UEA, dan pekerjaan konstruksi sedang berlangsung. Operator tur lokal terpaksa menutup toko dan mencari pekerjaan lain. Seorang pengusaha UEA yang menggambarkan dirinya baru-baru ini mengatakan kepada surat kabar harian Independent bahwa ia sedang membangun hotel-hotel mewah bintang lima di atas pantai pasir putih dan terumbu karang Socotra yang masih asli. Para saksi mata mengatakan bagian-bagian pulau itu, sekitar 70 persen di antaranya adalah tanah yang dilindungi dan telah dibulldoser dalam persiapan untuk membangun hotel, kolam renang, dan infrastruktur wisata lainnya untuk kedatangan warga UEA (Al Jazeera, 2018).

Di masa lalu, pemerintah UEA mengatakan Abu Dhabi, bagian dari koalisi yang dipimpin Saudi bukanlah penjajah atau pembuat onar. UAE belum membuat rencana pengembangan berskala besar di masa depan atau rencana wisata massal untuk publik Socotra. Abu Dhabi hanya mengakui bahwa pada bulan Mei 2018, mereka mengirim militer ke pulau Yaman untuk keterampilan pertempuran intensif, penanganan senjata dan pelatihan pertolongan pertama. Banyak dari pasukan itu akhirnya ditempatkan di garis depan di daratan (Al Jazeera, 2018).

Para pengeritik mengatakan UEA berupaya mengubah pulau itu menjadi resor liburan militer dan pos terdepan permanen, dan bahkan mungkin mencuri tanaman dan hewan yang dilindungi UNESCO. UEA telah menemukan Yaman adalah tempat uji yang ideal untuk ambisi penguasa *de facto*-nya, putra mahkota Abu Dhabi Mohammad bin Zayed. Hampir tiga

tahun sejak agresi, orang-orang Emirat masih berada di pulau itu dan mereka tidak berniat pergi dalam waktu dekat. Tidak ada Houthi untuk membebaskan Socotra (Al Jazeera, 2018).

Pada bulan Mei 2018, ratusan warga Yaman melakukan demonstrasi dengan meneriakkan slogan dukungan kepada Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi dan menyatakan tindakan pasukan UEA sebagai tindakan ilegal dan merupakan bentuk intimidasi. Mereka kemudian bersatu untuk mengusir pasukan UEA dari pulau Socotra. Sementara itu, UEA mengatakan bahwa pasukan yang mereka kirim untuk melindungi pulau Socotra dan mereka mengklaim pulau tersebut dengan wilayah UEA selama bertahun-tahun (Republika, 2018).

Bendera hijau UEA bermunculan di gedung-gedung resmi dan dilukis di sisi gunung, bersama dengan pesan-pesan yang berterima kasih kepada bin Zayed atas kemurahan hatinya. Keadaan ini membuat warga di pulau tersebut semakin marah. Kurangnya transparansi telah memicu kekhawatiran di seluruh Socotra dan Yaman yang lebih luas tentang rencana penuh UAE. Sementara itu, Arab Saudi terus-menerus menggempur Yaman sejak Maret 2015 dalam upaya mengembalikan kekuasaan ke Hadi dan mendorong mundur pemberontak Syiah Houthi Ansarullah. Namun, Riyadh telah gagal mencapai tujuannya meskipun telah mengeluarkan biaya besar. Sebagai negara Teluk Persia yang kaya akan minyak, UEA telah memulai proyek ekstrateritorial serupa di daerah lain, termasuk di Eritrea, Djibouti, Somalia dan kepulauan Yaman di Perim (Al Jazeera, 2018).

Selain itu, pemerintah Abu Dhabi mendirikan pangkalan militer dan jaringan komunikasi di Socotra, selain mencari sensus karena telah mengundang orang-orang di pulau itu untuk melakukan perjalanan ke Abu Dhabi, sedangkan mereka telah berjanji untuk diberikan perawatan kesehatan dan izin kerja. Karena kurangnya transparansi, kekhawatiran telah meningkat di seluruh Socotra terhadap rencana UEA, terutama karena tidak adanya media, dan ketidakmampuan wartawan untuk memasuki pulau itu. Penduduk Socotra berpendapat kemungkinan membentuk selatan baru di Yaman atau apa yang disebut “Emirat kedelapan” UEA, yang terdiri dari Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman dan Umm Al Quwain, bertindak seolah-olah Pulau Socotra adalah Emirat ke delapan di Yaman (Al Jazeera, 2018).

9.2. Perang yang Tiada Henti

Perang Yaman telah terjadi sejak Maret 2015, dimana pemberontak Houthi ingin merebut Aden. Pertempuran ini membuat Presiden Abedrabbo Mansoru Hadi melarikan diri

ke pengasingan di Saudi. Seperti yang telah dijelaskan diatas, pada tahun 2018, Uni Emirat Arab (UEA) mengerahkan lebih dari seratus tentara dengan artileri dan kendaraan lapis baja ke pulau Socotra di Selat Guardafui tanpa koordinasi sebelumnya dengan Yaman. Pengerahan awal terdiri dari pesawat militer UEA yang mengangkut seratus tentara UEA dan dua kendaraan lapis baja, diikuti oleh dua pesawat lagi yang membawa lebih banyak tentara, tank, dan kendaraan lapis baja lainnya. Al Jazeera melaporkan bahwa tak lama setelah mendarat, pasukan UEA memecat tentara Yaman yang ditempatkan di instalasi administratif seperti Bandara Socotra dan pelabuhan laut sampai pemberitahuan lebih lanjut, dan bendera Uni Emirat Arab dinaikkan di atas gedung-gedung pemerintah di Hadibu. UEA telah mencaplok pulau itu dan membangun jaringan komunikasi, serta melakukan sensus dan memberi penduduk Socotra perawatan kesehatan dan izin kerja gratis di Abu Dhabi.

Dua minggu kemudian, pasukan Saudi juga dikerahkan ke kepulauan itu dan sebuah kesepakatan ditengahi antara Uni Emirat Arab dan Yaman untuk pelatihan militer bersama dan kembalinya kontrol administratif bandara dan pelabuhan Socotra ke Yaman. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengutuk pengambilalihan itu sebagai "tindakan agresi", namun tidak ada perlawanan militer terhadap pasukan Emirat dilaporkan. Seorang pejabat UEA yang mengunjungi Socotra menyatakan bahwa pulau itu akan menjadi bagian dari UEA dan penduduknya akan diberi kewarganegaraan UEA (Forster, 2017).

Pada tahun 2016, UEA meningkatkan pasokan yang dikirim ke Socotra yang sebagian besar telah ditinggalkan dan dilupakan selama konflik yang sedang berlangsung. Pada Oktober 2016, pesawat kargo ke-31 mendarat di bandara Socotra yang berisi dua ton bantuan. Pada saat itu, UEA juga mendirikan pangkalan militer di pulau itu sebagai bagian dari intervensi yang dipimpin Saudi (Forster, 2017).

Pada tahun 2017, pasukan Emirat telah dikerahkan di pulau itu sebagai bagian dari intervensi yang dipimpin Saudi, beberapa faksi politik Yaman menuduh UEA berusaha untuk menduduki Socotra dan menjarah serta merusak flora pulau itu. Sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Yaman Ahmed Obeid bin Daghr mengatakan penyitaan pelabuhan dan bandara militer UEA di Socotra adalah serangan "tidak adil" terhadap kedaulatan Yaman. Kementerian Luar Negeri UEA menanggapi dengan mengatakan "pihaknya terkejut dengan pernyataan itu dan menyalahkan Ikhwanul Muslimin untuk mendistorsi perannya. Kehadiran militer UEA di semua provinsi Yaman yang dibebaskan, termasuk Socotra, hadir dalam upaya

koalisi Arab untuk mendukung pemerintah yang sah pada tahap kritis ini dalam sejarah Yaman” (Forster, 2017).

Protes berunjuk rasa terhadap pengambilalihan UEA, menuntut penarikan segera. Sementara itu, pendukung pro-Emirat berkumpul di ibu kota pulau Hadibu untuk mendukung kehadiran UEA di pulau itu. Amerika Serikat menyerukan de-eskalasi dan dialog antara UEA dan Yaman. Sedangkan, Turki menunjukkan keprihatinan mengenai konflik tersebut. Menteri Luar Negeri Turki yang mengikuti perkembangan terbaru di Pulau Socotra Yaman mengatakan kami prihatin dengan perkembangan ini karena dapat menimbulkan ancaman baru bagi integritas dan kedaulatan wilayah Yaman dan meminta semua aktor terkait untuk menghormati pemerintah Yaman yang sah dan untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi (Forster, 2017).

Sampai awal tahun 2019, Pertempuran terus terjadi dan tidak dapat dibendung oleh pasukan Saudi karena adanya konflik antara pemerintah UEA dan pemerintah Saudi yang menyebabkan koalisi jadi terpecah. Kondisi ini menyebabkan masalah tambahan tersendiri bagi pemerintah Arab Saudi yang harus memfokuskan energi melawan Houthi yang bersekutu dengan musuh pemerintah Saudi, Iran. Ketegangan meningkat di selatan Yaman setelah pasukan Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) merebut ibu kota sementara pemerintah Yaman di Kota Pelabuhan Aden pada bulan Agustus 2019. Dewan Transisi Selatan (STC) adalah gerakan separatis yang didukung oleh pemerintah UEA dan berjuang untuk meraih kemerdekaan Yaman selatan yang disatukan dengan utara pada tahun 1990. STC dipimpin oleh Aidaru Al Zubaidi. Pertempuran ini terus berlangsung sampai bulan Oktober 2019 yang menimbulkan kekhawatiran bahwa negara yang dilanda perang ini bisa terpecah total. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional serta STC dimana keduanya memiliki hubungan baik dengan Saudi membuat kesepakatan kekuasaan untuk mengakhiri konflik tersebut. Hasil kesepakatan ini menyebutkan bahwa STC menyerahkan sejumlah wilayah dan pasukan pro pemerintah akan kembali ke Aden. Kesepakatan ini memberi keuntungan pasukan koalisi karena mereka dapat bersatu melawan Houthi, kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan dua fasilitas minyak Saudi Aramco pada bulan September 2019. Selain itu, Saudi juga bisa mengamankan jalur bantuan kemanusiaan bagi warga Yaman yang menderita sejak perang pecah (Suhartono, 2019).

Pada bulan Oktober 2019, setelah pasukan pro pemerintahan yang sah mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan dengan separatis Yaman selatan, pasukan koalisi Arab Saudi mengambil alih komando pasukan di Aden, Yaman. Langkah ini dilakukan karena Uni

Emirat Arab yang merupakan bagian dari pasukan koalisi telah menyerahkan posisi-posisi penting kepada pasukan Saudi sejak awal Oktober 2019 (Suhartono, 2019).

9.3. Dampak Perang Terhadap Masyarakat Sipil

Yaman telah mengalami dua tahun perang saudara. Kekerasan dan krisis kemanusiaan telah dirasakan dampaknya oleh semua rakyat Yaman. Berbagai cara telah dilakukan seperti upaya diplomatik untuk negosiasi damai dan gencatan senjata pada tahun 2016 tidak berhasil, dan kohesi sosial di tingkat lokal gagal terus. Situasi di Yaman sampai tahun 2019, tidak memungkinkan untuk solusi diplomatik tingkat tinggi sebagai salah satu cara dalam meredam peperangan yang terjadi karena akan digagalkan oleh konflik yang tidak pernah berhenti dan semakin melebar sampai ke tingkat lokal. Selain itu, perpecahan sosial seperti kesukuan, sektarian, regional, dan politik semakin menyebar dan menjadi penghalang bagi perdamaian dan stabilitas. Tidak ada upaya perdamaian baik ditingkat nasional atau internasional yang dapat berhasil dan berkelanjutan tanpa dukungan yang disepakati bersama untuk mengatasi perpecahan ini. Arab Saudi dan sekutu GCC (Kerjasama Teluk Arab yang mencakup Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab) telah mengalami beberapa perselisihan ideologis dan teritorial dengan Iran yang telah membentuk hubungan di seluruh kawasan. Sementara Arab Saudi dan Iran sebagian besar adalah negara-negara Muslim, Arab Saudi menganut sistem kerajaan Muslim Sunni dan Iran menganut sistem republik Muslim Syiah. Arab Saudi dan Iran tidak memiliki hubungan diplomatik, dan perbedaan interpretasi mereka terhadap Islam telah memengaruhi agenda dan sekutu politik mereka di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi telah mengembangkan hubungan politik, diplomatik, dan ekonomi yang erat dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan Iran lebih mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia dan Tiongkok.

Setelah Houthi mengambil alih Sana'a dan ketika milisi Houthi mendorong semakin ke selatan menuju Aden pada tahun 2015, Arab Saudi, dengan dukungan dari sekutu Barat dan GCC, meluncurkan kampanye militer untuk melawan Houthi. Houthi adalah sekte Syiah, dan Arab Saudi menganggap Houthi sebagai proksi Iran dan penerima dukungan Iran. Ketika berbagai kelompok bertindak berdasarkan keyakinan, maka akan memperkuat ikatan Houthi-Iran dan mengarahkan Houthi ke Iran untuk meraih dukungan. Ini juga mengintensifkan perpecahan sektarian dalam masyarakat, karena sekte-sekte keagamaan menjadi semakin selaras dengan dinamika perang yang lebih luas. Sementara Saudi percaya Iran telah

mengambil keuntungan dari peluang untuk melawan kepentingan musuh-musuhnya, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung kasus bahwa Iran dan sekutunya mendukung atau bertanggung jawab atas persenjataan kelompok-kelompok Houthi (Maktary & Smith, 2017).

Ketika keterlibatan aktor internasional menjadi lebih lazim, efeknya dirasakan oleh warga sipil Yaman yang menderita taktik perang internasional termasuk serangan udara dan blokade. Lebih dari sepertiga dari semua serangan udara yang dipimpin Saudi telah menghantam situs-situs sipil, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan masjid. Konsekuensi dari dinamika perang proksi ini memengaruhi atmosfer politik di tingkat lokal, yang memperkuat perpecahan sektarian dan politik (Maktary & Smith, 2017).

Di Yaman, hampir lima tahun konflik telah berkontribusi pada fragmentasi ekstrim kekuasaan dan otoritas pusat dan mengikis tatanan politik lokal. Struktur otoritas lokal telah muncul, bersama dengan sejumlah besar agen negara dan milisi di kelompok elite lokal dan organisasi internasional. Menurut seorang ahli yang ada di PBB mengatakan bahwa otoritas pusat telah hilang karena Yaman, sebagai sebuah negara, telah tidak ada lagi, digantikan oleh undang-undang berbeda yang berjuang melawan otoritas pusat. Konflik kemudian meluas ke pulau Socotra di Laut Arab dan wilayah paling timur Mahrah. Sebelumnya membentuk Kesultanan Mahrah Ghaydah dan Socotra, mereka memegang posisi penting dalam dinamika Yaman di mana mereka adalah satu-satunya dua gubernur yang belum terkena dampak langsung oleh kekerasan perang saat ini. Meskipun demikian, mereka tetap terkena dampak dari ketegangan yang berkaitan dengan konflik, terutama merupakan hasil kebijakan intervensi dari negara-negara koalisi yang dipimpin Saudi, yang mengecewakan perdamaian (Maktary & Smith, 2017).

Pada November 2015, UEA secara signifikan meningkatkan kehadirannya di pulau Socotra dengan alasan menawarkan bantuan kemanusiaan melalui Bulan Sabit Merah Emirates dan Yayasan Khalifa. Semakin hari, kehadiran Emirati terus meningkatkan intensitas, dan berusaha melakukan pendekatan dengan warga sipil melalui *soft approach*. Salah satu upaya ini adalah pendirian pangkalan militer, pembangunan sekolah, jalan, dan rumah sakit baru. Tidak semua warga sipil menyetujui kehadiran UEA di Socotra. Banyak penduduk yang melakukan protes pertama atas kehadiran Emirat di pulau itu pada Oktober 2017. Motif mengenai kehadiran UEA sebenarnya telah mulai dipertanyakan sejak akhir 2016. Pada 9 April 2018, protes masyarakat terus berlanjut dan menyerukan pendudukan pasukan UEA adalah ilegal dan menuntut mereka pergi dari pulau Socotra (Maktary & Smith, 2017).

Terletak 240 km timur di tanduk Afrika dan 380 km selatan Yaman, pulau Socotra menempati jalur strategis pelayaran perdagangan internasional, yang berada di pusat rencana

ekspansionis UEA untuk menjadi kekuatan maritim utama di wilayah Yaman. Untuk kepentingan ekonomi dan militer UEA, pada bulan April 2019, UEA membangun pangkalan militer di sebelah pelabuhan Hawlaf. Pelabuhan Hawlaf telah dibangun kembali oleh UEA pada bulan Maret 2018 melalui Yayasan Khalifa mantan gubernur Socotra. Anggota STC yang didukung UEA, Mayor Jenderal Solim Al-Socotri mengkonfirmasi kedatangan UEA di pulau ini dan lebih dari 100 penduduk setempat yang telah ditahan di Aden oleh pasukan Emirat. Anggota STC menuduh UEA merekrut para pejuang yang baru dilatih untuk menjadi militer UEA dan sebagai bagian dari pasukan Sabuk Keamanan. Sementara itu, pemerintah Hadi mengutuk tindakan UEA ini. Kemudian gubernur Socotra yang sepaham dengan Hadi Ramzi Mahrus menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan terciptanya pasukan seperti Sabuk Keamanan di pulau ini karena dapat meningkatkan ketegangan, oleh karena itu, perkembangan di Socotra perlu diawasi, karena keterlibatan Emirat yang berkelanjutan di pulau itu dan keinginannya yang untuk mengubah pulau Socotra menjadi resor liburan dan liburan militer telah mengganggu tatanan sosial dan dapat menciptakan perpecahan secara terus-menerus, dan dalam jangka panjang dapat berubah menjadi kekerasan politik (Maktary & Smith, 2017).

9.4.kesimpulan

Teori yang berkaitan dengan konflik antara Arab Saudi dan Yaman yaitu *world system theory*. Wallerstein menyatakan bahwa “a world-system is a social system, one that has boundaries, structures, member groups, rules of legitimation, and coherence” (Coccia, 2018). Teori ini memberi gambaran bahwa sebuah sistem dunia adalah sebuah sistem sosial yang memiliki struktur, batasan, kelompok anggota, aturan legitimasi, dan koherensi. Sistem ekonomi dunia yang terintegrasi melalui pasar, daripada pusat politik, di mana dua atau lebih daerah memiliki interaksi geoekonomi sehubungan dengan kebutuhan seperti makanan, sumber daya alam, dan perlindungan (Coccia, 2018).

Menurut Wallerstein, data sejarah mencatat terdapat dua jenis sistem sosial berskala besar: (1) kerajaan dengan pembagian ekonomi fungsional dari tenaga kerja dan pendekatan negara pengumpul upeti, dan (2) ekonomi dunia dengan berbagi kedaulatan politik, tidak ada yang dapat mengendalikan seluruh sistem ekonomi (Coccia, 2018). Oleh karena itu, ekonomi dunia harus lebih mampu daripada kerajaan dunia untuk mempertahankan pembangunan ekonomi karena subjek ekonomi memiliki lebih banyak kebebasan untuk bermanuver, sesuai, dan menginvestasikan kembali sumber daya dan surplus ekonomi. Ekonomi dunia seperti

kapitalisme dari abad keenam belas hingga saat ini, memiliki pembagian kerja di antara tiga wilayah yaitu *core*, *semi-peripheri*, dan *peripheri* (inti, semi-perifer, dan pinggiran) yang dihubungkan bersama oleh pasar perdagangan dunia dalam komoditas curah (kebutuhan untuk konsumsi penduduk). Setiap wilayah geoekonomi dunia memiliki struktur ekonomi berdasarkan pada campuran kegiatan ekonomi (misalnya, industri dan produk dari multi-budidaya di bidang pertanian di dalam wilayah inti, produk dari budidaya tunggal di daerah pinggiran) dan kontrol tenaga kerja (misalnya upah tenaga kerja terampil di inti, bagi hasil di semiperifer, dan perbudakan atau kerja paksa di pinggiran). Imbalan ekonomi dari zona-zona ini berbeda. Khususnya bidang inti memperoleh dan mempertahankan surplus yang tidak proporsional. Selain itu, struktur ekonomi masing-masing daerah mendukung kelas dominan yang berorientasi pada pasar dunia dan negara-negara dengan kekuatan tertentu beroperasi untuk kepentingan kelas dominan itu. Menurut Wallerstein kekuatan diferensial dari banyak negara dalam ekonomi kapitalis dunia sangat penting menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan (Coccia, 2018).

Kaitan antara Arab Saudi atas bantuannya terhadap Yaman yaitu bisa dianalogikan bahwa Arab Saudi yang memiliki kepentingan minyak di Yaman tetapi mendapatkannya dengan harga yang murah sehingga dengan bantuan Amerika Serikat yang merupakan negara *core* membantu Arab Saudi sebagai negara semiperifer untuk mendominasi perekonomian di Yaman yang posisinya sebagai negara pinggiran. Dengan pengaruh akan kekuatan Amerika Serikat yang kuat mengantarkan Arab Saudi mengintervensi Yaman demi kepentingan ekonominya yang diharapkan tetap surplus. Kondisi Yaman yang terjebak dalam krisis ekonomi menjadikannya negara miskin atau sebagai posisi negara dunia ketiga (*periphery*). Keadaan internal yang tidak stabil memicu konflik internal maupun eksternal, seperti perang saudara yang tidak berkesudahan. Kondisi ini juga menjadi salah satu alasan dimana Yaman tidak dapat menolak atas bantuan yang diberikan oleh Arab Saudi.

BAB 10

PERBATASAN HONG KONG DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

10.1. Perbatasan yang Perlahan Menghilang

Hong Kong adalah salah satu wilayah yang berada di sebelah selatan daratan Tiongkok (*China's mainland*). Hong Kong merupakan wilayah yang memiliki hak otonom sendiri untuk mengatur sistem perekonomian dan sistem pemerintahannya. Situasi ini merupakan perpanjangan dari sebuah perjanjian yang ditetapkan bersama oleh Deng Xiao Ping, selaku Presiden Republik Rakyat Tiongkok, dan Margaret Thatcher, selaku Perdana Menteri Inggris pada tahun 1984. Pada saat itu, Deng Xiao Ping dan Margaret Thatcher menyetujui bahwa Hong Kong merupakan wilayah koloni milik Inggris. Kesepakatan ini diambil akibat adanya konflik berkepanjangan antara Inggris dan Tiongkok terkait perdagangan di daratan Tiongkok. Setelah Hong Kong menjadi wilayah koloni milik Inggris, Pemerintah Inggris kemudian melakukan pembangunan besar-besaran. Perekonomian wilayah ini kemudian membaik dan terus meningkat.



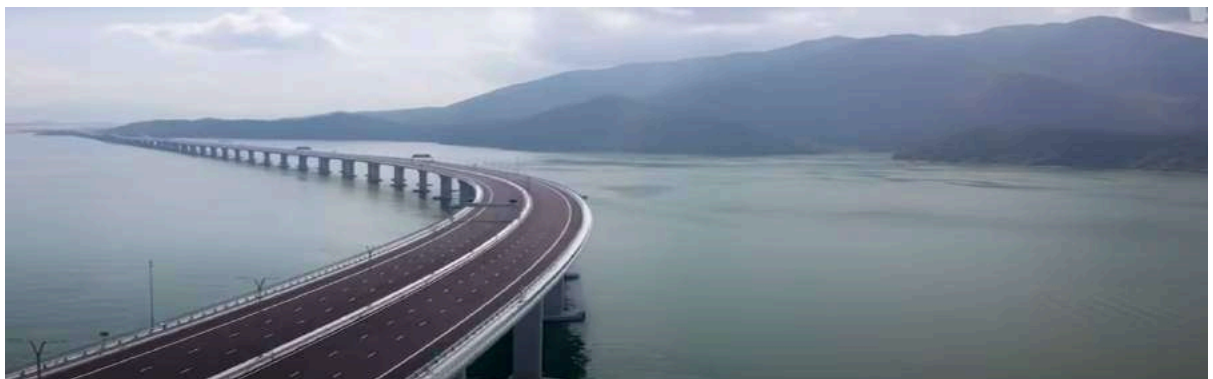
Gambar 10.1. Perbatasan antara Hong Kong dan RRT
Sumber: (Vox, 2018)

Perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa Hong Kong akan menjadi wilayah koloni milik Inggris selama 99 tahun. Meski demikian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dipatuhi kedua belah pihak. Misalnya, kondisi sosial dan sistem perekonomian di Hong Kong tidak akan berubah dan demikian pula dengan gaya hidupnya (*the current social and economic systems in Hong Kong will remain unchanged and so will the life style*). Selain itu,

persyaratan lainnya adalah bahwa masyarakat Hong Kong harus memperoleh hak-hak mendasar dan kebebasannya (*rights and freedom*). Secara teknis, perjanjian ini telah berakhir pada tahun 1997. Perkembangan yang pesat dan masif di Hong Kong pada awal tahun 1990-an menjadikan Hong Kong sebagai pusat perekonomian Republik Rakyat Tiongkok (*China's economy power house*) dan pintu masuk terhadap dunia barat (*gate way to the west*) (Vox, 2018).

Mendekati “waktu kadaluarsa” perjanjian tersebut, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kemudian merundingkan kelanjutan status dan relasi RRT dengan Hong Kong. Perjanjian tersebut kemudian diperbaharui dengan menjalankan sebuah konsep satu negara dua sistem (*one country, two systems*). Konsep ini menegaskan bahwa Hong Kong adalah wilayah berdaulat milik RRT, namun Hong Kong memiliki hak otonomi untuk mengurus urusan di dalam wilayahnya sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara RRT dan Hong Kong. Misalnya, terkait sistem pemerintahan, sistem perekonomian, bahasa sehari-hari, bahkan gaya hidup masyarakatnya. Perjanjian terbaru ini menjadikan Hong Kong memiliki nama resmi Daerah Administratif Khusus RRT Hong Kong (*Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China*) (Vox, 2018).

Waktu kadaluarsa perjanjian baru antara RRT dengan Hong Kong adalah 50 tahun sehingga perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2047. Secara teknis, Pemerintah RRT harus menaati segala persyaratan perjanjian termasuk menghormati hak otonomi Hong Kong sebagai wilayah administratif khusus beserta batasan-batasan “wilayah berdaulatnya”. Namun dalam realitanya, Pemerintah RRT nampaknya ingin segera “menghapuskan” batasan-batasan antara RRT dengan Hong Kong. Batasan-batasan yang hendak dihapuskan juga mencakup “wilayah berdaulat” Hong Kong. Dalam realitanya, Pemerintah RRT terkesan hendak mempercepat terhapusnya batasan antara RRT dengan Hong Kong dan menjadikan Hong Kong sebagai wilayah di bawah kedaulatan RRT sepenuhnya.



Gambar 10.2. Jembatan Penghubung antara RRT dan Hong Kong
Sumber: (Vox, 2018)

Indikasi ini didukung oleh hadirnya sebuah jembatan layang di atas laut yang membentang sepanjang 55 kilometer dari Hong Kong menuju Shenzhen. Jembatan layang ini menghubungkan langsung Hong Kong dengan daratan Tiongkok. Selain itu, eksistensi Jembatan Penghubung antara RRT dan Hong Kong di Hong Kong juga didukung dengan adanya sebuah bangunan barak tentara Jembatan Penghubung antara RRT dan Hong Kong di pusat kota Hong Kong. Bangunan ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Hong Kong adalah wilayah kedaulatan milik Jembatan Penghubung antara RRT dan Hong Kong. Selain itu, Pemerintah Jembatan Penghubung antara RRT dan Hong Kong juga memperluas pengaruhnya di Hong Kong melalui media massa. Setiap sore, stasiun televisi di Hong Kong akan mengawali acara berita dengan memutar lagu kebangsaan Jembatan Penghubung antara RRT dan Hong Kong. Promosi iklan terkait budaya dan kultur Tiongkok juga ditayangkan di televisi dengan menggunakan bahasa Mandarin. Padahal, masyarakat Hong Kong menggunakan bahasa Kanton dalam kesehariannya (Vox, 2018).



Gambar 10.3. Jembatan layang di atas laut yang membentang sepanjang 55 kilometer dari Hong Kong menuju Shenzhen

Sumber: (Vox, 2018)

Langkah Pemerintah RRT untuk “menghapuskan” perbatasan RRT dengan Hongkong didasari oleh pergeseran peran Hong Kong terhadap kepentingan RRT. Beberapa kota di RRT mulai mengalami perkembangan khususnya dalam sektor perekonomian, seperti Beijing dan Shenzhen. Hal ini menyebabkan Hong Kong tidak lagi menjadi *China's economy power house* dan RRT tidak lagi memperoleh keuntungan perekonomian yang besar dari Hong Kong. Karenanya, Pemerintah RRT tidak lagi memiliki alasan untuk menghormati hak otonom Hong Kong. Untuk mengantisipasi “lepasnya” Hong Kong dari naungan RRT, Pemerintah RRT

kemudian mengupayakan berbagai cara untuk menjadikan Hong Kong berada di bawah kekuasaan Pemerintah RRT sepenuhnya.



Gambar 10.4. *The Umbrella Movement*
Sumber: (Vox, 2018)

Pada awal masa implikasi perjanjian antara RRT dan Hong Kong, beberapa kelompok masyarakat di Hong Kong mengidentifikasi dirinya sebagai orang Tiongkok. Namun seiring berjalannya waktu, “nasionalisme” masyarakat Hong Kong semakin kuat dan lebih nyaman untuk mengakui identitasnya sebagai orang Hong Kong. Salah satu insiden yang menunjukkan besarnya “nasionalisme” masyarakat Hong Kong adalah *The Umbrella Movement*. *The Umbrella Movement* merujuk pada aksi demonstrasi besar-besaran masyarakat Hong Kong dengan menggunakan payung sebagai alat perlindungan diri. Aksi demonstrasi ini menuntut berhentinya intervensi Pemerintah RRT dalam proses demokrasi di Hong Kong. Pada saat itu, Pemerintah RRT berusaha untuk mengintervensi calon perwakilan rakyat dengan menunjuk orang-orang yang pro terhadap ideologi dan nilai-nilai Tiongkok. *The Umbrella Movement* berujung pada keributan dan kekerasan yang terjadi antara masyarakat demonstran dengan aparat keamanan (Vox, 2018).

Perbatasan Hong Kong dan RRT yang perlahan “menghilang” merupakan salah satu isu perbatasan yang menarik. Sebab, Hong Kong sendiri merupakan bagian dari Tiongkok dan bukan merupakan entitas politik independen. Isu perbatasan di antara kedua negara ini tidak selalu merujuk pada persengketaan wilayah maupun perbatasan geografis, namun lebih ke aspek demografis dengan melihat sejarah yang panjang di antara RRT dan Hong Kong. Hong Kong ingin mempertahankan perbatasannya dengan RRT untuk menunjukkan perbedaan di antara kedua negara. Di sisi lain, RRT hendak menghapus perbatasan tersebut karena ingin

“menguasai” Hong Kong sepenuhnya. Karena perbatasan yang perlahan “menghilang” tersebut, masyarakat Hong Kong turut memperkuat solidaritas untuk melawan pengaruh RRT dan memperjuangkan demokrasi serta identitas diri mereka.

10.2. *One Country, Two Systems*

Hong Kong merupakan wilayah koloni Inggris sejak tahun 1842 setelah Tiongkok kalah dalam *Opium War* melawan Inggris. Meski demikian, pada periode penyerahan wilayah koloni tersebut, Hong Kong masih memiliki kedekatan dengan Tiongkok dalam sektor sosial dan ekonomi. Pada saat itu, sebagian besar penduduk Hong Kong merupakan imigran dari Tiongkok Selatan yang bertujuan untuk mencari peluang kerja baru dan kehidupan yang layak di Hong Kong. Selain itu, belum adanya perbatasan formal yang memisahkan daratan Tiongkok dan Hong Kong juga mendorong mobilisasi penduduk. Namun setelah pecahnya *Chinese Communist Revolution* pada tahun 1949, hubungan Hong Kong dan Tiongkok kemudian berubah. Hong Kong kemudian semakin terpisah dengan Tiongkok baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial, bahkan kultur penduduknya. Pada tahun 1950-an, perputaran ekonomi Hong Kong tidak lagi bergantung pada Tiongkok. Penduduk Hong Kong juga turut membangun identitas dan kultur baru yang berbeda dengan penduduk daratan Tiongkok (So, 2011).

Perjanjian penyerahan Hong Kong sebagai wilayah koloni Inggris hanya berlangsung selama 99 tahun. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Inggris dan Pemerintah RRT kemudian mendiskusikan masa depan Hong Kong. Pemerintah RRT menyatakan bahwa Tiongkok hendak memperoleh kembali kedaulatan sepenuhnya terhadap Hong Kong. Meski demikian, penduduk Hong Kong mendorong adanya perpanjangan perjanjian agar Hong Kong tetap menjadi wilayah koloni Inggris. Perdebatan dan proses negosiasi yang panjang tersebut kemudian diakhiri dengan penandatanganan *Joint Declaration* antara Inggris dan Tiongkok pada tahun 1984. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Hong Kong akan menjadi bagian dari RRT terhitung sejak tanggal 1 Juli 1997. Pada tanggal tersebut, Hong Kong akan menjadi *Special Administrative Region of China* di mana sistem ekonomi dan sosial, gaya hidup masyarakat, mata uang, dan otonominya tidak berubah dan tidak boleh diinterfensi oleh Pemerintah RRT.

Setelah penandatanganan *Join Declaration*, integrasi ekonomi antara Hong Kong dan Tiongkok semakin meningkat. Pada tahun 1980-an, terjadi sebuah konsep “pendekatan informal” yang diterapkan oleh para pelaku bisnis kecil. Para pelaku bisnis kecil dari Hong

Kong memanfaatkan pendekatan hubungan sosial dan persamaan latar belakang sosio-kultural. Dengan cara ini, para pelaku bisnis kecil dari Hong Kong dapat memperluas pasarnya tanpa harus melalui mekanisme rumit dari Pemerintah RRT. Meski integrasi ekonomi Hong Kong dan Tiongkok membaik, hal yang berbeda terjadi pada sektor politik. Pada tahun 1989, terjadi Insiden Tiananmen yang menjatuhkan banyak korban jiwa. Insiden Tiananmen merupakan aksi demonstrasi pelajar yang menginginkan adanya sistem pemerintahan demokratis di Tiongkok. Insiden Tiananmen kemudian berdampak pada kepercayaan Hong Kong terhadap komitmen Tiongkok untuk melaksanakan prinsip “*One Country, Two Systems*” (So, 2011).

Setelah periode tersebut, Hong Kong kembali mengalami krisis akibat hadirnya penyakit epidemik SARS pada tahun 2003. Hal ini kemudian menyebabkan Hong Kong mengalami kerugian besar pada sektor pariwisata dan perdagangan. Menanggapi situasi ini, Pemerintah RRT dan Pemerintah Hong Kong SAR kemudian menandatangani *Closer Economic Participation Arrangement* (CEPA) yang bertujuan untuk mendorong kembali laju perdagangan Hong Kong pada periode epidemik. Selain itu, kedua belah pihak juga berencana untuk melakukan pengembangan infrastruktur yang menghubungkan Hong Kong dengan daratan Tiongkok. Pengembangan infrastruktur ini diharapkan dapat mempermudah mobilisasi logistik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan integrasi sosio-kultural. Kondisi ini kemudian disebut sebagai “integrasi simetris”. Integrasi simetris memiliki tiga karakteristik yaitu berbentuk interaksi dua arah, interaksi yang bersifat lebih komprehensif, dan manfaat integrasi yang turut menyentuh berbagai lapisan masyarakat (So, 2011).

Selama lebih dari tiga dekade terakhir, hubungan Hong Kong dan Tiongkok terus terombang-ambing di antara prinsip *one country* atau *two systems*. Pemerintah Hong Kong terus mengupayakan agar berbagai kebijakan dapat mendorong prinsip *two systems*. Di sisi lain, Pemerintah RRT berusaha untuk mendorong adanya unifikasi dan integrasi berdasarkan prinsip *one country*. Berbagai insiden dan krisis yang dialami Hong Kong dan Tiongkok sampai saat ini menunjukkan adanya dinamika sosial politik dalam menunjukkan komitmennya terhadap “*One Country, Two Systems*”. Meski demikian, kedua belah pihak juga tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap kebijakan tersebut. Berbagai kontroversi juga hadir dalam melihat apakah Hong Kong perlu berada pada kutub *one country* atau kutub *two systems*.

10.3. Upaya *Mainlandization*

Eksistensi Hong Kong sebagai sebuah entitas negara dilegitimasi setelah penandatanganan *Sino-British Joint Declaration* pada 19 Desember 1984. Pada periode tahun 1984 sampai 1997, Hong Kong menjadi wilayah koloni milik Inggris. Setelah tahun 1997,

Hong Kong dikembalikan oleh Inggris kepada Tiongkok secara resmi. Kebijakan ini merujuk pada *One Country, Two Systems* yang memperbolehkan Hong Kong untuk mempertahankan sistem politik dan sistem perekonomiannya di bawah yurisdiksi dari RRT. Hong Kong kemudian menjadi wilayah yang boleh beroperasi secara otonom dengan sebutan *Special Administrative Region* (SRA). Kebijakan tersebut juga menghasilkan *Basic Law* yaitu sebuah konstitusi unik milik Hong Kong. Kebijakan *One Country, Two Systems* tersebut akan berakhir pada tahun 2047. Meski demikian, RRT sudah mulai melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan Hong Kong ke dalam daratan Tiongkok (*China's mainland*). Upaya ini juga disebut dengan istilah *mainlandization* (Mok, 2019).

Istilah *mainlandization* merujuk pada upaya-upaya Pemerintah RRT untuk memperoleh kembali kedaulatan penuh atas Hong Kong. Upaya-upaya *mainlandization* salah satunya dapat terlihat pada pengembangan terkini infrastruktur di titik-titik perbatasan yang kemudian melewati tetapan perbatasan wilayah antara Hong Kong dan Tiongkok. Misalnya, pada tanggal 6 Januari 2018, Pemerintah RRT menyetujui permintaan pemerintah provinsi Guangdong untuk meruntuhkan perbatasan fisik yang memisahkan *Shenzen Special Economic Zone* dengan Hong Kong. Perbatasan fisik antara Shenzen dan Hong Kong berupa pagar besi sepanjang 84.6 mil yang menyusuri Sungai Shenzen. Sungai Shenzen merupakan perbatasan alamiah yang secara geografis memisahkan kedua wilayah tersebut. Di sisi lain, pemerintah Hong Kong terus memperkuat wilayahnya pada titik-titik perbatasan yang sudah ada. Pemerintah Hong Kong juga mendorong pengembangan kantor-kantor perbatasan dan meningkatkan regulasi perbatasan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan hak otonomi Hong Kong atas sistem politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda dari Tiongkok (Mok, 2019).

Kondisi Hong Kong dan Tiongkok ini merupakan perpanjangan dari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Ketika Tiongkok berhasil dikalahkan oleh Inggris pada *Opium War*, Tiongkok kemudian menyerahkan Hong Kong kepada Inggris. *Treaty of Nanking* yang ditandatangani pada 29 Agustus 1842 menjadikan Hong Kong sebagai wilayah koloni Inggris secara resmi. Dengan bantuan dari Inggris, perbatasan Hong Kong dibuka untuk pasar bebas dengan daratan Tiongkok dan dunia internasional. Namun, pada tahun 1949 perang saudara terjadi di Tiongkok yang dimenangkan oleh Partai Komunis. Akibatnya, ribuan penduduk Tiongkok kemudian bermigrasi ke Hong Kong. Hal ini kemudian mendorong pemerintah koloni Inggris untuk menutup perbatasan Hong Kong dengan Tiongkok. Penutupan perbatasan ini juga bertujuan untuk mencegah hadirnya pengaruh komunisme Tiongkok di Hong Kong. Untuk menandakan ditutupnya perbatasan, dibangunlah sebuah pagar sepanjang Sungai

Shenzen. Pagar perbatasan ini merupakan bentuk perbatasan fisik pertama antara Tiongkok dan Hong Kong (Mok, 2019).

Setelah Hong Kong diserahkan kembali pada Tiongkok, kontrol terhadap perbatasan merupakan hal yang penting jika merujuk pada kebijakan “*One Country, Two Systems*”. Namun dalam aspek imigrasi, perpindahan antar-wilayah kemudian menjadi asimetrikal. Berbagai kebijakan kedua wilayah terkait perbatasan maupun perpindahan orang dan komoditas menjadi tumpang tindih. Misalnya, terkait beberapa wilayah perbatasan yang tergolong *Frontier Closed Area* (FCA). Pemerintah Hong Kong menetapkan Jalan Chun Ying sebagai salah satu wilayah FCA. Sehingga, penduduk Hong Kong tidak diperbolehkan mengunjungi area tersebut jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Namun di sisi lain, Pemerintah RRT justru menjadikan Jalan Chun Ying sebagai kawasan wisata yang terbuka untuk umum dan dikomersialisasikan. Perbedaan kebijakan akses terhadap suatu wilayah menunjukkan adanya “paksaan kekuasaan yang halus” dari Tiongkok terhadap wilayah Hong Kong. Hal ini merupakan salah satu manifestasi dari upaya *mainlandization* (Mok, 2019).

Berdasarkan gambaran kondisi perbatasan Hong Kong dan Tiongkok pada periode sebelum dan sesudah kolonisasi Inggris, dapat disimpulkan bahwa perbatasan Hong Kong dan Tiongkok dipolitisasi karena adanya migrasi penduduk daratan Tiongkok ke Hong Kong. Berbagai perubahan radikal dalam sejarah mendorong pengembangan dan kemajuan operasional kontrol perbatasan dan Tiongkok akan memanfaatkan *power* yang dimilikinya untuk memastikan bahwa pada tahun 2047, Hong Kong akan sepenuhnya berintegrasi dengan Tiongkok. Namun, Hong Kong juga turut berupaya untuk melindungi perbatasannya dan menetapkan identitasnya sebagai entitas otonom yang berbeda.

10.4. Kesimpulan

Pada periode pasca perang dingin, definisi dari konsep *security* dalam kajian hubungan internasional kemudian terbagi menjadi definisi sempit dan definisi luas. Definisi sempit merujuk pada keamanan suatu negara yang mengutamakan kemampuan militer negara tersebut serta bagaimana kondisi hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet dapat memengaruhi keamanan negara tersebut. Di sisi lain, definisi yang lebih luas terkait konsep keamanan merujuk pada keamanan regional dan *human security* yang turut membawa nilai-nilai sosial, budaya, dan identitas (Eroukhmanoff, 2017). Perbedaan persepsi terkait konsep keamanan ini menunjukkan bahwa ‘keamanan’ itu sendiri bukan merupakan sesuatu yang ‘*gifted*’, melainkan sesuatu yang ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Karenanya, konsep keamanan bersifat kontekstual. Situasi hubungan antarnegara pasca perang dingin mengindikasikan bahwa konsep keamanan merupakan konsep yang dapat menghasilkan perdebatan yang tidak dapat

diselesaikan oleh bukti-bukti empiris karena konsep keamanan mengandung unsur-unsur ideologi dan nilai moral (Fierke, 2007).

Menurut *securitisation theory*, sebuah isu dapat berubah menjadi isu keamanan yang ekstrim dan perlu diselesaikan apabila isu tersebut telah diberi label ‘berbahaya’ dan ‘mengancam’ oleh ‘aktor-aktor keamanan’ yang memiliki kemampuan institusional untuk mengubah status dari isu tersebut (Fierke, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor tertentu yang menentukan batasan-batasan dari konsep keamanan suatu negara. Aktor-aktor tersebut cenderung menetapkan batasan-batasan keamanan dengan menginduksi kepentingan-kepentingan tertentu. Teori Sekuritisasi menjelaskan bahwa terdapat lima sektor yang dapat dijadikan isu keamanan yaitu ekonomi, sosial, militer, politik, dan lingkungan (Eroukhmanoff, 2017). Kelima sektor tersebut memiliki hubungan langsung dengan publik. Sehingga, aktor-aktor keamanan dapat mencapai kepentingannya melalui dukungan publik terhadap isu keamanan yang disorotnya. Untuk meyakinkan publik, aktor-aktor keamanan akan ‘membungkus’ isu yang disorotnya secara berlebihan dan menjadikannya sebagai ‘isu yang lebih besar daripada sekedar kepentingan politik’ (Eroukhmanoff, 2017).

Proses integrasi RRT dan Hong Kong dapat dianalisis dengan menggunakan asumsi-asumsi dalam teori sekuritisasi. RRT melakukan berbagai upaya agar Hong Kong dapat menjadi bagian dari daratan Tiongkok setelah hak-hak *Special Administrative Region* milik Hong Kong berakhir pada tahun 2047. Meski demikian, terdapat berbagai kendala dalam upaya-upaya tersebut mengingat masyarakat Hong Kong dan Tiongkok cenderung memiliki identitas yang berbeda. Isu perbedaan identitas inilah yang kemudian, secara tidak langsung, dijadikan isu keamanan oleh Tiongkok. Masyarakat Hong Kong memiliki ideologi dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat Tiongkok. Misalnya, Hong Kong menjunjung tinggi demokrasi sedangkan Tiongkok menganut sistem sosialis-komunis. Untuk ‘menekan’ dukungan terhadap demokrasi di Hong Kong, Pemerintah RRT menempatkan sebuah bangunan barak tentara RRT di pusat kota Hong Kong. Upaya ini menunjukkan bahwa Tiongkok telah menjadikan isu identitas masyarakat sebagai isu keamanan dengan tingkat ancaman yang tinggi karena turut melibatkan kekuatan militer.

Teori sekuritisasi menekankan adanya aktor-aktor keamanan dalam menggiring opini publik terkait isu keamanan. Meski demikian, aktor-aktor tersebut tidak terbatas pada *stake holder* dan pejabat politik. Aktor-aktor keamanan dapat berasal dari kalangan profesional, militer, tokoh-tokoh publik, dan aktor fungsional lainnya (Eroukhmanoff, 2017). Implementasi dari asumsi ini juga terdapat pada upaya integrasi RRT dan Hong Kong. Di sisi lain, Hong Kong turut ‘membungkus’ isu identitas sebagai sebuah isu keamanan yang dapat mengancam

dan membahayakan Hong Kong. Berbagai aksi demonstrasi masyarakat Hong Kong untuk menolak pengaruh dan campur tangan Tiongkok telah dilakukan dalam beberapa kesempatan. Misalnya pada aksi *The Umbrella Movement* dan aksi demonstrasi penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong. Gerakan-gerakan penolakan tersebut diinisiasi oleh masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, bahkan tokoh publik. Kehadiran dan campur tangan Tiongkok dalam upaya integrasi RRT dan Hong Kong dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap *human security* masyarakat Hong Kong. Teori Sekuritisasi dapat digunakan dalam menganalisis isu perbatasan baik dari sudut pandang kedaulatan negara, sengketa perbatasan, hingga isu demografi dan sosial di masyarakat. Teori ini dapat digunakan mengingat isu-isu perbatasan selalu berkaitan dengan keamanan negara mau pun keamanan masyarakatnya.

BAB 11

PERBATASAN PORTUGAL DAN SPANYOL

11.1. Sejarah



Gambar 11.1. Hispania
Sumber: (Dashlane, 2019)

Berbicara tentang sejarah, semenanjung Iberia sebagian besar dihuni oleh suku Celt dan suku Iberia sebelum suku Phoenicians dan kemudian Romawi mengambil alih. Orang-orang Romawi menyebutnya dulu Hispania. Pada awal 400-an, orang-orang Jerman datang dan mengusir orang-orang Romawi, membangun kerajaan mereka sendiri di sebagian besar semenanjung. Bizantium mengklaim sebuah provinsi di semenanjung untuk sementara waktu, Visigoth telah mendominasi di sana dari 400-an hingga 700-an, dan juga telah membentuk kerajaan Toledo. Pada tahun 726, penakluk Muslim yang biasa disebut sebagai orang Moor mengambil alih sebagian besar semenanjung dan mengubahnya menjadi negara Islam. Afonso I berjuang melawan orang-orang Moor, mendirikan kerajaan Portugal dan menjadi raja pertama kerajaan. Sementara itu, perlahan tapi pasti, orang-orang Moor dipaksa keluar dari semenanjung selama periode yang dikenal sebagai Reconquista. Pada tahun 1492, orang-orang Moor sudah pergi (Dashlane, 2019).



Gambar 11.2. Kerajaan Bentukan Orang-Orang Jerman
Sumber: (Dashlane, 2019)

Columbus meninggalkan Amerika dan mulai mengklaim tanah baru untuk Spanyol. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan Portugal telah menciptakan koloni-koloni di luar negeri sejak 1415, dan sepanjang tahun 1400-an para penjelajah Portugis telah berlayar di pantai Afrika mendirikan beberapa pos perdagangan. Setelah Columbus, Spanyol dan Portugal menandatangani perjanjian Tordesillas untuk membagi tanah yang baru ditemukan di luar Eropa (Dashlane, 2019).



Gambar 11.3. Ekspansi Portugal dan Spanyol
Sumber: (Dashlane, 2019)

Pada tahun 1498, penjelajah Portugis yang bernama Vasco da Gama menjadi orang Eropa pertama yang mencapai India melalui laut. Jadi pada tahun 1500-an, baik Spanyol maupun Portugal menjadi negara yang sangat kuat dan membangun kerajaan besar. Pada 1600-an, baik pengaruh Spanyol dan Portugis tidak bisa dihindarkan, kedua negara ini bahkan bergabung untuk sementara waktu dengan Uni Iberia (Dashlane, 2019).



Gambar 11.4. Kerajaan Toledo
Sumber: (Dashlane, 2019)

Pada awal 1800-an, sebagian besar kekaisaran Spanyol hilang dan setelah Brasil mendeklarasikan kemerdekaan pada 1822, kekaisaran Portugis sedang dalam perjalanan keluar juga. Pada awal 1900-an, baik Spanyol maupun Portugal mengalami periode yang tidak stabil. Spanyol beralih dari monarki menjadi republik, menjadi monarki lagi. Lalu terlibat perang saudara dan menjadi diktator. Sedangkan Portugal juga memiliki otoriterisme, meskipun ia juga memiliki pertarungan demokrasi di sana-sini. Sekarang walaupun keduanya menganut sistem pemilihan, Spanyol menganut sistem monarki konstitusional dan di Portugal sistem republik konstitusional (Dashlane, 2019).



Gambar 11.5. Sistem Pemerintahan yang Dianut Portugal dan Spanyol
Sumber: (Dashlane, 2019)

11.2. Keunikan Portugal dan Spanyol



Gambar 11.6. Letak Portugal dan Spanyol secara Geografis
Sumber: (Dashlane, 2019)

Portugal dan Spanyol adalah dua negara yang saling berbatasan dan keduanya memiliki sebuah kerajaan besar. Walaupun negara Portugal dan Spanyol tidak mempunyai wilayah yang luas namun kedua negara ini memiliki pengaruh luar biasa terhadap dunia, contohnya terdapat sekitar 250 juta orang didunia yang berbicara menggunakan bahasa Portugal dan terdapat sekitar 525 juta orang yang menggunakan bahasa Spanyol. Selain itu, bahasa Spanyol diakui sebagai urutan ke-4 bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang di dunia. Portugal memiliki ibukota Lisbon, Spanyol memiliki ibukota Madrid. Secara geografis, Madrid lebih besar dua kali ketimbang Lisbon (Dashlane, 2019).



Gambar 11.7. Letak Ibukota Masing-Masing Negara
Sumber: (Dashlane, 2019)

Kedua negara ini mempunyai harapan hidup tertinggi didunia, di Spanyol harapan hidupnya sebesar 83 tahun dan di Portugal sebesar 81 tahun. Kedua negara ini juga mempunyai pulau yang terlepas dari daratannya dan berada di Samudra Atlantik, Spanyol mempunyai pulau Canary dan pulau Balearic namun pulau Balearic tidak berada di Samudra Atlantik tapi berada di bagian pantai timur Spanyol. Sementara itu, Portugal mempunyai dua pulau yaitu pulau Azores dan Madeira. Di daratan kedua negara ini baik Portugal maupun Spanyol tidak terlalu khawatir tentang bencana alam. Tentu saja ada gempa bumi yang kadang-kadang terjadi, tetapi gempa bumi di kedua negara tersebut sangat jarang terjadi. Meskipun demikian, pada tahun 1755, gempa bumi yang terjadi di Lisbon sangatlah dahsyat yang hampir menghancurkan seluruh isi kota Lisbon (Dashlane, 2019).



Gambar 11.8. Pulau-Pulau yang Dimiliki Portugal dan Spanyol
Sumber: (Dashlane, 2019)

Kedua negara ini juga mempunyai banyak hutang meskipun Portugal mempunyai hutang lebih banyak dibanding Spanyol dan tingkat kemiskinan di kedua negara ini hampir sama walaupun Portugal sedikit lebih besar dibanding Spanyol. Tingkat kemiskinan di Portugal sebesar 23.3% dan tingkat kemiskinan di Spanyol sebesar 21.6% (Dashlane, 2019). Portugal mengalami krisis keuangan dari tahun 2010 sampai 2014. Pada akhirnya, Portugal adalah salah satu negara pinggiran euro yang meminta bail-out, pada tahun 2011. Salah satu penyebab terjadinya krisis ini karena negara yang tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya akibatnya melonjaknya kredit yang terjadi antara tahun 2001 sampai 2007 (Martins, 2015).

Spanyol adalah negara terbesar ketiga di Eropa barat, berbatasan dengan Perancis, Portugal dan Maroko. Populasinya meningkat 12% pada periode 1995 sampai 2005 karena arus imigrasi yang kuat, tetapi mengalami sedikit penurunan sejak 2011 terkait dengan keseimbangan migrasi sebagai konsekuensi dari kemerosotan ekonomi dan semakin banyak orang Spanyol meninggalkan negara sejak 2009. Produk domestik bruto (PDB) per kapita di Spanyol menurun pada periode 2009-2015 sebesar 20%, dengan PDB per kapita mencapai US \$ 26.529 pada 2016. Tingkat kemiskinan meningkat, mencapai 28,6% pada tahun 2015 yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi dan pengurangan pendapatan rumah tangga (Bernal et al., 2018).



Gambar 11.9. *The running of the bulls*
Sumber: (Dashlane, 2019)

Baik negara Portugal maupun negara Spanyol keduanya adalah anggota European Union. Keduanya juga tidak memiliki hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan atau kriminal. Pada tahun 1884 negara Portugal adalah negara pertama yang menghilangkan hukuman penjara seumur hidup. Kedua negara tersebut permainan sepak bola adalah olahraga yang sangat populer. Walaupun olahraga sepak bola sangat populer di kedua negara tersebut, namun *the running of the bulls* juga cukup populer bahkan menarik perhatian di Dunia. *The running of the bulls* adalah acara yang dimana berlari di depan sekelompok banteng, biasanya enam tetapi kadang-kadang sepuluh atau lebih, yang sengaja dilepaskan di jalan (Dashlane, 2019).



Gambar 11.10. Negara Tetangga Spanyol
 Sumber: (Dashlane, 2019)

Walaupun kedua negara ini mempunyai banyak persamaan, namun tidak sedikit juga perbedaannya, seperti Spanyol mempunyai luas wilayah lebih besar sebesar lima kali lipat dibanding luas wilayah negara Portugal dan tentu saja negara Spanyol memiliki banyak garis pantai dibanding Portugal. Portugal mempunyai curah hujan lebih banyak dibanding Spanyol. Secara rata rata Spanyol mempunyai lebih banyak populasinya dibanding Portugal, populasi di Spanyol sekitar 49 juta orang dan di Portugal sebanyak 10 juta orang. Sementara itu populasi Spanyol telah meningkat walaupun terbilang cukup lambat namun populasi di Portugal menyusut selama beberapa tahun terakhir. Spanyol juga tidak hanya berbatasan dengan Portugal di bagian barat namun Spanyol juga berbatasan dengan negara Prancis dan negara kecil Andora di bagian utara sehingga negara Portugal terhempit karena hanya berbatasan dengan negara Spanyol. Negara Spanyol juga lebih religius, walaupun kedua negara mayoritas penduduknya diidentifikasi roman katolik. Spanyol juga memiliki banyak iklim yang bervariasi sementara sebagian besar semenanjung memiliki iklim mediterania, dengan musim panas yang kering, musim dingin yang basah, dan suhu yang ringan sepanjang tahun, beberapa bagian dari Spanyol memiliki iklim lautan, iklim semi kering, iklim kontinental, iklim subtropis lembab, iklim pegunungan yang dingin. Spanyol juga mempunyai lebih banyak pegunungan dibanding Portugal. Portugal suasananya lebih pedesaan walaupun negara Spanyol

lebih besar lima kali lipat dibanding Portugal namun Spanyol lebih banyak menggunakan lahannya untuk pertanian dan industri. Industri utama di Spanyol meliputi obat-obatan, logam, tekstil, dan bahan kimia (Dashlane, 2019).



Gambar 11.11. Flying fox, naik dari Spanyol dan akan mendarat di Portugal
Sumber: (Aprianto, 2019)

Spanyol mengandalkan banyak lahannya untuk pertanian dan industri dalam mendukung perekonomian. Selain itu, Spanyol juga banyak digemari oleh turis mancanegara, hal ini terbukti dengan diakuinya Spanyol sebagai negara urutan kedua yang mempunyai turis mancanegara di dunia. Sementara itu, industri utama di Portugal termasuk tekstil, kulit, alas kaki dan kimia. Kedua negara ini terbentuk sejak tahun 1139 Masehi, sehingga dijuluki sebagai salah satu negara tertua di dunia dengan batas-batas wilayah yang tetap stabil sampai sekarang (Dashlane, 2019).

11.3. Kesimpulan

Salah satu keunikan antara Portugal dan Spanyol adalah demarkasi yang telah didefinisikan sejak kedua negara tersebut terbentuk, sehingga perbatasan ini dianggap sebagai salah satu perbatasan tertua di dunia. Panjang perbatasan Portugal-Spanyol adalah 1.214 km (754 mil) dan dianggap sebagai perbatasan yang tidak memiliki gangguan dan terpanjang di Uni Eropa. Sekalipun kondisi ekonomi kedua negara memburuk, tetapi hal ini tidak membuat situasi di perbatasan menjadi tegang.

BAB 12 PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE

12.1. Penetapan Batas Negara Berdasarkan Hukum

Perbatasan menjadi suatu hal yang penting karena akan menentukan kedaulatan, penegakan hukum, batasan, dan identifikasi suatu negara. Dengan adanya batas yang jelas antar suatu negara, maka resiko konflik dapat diminimalisir dan negara-negara yang ada di perbatasan tersebut dapat menerapkan undang-undang yang mereka telah buat. Secara teoritis ada sembilan aspek yang menjadi alasannya untuk mengklaim suatu wilayah oleh suatu negara, yaitu:

1. Perjanjian, klaim umum berdasarkan perjanjian internasional dan cenderung meminimalkan konflik;
2. Geografi, klaim berdasarkan pada alam;
3. Ekonomi, klaim berdasarkan perkembangan kepastian negara;
4. Budaya, klaim berdasarkan karakteristik budaya;
5. Kontrol Efektif, klaim berdasarkan kontrol administrasi terhadap populasi (Dianggap sebagai klaim terkuat dalam hukum internasional);
6. Sejarah, klaim berdasarkan sejarah kepemilikan;
7. *Utis possidetis Juris*, klaim berdasarkan prinsip bahwa negara baru merdeka mewarisi batas administrasi yang dibentuk oleh otoritas sebelumnya;
8. Elitisme, klaim berdasarkan kapasitas teknologi;
9. Ideologi, klaim berdasarkan ekspansi ideologi (Sunyowati, Adam, & Vinata, 2019).

Sementara Indonesia cenderung menggunakan klaim, traktat, sejarah, dan budaya *utis possidetis* dalam mengklaim daerah perbatasan ketika menghadapi sengketa wilayah perbatasan dengan negara-negara lain. Secara teknis, Konvensi yuridis 1982 tentang Hukum Laut mengatur penetapan batas laut, termasuk melalui garis pangkal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UNCLOS 1982, diklarifikasi oleh PP tentang Daftar Baseline Geographic Coordinates Kepulauan Indonesia (Sunyowati et al., 2019).

Setelah Timor Leste lepas dari Indonesia, negara tersebut memiliki dua wilayah, dan salah satu diantaranya berada dalam wilayah Indonesia. Berbagai upaya diplomasi damai telah dilakukan dalam menentukan batas-batas diantara kedua negara ini, tapi tidak membuat kedua negara puas. Kemudian Indonesia menginginkan untuk menerapkan prinsip *uti possidetis juris*

yang dianggap tepat karena menganut prinsip bahwa negara baru merdeka mewarisi batas administrasi yang dibentuk oleh otoritas yang telah ada sebelumnya.

Selanjutnya dalam Perjanjian 1904, Oecusse sebagai wilayah yang dimasukkan kedalam negara Republik Demokratik Timor Leste adalah daerah di bibir pantai Noel Besi yang terletak di sebelah barat dan bibir pantai Noel Meto di sebelah timur. Perjanjian 1904 menyatakan bahwa Noel Besi terletak di pantai di titik Pulau Batek terletak di $30^{\circ} 47'$ barat dari utara. Pedoman Inggris menyatakan bahwa Sungai Noel Iron terletak di pantai pada titik meridian $124^{\circ} 02'E$ dan Noel Meto membentang 27 nm timur laut pada $124^{\circ} 27'E$ meridian. Garis dari batas antara kedua ujung menghasilkan area persegi panjang 550nm^2 , dibatasi oleh batas lateral yang terhubung ke pantai utara Timor dan dihubungkan oleh garis pantai Oecusse dan dari pantai Indonesia dari Pulau Pantar dan Pulau Alor. Klaim Timor Timur dari pantai Oecusse di batasi oleh Pulau Batek di wilayah Indonesia. Ini dijelaskan sebagai pulau kecil dengan permukaan atau karang yang memiliki ketinggian 81 meter. Karena pulau kecil ini, Indonesia memiliki hak untuk mengklaim perpanjangan zona maritim di wilayah ini. Indonesia menyatakan bahwa pulau ini adalah karang sesuai dengan istilahnya. Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, menyatakan bahwa “batu yang tidak dapat mendukung tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonominya sendiri tidak memiliki eksklusif atau zona ekonomi kontinental.” Indonesia masih dapat memperluas dari permintaan jika Indonesia dapat mempertahankan tempatnya atau memiliki kehidupan ekonomi sendiri. Tambahan, Indonesia sebagai negara kepulauan diijinkan untuk menentukan garis dasar Indonesia (Sunnyowati et al., 2019).

Dalam menentukan batas suatu negara seperti antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, yang memiliki ikatan budaya dan telah menjadi bagian dari Indonesia, prinsip *Uti Possidetis Juris* harus diterapkan. Sementara itu, untuk batas laut teritorial antara keduanya, negara mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982 dan persetujuan para pihak. Perjanjian Republik Indonesia dan Republik Demokratik Indonesia Timor Timur untuk Wilayah Oecusse, masih dalam proses penyelesaian. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Timor Leste membuat daerah Oecusse zona ekonomi khusus, zona yang diharapkan memiliki nilai ekonomi untuk kedua negara, terutama di wilayah perbatasan (Sunnyowati et al., 2019).

12.2. Sejarah Penjajahan dan Keanekaragaman di Wilayah Perbatasan

Perbatasan yang dibahas adalah perbatasan Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Beberapa masalah perbatasan sering kali terjadi karena faktor sosial dan budaya

(demografi) serta hukum yang berlaku. Pemberlakuan hukum sering dianggap tidak adil dalam masyarakat utamanya wilayah perbatasan yang sangat rumit untuk diatur. Kedua negara memiliki adat budaya yang sama sehingga nilai-nilai toleransi dan faktor-faktor yang memicu konflik dapat dihindari di daerah perbatasan. Meskipun demikian, beberapa konflik yang melibatkan daerah perbatasan terkadang tak dapat dihindari.

Untuk perbatasan Timor Leste dan Indonesia diawali pada saat zaman penjajahan kolonial Belanda dan Portugis di kedua wilayah ini. Belanda menjajah Indonesia dengan cara yang eksploitatif dan mengambil alih wilayah Indonesia, begitupun dengan Portugis yang menjajah RDTL lalu berhasil menduduki wilayahnya. Akhirnya kedua bangsa kolonial ini bertemu dan berperang. Dan untuk memisahkan negara Timor Leste (jajahan Portugis) dan Indonesia (jajahan Belanda) dibuatlah suatu perjanjian yang bernama Perjanjian 1904. Perjanjian ini digunakan dalam mengatur wilayah-wilayah milik Indonesia dan Timor Leste. Meskipun demikian, untuk wilayah perbatasan belum diatur secara detail. Beberapa daerah perbatasan dipisahkan oleh sungai sebagai penanda. Seiring berjalannya waktu, pihak Timor Leste tidak menyetujui perbatasan yang menggunakan sungai karena dianggap merugikan. Perbatasan yang dibatasi oleh sungai sering berubah tergantung pada musim hujan atau musim kemarau menyebabkan garis sungai bergeser. Permasalahan lain yang muncul adalah konflik sosial, dimana masyarakat dapat berpindah dan melakukan aktivitas ke negara tetangga tanpa membawa dokumen lengkap. Dampak yang ditimbulkan adalah adanya pergeseran budaya dan mereka akan terpisah dari keluarga. Selain itu, beberapa penduduk juga memiliki tempat tinggal atau pun tanah di negara seberang (Rato, 2019).

Setelah adanya keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999, Timor Timur resmi lepas dari negara Indonesia dan akhirnya memutuskan untuk merdeka setelah hasil referendum dari rakyat di Timor Timur. Diputuskanlah wilayah perbatasan yang masih sangat alami dan kurang jelas yang membuat wilayah Oecusse berdiri di tengah wilayah kedaulatan Indonesia. Wilayah Oecusse Ambeno ini merdeka atas dasar karena wilayah tersebut pernah dijajah oleh Portugis dan bukannya Belanda.

Oecusse dijajah pertama kali oleh bangsa Portugis dan pada umumnya wilayah ini berbudaya dan berbahasa Portugis. Wilayah Oecusse dihuni sekitar 60.000 populasi. Ketika seorang penghuni ingin berangkat ke Ibu Kota Dili, mereka harus menempuh sekitar 12 jam menggunakan kapal Ferry. Pilihan lain apabila ingin pergi menggunakan pesawat terbang, mereka harus menunggu sekitar enam minggu. Jadi setiap enam minggu pesawat baru bisa berangkat ke ibukota Dili. Hal ini tentu dikarenakan sistem administrasi wilayah tersebut yang berbatasan langsung dan berada di wilayah negara lain. Kerumitan untuk mengurus terlebih

dahulu perjalanan dikarenakan melewati wilayah negara lain, membuat jalur transportasinya juga terhambat dan tidak cepat (ExhibitEarth, 2018).

Sementara itu, wilayah Atauro atau Pulau Kambing juga kadang dianggap sebagai bagian yang tidak termasuk kedalam wilayah Timor Leste. Wilayah Atauro yang berjarak 25 km dari ibukota Timor Leste Dili, membuat wilayah tersebut kadang dianggap berbeda. Meskipun penduduk wilayah tersebut mayoritas agama Kristen Protestan dan berbeda dengan penduduk di ibukota Dili yang mayoritas kristen Katolik. Wilayah ini dianggap sebagai destinasi terbaik karena memiliki pemandangan yang sangat bagus dan menarik para wisatawan. Keberadaan Atauro atau pulau kambing juga membuat dimensi 12 wilayah Timor Leste.



Gambar 12.1. Peta Politik Timor Leste

Sumber: (SejarahNegara, 2019)

Ketiga wilayah tersebut, Dili, Oecusse dan Atauro atau Pulau Kambing berusaha menjelaskan kepada kita bahwa kesatuan negara juga bisa dibentuk dari perbedaan. Meskipun jarak pulau Kambing dengan ibukota berjauhan dan wilayah Oecusse berada dalam wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlepas dari jajahan ataupun keberadaan yang strategis, membuat Timor Leste harus bekerja keras membangun dan memperbaiki negaranya. Lokasi yang mengancam di wilayah perbatasan juga membuat keamanan yang

serius harus diperhatikan bagi pemerintah Timor Leste karena kriminalisasi dan perdagangan ilegal kadang terjadi di wilayah perbatasan.

Tingkat kesejahteraan rakyat di tiga wilayah tersebut utamanya yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Oecusse kadang tidak terkendali. Perekonomian yang melonjak tajam dan kebutuhan pokok yang tidak selaras dengan apa yang terjadi memaksa masyarakat kadang multi visa. Sehingga di wilayah tersebut juga sering terjadi perubahan status kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Hal ini juga karena lokasi perbatasan yang sulit dikontrol dan tidak dibangun dengan maksimal (ExhibitEarth, 2018). Adapun ciri khas yang terjadi di wilayah Timor Leste, penduduk negara yang dengan mudahnya bertransformasi atau pindah ke negara lain. Misalnya Indonesia yang sangat dekat dengan Timor Leste, meskipun di sebelah timur perbatasan terdapat wilayah netral untuk pertemuan atau karena belum diatur oleh dunia internasional dan negara terkait, menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi yang selalu dipertentangkan dan dijadikan akar masalah konflik.



Gambar 12.2. Peta Wilayah Timor Leste
Sumber: (SejarahNegara, 2019)

Selain konflik sosial, konflik hukum juga terlibat dalam permasalahan perbatasan Timor Leste dan Indonesia. Masyarakat lokal harus mentaati hukum internasional yang telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan perbatasan sebuah negara. Meskipun hal ini banyak yang dilanggar. Perlunya keterlibatan pemuka agama, pemuka adat, stakeholders, dan pemuda-pemuda dari kedua negara dalam membuat suatu perjanjian adat. Meskipun demikian,

perjanjian adat ini harus sesuai dengan hukum internasional sehingga kedua wilayah yang berada di perbatasan merasa tidak dirugikan.

12.3. Konflik di Daerah Perbatasan

Konflik ini terjadi karena semakin bertambahnya warga Timor Leste yang berasal dari Distrik Oecusse bermukim di Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi 63 kepala keluarga atau sekitar 315 jiwa yang pada tahun 2015 jumlahnya hanya sekitar 40 kepala keluarga (Slamet, 2016). Kondisi ini dianggap oleh penduduk lokal sebagai aksi penguasaan Timor Leste.



Gambar 12.3. Naktuka, Wilayah Demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste
Sumber: (Slamet, 2016)

Naktuka adalah wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste. Pada tahun 2016, warga Timor Leste asal Oecusse telah menguasai sekitar 1.069 hektar yang digunakan untuk berkebun dan membangun pemukiman. Awalnya, wilayah Naktuka memang adalah bagian dari NKRI sebelum Timor Leste merdeka. Banyak warga Oecusse berkebun di area ini. Tetapi setelah Timor Leste merdeka, warga asal Oecusse tidak hanya berkebun tetapi juga membangun rumah untuk tempat tinggal mereka (Slamet, 2016). 1.069 hektare merupakan luas lahan yang dipersengketakan cukup luas. Padahal kedua wilayah dibatasi Noel Besi (sungai besar), tapi warga Timor Leste dengan segenap tenaganya tetap menyeberangi wilayah tersebut.

Setelah wilayah Naktuka ditetapkan sebagai daerah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste, warga Oecusse tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Hal ini membuat warga Indonesia menjadi resah. Demarkasi berarti batas pemisah yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat persengketaan dan tidak boleh dilanggar selama perjanjian atau gencatan senjata tersebut telah dibuat. Pada awal 2016 terjadi konflik antara masyarakat di Amfoang Timur dengan masyarakat Timor Leste di Naktuka. Pada akhirnya, konflik ini dapat diredam oleh pemerintah dan tokoh masyarakat sekitar lokasi. Di satu sisi, warga Oecusse yang menempati wilayah Naktuka ini pada umumnya masih terdapat hubungan darah dengan masyarakat di Amfoang Timur. Oleh karena itu, pemerintah lokal mencoba mencari cara berupa perundingan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Konflik sesama petani di Naktuka yang berada di wilayah Noelbesi-Citrana, terletak diantara Kabupaten Kupang (NTT) dengan Distrik Oecusse terus terjadi karena perundingan pada tingkat pusat yang dilakukan kedua negara tidak menemukan solusi karena masing-masing negara memakai ketentuan yang saling berlawanan dalam mengartikan isi pemahaman kesepakatan perjanjian negara penjajah karena tidak sesuai dengan kondisi masa lalu dan masa sekarang. Pada tanggal 14 November 2017, pemerintah RI dan Timor Leste kembali berunding untuk membahas penyelesaian masalah tersebut yang melibatkan tokoh adat RI dan RDTL dengan tema “Nekaf Mese Ansaof Mese, Atoni Pah Meto” yang berarti satu hati satu jiwa sebagai orang Dawan. Pertemuan ini dilaksanakan di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur kabupaten Kupang. Pertemuan ini juga dihadiri Kaprenrem 161 Wira Sakti Kupang, Mayor Armed Ida Bagus Diana Sukertia. Kegiatan yang berisi rapat antara para Raja, Fettor sebagai tokoh adat kerajaan dan aparat pemerintah daerah serta personel Korem 161/Wira Sakti mencoba merumuskan keinginan rakyat adat kerajaan Amfoang sehingga permasalahan sengketa RI-RDTL di wilayah Naktuka dapat diselesaikan (Keda, 2017). Penyelesaian secara adat ini sangat dinanti oleh warga yang ada di daerah sengketa batas wilayah tersebut. Sampai tahun 2019, masih terus dilakukan perundingan yang juga melibatkan Menteri Luar Negeri Indonesia. Sementara itu, Kain Maus sebagai tokoh masyarakat Amfoang Timur mengatakan jumlah warga Timor Leste terus bertambah di wilayah Naktuka dan mereka yang tinggal di sini semua memiliki kartu tanda penduduk Timor Leste (AntaraNews, 2019).

12.4. Kesimpulan

Penulis mencoba menyimpulkan permasalahan perbatasan Indonesia-Timor Leste menggunakan *human security theory*. *Human security theory* pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report 1994 (UNDP, 1994). Teori ini berkaitan dengan dua hak dasar kebebasan yaitu kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan. *The Commission of Human Security (2003)* mendefinisikan keamanan manusia ialah “untuk melindungi inti vital semua kehidupan manusia dengan cara yang meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia, ”nampak lebih luas dari definisi UNDP (1994) dan termasuk "martabat manusia." 1 Resolusi PBB A / RES / 66/290, diadopsi dengan suara bulat pada 10 September 2012, sebagian besar mendukung garis pengembangan konseptual sejak UNDP (1994) dan CHS (2003) dengan menggambarkan keamanan manusia sebagai "hak orang untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan. Salah satu konsepnya adalah konsep pengembangan manusia (*human development*). Keamanan manusia dan pengembangan manusia sangat terkait. Jika pengembangan manusia mampu menunjukkan pencapaian hak-hak dasar, termasuk hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup yang memadai, dan seterusnya yang menjamin kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan adalah syarat pembangunan manusia. Keamanan manusia adalah dasar yang membangun pengembangan manusia. Di sisi lain, memberdayakan individu dan memperluas pengetahuan serta kemampuannya akan meningkatkan keamanan manusia. Pengembangan manusia memperkuat keamanan manusia. Karena itu, ketika berhadapan dengan keamanan manusia, kita seharusnya tidak mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan manusia (Miller, 2009).

Negara Timor Leste terbentuk dengan berbagai masalah dan pada akhirnya menjadi negara yang diakui oleh dunia internasional serta PBB. Seringkali untuk mengatur wilayah atau negara dibutuhkan masalah sebagai pemicunya. Dengan demikian dapat dicarikan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang ada di daerah perbatasan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah dan fasilitas kesehatan yang minim menjadi pemicu dalam keamanan manusia. Kondisi seperti ini dapat berpotensi menjadi sebuah konflik. Sangat penting bagi kedua negara untuk memperhatikan sektor keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kedua sektor tersebut juga dapat mendukung pembangunan nasional suatu negara.

BAB 13 PERBATASAN GIBRALTAR DAN SPANYOL

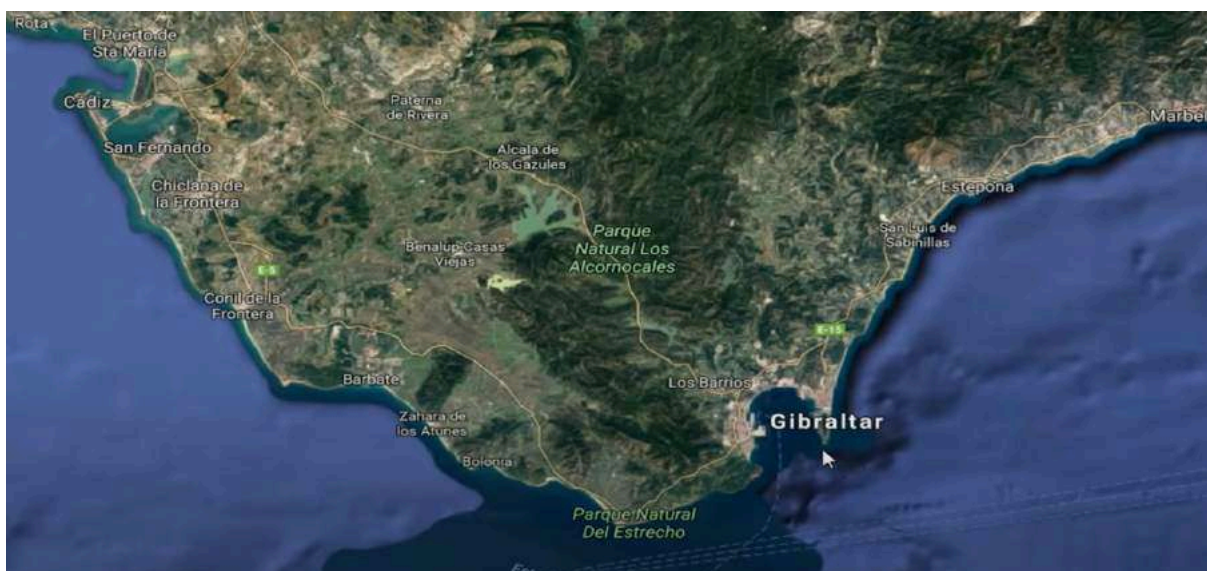
13.1. Konflik antara Inggris, Spanyol dan Gibraltar

Perbatasan memang suatu garis khayal atau nampak secara fisik yang ditarik dan muncul dari hasil negosiasi diplomatis atau merupakan hasil dari perang untuk merebut teritori. Perbatasan memiliki karakternya sendiri yang menentukan bagaimana pengertian kehidupan sehari-hari dari masyarakat yang berada di salah satu sisi dan masyarakat dari sisi yang lain. Seperti yang terjadi di perbatasan Gibraltar dan Spanyol, tentu saja masyarakat Spanyol dengan budayanya sendiri, identitas politiknya sendiri, dan masyarakat Gibraltar dengan budayanya sendiri yang dibawa oleh Inggris, karena memang merupakan wilayah seberang lautan Inggris. Masyarakat perbatasan memiliki karakter tertentu, masing-masing sisi memiliki karakter yang sama seperti kesamaan budaya, atau memiliki karakter keragaman dari ekspresi budaya yang kompleks. Orang yang tinggal di daerah perbatasan tidak memandang perbatasan dalam kondisi yang sama dengan orang-orang di setiap sisi yang tidak tahan kondisi tertentu. Seperti orang-orang Spanyol yang bekerja di Gibraltar tentulah mengikuti etos kerja dari Gibraltar yang berada dibawah pengaruh Inggris. Dan orang Gibraltar yang menyebrang mengikuti aturan-aturan Spanyol yang lebih ringan karena mengikuti aturan dari Uni Eropa (Groom, 1997).



Gambar 13.1. Posisi Strategis Gibraltar
Sumber: (7Seven, 2017)

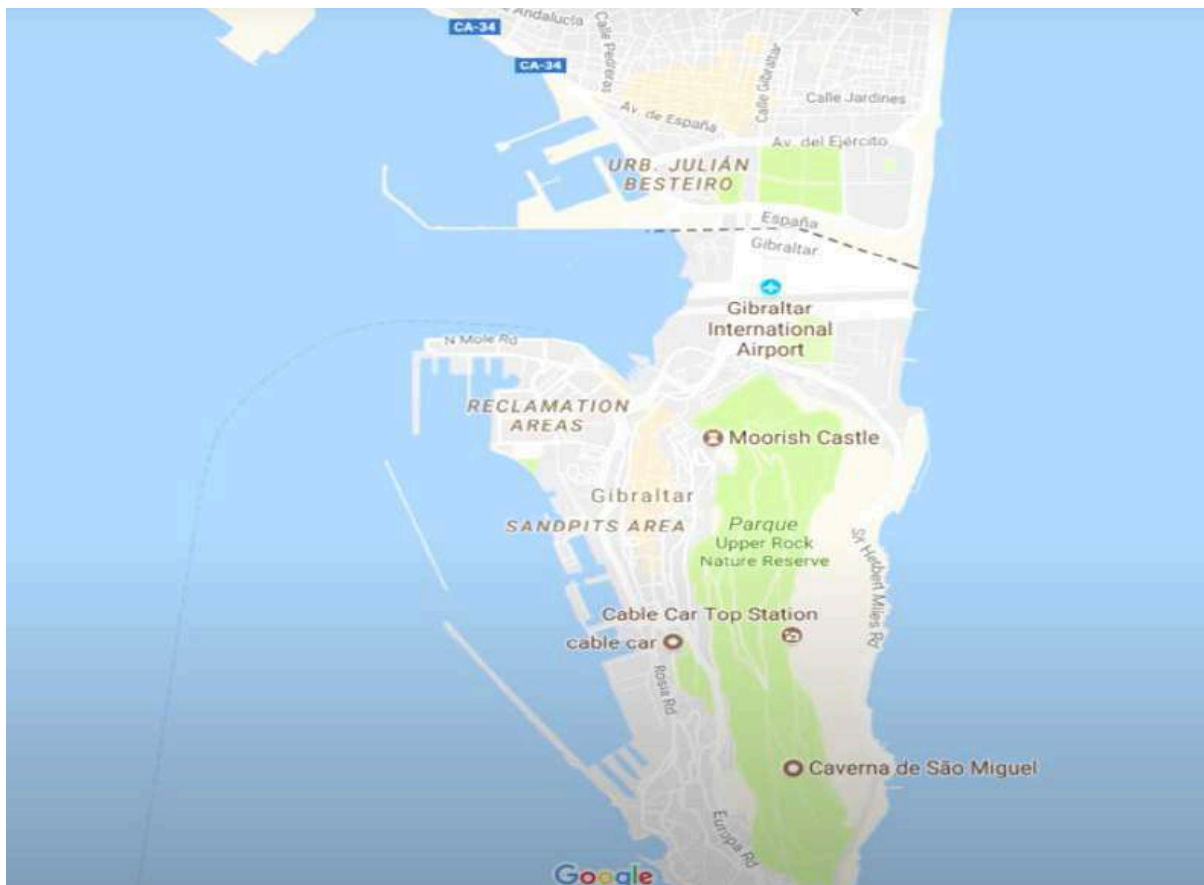
Konflik atas Gibraltar adalah konflik yang memanas dari dulu, dan masih harus diselesaikan sampai sekarang. Gibraltar memiliki 30.000 penduduk yang memiliki hubungan antara Inggris dan Spanyol dan Uni Eropa (EU) di mana situasi yang belum terselesaikan atas Gibraltar telah merugikan integrasi Eropa dalam beberapa aspek (Groom, 1997). Sementara pertanyaan tentang Gibraltar membutuhkan tanggung jawab baik dari pihak Inggris, Gibraltar dan Spanyol, dan peningkatan kesadaran dan kepemimpinan dari Uni Eropa yang juga dirugikan, terutama setelah Brexit 2020 akhirnya terwujud. Sebelum pembagian kekuasaan antara pemerintah Inggris dan Gibraltar memiliki implikasi untuk hubungan antara Inggris, Gibraltar, terutama saat Inggris masih bagian dari Uni Eropa. Terutama setelah Inggris dan Spanyol merundingkan kesepakatan untuk penggunaan bandara Gibraltar yang ditolak oleh pemerintah Gibraltar. Ini memiliki efek yang signifikan pada undang-undang Eropa tentang liberalisasi udara, yang merupakan bagian dari kebebasan bepergian.



Gambar 13.2. Posisi Strategis Gibraltar
Sumber: (7Seven, 2017)

Ketika Inggris berunding dengan berbagai badan yang dibentuk Uni Eropa tentang hal-hal yang menyangkut Gibraltar, Gibraltar sendiri tidak terwakili sama sekali. Di sisi lain, implementasi dari apa yang telah disepakati pemerintah Inggris dalam konteks Uni Eropa adalah masalah bagi pemerintah Gibraltar. Jika keduanya tidak setuju, maka muncul perselisihan di antara kedua pemerintah. Dengan demikian Gibraltar adalah wilayah Eropa, tanpa perwakilan langsung di lembaga Uni Eropa mana pun, di mana kepentingannya hanya diwakili oleh Inggris dan tidak termasuk perwakilan Gibraltar. Saat Inggris masih bergabung dengan Uni Eropa, Gibraltar tidak memiliki perwakilan di Parlemen Eropa, orang-orang

Gibraltar sendiri tidak memiliki keseriusan mempertimbangkan untuk mendirikan kantor di Brussels untuk bertindak sebagai lobi atau sumber informasi dengan Uni Eropa (Groom, 1997).



Gambar 13.3. Posisi Strategis Gibraltar
Sumber: (7Seven, 2017)

Seperti yang terkait dengan pertengkaran antara Inggris, Spanyol dan Gibraltar atas pertanyaan paspor Gibraltar. Spanyol mengisyaratkan bahwa mereka mungkin tidak mengakui paspor Gibraltarian. Selain itu, baik itu Inggris maupun Gibraltar tidak termasuk dalam kelompok Schengen sehingga ini memberi arti penting pada perbatasan antara Gibraltar dan Spanyol, karena jika Inggris keluar dari Uni Eropa, maka Spanyol akan sangat terhambat dalam mengawasi kontrol perbatasan dengan Gibraltar. Politik identitas masih hidup bahkan di Eropa kontemporer. Karenanya, masalah Gibraltar bukanlah masalah yang terisolasi, tetapi merupakan bagian dari tantangan umum terhadap kebijaksanaan konvensional (Groom, 1997). Terlebih setelah Brexit 2020 telah terjadi, masalah Gibraltar tidak lagi menjadi prioritas utama dari Uni Eropa karena Gibraltar adalah hak dari Inggris.

13.2. Keunikan Bandara Internasional Gibraltar

Gibraltar merupakan wilayah yang terletak sangat strategis diantara Laut Mediterrania dan ujung Benua Eropa dan Benua Afrika. Keunikan lainnya, Gibraltar memiliki bandara internasional atau yang biasa disebut sebagai Gibraltar International Airport. Keunikan dari bandara ini adalah karena bandara ini terletak di tengah-tengah perbatasan antara Gibraltar dan Spanyol. Bahkan di dalamnya terdapat landasan pacu pesawat terbang untuk mendarat dan terbang juga digunakan sebagai penyeberangan imigrasi oleh kedua negara baik itu untuk barang, kendaraan, dan perseorangan. Bandara ini juga dijadikan sebagai penyebarangan masyarakat Gibraltar dan Spanyol. Gibraltar dan Spanyol terletak berdekatan di wilayah Benua Eropa terutama di Pesisir Laut Mediterrania. Gibraltar adalah negara yang meliputi area yang hanya seluas 6 km persegi dan dengan populasi sekitar 30.000. Negara yang merupakan bagian dari British Overseas Territory ini terletak di ujung paling selatan Semenanjung Iberia di Eropa. Berjarak 9 mil laut dari Maroko dan terhubung ke Spanyol dengan jalan lebih dari satu kilometer panjangnya (7Seven, 2017).



Gambar 13.4. Letak Gibraltar International Airport
Sumber: (7Seven, 2017)

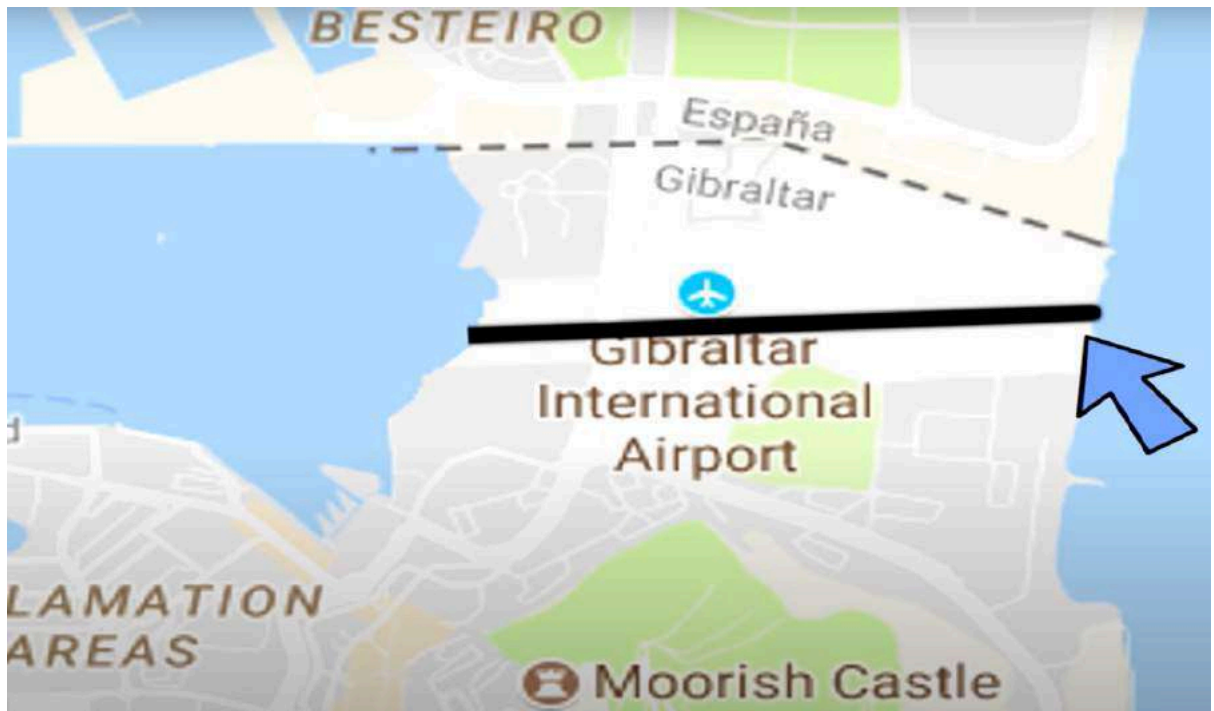
Ekonomi Gibraltar sebagian besar bergantung pada pariwisata, perjudian online, layanan keuangan, dan pengisian bahan bakar kapal kargo. Kedaulatan Gibraltar adalah titik

pertikaian dalam hubungan Anglo-Spanyol karena Spanyol menegaskan klaim atas wilayah tersebut. Orang-orang Afrika menolak proposal untuk kedaulatan Spanyol dalam referendum 1967 dan dalam referendum 2002, gagasan kedaulatan bersama juga ditolak. Pemerintah Inggris sekarang menolak untuk membahas kedaulatan tanpa persetujuan dari warga negara Gibraltar sendiri. Menurut referendum yang pernah dilakukan, telah dideklarasikan bahwa rakyat Gibraltar tidak akan pernah kompromi, menyerah atau memperdagangkan kedaulatan mereka atau hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Gibraltar menginginkan hubungan yang baik, bertetangga, Eropa dengan Spanyol, dan Gibraltar adalah milik rakyat Gibraltar dan bukan milik Spanyol untuk diklaim atau Inggris untuk dibagikan (7Seven, 2017).



Gambar 13.5. Letak Gibraltar International Airport
Sumber: (7Seven, 2017)

Spanyol bersikeras pada perjanjian bilateral dengan Inggris atas kedaulatan, sedangkan Inggris hanya akan membahas kedaulatan jika Gibraltar dimasukkan dalam diskusi. Dari Pandangan PBB tentang posisi masing-masing pihak tercantum dalam laporan 2016 mereka. PBB saat ini mendaftarkan Gibraltar sebagai “a Self Governing Territory.” Gibraltar diberi Gibraltar Constitution Order tahun 2006 oleh Inggris yang membentuk suatu pemerintahan di mana Gubernur Gibraltar bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan eksternal, pertahanan, keamanan internal dan untuk penunjukan tertentu ke kantor publik, dan pemerintah Gibraltar bertanggung jawab untuk semua hal lainnya. Inggris percaya bahwa Gibraltar merupakan wilayah independen, diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gibraltar menikmati hak individu dan kolektif yang diatur dalam konstitusi 2006 dan hak menentukan nasib sendiri (7Seven, 2017).



Gambar 13.6. Letak Gibraltar International Airport
 Sumber: (7Seven, 2017)

Melintasi perbatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol harus melalui pemeriksaan. Spanyol menekankan bahwa pemeriksaan tidak bermotivasi politik, karena itu perlu untuk memastikan kepatuhan yang ketat dengan peraturan perbatasan Uni Eropa untuk melawan masalah perdagangan gelap yang umum terjadi. Apalagi Gibraltar bagian wilayah Inggris dan termasuk dalam Schengen Area “*Single Market*” dari UE. Spanyol mengklaim lapangan udara ditempati secara ilegal oleh Inggris. Inggris mengklaim kedaulatannya meluas di atas wilayah tanah genting tempat lapangan udara dibangun. Inggris juga mengklaim batas tiga mil di perairan teritorial di sekitar Gibraltar sedangkan Spanyol mengklaim hak maritim untuk semua wilayah kecuali di dalam pelabuhan di Gibraltar. Klaim Inggris atas serbuan kapal Spanyol ke perairan teritorial Gibraltar dianggap oleh Spanyol untuk mencerminkan aktivitas rutin kapal Spanyol di perairan mereka sendiri (7Seven, 2017).



Gambar 13.7. Keindahan Gibraltar International Airport
Sumber: (7Seven, 2017)

Pada tahun 2015, Inggris menegaskan kembali klaimnya atas kedaulatan, bahwa Gibraltar memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri yang ditetapkan dalam konstitusi 2006 dan bahwa Inggris tidak akan mengadakan diskusi kedaulatan apa pun kecuali Gibraltar setuju dan Inggris berkomitmen untuk melindungi Gibraltar, orang-orangnya dan ekonominya. Inggris mengklaim kedaulatan atas tanah yang diperpanjang di atas laut hingga batas tiga mil atau ke garis tengah di bawah konvensi PBB tentang Hukum Laut. Setiap diskusi harus menyertakan Gibraltar karena konstitusi mereka memberi mereka kekuatan tunggal atas urusannya sendiri. Pemerintah Gibraltar telah terlibat dalam pembicaraan dengan Spanyol untuk menyelesaikan perselisihan lain, seperti urusan perbatasan, dengan mengesampingkan masalah kedaulatan yang diselesaikan oleh Inggris (7Seven, 2017).



Gambar 13.8. Keunikan Gibraltar International Airport yang Juga Dapat Dilalui Kendaraan

Sumber: (7Seven, 2017)

Gibraltar merupakan bagian dari Inggris juga terkena imbas dari keluarnya Inggris dari UE atau dikenal sebagai Brexit pada akhir Januari tahun 2020. Dipastikan bahwa Gibraltar akan memperbaharui kembali kebijakannya terkait perbatasannya dengan Spanyol terutama penyeberangan kendaraan dan manusia. Tapi itu tidak akan banyak berubah. Ada pos pemeriksaan pabean yang terus berdiri hingga sekarang di dalam Bandara Gibraltar tempat orang-orang menyeberang. Bandara Gibraltar sebenarnya merupakan bandara militer pertama, yang telah dibuka untuk wisatawan dan penduduk. Serta bertindak sebagai penghubung fisik antara Inggris dan Gibraltar, dan juga bertindak sebagai salah satu pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di luar Inggris, di mana RAF Typhoon Fighter Jets sering ditempatkan. Selain Bandara, ada Pangkalan Angkatan Laut Kerajaan yang aktif yang ditempatkan di Gibraltar, tempat sekutu AS dan NATO merapatkan kapal perang dan kapal induknya. Selain itu, ada rencana untuk mengadakan terowongan dan jalan yang dialihkan sedang dibangun dan didanai oleh Inggris bukan Pemerintah Gibraltar, Inggris berurusan dengan sebagian besar biaya infrastruktur bukan Pemerintah Gibraltar. Untuk landasan pacu dari bandara ini menjadi penting bagi wisatawan maupun siswa yang ingin berlibur tanpa harus pergi jauh ke Malaga. Bahkan untuk setiap orang yang ingin menyeberangi kedua negara, haruslah melewati jalan ini. Keunikan dari landasan pacu ini adalah memuat banyak penerbangan ke Gibraltar sebagai bandara penghubung, jadi berada di dalam kendaraan ataupun berjalan kaki menunggu pesawat untuk menyeberang ke Spanyol atau ke Gibraltar adalah sesuatu yang sering terjadi (7Seven, 2017).



Gambar 13.9. Keunikan Gibraltar International Airport yang Juga Dapat Dilalui Kendaraan

Sumber: (7Seven, 2017)

Pembangunan bandara ini mengharuskannya berada di tengah garis perbatasan dan bentuk landasan pacu yang melintang dari timur ke barat. Pertama, pembangunan bandara membutuhkan letak strategis dari arah angin, serta keadaan secara geografis untuk menghindari bahaya dari “The Rock” ketika pesawat mendekat. Alasan lain, landasan pacu untuk menyeberang jalan tengah di formasi timur dan barat adalah karena sebagian besar waktu, angin di Gibraltar baik bertiup dari timur atau barat. Pesawat selalu lepas landas dan mendarat di atas angin. jadi jika landasan dibangun di sisi batu, itu akan menjadi pendaratan angin lintas yang sangat berbahaya (7Seven, 2017).

Meskipun demikian, ketika ada angin barat yang kuat bertiup atau ada kabut, pesawat akan dialihkan ke Malaga dan maskapai harus mengatur bus. Selain itu pesawat militer tidak diizinkan memasuki wilayah udara Spanyol saat bepergian ke atau dari Gibraltar karena harus menukik tajam ke ruang udara internasional. Bandara ini juga melayani area "campo de Gibraltar" Spanyol, dimana sebagian besar penumpang datang dari Spanyol untuk terbang keluar, atau menuju ke Spanyol ketika terbang. Oleh karena itu mengapa ada banyak pembicaraan tentang operasi bersama bandara dengan Orang Spanyol. Sesuatu yang tentu saja sangat ditentang oleh masyarakat Gibraltar. Bandara ini menambah pelayanan penerbangan yang umumnya lebih banyak dari dan menuju London, Bristol, dan Manchester di Inggris (7Seven, 2017).

Meskipun keamanan di perbatasan telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, tapi masih saja ada orang-orang yang mencoba menjual tiket masuk ke Gibraltar. Masuk ke Gibraltar gratis tanpa pungutan biaya. Paspur lengkap yang sah atau kartu identitas UE dalam hal warga negara UE. Pemegang paspor lain mungkin memerlukan visa untuk masuk ke Gibraltar. Berjalan dari perbatasan ke pusat Gibraltar hanya membutuhkan waktu 15 menit. Ada layanan bus ke berbagai bagian Rock di halte bus, di sisi perbatasan Gibraltar. Ada juga pangkalan taksi dan Tourist Information Office. Petugas perbatasan bertanggungjawab untuk menjaga perbatasan yang aman dan lancar dan melindungi terhadap tindakan kriminal yang mengancam keamanan perjalanan, dengan menegakkan hukum dan mengamankan kepercayaan para pelancong, untuk menjaga wilayah tetap aman dan Gibraltar terbuka untuk bisnis. Ketika seseorang ingin menyeberang melalui bandara ini adalah seperti lampu merah perempatan jalan dengan pesawat, orang-orang harus menunggu sampai pesawat lewat dengan aman, kemudian barulah orang-orang tadi menyeberang (7Seven, 2017).

13.3. Konsep Bandara Lintas Batas

Dalam subbab ini menjelaskan bagaimana suatu bangunan seperti bandara yang terletak diantara dua negara atau terletak persis di sebuah perbatasan. Persepsi mengenai perbatasan memang sangat berbeda. Sama seperti definisi dari Spanyol dan Inggris melihat perbatasan di Gibraltar-Spanyol. Tentu dikalangan masyarakat, persepsi berbeda memperlihatkan bagaimana hubungan bertetangga memperlihatkan multikultural dari masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan nilai-nilai pemahaman dan rasa hormat terhadap budaya-budaya yang hadir di perbatasan.



Gambar 13.10. Keunikan Gibraltar International Airport
Sumber: (7Seven, 2017)

Garis batas geografis, bandara secara signifikan berkontribusi untuk mengubah konsep wilayah perbatasan dan membuka peluang baru, namun tidak terjadi untuk kasus Gibraltar. Konsep dalam bab ini adalah *Cross Border* atau lintas batas dari suatu bandara yang terletak di tengah perbatasan yang memisahkan dua negara di Gibraltar. Bandara Gibraltar memiliki terminal yang terpisah, tetapi hanya satu terminal yang memiliki akses ke sisi bandar, yang berada sepenuhnya di Gibraltar (Mirković & Sovilj, 2019).

	Passengers	Aircraft movements	Cargo (tonnes)
2008	378,603	3,958	624
2009	371,231	4,290	313
2010	305,325	3,346	296
2011	383,013	3,628	292
2012	387,219	3,490	314
2013	383,876	3,564	352
2014	415,103	3,730	384
2015	444,336	4,100	408
2016	548,230	4,968	404

Gambar 13.11. Jumlah Penumpang di Gibraltar International Airport yang Cenderung Naik dari Tahun ke Tahun
Sumber: (7Seven, 2017)

Gibraltar seperti wilayah Inggris lainnya berada di luar Wilayah Schengen Uni Eropa, dan sejak Brexit 2020 terwujud, diperlukan pemeriksaan identitas untuk orang-orang yang ingin melintasi perbatasan dari dan menuju Spanyol yang merupakan Wilayah Schengen Uni Eropa. Perbatasan ini sendiri membentang dari timur ke barat dengan total 1,2 kilometer panjangnya yang memisahkan Gibraltar dari kota tetangga La Línea di Spanyol. Perbatasan ini berada di sebelah utara dari bandara Internasional Gibraltar. Di dalam bandara terdapat landasan pacu yang melintang dari timur ke barat, dan ditengahnya dipotong oleh jalan Winston Churchill Avenue. Jalan inilah yang menjadi penghubung dan *check point* dari dan menuju Spanyol di perbatasan Gibraltar. Bandara ini adalah bandara sipil yang melayani masyarakat Gibraltar sepenuhnya. Landasan pacu ini dimiliki oleh Departemen Pertahanan dan juga digunakan oleh Angkatan Udara Kerajaan sebagai bagian dari RAF Gibraltar. Operator sipil *Air Traffic Controller* menggunakan terminal yang juga dioperasikan oleh sipil. National Air Traffic Services Inggris memegang kontrak sebagai penyedia layanan navigasi udara untuk bandara ini (Mirković & Sovilj, 2019).



Gambar 13.12. Jalan Winston Churchill Avenue
Sumber: (7Seven, 2017)

Karena jalan Winston Churchill Avenue sebagai satu-satunya jalan menuju perbatasan darat dengan Spanyol memotong landasan pacu bandara, sehingga lalu lintas jalan ini harus ditutup setiap kali pesawat akan mendarat atau berangkat di landasan pacu bandara. Jalan Winston Churchill Avenue ini merupakan satu-satunya cara untuk pergi dari Spanyol ke Gibraltar, jadi tidak ada lagi cara untuk menghindari jalan ini. Sedangkan jalan ini lalu lintasnya akan mengikuti bagaimana pesawat akan mendarat atau lepas landas, dan keadaan ini akan lebih ramai lagi ketika musim panas tiba, ketika lebih banyak penerbangan dari dan menuju bandara ini untuk berkunjung (Mirković & Sovilj, 2019).

Dua negara antara Spanyol dan Gibraltar yang merupakan wilayah seberang laut Inggris yang saling berbatasan. Konsep dari bandara sebagai lintas batas juga dipandang sebagai salah satu solusi yang mungkin (sementara atau jangka panjang) untuk wilayah yang sensitif secara politis, untuk wilayah dengan status tidak jelas dan atau sebagian tidak dapat diterima, seperti dari Gibraltar yang terus dipertanyakan Spanyol. Posisi bangunan terminal sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dihubungkan ke bangunan terminal lain di sisi lain dari garis perbatasan di Gibraltar dan Spanyol, dan landasan pacunya dibelah oleh jalanan yang menjadi penghubung kedua negara. Ketika bandara terletak dekat dengan perbatasan antara dua negara seperti Bandara Internasional Gibraltar, secara juga menarik penumpang dari semua negara yang berbatasan. Dalam hal ini konsep bandara lintas batas dipandang sebagai solusi yang nyaman untuk investasi bersama negara-negara tetangga, melalui kerjasama, dan telah dilakukan setelah Cordoba Accord 18 September 2006. Cordoba Accord sendiri merupakan Forum Trilateral Gibraltar diadakan antara Pemerintah Gibraltar, Spanyol dan Inggris. Isinya ini mengakhiri semua pembatasan secara diskriminatif penerbangan sipil ke Gibraltar,

termasuk larangan penerbangan di atas tanah Spanyol, dan pengecualian Gibraltar dari semua perjanjian Uni Eropa dalam hal transportasi udara, dan memungkinkan penerbangan sipil dari semua negara ke Bandara Internasional Gibraltar. Bahkan setelah Brexit, perjanjian ini masih berlaku (Mirković & Sovilj, 2019).

13.4. Kesimpulan

Gibraltar International Airport menjadi pusat perhatian karena letaknya yang berada di perbatasan antara Spanyol dan Gibraltar yang merupakan wilayah seberang laut Inggris di Mediterania. Kedudukan dari Gibraltar terbilang unik, karena merupakan wilayah seberang laut dari Inggris, sedangkan posisi dari Spanyol sebagai aktor yang menginginkan adanya ikut campur di masalah perbatasannya dengan Gibraltar tentu sudah pasti bertemu Inggris, karena menyangkut pada kedaulatan suatu wilayah dari Inggris, yaitu Gibraltar. Kemudian, baik Inggris maupun Gibraltar pernah menjadi bagian dari Uni Eropa, namun setelah Brexit secara resmi terjadi pada awal tahun 2020 ini, maka tidak lagi. Namun pihak Spanyol bersih keras agar permasalahan perbatasan ini tetap dibahas dengan melibatkan Uni Eropa, dengan alasan Spanyol merupakan bagian dari Uni Eropa, dan masalah perbatasan ini sudah pasti melibatkan Uni Eropa, karena berdampak pada kepentingan imigrasi, kebebasan bergerak, pajak, birokrasi, cukai, dan barang yang berlalu-lalang di perbatasan Gibraltar.

Perspektif realisme neo-klasik (Neoclassical Realism) dalam berhubungan dengan negara lain, terutama mengenai status dari salah satu bagian integral dari kedaulatan memiliki dampak kapabilitas kekuatan sehingga berdampak pada kebijakan luar negeri secara tidak langsung namun kompleks. Terutama di sisi Inggris karena tekanan harus diterjemahkan melalui variabel tingkat unit yang mengintervensi dari persepsi pembuat keputusan, atau dari struktur negara, seperti hubungan negara-masyarakat, sifat rezim politik domestik mereka, budaya strategis, dan persepsi pemimpin. Jadi negara tidak selalu melihat rangsangan sistematis dengan benar, atau sistem internasional tidak selalu memberikan sinyal yang jelas tentang ancaman dan peluang. Dalam memahami hubungan kompleks antara kekuasaan dan membuat kebijakan, dengan demikian memerlukan pemeriksaan yang cermat dari konteks internasional, dan yang lebih penting dari domestik, di mana kebijakan luar negeri dirumuskan dan diimplementasikan. Sudah pasti dari realisme neo-klasik melihat bahwa ruang lingkup dari kebijakan luar negeri suatu negara didorong oleh kekuatan material yang sangat relatif dari negara tersebut (Meibauer, 2020).

Setelah terjadinya Brexit yang mengungkapkan dampak politik pada politik partai dan membawa perubahan besar pada lembaga-lembaga di Inggris dan kebijakan publik dari meninggalkan UE, semuanya memperlihatkan bahwa kepentingan domestik tentulah menjadi

masalah utama dalam perumusan kebijakan luar negeri. Namun dengan keluarnya Inggris, tentu berdampak kepada hak-haknya yang lain, yaitu kedaulatan, salah satunya adalah Gibraltar, yang statusnya terus menjadi pertanyaan dari Spanyol. Bagaimana suatu entitas politik yang berada jauh dari Inggris, yang merupakan wilayah kedaulatan dari Inggris, dengan kondisi internal yang berbeda dari Inggris, namun masih berada di daratan Eropa, terkena dampak dari Brexit, sehingga diharuskan Gibraltar yang bagian dari Inggris, ikut terseret keluar dari Uni Eropa.

Berdasarkan pendapat Gustav Meibauer dalam artikelnya dengan judul *interest, ideas, and the study of state behavior in neoclassical realism*, smemahami bahwa realisme neo-klasik mencakup pada apresiasi terhadap peranan yang dilihat oleh para pembuat keputusan yang bertindak dengan cara-cara yang diperhitungkan dan rasional untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Sistem internasional seperti Uni Eropa dapat memberikan persyaratan yang relatif jelas kepada negara anggotanya, berdasarkan distribusi kemampuan dan tingkat pertumbuhan diferensial yang relatif. Tapi itu harus dilakukan terutama melalui persepsi orang-orang yang membuat keputusan atas nama negaranya sendiri. Juga menuntut Inggris untuk keluar, kepentingan Uni Eropa tidak selalu memberikan sinyal yang jelas tentang ancaman dan peluang, sehingga tidak mampu memetakan distribusi keuntungan untuk Inggris. Dan Inggris memandangnya sebagai kekurangan untuk tetap bersama Uni Eropa. Pemahaman dari artikel Meibauer ini, dapat dilihat bahwa negara tidak selalu dapat memobilisasi sumber daya domestik yang diperlukan untuk merespons sebagaimana diperlukan oleh sistem internasional. Orang-orang Inggris membutuhkan negara yang sangat fleksibel yang mampu mengidentifikasi imperatif sistemik dengan benar dan merespons dengan segera sesuai dengan keadaan internasional. Jika penyeimbangan diperlukan, negara harus dapat meningkatkan pendapatan, memobilisasi sumber daya, dan meminta tenaga militer secara tepat waktu untuk mencegah negara anggota lain mencapai hegemoni Uni Eropa, dan berakibat mempengaruhi Inggris secara keseluruhan, dan terkhusus pula kepada Gibraltar, yang mana tentu diidentifikasi sebagai ancaman.

Nilai-nilai dari pandangan masyarakat Gibraltar yang menjadi konsiderasi dasar, melihat bahwa asumsi-asumsi dasar inilah yang menentukan kepentingan material yang diberikan menjadi penyebab untuk membuat kebijakan luar negeri. Ide fundamental dari masyarakat Gibraltar dan dari pengaruh Inggris yang dipandang sebagai kepentingan nasional Gibraltar. Namun pada saat yang sama, mereka perlu dikaitkan dengan eksternal seperti Spanyol, tapi tetap tidak dapat dijadikan sebagai konsiderasi sama sekali. Dengan demikian hanya ada fokus pada koherensi ideasional pada penyesuaian strategis yang besar seperti

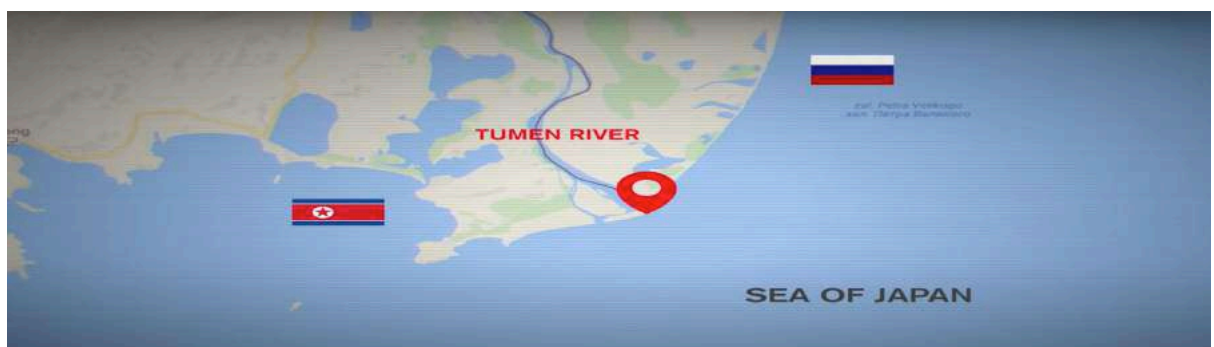
Gibraltar. Jadi saling mempengaruhi kepentingan dan idea dalam kebijakan luar negeri Gibraltar. Spanyol yang mempertanyakan kebijakan agar perbatasan Gibraltar lebih lembut agar bisa dilalui secara bebas seperti saat Inggris dan Gibraltar masih di Uni Eropa. Namun Inggris tetap berkeras mempertahankan posisi mereka yang tidak dapat didamaikan dalam perselisihan perbatasan karena tetap upaya penyelesaian sudah pernah dilakukan dan ingin agar perjanjian yang sudah ada tetap dipertahankan dan tidak diperbaharui. Inggris dan Gibraltar sudah bersepakat dengan Spanyol, dengan konsiderasi dasar secara konseptual antara minat dan gagasan serta antara keyakinan individu dan ide-ide sosial dari masyarakat Gibraltar di bawah pengaruh kedaulatan Inggris, apalagi perbatasan tentu menyangkut kedaulatan.

BAB 14 PERBATASAN-PERBATASAN DI BENUA ASIA

14.1. Keunikan Perbatasan-Perbatasan di Benua Asia

Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia yang meliputi luas wilayah 44.579.000 km², yang merupakan 30% dari total luas wilayah bumi. Sebagai benua terbesar di dunia, benua Asia dihuni oleh sebagian besar populasi manusia yang ada di bumi dan merupakan tempat lahir dan berkembangnya banyak peradaban (Bento, 2017). Luasnya benua Asia dan banyaknya manusia yang menghuni benua tersebut tentunya sebuah perbatasan menjadi hal yang sangat penting guna menghindari konflik atau setidaknya dapat menentukan sejauh mana sebuah pemerintahan memiliki kekuasaan atau wilayahnya.

Perbatasan-perbatasan di benua Asia tentunya tidak secara langsung terbentuk begitu saja. Memerlukan banyak proses dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sebuah batas wilayah. Pada bab ini, perbatasan yang pertama dikaji yaitu perbatasan antara Korea Utara dan Rusia. Perbatasan antara kedua wilayah ini ditandai dengan sebuah sungai bernama Tumen yang juga merupakan sungai yang mengalir ke Laut Jepang. Beralih ke perbatasan antara Jepang dan Taiwan. Perbatasan antara kedua negara ini ditentukan berdasarkan faktor-faktor sejarah, geologi, dan geopolitik dari kedua negara tersebut. Di Jepang sendiri terdapat banyak pulau-pulau kecil, baik yang masih terhubung secara daratan maupun pulau-pulau yang terpisah oleh lautan seperti pulau Ogasawara. Pada pulau-pulau Jepang tersebut banyak ditemukan hewan-hewan, terutama hewan laut yang telah mengalami evolusi unik, contohnya cumi-cumi raksasa (Bento, 2017).



Gambar 14.1. Sungai Tumen
Sumber: (Bento, 2017)

Beralih ke wilayah Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara terdiri atas 25.000 pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Negara-negara yang termasuk ke dalam wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Banyak kemudian pertanyaan muncul, dimana batas dari wilayah Asia Tenggara. Melihat Asia Tenggara berbatasan langsung dengan benua Australia, terutama Indonesia yang juga berbatasan dengan Papua New Guinea yang dimana Papua New Guinea tidak termasuk ke dalam wilayah Asia Tenggara melainkan masuk ke dalam Australiasia. Kasus perbatasan antara Indonesia dan Australia merupakan contoh perbatasan yang cukup unik. Australia merupakan sebuah benua namun juga sekaligus sebagai sebuah negara. Maka jika kita berfokus pada ciri-ciri dari sebuah benua, maka benua Australia juga dapat mencakup wilayah Papua New Guinea dan bahkan beberapa wilayah Indonesia. Alasan besar yang kemudian menjadikan Papua New Guinea tidak termasuk ke dalam wilayah benua Asia maupun Asia Tenggara yaitu karena adanya hubungan geopolitik yang sangat kuat antara Papua New Guinea dengan negara-negara tetangganya di bagian selatan (Bento, 2017).

Jika membahas perbatasan antara Indonesia dan benua Australia, hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan ini yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan Weber ini merupakan garis yang membatasi atau lebih tepatnya penanda penyebaran flora dan fauna antara Indonesia dan Australia sehingga dapat terlihat secara jelas tipe-tipe flora dan fauna yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Pada tahun 1859, Alfred Russel yaitu seorang naturalis Inggris melihat bahwa terdapat beberapa tipe hewan dan tumbuhan yang berada di wilayah Indonesia memiliki kesamaan dengan hewan dan tumbuhan yang berada di Australia. Sedangkan untuk garis Weber, diperkenalkan pertama kali oleh Max Weber yang merupakan seorang ahli zoologi Jerman-Belanda. Garis Weber yang diperkenalkan oleh Max Weber ini digunakan sebagai garis alternatif dan garis Wallace. Max Weber menciptakan garis ini setelah melihat adanya kecacatan dari garis yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Alfred Russel. Cacatan yang menjadi perhatian Max Weber dari penelitian Russel tersebut yaitu, pada garis Wallace tidak terlalu memperhitungkan hewan-hewan mamalia vertebrata, atau dengan kata lain garis tersebut tidak mencakup keseluruhan jenis hewan sehingga Max Weber beranggapan bahwa garis Wallace tersebut tidak dapat digunakan dalam menentukan batas penyebaran flora dan fauna antara Indonesia dan Australia (Bento, 2017).

Selain garis Weber dan Wallace, terdapat juga garis Lydekker yang merupakan garis yang lebih berfokus pada bagian timur. Garis ini diperkenalkan oleh Richard Lydekker yang merupakan seorang naturalis Inggris. Perbatasan antara benua Australia dan Asia Tenggara, terutama Indonesia tentunya tidak hanya sebatas pada batas-batas yang berada di atas permukaan saja. Melainkan juga mencakup wilayah kontinental perpanjangan yang berada di bawah permukaan laut yang meliputi pulau-pulau kecil dari masing-masing wilayah. Dapat terlihat dengan jelas bahwa garis Wallace berfokus pada pembagian wilayah yang memiliki kaitan erat dengan tepi landas kontinen Asia. Sedangkan garis Lydekker lebih berokus pada pembagian wilayah atau perbatasan yang berkaitan langsung dengan wilayah Australia. Jika melihat secara sejarah juga, pada zaman es, ketika permukaan air laut masih cukup rendah, banyak dari wilayah-wilayah pulau di Asia yang menyatu secara daratan. Maka dari itu peradaban di Asia dapat berkembang dengan sangat cepat dikarenakan mudahnya akses perpindahan manusia pada saat itu (Bento, 2017).

Beralih ke perbatasan yang terdapat di wilayah Asia Selatan, yaitu antara negara-negara Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan dan Maladewa. Selanjutnya Asia Barat atau orang lebih mengenalnya sebagai wilayah Timur Tengah, terdapat sebuah teluk utama yaitu teluk Persia dan negara-negara seperti Iran, Irak Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Beralih ke teluk Aden, terdapat wilayah Oman, Yaman, Arab Saudi di bagian Barat. Jika kita berfokus pada semenanjung Arab, secara geografis Asia, Yaman dapat masuk ke dalam wilayah Asia dan jika kita memperhatikan pulau-pulau seperti Kepulauan Hanish dan Perim di Laut Merah, pulau-pulau tersebut secara sekilas dapat dikatakan masuk dalam wilayah benua Afrika. Masih banyak pulau-pulau Yaman yang berbatasan dekat dengan wilayah Asia, kecuali Kepulauan Socotra yang wilayahnya lebih condong ke Laut Arab dan lebih dekat dengan wilayah Afrika yang memanjang dari Somalia. Meskipun Mesir masuk ke dalam wilayah Timur Tengah dan Timur Tengah masuk ke dalam wilayah Asia, namun Mesir tidak dianggap sebagai Asia (Bento, 2017).

Konsep sebuah benua seharusnya merupakan sebuah wilayah utuh yang dipisahkan oleh sebuah perairan yang luas. Namun konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara merata karena penentuan sebuah batas-batas wilayah benua juga bergantung pada faktor-faktor lain seperti sejarah, geopolitik dan geostrategis. Contohnya saja, benua Asia, Afrika dan Eropa yang terhubung oleh daratan, maka kemudian benua-benua tersebut disebut juga sebagai benua

Afro-Eurasia. Lalu kemudian sebuah pertanyaan muncul terkait bagaimana kemudian benua-benua tersebut membagi wilayah-wilayahnya. Jawabannya adalah terusan Suez. Namun, akibat dari kurangnya pembagian yang jelas, tidak jarang terjadi perebutan wilayah atau konflik di antara negara-negara di benua tersebut. Kompleksnya fenomena pembagian wilayah di kawasan Timur Tengah menjadikan wilayah ini sarat akan konflik dan sulitnya penyelesaian konflik perbatasan. Tidak hanya konflik-konflik perbatasan yang terjadi antara negara dengan negara, namun konflik internal antara pemerintah dan sebuah kelompok yang menuntut untuk melakukan pemisahan wilayah ataupun hanya sekedar ingin menguasai sebuah wilayah tertentu tentunya juga masuk ke dalam masalah yang harus dihadapi ketika sebuah perbatasan dibuktikan pada suatu wilayah. Penentuan batas-batas wilayah perlu memperhatikan banyak faktor agar semua pihak terlibat dapat menghindari konflik (Bento, 2017).

14.2. Pudarnya Batas sebuah Perbatasan

Asia Selatan merupakan sebuah wilayah pasca-kolonial yang memiliki banyak hal untuk dipelajari, terutama terkait ilmu geopolitik, seperti perbatasan, aturan-aturan yang mengikat, hingga ketertiban setiap negara yang berada di wilayah tersebut. Luasnya wilayah ini, membuat masih sangat sulit untuk memetakan perbatasan setiap negara yang dapat diterima bersama dan tidak merugikan pihak lain. Sehingga perbatasan yang ada pada wilayah ini masih terus mengalami perubahan. Contohnya saja, masih sulit untuk memberikan batasan yang jelas pada negara-negara di Asia Selatan. Hal tersebut dikarenakan masih sulit menemukan titik tengah antara sejarah etnis di dalamnya dan sejarah terbentuknya perbatasan tersebut. Apalagi cukup banyak negara di wilayah Asia Selatan ini yang merupakan negara bekas jajahan Inggris sehingga banyak dari batas wilayah merupakan hasil perumusan dari kolonial Inggris. Hal tersebut tentunya dapat merugikan pihak lain yang merasa memiliki hak atas suatu wilayah.

Secara paradoks, Asia Selatan merupakan wilayah yang masyarakatnya memiliki status sosial yang sangat beragam. Status sosial tersebut tidak lain disebabkan oleh perbedaan peluang dan kapasitas yang dimiliki setiap orang berbeda-beda di setiap negara. Wilayah ini merupakan tempat berkumpulnya beragam budaya, etnis, dan berbagai hal lainnya. Luasnya wilayah yang dimiliki Asia Selatan ini yang menyebabkan keberagaman tersebut. Tidak jarang hubungan antar negara-negara di dalamnya tidak terjalin dengan baik, contohnya saja antara India dan Pakistan. Asia Selatan merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk tercepat di dunia. Sifat perbatasan antar negara yang dimiliki di wilayah ini sangat beragam

yang sangat memungkinkan terjadi konflik perbatasan, baik antar negara atau bahkan antar etnis dalam negara tersebut (Tripathi & Chaturvedi, 2019).

Sektor keamanan menjadi salah satu sektor yang harus menjadi perhatian bagi negara-negara di kawasan ini. Meskipun demikian, mereka mampu membentuk hubungan ekonomi dan arus perdagangan antar negara. Namun, sistem politik yang dimiliki oleh setiap negara juga dapat menjadi hambatan tersendiri dalam hubungan ekonomi tersebut. Penanda utama yang dapat dijadikan landasan perbatasan antar negara-negara tersebut yaitu politik dan bisnis (aktifitas ekonomi). Perbedaan mendasar pada sosial-budaya semakin menyulitkan terwujudnya prospek yang dapat mengatasi perpecahan politik (Tripathi & Chaturvedi, 2019). Di Asia Selatan, perbatasan merupakan faktor yang sangat penting bagi pemisahan kekuasaan. Dengan adanya perbatasan yang lebih jelas dan menguntungkan bagi semua pihak, diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat yang tinggal di Asia Selatan. Terutama taraf hidup dan status sosial yang lebih baik.

Perbatasan yang ada seharusnya digunakan sebagai kekuatan sebuah negara untuk memperjelas kedaulatannya, bukan untuk membatasi hubungan antar negara. Walaupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi di wilayah tersebut, tetapi integrasi tetap merupakan hal yang diinginkan oleh semua negara. Hingga sekarang, terjadi penurunan angka kemiskinan di Asia Selatan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di wilayah Sub-Sahara Afrika. Meskipun demikian, ada lebih dari 130 juta penduduk Asia Selatan bermukim di pemukiman kurang layak. Asia Selatan juga merupakan wilayah yang sangat terdampak bencana alam di dunia, seperti pemanasan global dan bencana alam lainnya yang disebabkan oleh perubahan iklim (Tripathi & Chaturvedi, 2019). Semakin jelas perbatasan yang dimiliki oleh wilayah ini, akan semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian kawasan. Perbatasan yang semakin jelas akan mengurangi terjadinya konflik, memperjelas kekuatan negara, memperkuat kedaulatan negara, dan akan semakin mempermudah negara tersebut untuk mengatur dan mengontrol segala bentuk aktifitas terutama aktifitas ekonomi di dalam negaranya.

14.3. Penerapan Konsep Perbatasan

Ada tiga dimensi utama dalam konsep perbatasan (Meena, 2019). Dimensi perbatasan yang pertama yaitu penghubung berbagai aktifitas atau mobilitas. Contohnya penghubung transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, serta berbagai penghubung mobilitas lainnya yang menjadi media interaksi antar wilayah di seluruh dunia. Dimensi kedua

yaitu tentang bagaimana perbatasan tidak selalu identik atau sebagai penyebab masalah bagi negara. Oleh karena itu, isu perbatasan tidak hanya harus menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah saja, tetapi juga aktor non negara lain seperti warga negara, pengusaha, LSM, dan berbagai aktor lainnya (Meena, 2019).

Dimensi kedua inilah yang menjadi fokus dalam sub bab ini. Dalam penyelesaian isu perbatasan, hal yang menjadi kunci utama yaitu kejelasan dari konsep perbatasan itu sendiri mengingat bahwa konsep perbatasan masih sangatlah luas karena mencakup tidak hanya batas wilayah, tetapi juga perbatasan yang memisahkan berbagai status sosial, hak-hak individu, etnis, ras, agama, dan lain sebagainya, baik secara kolektif maupun individual. Aspek-aspek tersebut merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena narasi yang ditemukan pada wilayah tersebut berkaitan langsung dengan perbatasan. Lebih jelasnya, pekerjaan-pekerjaan seperti nelayan yang biasanya melaut dan tanpa sadar telah melewati batas negaranya dapat menjadi sumber masalah antar kedua negara tersebut (Meena, 2019). Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada masyarakat yang bekerja atau bermukim di wilayah-wilayah perbatasan untuk tidak melakukan pekerjaan atau aktifitas yang melewati batas negara. Dimensi terakhir atau dimensi ketiga yaitu aktor non negara yang berada di dekat perbatasan juga dapat menjadi aktor diplomasi antar negara. Mereka dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi negara (Meena, 2019).

Selain tiga dimensi di atas, subbab ini juga membahas mengenai tiga cara dalam mengkaji studi perbatasan (Meena, 2019). Cara pertama, menurut Balibar, ia menyarankan bahwa “perbatasan dapat ditemukan dalam berbagai aspek, baik aspek negara maupun masyarakat dimana kontrol selektif dapat ditemukan. Cara ini yang harus menjadi fokus utama dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan dan terorisme. Ancaman yang dirasakan oleh India tersebut tidak lain merupakan hasil dari aktifitas negara musuhnya yaitu Pakistan dan merupakan hasil dari aktifitas warga yang berada di zona perbatasan dalam melakukan berbagai aktifitas sehari-hari. Aktifitas-aktifitas tersebut tidak jarang menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat di negara tetangga (Meena, 2019).

Kedua, Rumford berpendapat bahwa perbatasan tidak selalu hanya berkaitan dengan negara. Guna mendukung aksi penerapan konsep perbatasan nyata bagi para pekerja di zona perbatasan nasional, aktor-aktor tersebut diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan perbatasan lokal untuk meningkatkan status atau hanya sekedar mengatur mobilitas. Komunitas yang keamanannya terjamin, dapat menjaga zona perbatasan melalui CCTV

(Meena, 2019). Dengan kata lain, praktik-praktik penjagaan zona perbatasan tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah tetapi juga dapat menjadi tanggungjawab bersama masyarakat yang bermukim di zona perbatasan.

Fokus ketiga dalam perpektif ini yaitu melihat perbatasan tidak hanya selalu bermakna mereka yang terpinggirkan atau yang tertindas. Pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan ini cenderung merupakan proyek yang dimiliki atau dilakukan oleh para pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. Fenomena ini memiliki makna yang sama dengan karya klasik Sahlins terkait perbatasan antara Perancis dan Spanyol di Pyreness terkait dualitas identitas nasional yang sangat terlihat jelas perbedaan antara masyarakat yang tinggal di kondisi perkotaan dan masyarakat yang tinggal pada kondisi yang terpinggirkan (Meena, 2019).

14.4. Isyu Migran di Daerah Perbatasan

Salah satu yang menjadi isyu dalam perbatasan adalah fenomena masuknya migran dari berbagai negara di belahan dunia, baik ke dalam dan ke luar negeri asalnya, telah meningkat cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari laporan PBB pada tahun 2017 terkait migrasi internasional, tercatat 106 juta dari total 258 juta migran internasional merupakan mereka yang berasal dari Asia. Asia Selatan merupakan rumah bagi sebagian besar hingga seperempat populasi dunia. Perdebatan sering sekali terjadi terkait masalah migrasi dan keamanan yang saling tumpang tindih dalam berbagai kasus, terutama ketika migrasi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional dan keamanan negara. Migrasi lintas-perbatasan merupakan salah satu contoh kasus dan menjadi tantangan utama bagi banyak negara. Contohnya saja gerakan migrasi massal komunitas Muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. Menurut Organisasi Internasional untuk Migran atau IOM, 48% dari total migran internasional yang ada merupakan perempuan (Awasthi, 2019).

14.5.

Kesimpulan

Migrasi dan keamanan adalah dua hal yang saling berkaitan pada saat berbicara mengenai perbatasan. Dengan adanya migrasi maka akan terjadi akulturasi budaya dari daerah asal dengan budaya di daerah tujuan. Migrasi juga dapat memberikan dampak pada sektor keamanan, ekonomi dan sosial negara tujuan. Keprihatinan terhadap *human security* akan menjadi dampak dari isyu perbatasan itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya kerangka hukum dan kebijakan dari pemerintah dalam memberikan perhatian pada isyu perbatasan sangat diperlukan

BAB 15

PERBATASAN BELGIA-BELANDA

15.1. Perbatasan yang Damai

Setiap negara pastinya memiliki perbatasan di setiap wilayahnya, hal inilah yang membedakan adanya karakteristik setiap wilayah. Sama halnya dengan perbatasan di Belgia dan Belanda. Kedua negara ini memiliki hubungan antar negara berdasarkan dari sejarah, budaya, lembaga dan bahasa. Belgia dan Belanda ini mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1839 yang dimana kerajaan kedua negara tersebut bersatu. Belanda dan Belgia itu sama-sama memiliki kesamaan dalam hal budaya. Belgia mengenal bahasa Belanda dengan nama Flemish yang dimana bahasa itu menjadi bahasa yang sering dipakai oleh negara Belgia dan Belanda itu.



Gambar 15.1. Letak Perbatasan Belgia-Belanda
Sumber: (GreatBigStory, 2018)

Belanda dan Belgia memiliki hubungan kebudayaan yang sangat kuat dikarenakan pembagian sejarah dan bahasa dari kedua negara tersebut, di tahun 1980, kedua negara itu membuat Uni Bahasa Belanda untuk menjalin kerjasama yang lebih lebar lagi dalam bidang sastra dan bahasa Belanda. Uni tersebut menyediakan layanan-layanan dan alat-alat yang berguna seperti kamus dan layanan penasihat bahasa, pendidikan di sekitaran Belanda, membantu proses membaca masyarakat dan yang terakhir yaitu membuat kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan bahasa Belanda di Eropa dan seluruh dunia. Uni Bahasa Belanda juga mempunyai tujuan untuk menampilkan masing-masing warisan kebudayaan dari kedua Negara tersebut (GreatBigStory, 2018).



Gambar 15.2. Letak Perbatasan Belgia-Belanda
Sumber: (GreatBigStory, 2018)

Mengenai perbatasan kedua negara, perbatasan tersebut memisahkan Belanda dan Belgia sepanjang 450 km (280 mil). Kedua negara ini merupakan bagian dari wilayah Schengen yang artinya tidak ada kontrol mengenai perbatasan permanen di area perbatasan ini. Di Belgia sendiri, perbatasannya dibagi menjadi empat provinsi Flemish yaitu dari barat ke timur: Flanders Barat, Flanders Timur, Antwerpen, dan Limburg (Belgia). Sebagian kecil dibagikan oleh provinsi Walloon Liège, yang juga mencakup Canton Timur berbahasa Jerman. Di sisi Belanda, perbatasan dibagi oleh tiga provinsi: Zeeland, Brabant Utara dan Limburg (GreatBigStory, 2018).



Gambar 15.3. *Postal Service* Dua Negara yang Saling Berdekatan
Sumber: (GreatBigStory, 2018)

Belgia dan Belanda ini termasuk dalam anggota Uni Eropa dan NATO, mereka bersama dengan Luxemburg sama-sama membentuk negara-negara dengan dataran rendah UNI ekonomi Benelux. Belgia memiliki suatu kedutaan besar yang berlokasi di Den Haag dan memiliki konsulat di beberapa negara bagian seperti Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen, Amsterdam, Maastricht, dan Winsum. Sedangkan untuk Belanda, ia memiliki kedutaan besar yang berlokasi di Brussels dan konsulatnya berada di Namur, Liege, Ghent, dan Antwerp.



Gambar 15.4. Ruang Meeting dengan Sebuah *Borderline* Didalamnya
Sumber: (GreatBigStory, 2018)

Belanda dan Belgia melakukan perjanjian pertukaran wilayah perbatasan negaranya. Perjanjian ini menjadi hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh kedua negara tersebut untuk terus menciptakan perdamaian. Belanda dan Belgia telah menyederhanakan permasalahan pelik terkait wilayah perbatasan. Keduanya sepakat bahwa sungai Meuse yang membelah kedua negara tersebut ditukar untuk meningkatkan akses kepolisian.



Gambar 15.5. Letak Perbatasan Belgia-Belanda di Sebuah Supermaret
Sumber: (GreatBigStory, 2018)

Baarle-Nassau merupakan nama kota yang berada di Belanda dan Baarle-Hertog adalah nama kota dari Belgia. Di tempat Belanda terdapat 30 pemukiman kecil yang memasuki wilayah Belgia, dan juga ada 22 bagian dari Belgia yang terkumpul di Belanda dan 10 wilayah Belanda di Belgia. Di Belgia, terdapat sekitar 100 ribu penduduk di kota Baarle. Para penduduk di sana sudah terbiasa dengan benda-benda dan layanan yang sudah mencakup dari kedua negara sekaligus, mereka sama-sama saling menggunakan benda atau layanan dari kedua negara itu. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya keunikan terjadi di perbatasan kedua negara ini, karena melihat dari peta yang ada saja pasti akan menimbulkan pertanyaan karena rumitnya perbatasan ini (GreatBigStory, 2018).

Dapat dikatakan bahwa perbatasan itu sangatlah rumit yang memisahkan wilayah kedua negara ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa perbatasan ini memiliki banyak keunikan, karena banyaknya bangunan dan jalan di kota Baarle yang secara bersamaan terletak di dalam Belgia dan Belanda. Perbatasan ini bukanlah seperti perbatasan pada umumnya yang hanya terdapat di satu titik saja, di perbatasan Belgia - Belanda ini sangatlah berliku-liku yang melintasi kota. Kita dapat melihat perbedaan antara kedua negara tersebut berdasarkan dari adanya tanda palang putih di aspal dengan inisial NL untuk Netherlands dan insial B untuk Belgia. Untuk di bagian rumah itu sendiri yang terkena bagian dari perbatasan kedua negara tersebut dapat ditandai dengan adanya bendera di depan rumah mereka masing-masing.



Gambar 15.6. Letak Perbatasan Belgia-Belanda di Sebuah Galeri
Sumber: (GreatBigStory, 2018)

Karena keunikannya itulah, banyak wisatawan yang penasaran dan berkunjung di Baarle-Hertog dan Baarle-Nassau. Mereka bisa dengan mudahnya, berfoto menginjakkan kaki di dua negara sekaligus, kaki kanan ada di wilayah negara Belanda, sementara kaki kiri bisa

berada di wilayah Belgia. Perbatasan ini dapat ditemukan di mana saja seperti di rumah dan di supermarket.

Palang putih tersebut terletak dimana-mana dalam kota ini karena perbatasan merekapun letaknya ada dimana-mana. Bahkan palang putih tersebut juga berlaku bagi seseorang yang memiliki kafe atau tempat makan yang tempatnya pas berada di perbatasan. Di Belgia, batas umur untuk meminum alkohol adalah 16 tahun sedangkan di Belanda batas umur meminum alkohol adalah 18 tahun jadi banyak orang yang membuat lelucon jika kamu tinggal di Belanda dan ingin meminum alkohol tapi umurmu belum sampai 18 tahun maka pergilah ke Belgia untuk meminum alkohol karena di Belgia menerapkan kebijakan umur legal untuk meminum alkohol lebih muda dibandingkan dengan Belanda (GreatBigStory, 2018). Hal-hal inilah yang membuat perbatasan ini sangatlah unik dibandingkan dengan perbatasan lainnya.



Gambar 15.7. Palang Putih sebagai *International Border*
Sumber: (GreatBigStory, 2018)

Cara membedakan yang mana orang Belanda dan yang mana orang Belgia adalah dengan cara mendengar aksen atau dialeg dalam bahasa sehari-hari. Untuk orang Belgia itu sendiri mereka berbicara lebih ber-dialek, sedangkan untuk orang Belanda kita dapat mengetahui dari cara mereka bertutur kata yang lebih jelas. Untuk masalah paspor atau kependudukan, mereka mempunyai sekaligus dua kewarganegaraan dan paspor. Akan tetapi dibalik keunikan-keunikan yang terjadi di perbatasan ini terdapat pula beberapa permasalahan yang kadang terjadi seperti, permasalahan kepemilikan tanah biasanya menjadi konflik terbesar di banyak negara. Bahkan permasalahan tersebut dapat mengakar hingga bertahun-tahun lamanya dan dapat memicu permusuhan abadi. Namun hal tersebut nampaknya tidak berlaku bagi kedua negara ini. Mereka berhasil mengalahkan tren tersebut dengan melakukan

pertukaran tanah perbatasan dengan penuh perdamaian. Selain itu juga masalah yang sering muncul mengenai infrastruktur, bagi Leo van Tilburg selaku pimpinan kotamadya Belgia mengatakan bahwa izin untuk mendirikan bangunan kadang agak rumit, karena titik lokasinya Belgia harus meminta izin kepada Belanda untuk membangun kantor (GreatBigStory, 2018).

Permasalahan kedua kawasan tersebut membutuhkan negosiasi antar negara. Jika ada permasalahan yang timbul di kawasan tersebut maka permasalahan tersebut harus didiskusikan dan dicari solusi. Mengenai peraturan perundang-undangannya di Belgia itu sendiri lebih longgar dari Belanda. Di kedua perbatasan negara ini penjagaannya tidaklah ketat. Masyarakat Baarle, baik itu Hertog maupun Nassau hidup rukun tanpa pernah saling bertengkar, meski berbeda kewarganegaraan. Pimpinan kantor pariwisata, Williem van Gool berharap jika perbatasan kedua negara ini dapat menjadi panutan bagi wilayah negara lain yang memiliki isu permasalahan yang rumit, Gool mengatakan bahwa mereka belajar untuk berbagi kepada yang lainnya, mereka juga belajar untuk tinggal bersama yang lainnya. Ia berharap ketentraman dan perdamaian yang ada di perbatasannya dapat menjadi contoh bagi negara-negara yang memiliki isu mengenai perbatasan (GreatBigStory, 2018).

15.2. Peran Polisi di Daerah Perbatasan

Globalisasi menyebabkan batas-batas negara semakin memudar baik itu dibidang politik, ekonomi, dan juga isu kejahatan seperti *cybercrime*. Dengan adanya batas negara, tidak akan menghentikan orang-orang jahat untuk melakukan kejahatan. Sejak Perjanjian Schengen mulai berlaku pada tahun 1985, pergerakan bebas orang dan barang antara negara-negara ini telah dimungkinkan, seperti halnya antara 24 negara Schengen lainnya di Uni Eropa (UE). Perbatasan nasional antara kedua Benelux ini sepanjang 450 km, dan masalah keamanan di kedua sisi perbatasan adalah kompleks. Insiden terjadi setiap hari di mana polisi Belgia atau Belanda harus bertindak melintasi perbatasan dalam konteks menjaga ketertiban umum, kontrol atau dalam konteks investigasi kriminal. Petugas kepolisian secara rutin dihadapkan dengan sejumlah masalah praktis dan hukum. Meskipun banyak hal sudah dimungkinkan atas dasar Perjanjian Schengen tahun 2004 dan Konvensi tahun berikutnya yang mulai berlaku setahun kemudian, ada kekurangan otorisasi yang lebih luas, terutama di bidang investigasi kriminal lintas batas. Ini berarti bahwa polisi biasanya harus memilih pada opsi kerjasama yang ada dalam konteks bantuan formal (Nimwegen, 2017).

Konsekuensi dari Perjanjian Schengen 1985 menjelaskan bahwa perlunya kekuatan lintas batas. Perjanjian Polisi Benelux yang ditandatangani pada tahun 2004, kemudian menetapkan bahwa petugas kepolisian dari Belanda, Belgia dan Luksemburg dapat melintasi

perbatasan satu sama lain dalam kasus-kasus yang melibatkan pemeliharaan ketertiban umum, seperti dalam kasus peristiwa berskala besar, bencana dan kecelakaan serius. Patroli dan pemeriksaan bersama juga dapat memungkinkan, seperti halnya bertindak dalam situasi yang mendesak, pengejaran atau observasi lintas batas terbatas. Namun, fokus dalam perjanjian ini dan perjanjian lain adalah pada penyediaan dan pertukaran informasi dan pada tindakan dalam konteks pemantauan dan penegakan hukum. Ini berarti bahwa para detektif Belgia dan Belanda masih harus mengambil jalur formal dan birokrasi dari bantuan polisi untuk tindakan investigasi lintas-batas (Nimwegen, 2017).

Perubahan untuk mewujudkan penyediaan kekuatan lintas batas secara logis membutuhkan perubahan pada kerangka hukum yang ada. Belgia sendiri siap untuk mengambil langkah-langkah yang jauh dalam konteks ini, baik di tingkat politik maupun administrasi. Akan tetapi, Belanda dalam hal ini masih mengalami kesulitan karena Belanda memang ingin bergerak maju tetapi mengalami lebih banyak kesulitan dengan menyerahkan sebagian wilayah kedaulatannya (Nimwegen, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kerja sama polisi adalah perbedaan budaya antara Belanda dan Belgia. Telah dicatat sebelumnya bahwa kedekatan budaya antara negara-negara ini dapat mengarah pada 'koalisi kriminal'. Menurut Hofstede, Perbedaan budaya antara Belanda dan Belgia diekspresikan terutama dalam jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian. Diharapkan bahwa dimasa sekarang dan di masa depan, organisasi kepolisian lebih berfungsi untuk menangani kejahatan lintas batas. Polisi Belanda itu sendiri sudah melakukan re-organisasi besar-besaran untuk menghasilkan peningkatan ketahanan terhadap kejahatan. Untuk memungkinkan kepolisian nasional sebagai organisasi baru untuk menangani kejahatan lintas batas secara efektif dan efisien diperlukan undang-undang dan peraturan yang tepat. Hal itu diperlukan untuk menjaga agar masyarakat di area perbatasan lebih aman lagi, terbebas dari kejahatan dan tetap merasa aman untuk kedepannya (Nimwegen, 2017).

15.3. Pengembangan Pariwisata Lintas Batas

Kota Baarle-Hertog dan Baarle-Nassau, terletak di bagian selatan Belanda, dekat perbatasan Belgia dan seluruhnya di kelilingi oleh wilayah Belanda, terdiri dari dua unit administrasi yang terpisah, salah satunya komunitas Belanda Baarle-Nassau, dan yang lain komunitas Belgia Baarle-Hertog. Sejarah telah meninggalkan sebuah wilayah yang terdiri dari dua kota dengan bentuk yang unik, sebagian milik Belanda dan sebagian lagi Belgia. Perbatasan Belgia-Belanda didirikan oleh Perjanjian Maastricht tahun 1843, sebagian besar

menegaskan batas-batas fungsional yang sudah berusia beberapa abad. Di daerah sekitar Baarle, labirin potongan puzzle internasional terbukti mustahil untuk mencapai kesepakatan yang pasti. Sebaliknya, kedua pemerintah memilih untuk mengalokasikan kebangsaan secara terpisah untuk masing-masing dari 5.732 bidang properti. Hal yang mempersulit perbatasan ini adalah karena adanya bagian Baarle-Nassau yang terletak di Belgia, dan juga ada bagian Belgia masuk di dalam bagian Belanda. Banyak upaya telah dilakukan selama berabad-abad untuk memperbaiki labirin ini, tetapi semua telah gagal, meninggalkan entitas nasional Baarle-Hertog dan Baarle-Nassau dengan sejumlah cerita rakyat yang unik dan kisah-kisah terkait kedaulatan yang menarik (Gelbman & Timothy, 2011).

Perbatasannya ini sangatlah rumit sehingga ada beberapa rumah dibagi antara kedua negara, dan sebagian orang ditempatkan 'di luar negeri' dari rumah mereka sendiri. Saat ini kota ini masih terkenal karena perbatasannya yang rumit. Para penghuni, masyarakat dan penduduk setempat merasa cukup nyaman dengan situasi ini meskipun ini menimbulkan banyak komplikasi dan masalah sulit yang membingungkan bahkan para ahli hukum yang paling berwawasan sekalipun. Baarle-Hertog adalah desa Belgia dengan 2.236 penduduk. Baarle-Nassau, desa Belanda, kira-kira sepuluh kali lebih besar dari Baarle-Hertog secara spasial dan memiliki 6.500 penduduk (Gelbman & Timothy, 2011).

Dalam situasi geopolitiknya, Baarle telah meningkatkan pariwisata kota. Kota ini terkenal dengan pasar dan bangunan bersejarahnya, beberapa di antaranya unik karena perbatasan internasional melintasinya. Masyarakat memiliki kantor informasi wisata bersama, banyak toko, restoran, dan beberapa hotel, dan banyak penduduk lokal dipekerjakan di sektor jasa. Masyarakat yang terletak di daerah perbatasan belajar untuk hidup dengan realitas sehari-hari yang berbeda di tengah, antara dua masyarakat dan budaya, dengan ruang interstitial antara sistem ekonomi dan dalam bayang-bayang hubungan politik internasional. Realitas ini kompleks tetapi juga mengandung potensi pengembangan ekonomi di banyak daerah, terutama pariwisata. Melihat latar belakang mereka yang unik menjadikan tempat ini sebagai salah satu daya tarik penting bagi wisatawan dari luar negeri (Gelbman & Timothy, 2011).

Perbatasan Belandan-Belgia adalah salah satu fenomena paling luar biasa di dekat perbatasan dan di banyak tempat di dunia mereka telah berkembang menjadi tujuan wisata. Salah satu contoh paling menakjubkan dan luar biasa dari sistem kompleks daerah ini adalah desa internasional Baarle-Hertog dan Baarle-Nassau. Perbedaan perbatasan dari kota ini menggambarkan bahwa masalah aksesibilitas, perbedaan, dan kesamaan dapat menjadi kartu

yang penting bagi wisatawan dan untuk pengembangan pariwisata yang menguntungkan kedua komunitas dan bangsa.

Situasi geopolitik yang kadang-kadang aneh dan agak dikotomis yang mengembangkan ikatan kolaboratif dan damai antara dua komunitas yang berbeda dari dua negara yang berbeda yang tinggal di satu ruang bersama, mewujudkan teka-teki yang tak terjawabkan dan menawarkan potensi untuk pertumbuhan pariwisata. Potensi ini dapat dan harus diwujudkan melalui pengembangan pariwisata lintas batas, yang dilakukan bersama oleh kedua Baar-les. Dua dewan kota Baarles memecahkan sebagian besar masalah mereka terkait masalah kota, sosial dan ekonomi dengan bekerja bersama. Orang-orang Baarle ingin melihat diri mereka sebagai contoh campuran warga negara Belgia dan Belanda tanpa kehilangan identitas mereka sendiri yang hidup bersama di lingkungan internasional, contoh yang baik untuk Eropa yang bersatu. Hal ini patut dijadikan sebagai contoh bagi negara lain untuk membahas mengenai permasalahan perbatasannya karena di Baarle ini, mereka melakukan semua hal dan mengambil keputusan secara bersama-sama agar terhindar dari konflik.

15.4. Kesimpulan

Teori globalisasi merupakan teori yang membahas mengenai proses yang telah dipercepat dengan upaya adanya intervensi dari dunia barat untuk memperluas ekonomi kapitalisnya dan juga budaya kapitalis (Pannilage, 2017). Belanda-Belgia telah meningkatkan sektor pariwisatanya disebabkan banyaknya minat turis mancanegara tertarik untuk mengunjungi perbatasan karena keunikan yang telah dimiliki oleh perbatasan kedua negara. Ini membuktikan, globalisasi saat ini telah menyebarluas dan mempengaruhi setiap orang melalui media online.

Kata globalisasi sering digunakan sebagai istilah ekonomi yang menunjukkan bentuk percepatan interkoneksi global maupun internasional yang mana hal tersebut dapat membuka pasar keuangan dan perusahaan global menjadi lebih besar lagi. Para ahli menyebut bahwa globalisasi ini merupakan suatu kapitalisme pasar bebas yang dapat memberikan anda kekuatan dengan pasar yang berkuasa dan membuat seseorang untuk terus melakukan perdagangan bebas (Pannilage, 2017). Sama halnya dengan perbatasan di Belgia dan Belanda yang sama-sama melakukan kerjasama untuk meningkatkan tingkat dan jumlah pariwisata di negaranya. Banyak turis asing yang merasa bahwa perbatasan ini sangatlah unik dikarenakan maraknya informasi yang beredar di sosial media yang menyatakan dan menunjukkan bahwa perbatasan tersebut memang pantas untuk dikunjungi.

Belanda dan Belgia melihat dengan adanya globalisasi ini sebagai suatu upaya untuk dapat meningkatkan ekonomi melalui sektor pariwisata. Mereka memanfaatkan segala cara yang ada untuk terus mempromosikan bahwa negaranya merupakan tempat yang sangat bagus dikunjungi. Dalam teorinya sendiri berisi bahwa globalisasi itu mengklaim bahwa lembaga multilateral yang paling kuat dalam hal sumber daya dikendalikan oleh negara-negara donor atau negara-negara yang besar (Pannilage, 2017).

Dalam hubungan bilateral kedua negara ini yaitu Belanda dan Belgia, mereka merupakan salah satu contoh yang baik dalam menjalankan hubungan bilateralnya karena diketahui mereka melakukan kerjasama dan sama-sama mencari solusi jika ada masalah yang terjadi di negaranya. Hal inilah yang membuat kedua negara tersebut hingga saat ini dapat menjadi contoh yang baik bagi negara yang berkonflik mengenai perbatasan di negaranya. Karena Belanda dan Belgia ini telah sepakat untuk sama-sama membahas jika ada suatu masalah yang terjadi, baik dari Belgia maupun Belanda hal ini merupakan hal yang sangat bagus untuk dapat membuat kedua negara ini lebih maju lagi.

BAB 16

PERBATASAN SPANYOL DENGAN MAROKO, GIBRALTAR DAN PRANCIS

16.1. Perbatasan Spanyol-Maroko

16.1.1. Keunikan



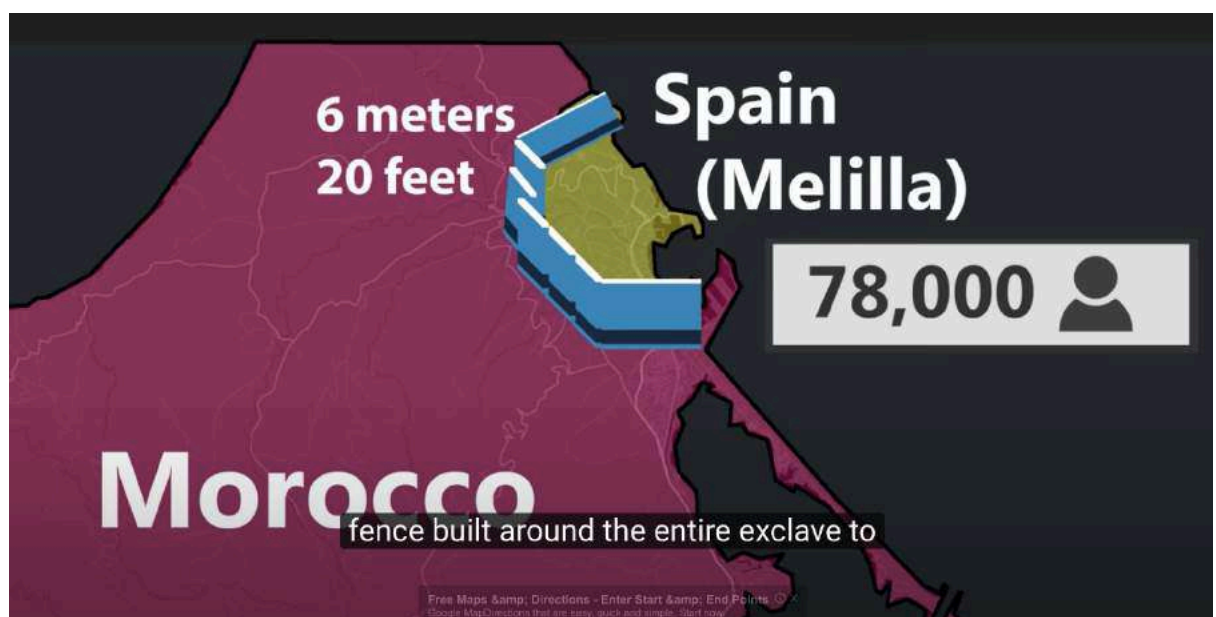
Gambar 16.1. Perbatasan Maroko dan Spanyol yang Dibatasi Tembok
Sumber: (RealLife, 2017)

Bab ini membahas perbatasan Spanyol dengan tiga negara tetangganya. Pada sub pertama ini akan dibahas perbatasan Spanyol-Maroko. Perbatasan antara Spanyol dan Maroko ditandai dengan keberadaan enclave negara Spanyol atau yang sering dikenal dengan sebutan wilayah kantong yang terletak di dekat wilayah Maroko. Dua wilayah kantong milik Spanyol atau enclave Spanyol yaitu Ceuta dan Melilla yaitu dua buah kota kecil yang terletak di kawasan pantai utara Afrika. Luas Ceuta sendiri hanya 18 km persegi, sementara wilayah Melilla jauh lebih kecil yaitu hanya 12,3 km persegi (RealLife, 2017).



Gambar 16.2. Enclave Negara Spanyol
Sumber: (RealLife, 2017)

Wilayah enclave milik Spanyol dianggap sebagai satu-satunya perbatasan darat antara benua Afrika dan Eropa yang mana wilayah Maroko terletak di benua Afrika sedangkan Melilla yang merupakan wilayah enclave Spanyol merupakan bagian dari benua Eropa. Sebagai bagian dari wilayah enclave Spanyol, wilayah Melilla, ketika berada di wilayah ini, seseorang akan merasa seperti sedang di negara Spanyol baik itu dari segi makanan, bahasa, arsitektur, dan mata uang yang sama dengan Spanyol. Namun di wilayah Melilla ini terdapat pagar yang dibangun sebagai batas negara antara Spanyol dan Maroko, pagar perbatasan di Melilla ini berupa dua pagar setinggi enam meter yang dilengkapi dengan menara pengintai dengan tujuan untuk melindungi wilayah tersebut (RealLife, 2017).



Gambar 16.3. Pagar Perbatasan Di Melilla Berupa Dua Pagar Setinggi Enam Meter
Sumber: (RealLife, 2017)

Perbatasan antara negara Spanyol dan Maroko yang ditandai dengan keberadaan wilayah enclave Spanyol yang berbatasan langsung dengan Maroko ini tidak dapat dipisahkan dari faktor historis antara kedua negara. Wilayah Ceuta dan Melilla merupakan wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1415 untuk wilayah Ceuta disusul oleh wilayah Melilla pada tahun 1497. Penaklukan kedua wilayah tersebut yaitu Ceuta dan Melilla diresmikan melalui perjanjian Cintra. Kemudian selama periode uni Iberia (tahun 1580-1640) wilayah Ceuta menarik banyak pemukim Spanyol, hal ini kemudian mengakibatkan ketika Portugal memperoleh kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1640, Ceuta memilih untuk tetap bersama Spanyol. Kemudian disepakati wilayah Ceuta dengan Maroko melalui perjanjian yang ditandatangani pada 7 Oktober 1844 (RealLife, 2017).



Gambar 16.4. Perbatasan Maroko dan Spanyol Merupakan yang Terpendek di Dunia
Sumber: (RealLife, 2017)

Upaya Maroko untuk merebut kedua wilayah enclave Spanyol ini dilakukan secara paksa selama abad ke-18 sampai abad ke-19, namun usaha tersebut tidak memperoleh hasil apapun kecuali kegagalan yang kemudian memuncak dalam perang Hispano-Maroko pada tahun 1859-1890 yang menghasilkan kemenangan untuk pihak Spanyol. Kemudian pada tahun 1993 Spanyol mulai membangun pagar perbatasan untuk wilayah Ceuta dan pagar perbatasan untuk wilayah Melilla yang kemudian semakin diperkuat pada tahun 1995, pembangunan batas di kedua wilayah tersebut juga dipicu sebagai respon dalam menanggapi peningkatan jumlah imigran yang hendak menembus pagar perbatasan (RealLife, 2017).



Gambar 16.5. Ceuta dengan Penduduk 76.000 Orang
Sumber: (RealLife, 2017)

16.1.2. Wilayah Melilla Sumber Pertikaian

Seperti yang telah dijelaskan diatas, wilayah Melilla merupakan salah satu wilayah yang menandai perbatasan antara negara Spanyol dengan Maroko. Letaknya di pantai Afrika Utara dengan populasi sekitar 85.000 orang dan 15% diantaranya diklasifikasikan sebagai orang asing. Melilla menjadi salah satu dari lima wilayah Afrika Utara dan merupakan wilayah Spanyol. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Ceuta, Penon de Vélez de la Gomera, Penon de Alhucémas dan Kepulauan Chafarinas, atau sering disebut sebagai Plazas de Soberania (wilayah berdaulat) atau hanya Plazas (Johnson & Jones, 2018).

Sebagai wilayah enclave Spanyol yang berbatasan langsung dengan Maroko. Wilayah Melilla bisa dikatakan kurang dalam hal perekonomian. Pengangguran di wilayah Melilla ini mencapai 30% dengan jumlah PDB per kapita € 16.426 pada tahun 2013, hal ini berarti PDB wilayah Melilla 26% lebih rendah dari rata-rata PDB Spanyol. Wilayah ini dihuni oleh sebagian kecil pengusaha di sektor publik, selain itu wilayah Melilla ini juga dihuni ribuan personel militer sebagai penjaga wilayah perbatasan antara Spanyol dengan Maroko yang juga dianggap sebagai gerbang bagi para imigran yang ingin masuk ke Eropa. Selain sebagai wilayah perbatasan, wilayah Melilla juga merupakan sumber pertikaian secara territorial. Salah satunya dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah ini yaitu Maroko. Pertikaian yang melibatkan negara yang berbatasan ini dibuktikan dengan sedikitnya ada 36 konfrontasi diplomatik dan kegiatan militerisasi atas wilayah tersebut sejak tahun 1956 (Johnson & Jones, 2018).

Aspek sejarah juga sangat mempengaruhi terjadinya pertikaian territorial antara dua negara yaitu Maroko dan Spanyol. Ketika Spanyol dan Prancis mendekolonisasi Maroko pada tahun 1956. Spanyol mempertahankan kendalinya atas wilayah Melilla dan Plazas dengan menyatakan wilayah tersebut merupakan wilayah Spanyol selama berabad-abad sebelum menjajah Maroko. Namun di beberapa dekade terakhir, Maroko mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya dan pemerintah Maroko meminta agar Spanyol mengembalikan wilayah enclave tersebut meliputi Melilla sebagai bekas milik Maroko (Johnson & Jones, 2018).

Melihat posisi Melilla sebagai wilayah yang penting selain karena merupakan wilayah perbatasan tetapi juga sebagai wilayah yang diperebutkan. Negara Spanyol sebagai pemilik enclave Melilla merasa perlu membangun perbatasan yang kokoh demi menjaga keamanan negaranya, ancaman intervensi negara Maroko yang mengklaim wilayah Melilla sebagai wilayahnya juga dianggap sangat penting untuk diperhatikan sehingga keberadaan militer

negara Spanyol di wilayah Melilla dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menjaga keamanan perbatasan terutama seiring dengan ikut meningkatnya isu imigran yang ingin ke Eropa melalui jalur Melilla (Johnson & Jones, 2018).

Meskipun wilayah Melilla dan Ceuta merupakan bagian dari negara Spanyol, yang berarti bahwa wilayah ini termasuk bagian dari Uni Eropa, namun terdapat beberapa peraturan Uni Eropa yang menjadi pengecualian untuk wilayah Melilla dan Ceuta. Hal ini mencakup peniadaan pajak PPN dan kedua wilayah ini Melilla dan Ceuta merupakan wilayah yang berada di luar ruang pabean Uni Eropa. Selain itu, wilayah ini juga diberlakukan zona schengen yaitu wilayah Uni Eropa di Afrika Utara yang disepakati melalui perjanjian dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Kesepakatan tersebut berisi bahwa negara Spanyol dibebaskan dari perjalanan bebas paspor, berbeda dengan negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa yang diberi kebebasan perjalanan bebas paspor ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Sehingga, akan ada pemeriksaan paspor untuk penumpang yang ingin bepergian dari enclave Melilla ataupun Ceuta sebelum masuk ke daratan Uni Eropa (Johnson & Jones, 2018).

16.1.3. Arti Perbatasan Menyangkut Keamanan Internal Wilayah

Selama beberapa dekade terakhir, studi perbatasan mulai berkembang memasuki ranah infrastruktur perbatasan. Hal ini menunjukkan bagaimana peranan dan fungsi negara dalam membentuk infrastruktur perbatasan. Infrastruktur perbatasan sendiri diartikan sebagai agregat atau dalam hal ini menandakan batas baik yang konkret ataupun yang tidak berwujud yang berperan dalam mengatur arus baik berupa orang atau manusia maupun komoditas. Bentuknya sendiri dapat berupa material seperti pagar yang dibangun oleh negara namun bisa juga berupa rute informal yang hanya disadari dan digunakan oleh penduduk lokal di sekitar wilayah perbatasan yang bisa berupa terowongan ataupun lorong bawah tanah. Bahkan seiring perkembangan, infrastruktur perbatasan tidak hanya berupa pagar pembatas yang dibangun oleh negara melainkan berkembang dengan membangun manajemen migrasi di wilayah perbatasan seperti camp, klinik, dan penjara (Krichker & Sarma, 2019).

Perkembangan infrastruktur perbatasan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan globalisasi yang semakin menguat hingga saat ini, masalah perbatasan tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur perbatasan berupa pagar tetapi lebih luas mengarah pada berkembangnya isu keamanan dan ancaman global sehingga perbatasan bagi suatu negara kemudian memiliki arti penting dan kemudian memicu tindakan negara untuk lebih memprioritaskan dan mengawasi wilayah perbatasannya (Krichker & Sarma, 2019).

Masalah perbatasan hingga saat ini masih menjadi salah satu isu global yang masih dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia, masalah perbatasan yang masih

menjadi perbincangan hingga saat ini juga mencakup permasalahan yang lebih spesifik berupa masalah infrastruktur perbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan tema tulisan ini yang membahas mengenai perbatasan negara Spanyol, pembahasan akan merujuk pada salah satu negara yang berbatasan dengan Spanyol yaitu perbatasan antara Spanyol dan Maroko.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika Spanyol bergabung dengan Uni Eropa di tahun 1986, wilayah Melilla yang merupakan wilayah enclave Spanyol yang terletak dan berbatasan langsung dengan Maroko di pantai selatan Mediterania, masuknya Spanyol menjadi anggota Uni Eropa kemudian menyebabkan Spanyol harus menentukan perbatasan dengan Maroko dengan membangun infrastruktur perbatasan berupa dinding perbatasan, namun dibangunnya dinding perbatasan ternyata menimbulkan permasalahan baru hal ini diakibatkan oleh meningkatnya arus migran yang mulai melihat wilayah Melilla sebagai wilayah transit dalam perjalanan mereka ke Eropa. Pembangunan infrastruktur perbatasan dilakukan oleh pemerintah negara Spanyol dengan membangun pagar yang mengelilingi wilayah Melilla yang berupa pagar dengan tinggi 6 meter dan dibangun sepanjang 12 kilometer, pagar juga dilengkapi dengan CCTV, sistem radar, menara kontrol, dan dijaga oleh lembaga penegak hukum Spanyol (Krichker & Sarma, 2019).

Wilayah Melilla tidak hanya dipandang sebagai garis pemisah antara wilayah enclave Spanyol dengan Maroko, tetapi juga merupakan perbatasan antara benua Eropa dengan benua Afrika, sehingga wilayah Melilla ini dianggap memiliki peranan penting sebagai wilayah perbatasan terutama dalam hal melindungi wilayah Uni Eropa dari migran yang ingin ke Eropa melalui wilayah Melilla tersebut. Perbatasan menjadi hal yang sangat penting sebagai simbol “safe home” dalam hal ini memiliki arti perbatasan menjadi hal penting untuk diperhatikan karena menyangkut keamanan internal wilayah dan menjaga wilayah dari ancaman yang berasal dari luar sehingga dianggap penting untuk membentuk proyeksi yang kuat (Krichker & Sarma, 2019). Wilayah Melilla sering dianggap sebagai pintu masuk ke Eropa, karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Maroko di benua Afrika sehingga wilayah Melilla ini dianggap sebagai zona transit dan rute migrasi Afrika-Eropa. Sebagai wilayah perbatasan Melilla juga tidak bisa dilepaskan dari isu penyelundupan migran dengan jalan memalsukan dokumen serta menyogok penjaga wilayah perbatasan (Krichker & Sarma, 2019).

16.2. Perbatasan Spanyol-Gibraltar

Gibraltar merupakan negara kecil yang terletak di ujung selatan negara Spanyol dengan luas wilayah sebesar 6,8 km persegi. Pada tahun 1502 status Gibraltar merupakan bagian dari

wilayah negara Spanyol akan tetapi berhasil direbut oleh Inggris melalui perlawanan kekuatan antar keduanya. Kekalahan Spanyol pada saat itu membuatnya harus menyerahkan daerah kekuasaannya kepada Inggris, salah satunya adalah wilayah Gibraltar. Sejak saat itu Inggris resmi memegang kekuasaan atas Gibraltar dan diresmikan melalui perjanjian Utrecht 1713 (RealLife, 2017).



Gambar 16.6. Perbatasan Spanyol dan Gibraltar
Sumber: (RealLife, 2017)

Wilayah perbatasan antara negara Spanyol dengan Gibraltar ini juga menimbulkan konflik yang bahkan masih bertahan hingga saat ini. Spanyol seakan tidak merelakan wilayahnya direbut oleh Inggris meskipun telah berlangsung sejak lama, berkali-kali kedua negara ini melakukan referendum tetapi tidak pernah mencapai kesepakatan. Isu perebutan wilayah Gibraltar ini sampai pada puncak konflik yang memanas di tahun 2013 yang kemudian memperburuk hubungan antara negara Spanyol dengan Inggris dan terus berlanjut hingga saat ini (RealLife, 2017).

Dinamika baru kemudian terjadi ketika peristiwa Brexit diresmikan oleh Uni Eropa, hal ini juga kemudian berdampak pada perbatasan antara negara Spanyol dengan Gibraltar yang merupakan bagian dari wilayah Inggris. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Brexit menyebabkan status Gibraltar menjadi tidak jelas dalam Uni Eropa. Masalah baru kemudian dianggap akan muncul dan memperparah konflik dikarenakan selain wilayah Gibraltar dengan jumlah penduduk sebanyak 30.000 jiwa, wilayah Gibraltar juga diisi oleh orang-orang Spanyol yang bekerja di wilayah tersebut. Tercatat bahwa sebanyak 14.000 pekerja yang kebanyakan merupakan warga negara Spanyol melintasi perbatasan setiap hari dengan tujuan untuk bekerja. Kondisi Brexit kemudian akan sedikit banyaknya mempengaruhi pekerja-pekerja terutama yang merupakan warga negara Spanyol, dengan direalisasinya Brexit dari Uni Eropa, kedua negara yang berbatasan langsung ini kemudian

diharuskan untuk meregulasi kembali terutama hal-hal yang berkaitan dengan lintas batas negara (RealLife, 2017).

16.3. Perbatasan Spanyol-Prancis

Negara Prancis juga menjadi salah satu negara yang berbatasan dengan negara Spanyol. Batas antara kedua negara ini ditandai dengan keberadaan sungai yang dikenal dengan sebutan sungai Bidasoa dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah pulau yang tak berpenghuni bernama pulau Pheasant. Karena letaknya di tengah-tengah sungai, pulau yang seluas 6.820 meter persegi ini kemudian diklaim oleh kedua negara yang berbatasan yaitu Spanyol dan Prancis. Sebagai bentuk upaya untuk menghindari konflik karena kedua negara ini sama-sama mengklaim pulau tersebut sebagai wilayahnya, maka kedua negara antara Spanyol dan Prancis kemudian sepakat untuk saling bertukar kepemilikan pulau itu setiap enam bulan sekali dan cara ini telah berlangsung selama 350 tahun (RealLife, 2017).



Gambar 16.7. Perbatasan Spanyol dan Prancis
Sumber: (RealLife, 2017)

Untuk mencapai kesepakatan bertukar kepemilikan atas pulau tersebut tidak didapatkan secara serta merta melainkan melalui proses perundingan yang panjang. Hasil perundingan kemudian berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Pyrenees yaitu jembatan kayu yang dibuat khusus menuju pulau tersebut dari sisi Prancis dan Spanyol dan kemudian diputuskan bahwa pulau tersebut merupakan milik bersama. Kesepakatan atas kepemilikan bersama pulau tersebut juga semakin dipertegas melalui pernikahan antara Raja Prancis Louis XIV dengan putri Raja Spanyol Philip IV dengan salah satu detail perjanjiannya

adalah kepemilikan bersama pulau Pheasant di antara kedua negara (RealLife, 2017).



Gambar 16.8. Spanyol dan Prancis sepakat saling bertukar kepemilikan pulau setiap enam bulan

Sumber: (RealLife, 2017)

Dalam mengatur wilayah pulau tersebut masing-masing negara baik negara Spanyol maupun negara Prancis mempercayakan masing-masing petinginya untuk menjadi pemimpin di pulau tersebut sesuai pembagian periode kepemilikan yaitu enam bulan untuk negara Spanyol dan enam bulan untuk negara Prancis. Di awal-awal kesepakatan diutus masing-masing gubernur dari kedua belah pihak negara untuk memimpin atau memerintah di pulau tersebut. Saat itu komandan AL di kota San Sebastian Spanyol dan rekannya dari kota Bayonne bergantian menjadi gubernur di pulau tersebut. Dan terus berlanjut, untuk saat ini pemimpin di pulau tersebut adalah walikota Irun dari negara Spanyol dan Hendaye dari negara Prancis yang secara berkala bertukar kekuasaan untuk memimpin wilayah pulau perbatasan antara Spanyol dan Prancis ini (RealLife, 2017).



Gambar 16.9. Perbatasan Spanyol dan Prancis

Sumber: (RealLife, 2017)

16.4. Kesimpulan

Tulisan ini akan menjelaskan analisis teori realisme terutama yang terkait dengan *national security* dalam kasus perbatasan Melilla Maroko dengan negara Spanyol. Realisme sebagai salah satu teori dalam hubungan internasional melihat kehidupan internasional sebagai sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi. Untuk itu, negara akan cenderung meningkatkan kapasitasnya untuk mencegah ancaman dalam menjalani kehidupan internasional dengan berbagai negara yang merujuk pada peningkatan strategi keamanan nasional. Konsentrasi terhadap kemungkinan ancaman yang bisa terjadi kemudian menyebabkan negara menurut teori ini akan melakukan penyebaran kekuatan atau dalam hal ini kekuatan yang dimiliki berupa sumber daya apa yang dimiliki oleh negara untuk menekan kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Hal ini sejalan dengan salah satu cabang pemikiran realisme yaitu *defensive realism* yang menunjukkan bahwa tujuan utama sebuah negara adalah menjamin keamanannya (Porter, 2016).

Pentingnya keamanan nasional menurut realisme telah mendorong negara untuk melakukan mobilisasi sumber daya untuk menghasilkan kapabilitas dalam mengejar kepentingan keamanan negaranya. Selain dengan berusaha mengembangkan kekuatan-kekuatan untuk keamanan negaranya. Sebuah negara juga cenderung akan mengembangkan kemampuan memprediksi ancaman masa depan dan berusaha untuk menekan kemungkinan untuk terjadinya, biasanya dilakukan dengan menyeimbangkan kapasitas ekonomi dan kesiapan militer. Menurut teori realis ketidakpastian akan masa depan kehidupan internasional adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kehidupan yang tidak aman dan kemungkinan terjadinya perang akan terus muncul karena kondisi dunia yang anarkis (Porter, 2016).

Porter dalam artikelnya menjelaskan mengenai korelasi *realism and nonlinearity*. Nonlinearity yang dimaksud dalam teori ini adalah kondisi yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk diselesaikan, jika dalam konteks keamanan nasional suatu negara menurut realisme hal ini merujuk pada berkembangnya konsep keamanan yang tidak hanya berupa ancaman perang melainkan telah berkembang semakin kompleks seiring dengan fenomena globalisasi yang mencakup isu-isu perbatasan, terorisme, imigran, dan lain-lain. Kondisi tersebut tidaklah dapat dihindari sehingga menurut teori realis negara harus mempersiapkan negaranya dengan memperkuat keamanan nasional (Porter, 2016).

Fenomena Melilla sebagai perbatasan antara Spanyol dan Maroko sekaligus perbatasan antara benua Eropa dan Afrika merupakan bentuk konkrit dari konsep *nonlinearity* yang dijelaskan oleh teori realisme. Bahwa isu perbatasan merupakan ancaman keamanan yang

kompleks selain ancaman perang. Isu perbatasan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat mengancam keamanan nasional suatu negara. Menurut realisme cara agar ancaman tersebut bisa dikendalikan adalah dengan memperkuat keamanan nasional itu sendiri. Dalam kasus Melilla isu yang dihadapi adalah kedatangan para imigran yang hendak ke benua Eropa dengan melakukan transit di Melilla, kedatangan para migran dari Afrika yang hendak menuju Eropa ini tentu mengancam keamanan nasional Spanyol sebagai negara terbelah keamanan Eropa. Untuk itu salah satu bentuk upaya peningkatan keamanan nasional sesuai dengan teori realisme yang dilakukan negara Spanyol adalah dengan membangun pagar di perbatasan Melilla dengan Spanyol yaitu berupa pagar dengan tinggi 6 meter dan dibangun sepanjang 12 kilometer, pagar juga dilengkapi dengan CCTV, sistem radar, menara kontrol, dan dijaga oleh lembaga penegak hukum Spanyol.

Selain dengan memperkuat keamanan nasional dengan membangun pagar, negara Spanyol juga menerapkan apa yang disebutkan oleh teori realisme yaitu pentingnya keamanan nasional telah mendorong negara untuk memobilisasi sumber dayanya untuk menghasilkan kapabilitas dalam mengejar kepentingan keamanan negaranya. Negara Spanyol dalam hal ini juga mengerahkan sumber daya yang dimilikinya ke wilayah perbatasan Melilla dengan Maroko untuk mengejar kepentingan keamanan negaranya dengan mencegah masuknya para imigran Afrika yang ingin masuk ke Eropa melalui wilayah Melilla. Sumber daya yang dikerahkan oleh Spanyol untuk menjaga perbatasan sebagai implementasi menjaga keamanan nasional negaranya berupa pengerahan militer untuk berjaga di wilayah perbatasan serta anggota penegak hukum Spanyol. Pengerahan kekuatan ekonomi juga dilakukan oleh negara Spanyol dengan membangun infrastruktur perbatasan yang mencakup CCTV, sistem radar, dan membangun menara kontrol untuk memantau pergerakan para migran.

BAB 17 PERBATASAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN NEPAL

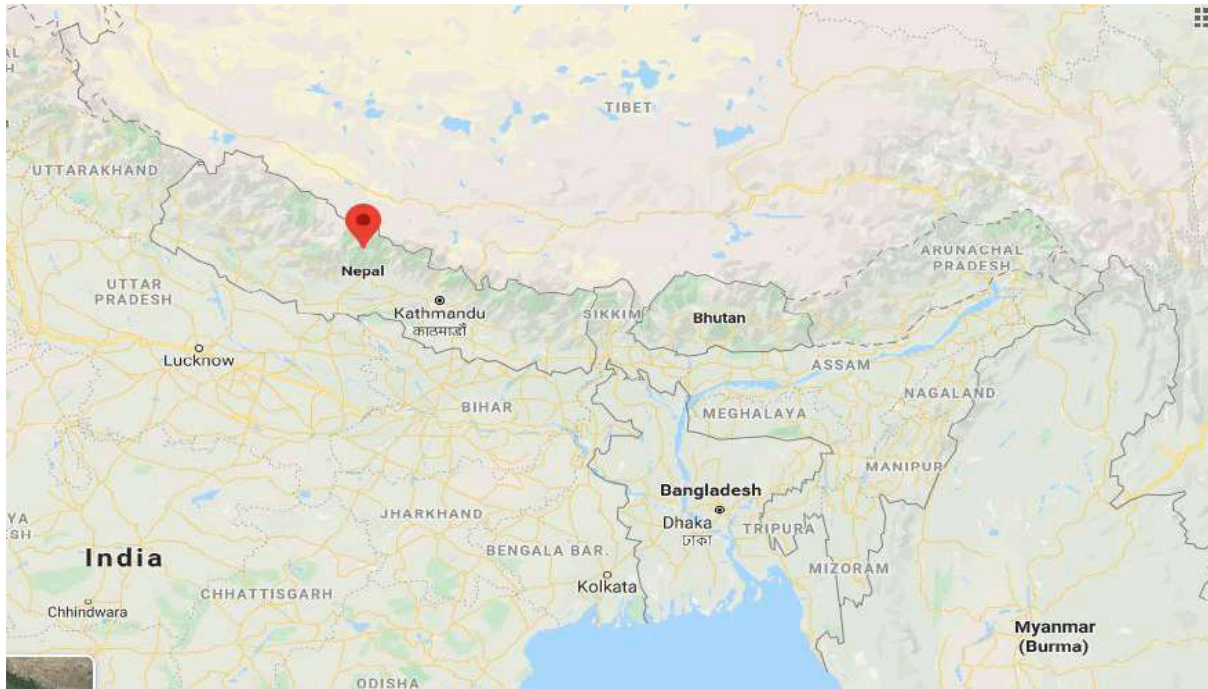
17.1. Perbatasan Tanpa *Border*

Perbatasan Nepal dengan wilayah Tibet di Tiongkok mencapai 1.415 kilometer di sepanjang perbatasan Himalaya. Lebih dari 90 persen perbatasan Nepal dengan RRT dijalankan melalui ketinggian yang tidak berpenghuni dengan jalur yang penuh dengan bebatuan dan salju, gletser dan ladang es. Dari sepuluh gunung tertinggi di dunia, delapan gunung, termasuk Kanchajunga (28.209 kaki) dan gunung Everest (29.029 kaki) terletak di Nepal bagian utara dan berbatasan dengan Tibet. *Watershed* utama antara Brahmaputra (Yarlung Trangpo di Tibet) dan Gangga (termasuk berbagai sistem sungai utama Nepal) terletak di seberang perbatasan Nepal-RRT menuju ke arah utara di Tibet (Jha, 2013).



Gambar 17.1. Letak Geografis RRT dan Nepal

Negara-negara Himalaya adalah kelompok negara-negara yang berada pada jalur Himalaya di Asia yang terdiri atas Himalaya Barat dan Timur. Nepal dan Bhutan adalah dua negara yang wilayahnya hampir seluruhnya berada di dalam jalur pegunungan tersebut. Selain itu, ada juga Tibet selatan yang merupakan otonomi Republik Rakyat Tiongkok. Himalaya juga menjadi pembatas antara RRT dan Nepal. Apabila seseorang ingin menempuh perjalanan darat dari Kodari (Nepal) menuju perbatasan Tiongkok harus menempuh perjalanan darat yang menegangkan lewat Araniko Highway (Arniko Rajmarg) dengan kendaraan transmisi gerak empat roda (4WD) (Utomo, 2016).



Gambar 17.2. Letak Perbatasan RRT (Tibet) dan Nepal

Wilayah perbatasan yang terletak antara Nepal dan Tibet adalah jajaran pegunungan Himalaya setinggi 4.000 meter. Dominan orang yang tinggal di sini memiliki kewarganegaraan ganda atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan. Kondisi ini dimungkinkan karena letaknya yang jauh dari pemeriksaan aparat pemerintah. Beberapa orang yang hidup di sini tidak datang ke sini secara kebetulan. Kebanyakan mereka adalah komunitas yang melarikan diri atau berstatus sebagai pengungsi, seperti orang-orang di Afrika yang melarikan diri dari perdagangan. Penduduk yang tinggal di kawasan ini dominan menggunakan dialek bahasa Tibet (Vox, 2017a).



Gambar 17.3. Jalur berupa jalanan tanah menuju Lo Manthang di Upper Mustang di Kawasan Himalaya. Jalur ini penghubung Nepal dan Tibet
Sumber: (Utomo, 2016)

Nepal dan RRT telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1955 dimana mereka telah menikmati masa sejarah yang panjang baik budaya, ekonomi dan perdagangan, yang

berasal dari Licchavi Nepal (kurang-lebih 400 hingga 750 M) dan Dinasti Tang Cina (618 hingga 907 M). Sejarah perdagangan trans-Himalaya adalah salah satu yang paling banyak dilakukan sebagai jalur penting dalam urusan perdagangan Asia kontinental pada abad ke-17 dan ke-18. Kondisi ini memberi keuntungan ekonomi, tidak hanya di negara-negara Asia Selatan seperti Nepal dan India, tetapi juga dari Asia Tengah, Mongolia dan sebagian RRT (Sharma, 2018).



Gambar 17.4. Truk sebagai salah satu alat transportasi untuk menyeberangi perbatasan Nepal-Tiongkok
Sumber: (Utomo, 2016)

Ada sebuah *short break* dalam hubungan RRT-Nepal setelah Revolusi China tahun 1911 sampai 1949. Pembentukan rezim Komunis di RRT di bawah kepemimpinan Mao Zedong dan dimulainya kembali kendali Tibet pada tahun 1957, memungkinkan Raja Mahendra dari Nepal untuk menghidupkan kembali hubungan yang erat dengan RRT. Raja Mahendra yang dianggap sebagai pelopor pembangunan ekonomi modern dan pembuat kebijakan luar negeri Nepal, ia berusaha untuk mempertahankan dan menyeimbangkan kebijakan negara tetangga dengan menjalin hubungan dengan banyak negara dan menarik investasi dalam jumlah besar. Keuangan dan bantuan teknis meningkat selama masa jabatannya, bahkan setelah kematiannya (Sharma, 2018).



Gambar 17.5. Truk sebagai salah satu alat transportasi untuk menyeberangi perbatasan Nepal-Tiongkok
Sumber: (Utomo, 2016)

Dalam menjalankan hubungan bilateral dengan Nepal, RRT berusaha mempertahankan prinsip tidak campur tangan kecuali apabila daerah perbatasan Himalaya mengalami ancaman. Meskipun demikian, pada tahun 1792, RRT pernah melakukan invasi ke Nepal pada tahun 1792 karena kebijakan perang Nepal terhadap Tibet yang mengganggu keamanan dalam negeri Tibet. Kemudian, memasuki abad ke-20, hubungan perdagangan antara RRT dan Nepal dengan intensitas rendah, hal ini disebabkan faktor kedekatan geografis. Nepal bertetangga dengan Tibet, daerah yang memiliki populasi sedikit dan kondisi transportasi yang buruk sehingga membuat kegiatan perdagangan di area perbatasan menjadi sulit (Sharma, 2018).



Gambar 17.6. Truk sebagai salah satu alat transportasi untuk menyeberangi perbatasan Nepal-Tiongkok
Sumber: (Utomo, 2016)

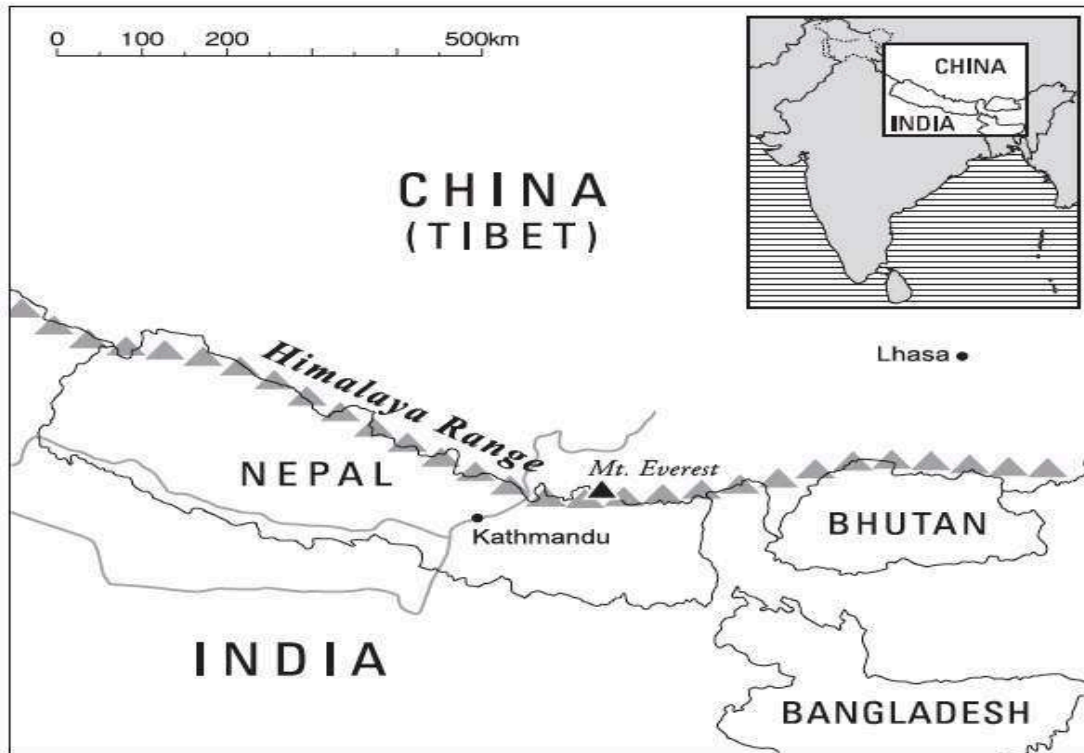
Nepal dan RRT bertukar duta besar perumahan pada Juli 1960. Pada tahun yang sama, Nepal mengalami konflik perbatasan dengan RRT di 35 tempat, termasuk di Gunung Everest. Pada satu titik waktu, Nepal bahkan dengan tegas membantah klaim RRT atas Gunung Everest pada tahun 1960. Kasus territorial perselisihan meletus antara Nepal dan RRT di tempat-tempat tertentu di Sankhuwasabha (Kimathanka), Distrik Taplejung, Rasuwa dan Humla (Nara Nangla). Namun kemudian Nepal berhasil menyelesaikannya masalah perbatasan dengan RRT sesuai Komisi Batas Bersama Nepal- RRT pada 5 Oktober 1961 (Jha, 2013).



Gambar 17.7. Jalur Berbahaya yang Harus di Tempuh Antara Tibet dan Nepal (Vox, 2017b)

17.2. Kerjasama RRT dan Nepal

Banyak orang di wilayah Himalaya di Nepal berasal dari Mongol dan mereka memiliki afinitas Tibet. Seringkali, mereka disebut Bhotiya. Secara tradisi, mereka memelihara yak dan menghasilkan tanaman seperti kentang, gandum, soba dan millet. Sebagian besar mereka bekerja sebagai kuli, pemandu, dan koki dan aktif dalam kegiatan perdagangan, pariwisata, dan trekking dalam bisnis. Untuk pertama kalinya Nepal dan RRT menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1955. Mereka menandatangani perjanjian pada tahun 1956 di mana peraturan visa yang ketat diberlakukan pada pergerakan orang dari satu negara ke negara lain. Namun, penduduk perbatasan yang tinggal di wilayah seluas 30 kilometer dari kedua sisi perbatasan Nepal-RRT diizinkan untuk melakukan perdagangan tradisional kecil secara barter. Mereka juga diizinkan mengunjungi teman dan kerabat dan bahkan berganti tempat tinggal tergantung musim di mana paspor, visa, atau sertifikat lainnya tidak diperlukan. Namun demikian, mereka diharapkan untuk mendaftar di pos pemeriksaan perbatasan atau badan pemerintah lain yang berwenang.



Gambar 17.8. Geografis Wilayah RRT dan Nepal
Sumber: (Jha, 2013)

Pada bulan Oktober 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping menandatangani 20 proyek yang mencakup perdagangan, pemasokan air dan obat-obatan tradisional dan proyek jalan kereta api menuju Tibet. Peningkatan kerjasama ini bertujuan untuk mengakhiri dominasi India atas jalur perdagangan Nepal dan meningkatkan konektivitas dengan Beijing. Peningkatan usaha kerjasama dengan Tiongkok dilakukan sejak blokade di sepanjang perbatasan Nepal-India yang menyebabkan Nepal kekurangan bahan bakar dan obat-obatan akut pada tahun 2015-2016. Jalur kereta api ini memiliki panjang 70 km yang menghubungkan Gyiron di Tibet dengan Katmandu. Pembangunan jalan ini juga bertujuan untuk menciptakan kembali Jalan Sutra lama yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia dan Eropa. Jalur kereta api ini akan melalui sebuah terowongan jalan sepanjang 28 km yang akan mempersingkat waktu perjalanan dari Khatmandu ke perbatasan Tiongkok. Tiongkok dan India berebut pengaruh atas Nepal sebagai penyangga alamiah diantara keduanya. Kedua negara juga menanam modal di sektor infrastruktur. India menyumbang hampir dua pertiga dari perdagangan Nepal dan merupakan satu-satunya pemasok bahan bakar sebelum blokade 2015-2016 terjadi (JPNN, 2019). India sejak lama menjadi pemasok sumber makanan, bahan bakar dan kebutuhan lain di Nepal yang merupakan negara tanpa pesisir. Pada tahun 2015, hubungan ini mengalami ketegangan di mana India menghentikan perdagangan lintas perbatasan selama empat bulan.

Konstitusi Nepal tahun 2015 telah menguraikan prinsip, kebijakan, dan kewajiban negara mengenai kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Nepal dipandu oleh keyakinan yang tetap pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kebijakan ketidaksejajaran, saling menghormati untuk wilayah masing-masing integritas dan kedaulatan, tanpa campur tangan satu sama lain urusan internal, rasa saling menghormati untuk kesetaraan, non-agresi dan penyelesaian damai atas perselisihan yang terjadi, dan kerja sama untuk saling memberi manfaat sesuai prinsip-prinsip pedoman kebijakan luar negeri. Meski Nepal membentuk hubungan diplomatik dengan India dan RRT masing - masing pada 13 Juni 1947 dan 1 Agustus 1955, Nepal memiliki hubungan dengan RRT dan India sudah sejak lama (Dahal, 2018).

Nepal merupakan negara yang terkurung daratan dimana terletak diantara dua negara besar yaitu India dan RRT. Seperti yang telah dijelaskan diatas, sebelah utara Nepal berbatasan dengan Tibet yang terdiri atas gunung, selatan terdiri dari dataran, timur dan barat berbatasan dengan India. Meskipun demikian, sejarah menunjukkan bahwa kedaulatan negara dapat dipertahankan apabila sektor ekonomi dapat dipertahankan dan perpolitikan stabil. Kondisi ini dibuktikan dengan hubungan Nepal-RRT yang semakin baik ditandai dengan penandatanganan proyek kereta api. Proyek kerjasama ini dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara.

17.3. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini akan dianalisis dengan melihat dari perspektif realisme. Realisme merupakan teori yang memandang bahwa bukti dunia yang sangat terintegrasi ekonomi bukanlah hal baru dan globalisasi bergantung pada dukungan negara. Selain itu, realis melihat, secara tradisional, masalah keamanan dan masalah militer adalah suatu pengetahuan yang memberi tahu mereka suatu pemahaman tentang sistem antar negara. Meskipun neorealis memang melihat pentingnya menumbuhkan pasar sebagai sumber kekayaan dan kekuatan potensial, mereka bersikeras bahwa negara tidak boleh dikuasai oleh negara lain (Harrison, 2006).

Asumsi realistik klasik tidak diasumsikan bahwa asumsi-asumsi ini selalu mencerminkan kenyataan, tetapi generalisasi yang agak valid tentang politik internasional. Realisme didasarkan pada empat asumsi utama. Pertama, negara seharusnya berdaulat dan merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Aktor non-negara seperti organisasi internasional hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak menyangkut kepentingan keamanan langsung. Negara akan mencoba memanipulasi atau mengabaikan aktor non-negara. Kedua, realis melihat negara adalah kesatuan dengan actor, dengan kata lain, negara berbicara dengan satu suara yaitu kebijakan tentang urusan internasional. Ketiga, kaum realis menganggap

bahwa negara itu rasional. Aktor yaitu negara akan membuat keputusan yang memaksimalkan manfaat negara. Keempat, kaum realis menganggap bahwa keamanan nasional menduduki peringkat teratas dalam hierarki urusan internasional (Harrison, 2006).

Bagi kaum realis, politik kekuasaan secara tradisional mengacu pada masalah militer. Realis dengan cepat menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan dan otonomi dapat dianggap hak dalam teori hukum, dalam praktiknya, kekuatan militer adalah yang mempertahankan wilayah negara berdaulat. Realisme merupakan teori yang memandang bahwa konflik antar negara dapat diterima untuk mencapai kepentingan nasional. Pandangan realis adalah pendekatan terbaik untuk membahas kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri kemungkinan dirumuskan sesuai dengan kepentingan nasional. Inilah sebabnya mengapa ada hubungan antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional (Harrison, 2006).

Realis berpendapat bahwa negara selalu terlibat dalam persaingan kekuasaan sebagai hasil dari keinginan untuk bertahan hidup dan mendominasi negara lain. Jadi, yang penting bagi negara adalah kekuatan. Realis setuju bahwa kebijakan luar negeri hanya untuk melayani kepentingan nasional dalam bidang politik internasional. Realis melihat kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dalam hal perebutan kekuasaan dan kelangsungan hidup negara. Alhasil, hubungannya antar negara cenderung lebih bersifat permusuhan daripada kooperatif. Ini mendorong negara untuk memperkuatnya kekuatan militer untuk bertahan hidup dan mempertahankan diri dari luar serangan militer dari negara lain. Untuk alasan ini, persiapan militer dari satu negara cenderung dicocokkan oleh negara - negara tetangga. Kelangsungan hidup negara sangat penting dan oleh karena itu kekuatan militer penting untuk melindungi keamanan nasional atau untuk melawan serangan militer eksternal yang tidak terduga. Karena pandangan realisme pada kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional fokus tentang kepentingan negara dapat diperdebatkan (Harrison, 2006). Seperti yang terjadi di RRT dimana RRT merupakan negara dengan kemampuan yang tinggi dari segi perekonomian dan teknologi. RRT pun menjadi mulai mendirikan militer infrastruktur di dataran tinggi Tibet dan pada tahun 1999 mereka membangun pagar di perbatasan padahal tempat ini terlalu tinggi untuk perbatasan. Selain itu untuk menjaga perbatasannya di Nepal, RRT datang di Nepal secara rutin untuk mengajukan pertanyaan, bahkan menahan orang secara acak. Mereka punya pengawasan, mereka memiliki menara arloji bahkan di sisi Nepal. RRT sekarang sudah mempunyai kekuatan yang kuat serta teknologi dan politik untuk lakukan kontrol dan kendali jarak jauh di wilayah ini dan untuk militerisasi perbatasannya. Ini membuktikan betapa RRT berusaha menjaga wilayahnya untuk keamanan nasionalnya sendiri.

BAB 18

PERBATASAN AMERIKA SERIKAT DAN KANADA

18.1. Perbatasan yang Unik

Perbatasan antara Amerika Serikat - Kanada, secara resmi di sebut sebagai *international boundary* yang memiliki panjang 8,891 km (5,525 mil) dan merupakan perbatasan negara terpanjang di dunia. Garis membujur yang memisahkan negara Amerika Serikat dengan Kanada dikenal dengan nama *Derby line* yang berada di kota Vermont. Perbatasan ini sangat berbeda dan unik dengan negara lainnya tetapi juga sangat rendah tingkat keamanannya karena perbatasan ini tidak memiliki pembatas dinding atau beton yang sangat tinggi. Bahkan penjagaan yang terbilang sangat rendah. Orang-orang berkebangsaan AS maupun Kanada dengan sangat mudah memasuki wilayah di kedua negara tersebut secara ilegal, karena perbatasan ini hanya di batasi pembatas jalan yang sangat pendek dan bahkan di sisi lain juga mereka menempatkan pot bunga yang berjejeran untuk menandakan perbatasan kedua negara tersebut (WildTravels, 2016).



Gambar 18.1. Border di Dalal Perpustakaan
Sumber: (WildTravels, 2016)

Tetapi hal unik lainnya, terdapat sebuah bangunan perpustakaan bernama The Haskell Free Library and Opera House yang berdiri diatas garis tersebut, sehingga ketika seseorang memasuki bangunan tersebut anda bisa memasuki batas negara lain. Bagi orang-orang berkebangsaan AS, perpustakaan the Haskell ini berada tepat di “93 Caswell Avenue Derby Line, kota Vermont. Amerika Serikat. Namun, bagi orang-orang berkebangsaan Kanada

alamatnya berbeda di mana terletak di kota Standstead, provinsi Quebec, 1 rue Cruch street, Kanada. Meskipun begitu, kedua alamat ini tidak ada yang salah dan sama-sama benar karena akan membawa ke tempat yang sama yaitu perpustakaan (WildTravels, 2016).

Kota Derby Line dan standstead adalah kota perbatasan yang memiliki banyak keunikan. Selain itu, gedung The Haskell Free Library and Opera House merupakan bangunan yang paling terkenal dan memiliki banyak keunikan dibandingkan dengan gedung lainnya di perbatasan Kanada dan AS. Perpustakaan ini bertingkat dua dan didirikan pada abad ke 14. Perpustakaan The Haskell Free Library and Opera House ini di bangun oleh sepasang suami istri berkebangsaan AS bernama Carlos Haskell dan istrinya yang berasal dari Kanada yang bernama Marta Stewart Haskell. Setelah bangunan tersebut selesai di bangun, mereka menyumbangkan perpustakaan The Haskeell Free Library and Opera kepada penduduk kedua negara di mana mereka masing masing berasal (WildTravels, 2016).



Gambar 18.2. Pot Bunga yang Berjejer Sebagai Tanda *Border*
Sumber: (WildTravels, 2016)

Awal mula Pembangunan The Haskell Free Library and Opera House memiliki banyak sejarah yang unik, karena bangunan ini didirikan tepat di atas perbatasan agar penduduk di kedua negara dapat memiliki akses ke perpustakaan ini. Baik penduduk berkebangsaan asal Kanada maupun berkebangsaan AS tetap dapat berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan meskipun berbeda negara. Perpustakaan ini hanya memiliki satu pintu masuk yang berada di sisi Amerika namun orang Kanada di perbolehkan tetap bebas masuk dan menggunakan perpustakaan, mereka bisa langsung kembali ke negaranya begitu selesai keluar dari pintu perpustakaan tersebut. Meskipun demikian, perpustakaan ini tetap memiliki pintu tetapi tetap tertutup dan hanya di gunakan ketika keadaan yang sangat darurat. Di dalam gedung sebuah garis hitam tebal, dan mereka meletakkan dengan menggunakan bendera masing – masing di

kedua perbatasan negara yang melintasi lantai ruang baca perpustakaan yang berfungsi untuk membatasi perbatasan Kanada dan AS (WildTravels, 2016).

Sedangkan, lantai atas pada bangunan perpustakaan difungsikan sebagai gedung opera dimana garis hitam tebal juga memotong secara diagonal di kursi sehingga panggung dan setengah dari jumlah kursi di perpustakaan terletak di sisi Kanada sedangkan sisa sebagian kursinya terletak di sisi Amerika Serikat. Begitu pula di dalam perpustakaan. Tempat buku anak-anak berada di wilayah Amerika Serikat. Sedangkan selain dari bagian tempat buku lainnya dan juga ruang baca perpustakaan berada tepat di wilayah Kanada. Oleh karena itu perpustakaan ini adalah perpustakaan satu-satunya di AS yang sangat unik karena tidak memiliki buku dan satu-satunya Opera House tanpa panggung. Selama beberapa dekade perpustakaan ini menjadi pusat tempat di mana penduduk di kedua negara bertemu dan berinteraksi satu sama lain tanpa harus memiliki passpor untuk saling menginjakkan kaki di kedua negara tersebut (WildTravels, 2016).



Gambar 18.3. Garis hitam tebal memotong secara diagonal di kursi sebagai tanda perbatasan negara
Sumber: (WildTravels, 2016)

The Haskell and Free Library and Opera House adalah satu-satunya gedung dan tempat untuk bertemunya keluarga dan kerabat yang terpisahkan oleh perbatasan negara tanpa melintasi batas secara ilegal. Hal ini sangat unik dibandingkan dengan perbatasan negara lainnya. Namun beberapa tahun lalu, masih ada saja orang yang memanfaatkan situasi kerawanan di perpustakaan yang tingkat keamanannya tergolong sangat rendah. Dimana pada tahun 2011, terjadi penyelundupan melalui toilet perpustakaan. Seorang pria berkebangsaan Kanada diduga menyelundupkan tas yang berisi senjata. Setelah kejadian itu, pihak berwenang di kedua negara mulai memperketat keamanan di perbatasan. Jalan-jalan yang pernah menjadi tuan rumah bagi lalu lintas dari kedua negara baik Amerika ataupun Kanada di tutup dan

tanaman pot yang berjejeran di pasang sebagai penghalang di hamparan perbatasan dekat perpustakaan (WildTravels, 2016).

Hal yang dilakukan pihak AS untuk memperketat penjagaan salah satunya dengan mengirim kendaraan keamanan untuk memantau di pintu masuk perpustakaan selama 24 jam dalam satu hari. Jadi, di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada terdapat bangunan The Haskell Free Library and Opera House hanya salah satu dari banyak bangunan yang berada tepat di perbatasan. Selain perpustakaan kota perbatasan Standstead dan Dearby line juga masih memiliki banyak keunikan. Hal lainnya seperti jalan yang membentang di perbatasan yang bernama Canusa Avenue. Hal uniknya meskipun jalannya berada di wilayah Kanada akan tetapi rumah warga yang ada di sepanjang tepi jalan selatannya sudah masuk di wilayah Amerika Serikat (WildTravels, 2016).

Selain Derby Line and Standstead juga terdapat keunikan lain, seperti Canusa Avenue di mana perbatasan internasional membentang di tengah jalan, tetapi meskipun jalan tersebut berada di Kanada, rumah-rumah yang berada di tepi Selatannya sudah masuk di wilayah Amerika Serikat. Jadi setiap kali warga negara AS keluar dari rumah mereka pada dasarnya sudah meninggalkan AS. Hal ini menunjukkan perbatasan ini sangat unik. Sebelumnya di perbatasan Canusa Avenue ini memiliki kantor pos yang sama dan melayani kedua negara. Kantor pos tersebut merupakan satu-satunya kantor pos internasional karena melayani rakyat berkebangsaan berbeda (WildTravels, 2016).



Gambar 18.4. Wilayah Perbatasan Tanpa Ada Pembatas
Sumber: (WildTravels, 2016)

Kantor pos di Canusa Avenue memiliki dua pintu dan dua bilik pos tetapi hanya memiliki satu postmaster yang melayani pelanggan di kedua negara. Hal lainnya yaitu kedua kota perbatasan ini berbagi sistem air yang sama. Air minum mereka diambil di wilayah Derby Line Kanada dan disimpan di AS. Distribusinya melalui sistem orang Kanada. Sedangkan limbah dari kota Derby Line, pihak AS harus melakukan perjalanan lintas batas negara untuk mengolah sampah mereka masing-masing. Pada zaman dulu awalnya perempuan dari Stanstead harus pergi ke Vermont AS untuk melahirkan karena kurangnya fasilitas kesehatan pemerintah dan akses menuju ke rumah sakit yang berada di Kanada. Oleh karenanya sebagian besar penduduk di kota Stanstead yang berusia lebih tua memiliki kewarganegaraan ganda meskipun Derby Line dan Stanstead memiliki kode telepon yang berbeda, tetapi panggilan telepon kedua kota di perbatasan ini bersifat lokal untuk mempermudah akses bagi masyarakat di kedua negara ini. The Haskell Free Library and Opera House diakui oleh kedua negara sebagai situs sejarah karena memiliki kisah historis yang unik dibalik dibangunnya bangunan ini sehingga menjadi lambang kedua negara dimana peraturan lintas batas tidak berlaku di dalam bangunan ini (WildTravels, 2016).

18.2. Perbedaan di Bidang Sosial

Kanada dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan besar yaitu setelah resesi besar (krisis ekonomi) pada tahun 2008 diberbagai bidang seperti federalisme fiskal, perawatan kesehatan, pensiun hari tua, dan asuransi keluarga. Kanada dan Amerika Serikat masing-masing mengalami perdebatan besar mengenai reformasi kebijakan sosial yang sedikit berfokus pada ekspansi dan penghematan. Langkah ekspansi pada tahun ke tahun sejak krisis ekonomi 2008, kontras dengan situasi yang dialami di negara-negara Eropa seperti Yunani dan Inggris di mana penekanannya adalah kebijakan sosial. Di satu sisi, di Amerika Serikat, simbol dari dorongan ekspansi ini segera setelah resesi hebat (krisis ekonomi) dan selama kepresidenan Obama (2009-2017) yaitu diberlakukannya Undang-Undang Perawatan terjangkau yang diatur tahun 2010. Bagian utama dari undang-undang ini memiliki banyak bagian yang belum semuanya diimplementasikan dengan lancar. Meskipun demikian telah menyebabkan penurunan besar dalam persentase orang Amerika yang hidup tanpa asuransi kesehatan. Di sisi lain, di Kanada, contoh ekspansi sosial yang paling signifikan selama dekade terakhir adalah keputusan untuk secara signifikan meningkatkan manfaat pensiun yang tersedia melalui program pensiun Kanada dan program pensiun Quebec, dua program pensiun publik terkait pendapatan yang sangat terkoordinasi yang merupakan inti dari sistem keamanan hari tua di Kanada. (Béland & Waddan, 2019).

Selain di bidang perawatan kesehatan dan pensiun di hari tua, hal yang berbeda lainnya di kedua negara Kanada dan AS yaitu dalam masalah kesetaraan gender. Dalam sebuah artikel tentang gender dan perkembangan kebijakan sosial di Amerika Serikat sejak 1970an menunjukkan bagaimana perkembangan kesetaraan tetap berakar pada asumsi gender tentang kerentanan kemampuan kerja dan kecacatan bahkan ketika ada upaya untuk bergerak ke kerangka yang lebih netral dalam gender. Di Kanada fokus pada masalah pengasuhan anak, yang menjadi sangat penting di Kanada sejak akhir 1990an. Dimana terdapat kontradiksi kebijakan seperti yang terlihat ketika para pembuat kebijakan berusaha membantu meningkatkan antisipasi untuk para ibu yang memiliki anak untuk ikut bergabung untuk bekerja. Hal ini merupakan warisan kebijakan yang di kembangkan dalam tradisi di Kanada untuk kesejahteraan liberal dan struktur pemerintahan yang terdesentralisasi (Béland & Waddan, 2019).

18.3. Tingkat Keamanan Perbatasan yang Rentan Kejahatan

Perbatasan Kanada dan AS adalah perbatasan yang tingkat keamanannya sangat rendah sehingga banyak imigran gelap yang masuk secara ilegal ke kedua negara. Hal ini membuat kedua negara memperluas jangkauan hukum untuk memaksimalkan peluang jaringan perdagangan internasional. Di sisi lain untuk tameng mencegah migran yang akan melakukan kegiatan-kegiatan ilegal. Selain itu juga sebagai penegakan di internalisasi ketika penggerebekan terhadap pekerja yang tidak memiliki dokumen. Dengan terpilihnya Donald trump sebagi presiden Amerika Serikat, hal ini membuat ribuan para pencari suaka melarikan diri dari Amerika Serikat menuju Kanada. Karena mereka menganggap bahwa semenjak pergantian presiden, Amerika Serikat dianggap menerapkan kebijakan xenophobia dan rasis. Gambar-gambar para pencari suaka yang melintasi perbatasan ke Kanada telah beredar di media. Kanada dianggap tempat yang liberal dan multikultural sehingga aman bagi para pencari suaka untuk bertahan hidup. Hal ini diperkuat oleh perdana menteri Justin Tradau dalam *tweetednya* “untuk mereka yang melarikan diri dari penganiayaan, terror dan perang, orang kanada menyambut anda, terlepas dari keyakinan anda. Keragaman adalah kekuatan kami” (Gilbert, 2019).

Amerika Serikat dan Kanada membuat kerjasama bilateral sebagai bagian dari rencana aksi perbatasan AS-Kanada yaitu Canada and The Safe Third Country Agreement (STCA). STCA adalah perjanjian bilateral antara AS dan Kanada yang mengharuskan pengungsi untuk meminta perlindungan pengungsi di negara pertama yang mereka datang, baik Amerika Serikat maupun Kanada. Dengan demikian setiap pengungsi yang berniat untuk meminta perlindungan di Kanada tidak dapat di terima jika mereka tiba atau bepergian melalui Amerika

Serikat terlebih dahulu kecuali mereka memenuhi salah satu syarat pengecualian yang berlaku. Ketika presiden Donald Trump membuat kebijakan yang berbau rasis, para pencari suaka melarikan diri menuju utara namun mereka dilarang membuat klaim pengungsi di pelabuhan masuk resmi karena STCA. Satu-satunya cara agar klaim dapat dibuat adalah jika mereka melintasi perbatasan Kanada-Amerika Serikat secara tidak teratur. Dan mengajukan klaim mereka tiba di Kanada. Bagi mereka yang menyeberang dimusim dingin yang berkepanjangan, perjalanan itu bisa sangat berbahaya. Setidaknya satu orang telah meninggal dan yang lainnya menderita radang dingin yang ekstrim yang berakibat fatal seperti amputasi jari tangan dan kaki mereka. Mereka yang dapat menemukan jalan dan melintasi padang rumput atau tanah pertanian atau jalan yang tidak di gunakan, segera di tangkap oleh Royal Canadian Mounted Police (RCMP) dan di tahan (Gilbert, 2019).

Awal mula pembentukan STCA adalah pasca 9/11, pemerintahan Kanada dan Amerika Serikat bekerja sama untuk mengamankan perbatasan bersama. Salah satu hasilnya yaitu deklarasi dan rencana aksi cerdas perbatasan Kanada – Amerika Serikat. Dimana Kanada setuju untuk bekerja sama dalam mempertahankan keamanan perbatasan dan berbagi informasi sebagai imbalan (Gilbert, 2019).

18.4. Salmon Sebagai Sumber Konflik

Meskipun AS dan Kanada memiliki perbatasan negara terpanjang di dunia yang tidak dijaga pasukan militer, tidak berarti kedua negara ini sepi dari perselisihan perbatasan. Dixon Entrance adalah salah satu pemicu perselisihan kedua negara. Dixon Entrance adalah perairan kaya sumber daya ikan yang terletak di antara kepulauan Haida Gwaii, di pantai utara British Columbia dan ujung selatan Alaska Panhandle. Wilayah ini kaya akan sejumlah fauna seperti orca, albatros dan lima spesies salmon yang menjalar ke pantai berbatu dan hutan hijau Prince of Pulau Wales dan daratan. Di wilayah ini, kapal patroli otoritas perikanan Kanada berkeliling mencari pelanggar perbatasan. Di perairan ini terdapat sebuah garis yang telah lama menjadi perdebatan, bahkan sebelum Bangsa Eropa datang dan melakukan kontak dengan masyarakat adat setempat, komunitas Haida, Tlingit dan Tsimshian yang selalu berperang atas batas darat dan laut di wilayah yang berlimpah tersebut. Ketidaksepakatan batas ini berlanjut hingga tahun 2019 khususnya menyangkut salmon atau pencari ikan ilegal (Selkirk, 2019).



18.5. Kapal-Kapal dari Alaska yang Mengambil Ikan Memicu Kemarahan Nelayan Kanada
Sumber: (Selkirk, 2019)

Konflik tersebut dimulai abad ke-18, ketika Inggris, Rusia, kemudian disusul AS menjajah di wilayah Alaska Panhandle (jalur sempit pegunungan, fjord dan pulau-pulau saluran yang berbatasan dengan British Columbia modern. Tahun 1732, ketika armada Rusia tiba di Alaska dan menemukan bahwa di daerah tersebut terdapat banyak sekali berang-berang laut. Setelah itu, dimulailah perdagangan bulu dengan penduduk setempat. Kapten James Cook datang pada dekade 1760-an dan mulai memetakan dan mensurvei Pasifik Utara untuk kepentingan Inggris. Kemudian, penjelajah Amerika Meriweather Lewis dan William Clark pada awal 1800-an menemukan jalan mereka ke Pacific Northwest. Kegiatan-kegiatan ini kemudian menciptakan sengketa teritorial. Akibatnya, dampak perang ini dirasakan oleh penduduk pribumi. Selama periode penjajahan Rusia, perbatasan selatan dan timur Panhandle Alaska tidak pernah ditetapkan secara hukum (Selkirk, 2019).

Pada tahun 1825, Inggris dan Rusia menetapkan perbatasan selatan Panhandle, dekat Pangeran Rupert modern, British Columbia yang dikenal dengan nama perjanjian 1825 Saint Petersburg. Meskipun demikian, sebagian besar wilayah tersebut yang terdiri dari pegunungan ditetapkan secara tegas. Amerika Serikat membeli Alaska dari Rusia pada tahun 1867. British Columbia bergabung dengan Kanada beberapa tahun kemudian. Setelah itu, pemerintah Kanada mengeluarkan pernyataan untuk melakukan survey resmi terhadap Panhandle dengan tujuan untuk menentukan perbatasan wilayah tersebut dengan jelas. Rencana ini ditentang oleh AS yang dianggap mengambil biaya terlalu mahal hanya untuk mensurvei wilayah yang kecil (Selkirk, 2019).

Beberapa tahun kemudian, emas ditemukan di British Columbia dan di Klondike di wilayah Yukon, barat laut Kanada pada tahun 1897. Terdapat sekitar 100 ribu orang bermigrasi

ke wilayah yang kaya akan emas tersebut. Tak lama menjelang, ditemukan cara yang tercepat untuk mencapai wilayah kaya emas tersebut yaitu dengan perjalanan laut melalui Dixon Entrance, ke dalam fjord dan kemudian melalui daratan melintasi Panhandle. Kanada ingin melakukan perjalanan tanpa ada rintangan ke wilayah mereka, disisi lain, AS enggan menyerahkan salah satu tanah yang dianggap terlalu kecil untuk dipetakan tersebut. Berbagai usaha dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, tapi pada tahun 1899, kedua negara mencapai jalan buntu (Selkirk, 2019).



Gambar 18.6. Dixon Entrance mengarah ke pantai berbatu dan hutan hijau Pulau Pangeran Wales dan daratan utama
Sumber: (Selkirk, 2019)

Tahun 1903, dibentuk pengadilan internasional untuk menyelesaikan sengketa batas Alaska yang terdiri dari enam ahli hukum dari Inggris, Kanada dan AS. Akhirnya, ahli hukum tersebut menetapkan batas timur Alaska di 56 kilometer sisi timur laut yang menyentuh pantai. Batas selatan atau garis A-B, membentang dari Cape Muzon, titik paling selatan Pulau Dall Alaska, lurus ke timur melalui Dixon Entrance ke Kanal Portland, perairan tersebut mengalir ke beberapa pulau sebelum kembali menuju Kanal Portland dan ke pantai pegunungan. Keputusan ini memicu kemarahan Kanada. Kanada berkeinginan agar garis A-B adalah garis pemisah antara dua tetangga itu, baik di laut maupun di darat. AS tidak menyetujui pendapat Kanada tersebut dan menyatakan bahwa keputusan dari tim ahli ini hanya berkaitan dengan perbatasan darat, sementara untuk hukum laut, batas laut sebenarnya adalah 20 kilometer di selatan garis, setengah jalan melintasi Dixon Entrance. Ketidaksepakatan tersebut terus berlanjut (Selkirk, 2019).

Ketidaksepakatan soal kepemilikan jalur sempit dengan sisi 80 kilometer dan 50 kilometer ini adalah karena ikan salmon pasifik. Kawasan ini kaya dengan salmon yang

melimpah dan melakukan migrasi tahunan berkelompok yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan industri. Antara tahun 1880-an sampai 1950-an terdapat lebih dari 100 pengalengan dan munculnya desa nelayan di seluruh British Columbia. Ikan salmon ini telah diekspor ke 53 negara yang berbeda. Terdapat lima jenis salmon setiap tahun melewati perairan tersebut, yakni ikan sockeye, coho, chinook, sohib, dan pink. Ikan-ikan ini kembali dari laut berniat mencari “rumah” mereka di Alaska, British Columbia, Washington atau Oregon, tempat mereka bertelur dan mati (Selkirk, 2019).



Gambar 18.7. Penangkapan ikan salmon memutar perekonomian kawasan barat laut Pasifik
Sumber: (Selkirk, 2019)

Dua kapal mengikuti dua regulasi yang berbeda untuk menangkap salmon di perairan tersebut. Nelayan-nelayan dari Kanada dan Amerika Serikat berusaha menangkap bagian salmon mereka dari perairan yang tidak pernah menemui kata sepakat. Selama dekade 1990-an, ketidaksepakatan ini menimbulkan perselisihan sampai pertempuran kecil yang dikenal dengan istilah “perang salmon.” AS dan Kanada mencoba mencari solusi untuk menentukan hak atas salmon mereka sejak 1930-an. Konsep ini tidak pernah terwujud karena salmon berenang bukan hanya menuju sungai tertentu, tetapi ke suatu bagian dari sungai itu. Pada akhirnya ditandatangani Perjanjian Salmon Pasifik pada tahun 1985, yang mengatur akses secara adil bagi nelayan untuk menangkap salmon di sepanjang pantai Pasifik untuk kedua negara tersebut (Selkirk, 2019).

Perjanjian Salmon Pasifik ini berakhir pada tahun 1992. Setelah itu, berbagai insiden internasional terjadi seperti kedua negara sering saling menangkap kapal penangkap ikan komersial. Pada tahun 1997 ketegangan antar kedua negara meningkat karena ratusan nelayan Kanada menghalangi kapal feri milik otoritas negara bagian Alaska di kawasan Prince Rupert

selama tiga hari dan mereka juga menyandera para penumpang kapal tersebut. Pada tahun 1999, konflik mereda setelah ditandatangani perjanjian baru yang berlaku selama 10 tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, meskipun tidak menyelesaikan masalah (Selkirk, 2019).



Gambar 18.8. Ikan Salmon yang Dikeringkan oleh Penduduk Alaska untuk Bahan Pangan
Sumber: (Selkirk, 2019)

18.5. Kesimpulan

Permasalahan perbatasan AS dan Kanada akan ditinjau dari perspektif realisme. Realisme adalah teori internasional yang menekankan peran negara, kepentingan nasional dan kekuatan militer dalam politik dunia. Realisme telah mendominasi distudi hubungan internasional sejak akhir perang dunia ke II. Kaum realis mengklaim untuk menjelaskan secara terperinci tentang perilaku negara dan kebijakan (terutama keseimbangan kekuasaan antara negara) untuk memperbaiki elemen-elemen yang tidak stabil yang melekat dalam urusan internasional. Realisme berfokus pada pola interaksi yang taat dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas politik terpusat. Kondisi anarki itu berarti bahwa logika politik internasional sering berbeda dari politik domestik, yang diatur oleh kekuatan berdaulat. Kaum realis umumnya pesimis tentang kemungkinan reformasi sistematis radikal. Realis berbeda dengan liberal yang cenderung menekankan kerja sama. Realis menganggap aktor utama di arena internasional sebagai negara, yang mementingkan keamanan mereka sendiri, bertindak dalam mengejar kepentingan nasional mereka sendiri, dan memperjuangkan kekuasaan. Sisi negatif dari penekanan realis pada kekuasaan dan kepentingan diri sendiri sering kali adalah skeptisisme mereka tentang relevansi norma etika dengan hubungan antar negara (Oghenerioborue-Christopher & David-Lawson, 2018).

Politik nasional adalah bidang otoritas dan hukum, sedangkan politik internasional, kadang-kadang mereka klaim, adalah ruang tanpa keadilan, ditandai dengan konflik aktif atau

potensial di antara negara-negara. Realis hubungan internasional menekankan batasan yang dikenakan pada politik oleh sifat manusia, yang mereka anggap egois, dan oleh tidak adanya pemerintah internasional. Bersama-sama, faktor-faktor ini berkontribusi pada paradigma hubungan internasional berbasis konflik, di mana para aktor utamanya adalah negara, di mana kekuasaan dan keamanan menjadi isu utama, dan di mana hanya ada sedikit tempat untuk moralitas. Seperangkat premis mengenai aktor negara, egoisme, anarki, kekuasaan, keamanan, dan moralitas yang mendefinisikan tradisi realis semuanya ada di Thucydides. Pada debat di Sparta, yang dijelaskan dalam Buku I Sejarah Thucydides, orang-orang Athena menegaskan prioritas kepentingan pribadi daripada moralitas. Mereka mengatakan bahwa pertimbangan benar dan salah "tidak pernah memalingkan orang dari peluang peningkatan yang ditawarkan oleh kekuatan superior". Namun, tidak semua realis menyangkal keberadaan etika dalam hubungan internasional. Perbedaan harus ditarik antara realisme klasik yang diwakili oleh para teoretisi abad kedua puluh seperti Reinhold Niebuhr dan Hans Morgenthau dan realisme radikal atau ekstrem. Sementara realisme klasik menekankan konsep kepentingan nasional, itu bukan doktrin Machiavellian "bahwa segala sesuatu dibenarkan karena alasan negara". Juga tidak melibatkan pemuliaan perang atau konflik. Mereka memberikan nilai tertinggi pada tindakan politik yang berhasil berdasarkan pada kehati-hatian, kemampuan untuk menilai kebenaran dari tindakan yang diberikan dari beberapa alternatif yang mungkin berdasarkan kemungkinan konsekuensi politiknya. Realis dan terutama neorealis saat ini, menganggap tidak adanya pemerintah, secara harfiah anarki, menjadi penentu utama hasil politik internasional. Kurangnya otoritas pembuat peraturan dan penegakan bersama berarti, mereka berpendapat, bahwa arena internasional pada dasarnya adalah sistem swadaya. Setiap negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya sendiri dan bebas menentukan kepentingannya sendiri dan mengejar kekuasaan. Dengan demikian, anarki mengarah pada situasi di mana kekuasaan memiliki peran utama dalam membentuk hubungan antar negara (Oghenerioborue-Christopher & David-Lawson, 2018).

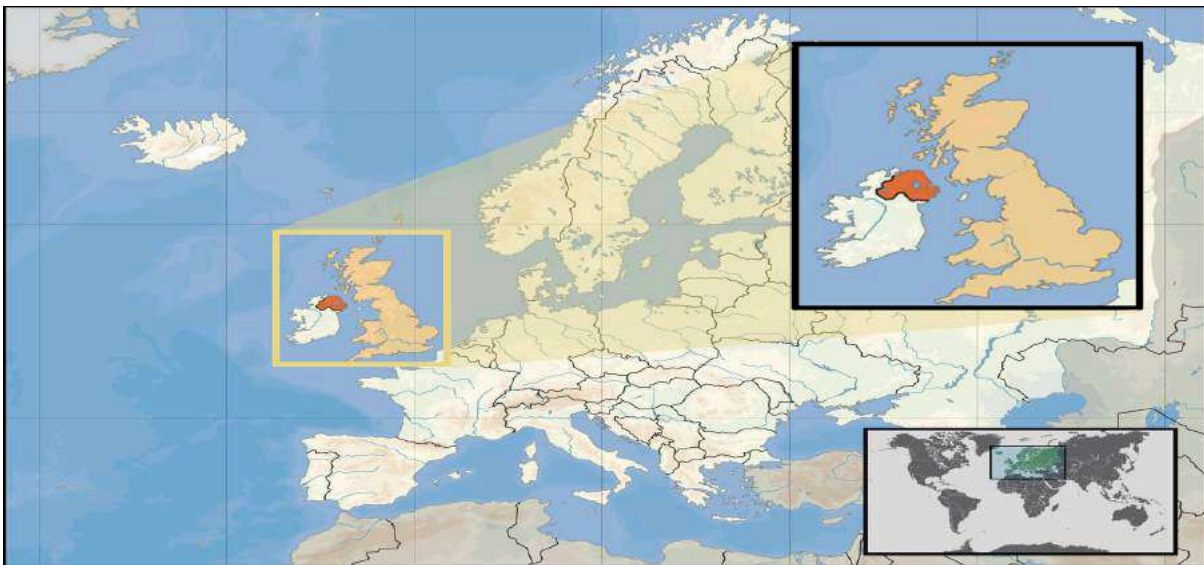
Dalam kata-kata utusan Athena di Melos, tanpa otoritas bersama yang dapat menegakkan ketertiban, "negara-negara merdeka bertahan [hanya] ketika mereka kuat". Sejauh realis membayangkan dunia negara sebagai anarkis, mereka juga memandang keamanan sebagai isu sentral. Untuk mencapai keamanan, negara berusaha meningkatkan kekuatan mereka dan melakukan penyeimbangan kekuatan untuk tujuan menghalangi potensi agresor. Perang diperjuangkan untuk mencegah negara-negara yang bersaing agar tidak menjadi lebih kuat secara militer (Oghenerioborue-Christopher & David-Lawson, 2018).

Hal inilah yang juga dilakukan oleh kedua negara dalam menjaga keamanan perbatasan mereka yang kaya dengan salmon, mereka berusaha meningkatkan kekuatan mereka dan melakukan penyeimbangan kekuatan untuk tujuan menghalangi potensi agresor. Terkadang mereka menjadi polisi untuk memberi rasa aman bagi nelayan mereka. Pertempuran-pertempuran kecil terkadang muncul untuk mencegah nelayan-nelayan dari negara lain mengambil salmon mereka.

BAB 19 PERSIAPAN KOTA-KOTA KECIL DI IRLANDIA UTARA DALAM MENGHADAPI BREXIT

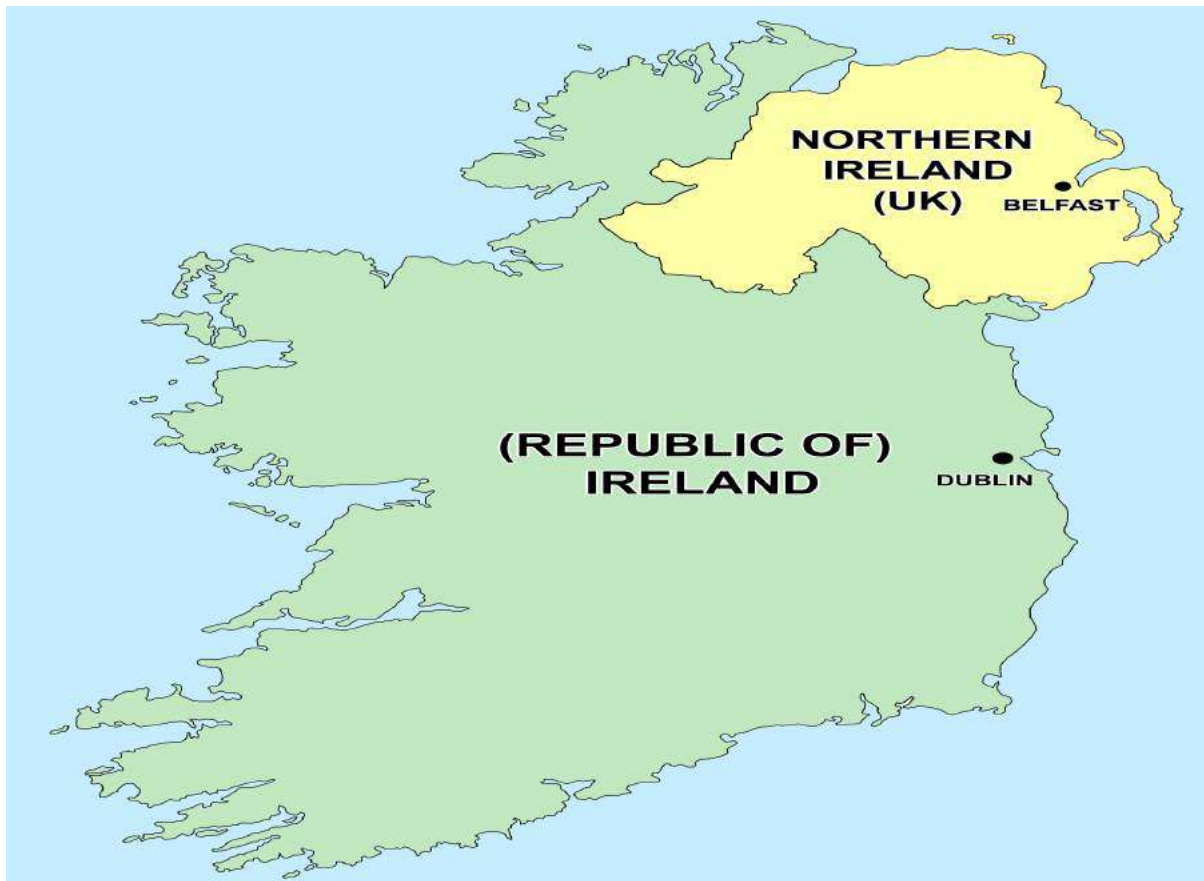
19.1. Cerita dari Strabane

Strabane, sebuah kota kecil di pantai Republik Irlandia yang terbagi dua dengan Inggris, merasakan dampak yang besar dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Marga Gloria, seorang penduduk lokal, saat diwawancarai oleh ITV News mengatakan bahwa rakyat di sana tidak merasa dimiliki baik oleh Inggris maupun Republik Irlandia. Terakhir kali ia merasa terpisah dengan penduduk lainnya di wilayah Utara dan Selatan adalah 40 tahun yang lalu, saat kebijakan *hard border* masih diterapkan oleh kedua negara. Sejak masa itu, orang-orang di Strabane merasa seolah perbatasan hanyalah suatu garis yang tak terlihat. Ia merasa bahwa kebijakan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa akan mendorong terjadinya pemisahan silaturahmi di antara mereka (ITVNews, 2020).



Gambar 19.1. Wilayah Kedaulatan Britania Raya

Lain cerita dengan yang terjadi pada Stephens, seorang gay yang pindah ke Strabane pada tahun 70an, yang mengkhawatirkan berkurangnya hak-hak sipil, terutama yang menyangkut persoalan hak kaum LGBT. Sebelumnya, pemerintah Inggris mengakui hak-hak LGBT karena kepatuhan Inggris terhadap pengadilan HAM Uni Eropa. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Stephens khawatir hak-haknya tidak lagi dapat dipenuhi (ITVNews, 2020).



Gambar 19.2. United Kingdom dan Republik Irlandia

Cerita lain juga berasal dari sebuah pabrik manufaktur olahraga terbesar di Inggris yang banyak mengirimkan hasil pabriknya ke Republik Irlandia. Menurutnya, produk-produknya perlu melewati beberapa *spirit agent* lalu dilanjutkan oleh pengecekan dari titik-titik pengawasan tentara Inggris yang sangat ketat. Peristiwa ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pekerjanya yang masih muda di usia 17 atau 18 tahun. Apalagi, produk-produknya juga perlu melewati delapan kali proses lintas batas di sepanjang proses produksi produknya (ITVNews, 2020).

Lain lagi dengan seorang peternak di wilayah perbatasan tersebut. Pemiliknya merupakan orang Inggris, tetapi lahan peternakannya berada di wilayah Republik Irlandia dan produknya dijual di wilayah Inggris. Ketakutannya berasal dari keputusan pihak parlemen pada tiga tahun belakangan yang terlalu banyak mengubah perjanjian dan banyak dari hasilnya kemudian tidak benar-benar memberi solusi. Peternak tersebut mempertanyakan bagaimana kemudian sebelas bulan ke depan mereka dapat menjamin bahwa usaha-usaha seperti miliknya dapat tetap beroperasi secara normal (ITVNews, 2020).



Gambar 19.3. Letak Strabane

Dari cerita tentang pabrik manufaktur, yang kemungkinan besar yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah pabrik dari perusahaan O’Neills yang berlokasi di Dublin dan Strabane. Perusahaan O’Neills memiliki peran besar dalam rantai ekonomi produk-produk olahraga Rugby, dengan pangsa pasar utama meliputi Republik Irlandia, Eropa, hingga ke Amerika Utara. Per Desember 2019, keuntungan perusahaan telah menurun hingga 18% sejak diberlakukannya Brexit. Dampak utamanya berada pada tingkat mobilitas karyawan, misalnya di pabrik Strabane, dari 800 karyawan, 30% di antaranya tinggal di wilayah Irlandia Utara. Belum lagi, sebagian dari mereka berada di kisaran usia 18 tahun, yang cukup menyulitkan untuk melalui tahapan pemeriksaan oleh pihak militer Inggris (ITVNews, 2020).

Cerita tentang peternak yang terakhir barangkali cukup serupa dengan cerita pabrik O’Neills. Pertanyaan terbesarnya adalah kekhawatiran terhadap kecepatan respon pemerintah dalam menghadapi masalah yang akan timbul. Selama ini, peternak tersebut meragukan bagaimana solusi-solusi pemerintah tidak memberi ruang bagi peternak di wilayah perbatasan. Barangkali secara umum, pemerintah Inggris telah menyatakan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa dapat memberi kesempatan besar bagi mayoritas petani Inggris untuk mengembangkan teknologinya. Menurut klaim tersebut, selama ini Inggris dikekang oleh aturan pertanian Uni Eropa yang tidak mengizinkan Inggris untuk mengembangkan pertaniannya karena negara-negara lain dalam Uni Eropa merasakan ketimpangan yang besar. Oleh karena itu, Inggris perlu memperlambat perkembangannya jika terikat oleh Uni Eropa. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, ikatan tersebut juga lepas. Inggris dapat melakukan pengembangan kembali dalam teknologinya, sehingga secara umum dapat memberikan kesejahteraan tambahan bagi mayoritas petani Inggris. Tetapi, kasus dalam cerita

ini menunjukkan bahwa hal tersebut justru diragukan oleh para peternak yang tinggal di wilayah perbatasan. Mereka merasa bahwa pemerintah Inggris perlu dengan segera mempertimbangkan aturan-aturan perbatasan yang tidak berbeda dengan yang ada saat Inggris masih berada dalam Uni Eropa.

19.2. Dampak Brexit

Terdapat lima poin utama dalam tulisan ini: (1) keluarnya Inggris dari Uni Eropa menandai bahwa perbatasan Irlandia menjadi bagian dari wilayah frontier Uni Eropa, (2) mengapa Inggris dan Uni Eropa perlu berkomitmen untuk menghindari *hard border*, (3) mengapa prioritas utama yang perlu dilakukan adalah menyetujui *backstop*, (4), bagaimana *backstop* dapat menjadi tindakan yang menghambat hubungan di masa depan, dan (5) bagaimana negosiasi-negosiasi di masa depan tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian permasalahan Irlandia.

Pada bagian pertama, dijelaskan bahwa sebelum terjadinya Brexit, hampir tidak ada batasan perpindahan orang antara kedua negara. Bahkan, yang menandakan seseorang telah keluar dari Inggris, misalnya, adalah melihat papan batas kecepatan, di mana di Inggris menggunakan mil per jam, sementara Irlandia menggunakan kilometer per jam. Beberapa bisnis bahkan beroperasi tanpa adanya pengecekan di perbatasan. Hal ini khususnya terjadi setelah kesepakatan *Good Friday Agreement* pada 1998. Tetapi, dengan berlakunya Brexit, Inggris berarti juga menyatakan keluar dari *Single Market and Customs Union* yang membuat Inggris berada pada posisi negara ketiga bagi Uni Eropa. Meskipun Inggris tetap dapat melaksanakan kebijakan yang tetap tidak memberi pengecekan di wilayah perbatasan, kebijakan ini dapat berpotensi melanggar aturan World Trade Organization (WTO), yang berarti Inggris telah menciptakan situasi di mana barang dapat masuk lebih mudah ketika melewati wilayah darat dibandingkan dengan wilayah laut. Hal ini dapat membuat berang partner-partner dagang Republik Irlandia yang lainnya. Sementara itu, melaksanakan pengecekan di perbatasan dapat berpotensi menciptakan tensi di masyarakat. Data-data yang dipaparkan di dalamnya berisi informasi bahwa penambahan biaya sedikit saja dapat menciptakan disrupsi dalam perdagangan yang saat ini terjadi dan memperburuk pertumbuhan di masa mendatang. Bahkan perdagangan bukan saja yang dapat terdampak, tetapi justru proses perdamaian Irlandia Utara, terutama pada normalisasi hubungan antara masyarakat Katolik dan Protestan (Durrant & Stojanovic, 2018).

Pada bagian kedua, dijelaskan bahwa negara-negara dalam Uni Eropa sebenarnya sepakat tentang persoalan utama sulitnya pemisahan Inggris dari Uni Eropa adalah karena pertimbangan perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Pembahasan tersebut berakhir

pada pilihan antara tiga opsi: (1) melalui pelaksanaan hubungan menyeluruh antara Inggris dan Uni Eropa, (2) melalui solusi spesifik dengan memberikan status keadaan khusus terhadap pulau Irlandia, (3), melalui ketaatan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan *Internal Market and Customs Union*, di masa ini dan di masa depan, mendukung kerja sama Utara-Selatan, program ekonomi seluruh pulau, dan perlindungan terhadap perjanjian *Good Friday* 1998. Opsi ketiga inilah yang kemudian disederhanakan dengan istilah *backstop*. Meskipun kedua pihak telah sepakat bahwa *hard border* yang direpresentasikan oleh *backstop* bukan solusi yang baik, sikap Inggris dan Uni Eropa selama proses negosiasi menunjukkan sebaliknya (Durrant & Stojanovic, 2018). Dari argumen-argumen yang disajikan, seperti *custom partnership*, *custom process*, tantangan-tantangan teknis dan politis, dan hubungan *regulatory* keduanya di masa depan, semua itu menunjukkan bahwa tidak ada prospek antara Inggris dan Uni Eropa untuk sepakat perlunya ratifikasi terhadap opsi-opsi dalam *Withdrawal Agreement* yang disebutkan sebelumnya.

Pada bagian ketiga, dijelaskan bahwa *backstop* adalah satu-satunya opsi yang dapat diambil dalam *Withdrawal Agreement* yang fungsinya dapat mencegah resiko-resiko dari pelaksanaan *hard border*. Tetapi, Inggris dengan tegas menolak detail *backstop* yang diajukan Uni Eropa, yakni dengan hanya memberikan pengecekan di wilayah Laut Irlandia. Bagi Inggris, kebijakan tersebut dapat menciptakan disrupsi dalam pasar umum Inggris dan mengancam integritas konstitusional antara Inggris dan wilayahnya, Irlandia Utara (Durrant & Stojanovic, 2018). Sayangnya, Inggris juga tidak mengajukan detail alternatif terhadap pelaksanaan *backstop*. Opsi yang Inggris punya, seperti dengan tetap melaksanakan protokol Uni Eropa dengan syarat Inggris perlu menerapkannya tidak khusus kepada Irlandia Utara saja tetapi seluruh Inggris, tetap bukan opsi yang dapat disetujui oleh dewan Inggris maupun Uni Eropa. Padahal, itulah opsi yang memiliki sifat disrupsi yang paling kecil.

Pada bagian keempat, dijelaskan bahwa Inggris dan Uni Eropa perlu sangat berhati-hati dalam mengambil opsi penyelesaian masalah perbatasan Irlandia dikarenakan pilihan ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap hubungan Inggris dengan Uni Eropa. Hal ini karena Inggris mencurigai bahwa perbatasan Irlandia dapat mencegah negosiasi-negosiasi yang lebih luas. Sementara itu, Uni Eropa mencurigai bahwa Inggris akan menggunakan kesepakatan ini untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam Dewan *Single Market* Uni Eropa. Oleh karena itu, keduanya memerlukan sebuah kebijakan *backstop* yang non-permanen (Durrant & Stojanovic, 2018).

Pada bagian kelima, dijelaskan bahwa apapun solusi yang diambil, permasalahan perbatasan Irlandia akan menjadi kartu yang dipegang oleh masing-masing pihak untuk

negosiasi-negosiasi ke depannya, jadi langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Inggris, yaitu:

- Memberikan opsi perdagangan tanpa pengecekan
- Jika tidak diterima, dapat beralih ke opsi *customs partnership* atau dengan membentuk *customs union* yang baru, artinya Inggris perlu menawarkan *substantial alignment* untuk bidang-bidang lainnya.
- Jika masih tidak diterima, Inggris hanya memiliki dua opsi: menjalankan kerja sama regulasi barang yang luas di bidang lainnya atau menjalankan solusi spesifik untuk masalah Irlandia, seperti hanya pada masalah agrikultur yang memiliki integrasi yang kuat di wilayah perbatasan (Durrant & Stojanovic, 2018).

19.3. Dampak Brexit Terhadap Sektor Transportasi

Bagaimana sektor transportasi memberikan dampak terhadap perpindahan barang dan orang dan bagaimana Brexit akan memberikan dampak pada sektor tersebut. Pengukuran skenario perlintasan tersebut pada enam lokasi perlintasan dan dengan memberikan asumsi terhadap pelaksanaan *hard Brexit*. Kebijakan *hard Brexit* yang dimaksud adalah bahwa Inggris memberi akses penuh terhadap dewan *Single Market* Eropa dan akses penuh terhadap liga dagang, yang menunjukkan Inggris bersedia mematuhi aturan-aturan WTO untuk berdagang dengan negara-negara di Uni Eropa. Temuan utamanya adalah harga *delay* yang perlu ditanggung dalam perlintasan orang dan barang dengan pelaksanaan *hard Brexit* adalah senilai 60,7 juta Euro per tahun. Nilai ini dapat dikurangi seandainya penggunaan teknologi tinggi diterapkan di perbatasan, seperti penggunaan HGV untuk masuk dan keluar dari Inggris, dan pembangunan infrastruktur baru, seperti jembatan yang dapat menghubungkan Irlandia Utara dengan negara-negara lain di Uni Eropa, tanpa perlu melewati pulau utama Inggris, sehingga barang dan orang dapat dipindahkan dengan biaya yang lebih efisien (Morchid & O'Mahony, 2019).

Masalah lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah perdagangan dalam sektor produk agrikultur, karena masih perlu melewati pulau Inggris. Jika *hard Brexit* terjadi, maka diperlukan pengecekan barang di pelabuhan Dublin, sehingga diperlukan biaya untuk pembangunan infrastruktur baru yang mendukung kebijakan tersebut. Pertimbangan lain yang juga penting adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur perbatasan serta dampak sosial dan psikososial yang dihasilkan dari pemisahan orang-orang Irlandia di utara dan selatan. Selama ini, tidak ada jalan nasional yang memerlukan kontrol

perbatasan, sehingga infrastruktur yang dibutuhkan seperti kantor-kantor perdagangan, lahan parkir, serta *checkpoint* imigrasi perlu dibangun (Morchid & O'Mahony, 2019).

Dari sisi dampak terhadap perdagangan, penerapan *hard Brexit* memerlukan Inggris untuk menerapkan aturan WTO, yakni pemberlakuan tarif yang dapat mencapai 55% dari produk makanan yang diproduksi di Irlandia. Hal ini terutama berdampak pada perusahaan farmasi dan medik dan barang-barang yang tidak tahan lama. Pada perusahaan farmasi, kemungkinan hanya akan mendapatkan tambahan biaya untuk dapat melewati jembatan Inggris, tetapi pada perusahaan yang memproduksi barang-barang yang tidak tahan lama, produk ini akan mengalami peningkatan harga yang signifikan. Meskipun begitu, pemangku-pemangku kepentingan di Irlandia optimis pemerintah Inggris tidak akan tinggal diam dan akan memberlakukan aturan yang memudahkan terjadinya perlintasan barang (Morchid & O'Mahony, 2019).

19.4. Model Interaksi Perbatasan

Teori yang digunakan dalam menganalisis isu Strabane adalah tipologi model interaksi perbatasan. Konsep ini diperkenalkan oleh Oscar J. Martinez melalui tulisannya dalam buku *Global Boundaries* yang berjudul "*The Dynamics of Borderland Interaction*". Terdapat empat model perbatasan yang dapat dijadikan sebagai landasan analisis:

1. Alienated Borderlands

Alienated Borderlands menunjukkan bahwa sangat sulit ditemui aktivitas lintas perbatasan dikarenakan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Perang, perselisihan politik, nasionalisme ekstrem, permusuhan ideologi, permusuhan religius, perbedaan yang terlalu mencolok dari aspek budaya, hingga rivalitas etnis dapat menjadi penyebab utama terciptanya situasi perbatasan yang demikian. Sehingga dalam pelaksanaannya, terdapat penjagaan militer yang sangat ketat di wilayah perbatasan dan pemeriksaan dilaksanakan dengan sangat ketat pula. Hal ini pula yang menyebabkan wilayah yang berada pada tingkat *alienated* seringkali berpenghuni secara kelompok-kelompok kecil dan tidak berkembang (Schofield, 2002).

2. Co-existent Borderlands

Co-existent borderlands menunjukkan bahwa wilayah perbatasan masih dapat diatur secara administratif sehingga perlintasan orang dan barang masih dapat terjadi secara teratur. Meskipun terjadi konflik internal, hubungan di perbatasan masih dapat dikendalikan hingga ke tingkat minimal. Situasi ini biasanya terjadi pada dua entitas negara yang pernah bermusuhan

dan mulai membaik, sehingga konflik-konflik lama perlahan terlupakan. Hubungan antara masyarakat di perbatasan seringkali terjadi dengan penjagaan ketat, tetapi hanya bersifat aktivitas formal saja. Penduduk secara umum kedua negara biasanya menjalin hubungan yang biasa saja satu dengan yang lain, tetapi yang tinggal di perbatasan dapat berpotensi membangun hubungan yang lebih baik satu dengan lainnya (Schofield, 2002).

3. Interdependent Borderlands

Interdependent borderlands menunjukkan bahwa hubungan internasional dapat memberikan suasana yang menguntungkan terhadap penduduk perbatasan yang memungkinkan keduanya berkembang dan tumbuh melalui modal asing, aktivitas pasar, dan pertukaran buruh. Kondisi ini juga seringkali menunjukkan bahwa kedua negara menjalin hubungan yang setara. Meskipun misalnya tidak terjadi hubungan yang setara, tetap dapat dilihat bahwa boleh jadi negara yang memegang peran dominan dapat mengambil keuntungan tertentu berupa tenaga kerja dan negara yang didominasi juga dapat mengambil keuntungan melalui investasi yang masuk. Biasanya, masalah-masalah yang dibahas adalah permasalahan imigrasi, kompetisi dagang, penyelundupan, dan nasionalisme etnis (Schofield, 2002).

4. Integrated Borderlands

Integrated borderlands adalah situasi di mana stabilitas di wilayah perbatasan sudah menjadi kuat dan bersifat permanen. Sifat lainnya dapat dilihat melalui aspek ekonomi yang telah terjalin dengan baik sehingga berada pada situasi yang seakan-akan tanpa batasan perpindahan orang dan barang. Masyarakat di wilayah tersebut juga telah merasakan adanya kesatuan, di mana nasionalisme tidak lagi berperan penting bagi masyarakat dan hubungan mereka terjalin dalam ideologi internasionalis, yakni ideologi yang menekankan pada hubungan yang damai dan peningkatan kualitas hidup antara kedua negara melalui perdagangan dan difusi teknologi (Schofield, 2002).

19.5. Kesimpulan

Melihat situasi di atas, pertimbangan terhadap keberlangsungan daerah perbatasan ternyata memang tidak mudah. Permasalahan pertama adalah masalah integrasi sosial. Kasus Gloria menunjukkan bahwa rakyat sebagai akar rumput yang tinggal di wilayah perbatasan cenderung memiliki kedekatan sosial yang tinggi, apalagi jika proses integrasi telah terjadi selama puluhan tahun. Sejak mereka menikmati masuknya Inggris ke dalam Uni Eropa, hubungan sosial yang terjadi, baik itu bermula dari hubungan bisnis atau kegiatan komunitas bersama lainnya, dapat mengabaikan identitas sosial, sehingga bagi mereka, tidak penting

apakah orang itu orang Inggris atau Irlandia. Yang jelas bagi mereka adalah mereka telah terintegrasi dan tidak ingin terpecah begitu saja hanya karena permasalahan politik di tingkat elit.

Sementara itu, cerita Stephens di atas menunjukkan bahwa terdapat aturan-aturan yang tidak dapat dilepaskan oleh keberadaan Inggris di Uni Eropa. Aturan-aturan itu dapat menjadi berkah besar bagi beberapa kelompok tertentu, yang dapat hilang sewaktu-waktu saat kerjasama terputus. Padahal, wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan konflik. Mungkin pernyataan tersebut tidak cocok bagi kondisi Inggris, tetapi akan menarik jika dipertanyakan pada kasus negara lain. Di beberapa negara seperti India, Afganistan, bahkan Indonesia, wilayah perbatasan seringkali menjadi daerah frontier atas perang melawan terorisme. Hilangnya beberapa aturan yang dapat menguntungkan orang-orang yang tinggal di wilayah perbatasan dapat berakibat fatal terhadap kepuasan masyarakat di sana, sehingga dengan mudah memicu masuknya pengaruh-pengaruh dari kelompok radikal.

Cerita pabrik O'Neills di atas menggambarkan bagaimana situasi dapat memengaruhi eksistensi sebuah perusahaan besar yang operasionalnya berasal dari proses transnasionalisme di wilayah perbatasan. Cerita ini cukup mirip dengan cerita Gloria, yang melibatkan bagaimana proses integrasi sosial di berbagai lini kehidupan dapat menciptakan interdependensi yang kuat, khususnya bagi masyarakat akar rumput di wilayah perbatasan. Tempat tinggal dan tempat kerja boleh jadi telah terjadi secara lintas negara dan kekhawatiran akan hilangnya kemudahan itu dapat mengancam hingga ke status pekerjaan mereka. Artinya, isu ini dapat memicu lahirnya pemutusan hubungan kerja besar-besaran di wilayah perbatasan.

Aturan-aturan yang mengikat negara dalam organisasi regional dapat menciptakan interdependensi yang kuat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, khususnya jika keadaan yang tercipta terjalin secara damai. Integrasi antar masyarakat menjadi penyebab kuatnya interdependensi di wilayah tersebut. Sehingga, jika satu negara memilih keluar dari organisasi regional yang diikuti sebelumnya, maka negara perlu dengan cepat melakukan identifikasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sebelumnya memberi keuntungan bagi masyarakat secara umum dan masyarakat yang secara khusus tinggal di wilayah perbatasan. Perlu adanya aturan-aturan khusus yang tetap dapat menjamin keberlangsungan kehidupan sosial bagi masyarakat perbatasan.

Situasi kota Strabane dapat dianalisis sebagai wilayah *integrated borderland*. Keberadaan Uni Eropa, terutama pasca Perjanjian Good Friday 1998, telah menciptakan integrasi yang sangat kuat di antara orang-orang yang tinggal di Strabane. Berbagai kisah menunjukkan beberapa sektor sosial dan perdagangan yang telah terintegrasi secara kuat.

Bahkan, wawancara pada instruktur yoga dan seorang gay tersebut menunjukkan situasi di mana nasionalisme terhadap Inggris bukan lagi hal yang penting, dan jalinan perdamaian antara orang Irlandia Utara dan Republik Irlandia menjadi jauh lebih penting dibandingkan kepentingan nasional yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah pusat Inggris. Keberadaan Uni Eropa juga cukup penting dari faktor ketersediaan regulasi yang dapat mengakomodasi kaum minoritas. Apalagi, jika melihat ke sektor perdagangan yang sangat terintegrasi, pentingnya aturan tanpa pengecekan dan *checkpoint* imigrasi terlihat jelas. Keberadaan aturan ini dapat memberikan keleluasaan yang sangat besar terhadap pengusaha di Strabane untuk menjalankan usahanya.

Dengan diterapkannya *hard border*, kota Strabane akan mengalami situasi yang buruk. Sebagaimana dijelaskan oleh Durrant, kondisi perbatasan Irlandia memerlukan Inggris untuk menerapkan *backstop*. Jika hal itu diterapkan, aturan tersebut dapat menurunkan tingkat integrasi antara Strabane dan Republik Irlandia ke tingkat *interdependent borderlands*. Dalam hal ini, jalinan sosial akan berkurang cukup signifikan karena perlunya pengecekan di beberapa titik, sehingga dipastikan akan menurunkan tingkat perpindahan orang. Sementara dari aspek perdagangan, adanya pengecekan menyebabkan naiknya biaya produksi dan harga, tetapi nampaknya kebijakan ini tidak akan berpengaruh banyak pada aspek tenaga kerja dan penurunan jumlah usaha yang berkembang, sebagaimana dijelaskan oleh Morchid dan O'Mahony. Padahal, kebutuhan Strabane adalah kondisi di mana perbatasan tetap berada pada situasi non-kontrol. Pengendalian lintas batas justru menjadi kekhawatiran penduduk lokal dan dari opsi-opsi rasional yang dimiliki Inggris, tetap tidak ada yang menguntungkan bagi pihak Strabane. Kebutuhan mereka justru terakomodasi melalui kebijakan *backdrop* yang diajukan oleh Uni Eropa, meskipun itu berarti kerugian yang fatal bagi Inggris secara nasional.

Dari kondisi yang terlihat, kondisi nampaknya akan stagnan pada posisi di mana Strabane berada pada jenis *interdependent borderlands*, dan kecil kemungkinan untuk dapat turun ke *co-existent borderlands*. Hal ini karena perbatasan Inggris dan Irlandia tidak memiliki konflik yang cukup tajam dan permusuhan yang masih berlanjut, sebagaimana ciri dari *co-existent borderlands*. Tetapi tetap bukan tidak mungkin situasi dapat memburuk dan hubungan perbatasan turun ke tingkat *co-existent*. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Inggris dan Uni Eropa dapat menjalin hubungan ke depannya, karena hal ini lah sebenarnya yang dapat menurunkan tingkat integrasi hubungan perbatasan ke tingkat *co-existent*. Sulitnya terjadi kesepakatan antara Inggris dan Uni Eropa dan kecurigaan yang terjadi antara keduanya dapat memaksa Inggris dengan tiba-tiba menerapkan *hard border* yang lebih ketat dan memutus opsi *backstop*. Aspek inilah yang perkembangannya perlu diikuti secara kontinyu.

Hard border dapat berakibat fatal dalam integrasi wilayah perbatasan Irlandia, khususnya di kota Strabane. Masyarakat Strabane sendiri telah mendapatkan banyak keuntungan dengan keikutsertaan Inggris di Uni Eropa, sehingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa dapat menjadi pemicu menurunnya integrasi dan kestabilan ekonomi di wilayah tersebut. Opsi-opsi politik yang dimiliki Inggris dan bermanfaat kepada Inggris secara umum, tidak memberikan manfaat yang sama kepada Strabane. Sementara itu, Strabane hanya dapat berharap kebijakan yang selama ini diterapkan dapat terus berlanjut dan *hard border* dapat dihindari. Faktor nasionalisme tidak lagi dapat menjadi modal dukungan bagi politisi Inggris terhadap penduduk Strabane, sehingga pendekatan terhadap Strabane hanya dapat dilakukan melalui kebijakan yang dapat menguntungkan mereka. Jika Inggris salah dalam mengambil kebijakan dan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis dengan Uni Eropa, maka bukan tidak mungkin wilayah perbatasan seperti Strabane dapat turun tingkat menjadi *co-existent*, yang jika terjadi dalam jangka waktu panjang, hanya akan memperlambat proses perdamaian yang telah diperjuangkan pada Perjanjian Good Friday 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- 7Seven. (2017). *Gibraltar: The Weirdest Airport and Strangest Border*. United Kingdom: 7Seven. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=u2G8LYamiUs&list=WL&index=16&t=457s>
- Al Jazeera. (2018). *What does The UAE Want with a Yemeni Island?* Qatar: Al Jazeera. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=WxqgmpE8e-g&feature=youtu.be>
- AntaraNews. (2019). Warga Timor Leste di Naktuka Terus Bertambah. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.antaraneews.com/berita/813844/warga-timor-leste-di-naktuka-terus-bertambah>
- Aprianto, C. T. (2019). 19 Perbatasan Negara-Negara Ini Punya Keunikan Tersendiri. <https://doi.org/10.3201/eid0803.030300>
- Ariyanti, H. (2019). Ini Alasan Demonstran Tolak UU Kewarganegaraan India. Retrieved 1 January 2020, from <https://www.merdeka.com/dunia/ini-alasan-demonstran-tolak-uu-kewarganegaraan-india.html>
- Awasthi, S. (2019). Migration and human security in South Asia. *Contemporary South Asia*, 27(3), 441–443. <https://doi.org/10.1080/09584935.2019.1649052>
- Ayu, J. (2019). Sehari di Skouw, Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Retrieved 1 March 2020, from <https://pesona.travel/keajaiban/3642/sehari-di-skouw-perbatasan-indonesia-dan-papua-nugini>
- Baaz, M., & Lilja, M. (2017). (Re)categorization as Resistance: Civil Society Mobilizations

- Around the Preah Vihear Temple. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 30(3), 295–310. <https://doi.org/10.1007/s10767-016-9241-7>
- Balzacq, T., Léonard, S., & Ruzicka, J. (2016). ‘Securitization’ revisited: theory and cases. *International Relations*, 30(4), 494–531. <https://doi.org/10.1177/0047117815596590>
- BangkaPos. (2019). Ini Keragaman dan Hal Unik di Sejumlah Daerah Perbatasan di Dunia, Bisa Tanding Voli Antar Negara. Retrieved 1 January 2020, from <https://bangka.tribunnews.com/2019/01/13/ini-keragaman-dan-hal-unik-di-sejumlah-daerah-perbatasan-di-dunia-bisa-tanding-voli-antar-negara>
- BBCNews. (2013). Mahkamah PBB Putuskan Wilayah Sengketa. Retrieved 1 March 2020, from https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/11/131111_thailand_perebutancandi
- Béland, D., & Waddan, A. (2019). Unidentical twins: recent social policy developments in Canada and the United States. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 35(1), 1–4. <https://doi.org/10.1080/21699763.2019.1568280>
- Bento, K. (2017). *Where Are The Asian Borders*. Unites States of America. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=vPupwlZINMY>
- Bernal, E., Sandra, D., Juan, G.-A., Fernando, O., Sánchez Martínez, I., Ramón, J., ... Hernández-Quevedo, C. (2018). Spain: Health system review. Health Systems in Transition. *European Observatory on Health Systems and Policies*, 20(2), 1–179. Retrieved from www.healthobservatory.eu
- BKPM. (2018). Kepala BKPM: Kerja Sama Investasi Indonesia-Singapura Fokus Tiga Sektor. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/kepala-bkpm-kerja-sama-investasi-indonesia-singapura-fokus-tiga-sektor>
- Caballero-Anthony, M. (2015). Community security: human security at 21. *Contemporary Politics*, 21(1), 53–69. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.994812>
- Carter, D. B., & Poast, P. (2016). Why Do States Build Walls? Political Economy, Security, and Border Stability. *Journal of Conflict Resolution*, 1–32. <https://doi.org/10.1177/0022002715596776>
- Chachavalpongpun, P. (2012). Embedding Embittered History: Unending Conflicts in Thai-Cambodian Relations. *Asian Affairs*, 43(1), 81–102. <https://doi.org/10.1080/03068374.2012.643593>
- CNA. (2019). *Singapore’s Southern Islands: a Shared Heritage with Indonesia*. Indonesia: CNA. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=gps0UaND_2s&feature=youtu.be

- CNNIndonesia. (2019). AS Kembalikan Pencari Suaka Pertama ke Meksiko. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190130063812-134-364923/as-kembalikan-pencari-suaka-pertama-ke-meksiko>
- Coccia, M. (2018). World-System Theory: A Sociopolitical Approach to Explain World Economic Development in a Capitalistic. *Journal of Economics and Political Economy*, 5(5), 459–465. <https://doi.org/10.31857/s020736760001432-4>
- Dahal, G. (2018). Foreign Relation of Nepal with China and India. *Journal of Political Science*, 18, 46–61. <https://doi.org/10.3126/jps.v18i0.20439>
- Dakwah, S. (2018). Daftar Negara Umat Muslim Terbesar Di Dunia yang Wajib Anda Ketahui. Retrieved from <https://medium.com/safaridakwah/daftar-negara-umat-muslim-terbesar-di-dunia-yang-wajib-anda-ketahui-ffc6debfd902>
- Das, J., & Talukdar, D. (2016). Socio-Economic and Political Consequence of Illegal Migration into Assam from Bangladesh. *Journal of Tourism & Hospitality*, 05(02). <https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000202>
- Dashlane. (2019). *Portugal and Spain Compared*. Portugal: Dashlane. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=QJ9VPkOj_7w
- Databoks. (2016). 10 Negara dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Tertinggi. Retrieved 1 January 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/25/10-negara-dengan-tingkat-kepadatan-penduduk-tertinggi>
- Datta, P. (2004). Push-pull factors of undocumented migration from Bangladesh to West Bengal: A perception study. *The Qualitative Report*, 9(2), 335–358. Retrieved from <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR9-2/datta.pdf>
- Derby, L. (2019). On the Edge: Writing the Border between Haiti and the Dominican Republic. *Journal of Borderlands Studies*, 34(1), 137–139. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1267591>
- Detikcom. (2009). SBY Resmikan FTZ Batam, Bintan, Karimun. Retrieved 1 March 2020, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1070756/sby-resmikan-ftz-batam-bintan-karimun>
- Durrant, T., & Stojanovic, A. (2018). The Irish border after Brexit. *Institut for Government*, (June), 1–15.
- DW. (2019). Perseteruan Pakistan dan India di Kashmir Semakin Memanas. Retrieved 1 February 2019, from <https://www.dw.com/id/perseteruan-pakistan-dan-india-di-kashmir-semakin-memanas/a-47709944>
- DW. (2020). Bangladesh. Retrieved 7 April 2020, from <https://www.dw.com/id/bangladesh/t->

45438605

- Endes Teturan, Y., Suwitri, S., Warella, Y., & Warsono, H. (2019). the Management of Border Area Between Indonesia Republic and Papua New Guinea in Sota Region of Merauke District. *Prizren Social Science Journal*, 3(1), 18–31.
<https://doi.org/10.32936/pssj.v3i1.76>
- Enuka, C. (2018). Dependency Theory and Global Economic Imbalance: A Critique. *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities*, 19(1), 130. <https://doi.org/10.4314/ujah.v19i1.7>
- Eroukhmanoff, C. (2017). Securitisation Theory. In *International Relations Theory* (pp. 104–109). Bristol, England: The British Library. <https://doi.org/10.5848/csp.2823.00001>
- ExhibitEarth. (2018). *That Bit of East Timor in Indonesia*. Indonesia: Exhibit Earth.
 Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=sTLQjg4eZWE&feature=youtu.be>
- Fadhilah, U. N., & Nursalikhah, A. (2018). India Anggap Jutaan Muslim Imigran Ilegal.
 Retrieved 1 January 2020, from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/08/18/pdn8ay366-india-anggap-jutaan-muslim-imigran-ilegal>
- Fathoni, R. S. (2018). Sejarah Bangladesh: Sebuah Negara Kecil Penuh Gejolak. Retrieved 1 March 2020, from <https://wawasansejarah.com/sejarah-bangladesh/>
- Fierke, K. M. (2007). *Critical Approaches to Internal Security*. Cambridge, UK: Polity Press.
 Retrieved from <https://www.amazon.com/Critical-Approaches-International-Security-Fierke/dp/0745632939>
- Fong, J. (2017). *Divided Island: How Haiti and the Dominican Republic Became Two Worlds*. United States. Retrieved from
<https://www.youtube.com/watch?v=4WvKeYuwifc>
- Forster, R. (2017). The southern transitional council: Implications for yemen’s peace process. *Middle East Policy*, 24(3), 133–144. <https://doi.org/10.1111/mepo.12295>
- Gasper, D., & Gómez, O. A. (2015). Human security thinking in practice: ‘personal security’, ‘citizen security’ and comprehensive mappings’. *Contemporary Politics*, 21(1), 100–116. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.993906>
- Gelbman, A., & Timothy, D. J. (2011). Border complexity, tourism and international exclaves A case study. *Annals of Tourism Research*, 38(1), 110–131.
<https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.06.002>
- Ghosh, S. (2019). Chor, Police and Cattle: The Political Economies of Bovine Value in the India–Bangladesh Borderlands. *South Asia: Journal of South Asia Studies*, 42(6), 1108–1124. <https://doi.org/10.1080/00856401.2019.1672926>
- Gilbert, E. (2019). Elasticity at the Canada–US border: Jurisdiction, rights, accountability.

- Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(3), 424–441.
<https://doi.org/10.1177/2399654418787190>
- GlobalNews. (2019). *The U.S-Mexico Migrant Crisis: What is Really Happening at the Border?* United States of America: Global News. Retrieved from
<https://www.youtube.com/watch?v=8Ra8udKbHro&feature=youtu.be>
- Graniczna, S. (2012). *Polish Border Guard-Euro 2012 Border Crossing*. Polandia. Retrieved from
<https://www.youtube.com/watch?v=h7-5aGdJi-8&feature=youtu.be>
- Gravelle, T. B. (2018). Politics, time, space, and attitudes toward US–Mexico border security. *Political Geography*, 65(August 2017), 107–116.
<https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.05.012>
- GreatBigStory. (2018). *The Town in Two Countries*. Netherlands: Great Big Story. Retrieved from
<https://www.youtube.com/watch?v=pP4OL2i6t-Q>
- Groom, A. J. R. (1997). Gibraltar: A pebble in the EU’s shoe. *Mediterranean Politics*, 2(3), 20–52. <https://doi.org/10.1080/13629399708414629>
- Handayani, R., & Nursalikhah, A. (2019). Dua Juta Orang di Assam India tak Diakui Kewarganegaraannya. Retrieved 1 March 2020, from
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/09/03/px8jog366-dua-juta-orang-di-assam-india-tak-diakui-kewarganegaraannya>
- Harrison, T. (2006). Realism, sovereignty and international relations: An examination of power politics in the age of globalization. *Vasa*. Retrieved from
<http://medcontent.metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf%5Cnhttp://scholarcommons.usf.edu/etd/2550/>
- ImagineYourKorea. (2020). Panmunjeom (Joint Security Area). Retrieved 1 March 2020, from
https://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264490
- Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara*. Jakarta. Retrieved from
http://dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_1906.pdf
- IndonesiaBusinessForum. (2019). *Salah Kelola Kawasan Perdagangan Bebas?* Indonesia: Indonesia Business Forum. Retrieved from
<https://www.youtube.com/watch?v=uhdWAwhLkk0&feature=youtu.be>
- ITVNews. (2020). *How Northern Ireland’s Border Towns are Preparing for Brexit*. United Kingdom: ITV News. Retrieved from
<https://www.youtube.com/watch?v=HsA7fYdeoKI>
- Jha, H. B. (2013). Nepal’s Border Relations with India and China. *Eurasia Border Review*,

4(1), 63–75.

- Johnson, C., & Jones, R. (2018). The biopolitics and geopolitics of border enforcement in Melilla. *Territory, Politics, Governance*, 6(1), 61–80.
<https://doi.org/10.1080/21622671.2016.1236746>
- JPNN. (2019). Tinggalkan India, Nepal Berpaling ke Tiongkok. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.jpnn.com/news/tinggalkan-india-nepal-berpaling-ke-tiongkok?page=2>
- Keda, O. (2017). Akhir Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/regional/read/3193326/akhir-sengketa-batas-indonesia-timor-leste>
- Kennedy, B. (2016). Zones of seeing: Artistic, touristic and digital images of the DMZ. *East Asian Journal of Popular Culture*, 2(2), 287–303.
https://doi.org/10.1386/eapc.2.2.287_1
- Kilroy, R. J., Rodriguez, A., & Hataley, T. (2017). *Security inequalities in North America: Reassessing Regional Security Complex Theory*. *Journal of Strategic Security* (Vol. 10).
<https://doi.org/10.5038/1944-0472.10.4.1613>
- KompasTV. (2019). *Pasar Perdagangan Internasional di Distrik Sota, jadi Destinasi Warga Papua New Guinea*. Indonesia. Retrieved from <https://www.kompas.tv/article/53439/pasar-perdagangan-internasional-di-distrik-sota-jadi-destinasi-wrga-papua-new-guinea>
- Krichker, D., & Sarma, J. (2019). Can Borders Speak to Each Other? The India–Bangladesh and Spain–Morocco Borders in Dialogue. *Journal of Borderlands Studies*, 0(0), 1–19.
<https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1676813>
- Kristanti, E. Y. (2013). Thailand Vs Kamboja Rebutan Kuil, Mahkamah PBB Memutuskan... Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/global/read/743371/thailand-vs-kamboja-rebutan-kuil-mahkamah-pbb-memutuskan>
- Kurnia, I. (2020). Melihat Rencana FTZ Batam-Bintan-Karimun yang Akan Disatukan. Retrieved 1 March 2020, from <https://gowest.id/melihat-rencana-ftz-batam-bintan-karimun-yang-akan-disatukan/>
- Kwang-bok, H., Hong-beom, A., & Sang-young, L. (2016). DMZ: Tanah Larangan Dipandang Melalui Pagar Kawat Berduri. Retrieved 1 February 2020, from <https://koreana.or.kr/user/0003/nd77784.do?View&boardNo=00000549&zineInfoNo=0015&pubYear=2016&pubMonth=AUTUMN&pubLang=Indonesia>
- Liputan6. (2015). 5 Negara dengan Wilayah Perbatasan yang Unik. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2259150/5-negara-dengan-wilayah->

perbatasan-yang-unik

- Maktary, S., & Smith, K. (2017). Pathways for Peace & Stability in Yemen. *Common Ground*, 1–35. Retrieved from https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/07/Yemen-Peace-Analysis_FINAL.pdf
- MapsofIndia. (2019). Assam District Map. Retrieved 1 January 2020, from <https://www.mapsofindia.com/maps/assam/assam-district.htm>
- Maris, S. (2019). Datang ke Pasar Rakyat Yuk! Ada Produk Khas Merauke dan Papua Nugini. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/news/read/3984052/datang-ke-pasar-rakyat-yuk-ada-produk-khas-merauke-dan-papua-nugini>
- Martins, A. (2015). The Portuguese corporate tax reform and international trends: An assessment. *International Journal of Law and Management*, 57(4), 281–299. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2014-0019>
- Mayilvaganan, M. (2019). Illegal Migration and Strategic Challenges: A Case Study of Undocumented Migration from Bangladesh to India. *Artha - Journal of Social Sciences*, 18(4), 25–42. <https://doi.org/10.12724/ajss.51.2>
- Meena, K. (2019). Borders and Bordering Practices: A Case Study of Jaisalmer District on India–Pakistan Border. *Journal of Borderlands Studies*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1646148>
- Meibauer, G. (2020). Interests, ideas, and the study of state behaviour in neoclassical realism. *Review of International Studies*, 46(1), 20–36. <https://doi.org/10.1017/S0260210519000214>
- Miller, R. T. (2009). Toward a Theory of Human Rights. *Faith and Philosophy*, 26(4), 474–478. <https://doi.org/10.5840/faithphil200926447>
- Mirković, B., & Sovilj, F. (2019). Cross-border Airport Concepts. *Transportation Research Procedia*, 43, 227–235. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.12.037>
- Mok, A. (2019). Hong Kong 's Border Regime and its Role in National Sovereignty. *Journal of Research and Creative Activity*, 5(1), 1–22.
- Morchid, K., & O'Mahony, M. (2019). Transport sector impacts of a border between Ireland and Northern Ireland after a hard Brexit. *Journal of Advanced Transportation*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/9029852>
- Morgan, B. (2019). Antihaitianismo: an embodied discourse. *Ethnic and Racial Studies*, 42(2), 311–328. <https://doi.org/10.1080/01419870.2018.1430841>
- Myślicki, A. (2016). Ukrainians' Crisis Immigration to Poland – A Chance for Polish

- Demography ? *European Journal of Geopolitics*, 4, 68–94.
- Nadalutti, E. (2015). The rise of trans-border regions in Southeast Asia: behind the dynamics of informal and formal integration processes in the ‘Indonesia–Malaysia–Singapore’ growth triangle. *Pacific Review*, 28(4), 607–630.
<https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1012536>
- Nadalutti, E. (2017). Is cross-border cooperation underpinned by an ethical code of values? A theoretical analysis. *Regional and Federal Studies*, 27(1), 41–62.
<https://doi.org/10.1080/13597566.2016.1261019>
- Nathaniel, F. (2020). 26 Maret 1971: Sejarah Pahit Getir Bangladesh Merdeka dari Pakistan. Retrieved 1 April 2020, from <https://tirto.id/sejarah-pahit-getir-bangladesh-merdeka-dari-pakistan-eHzK>
- Nimwegen, S. van. (2017). The need for the Netherlands and Belgium to further integrate police cooperation. *New Journal of European Criminal Law*, 8(3), 323–333.
<https://doi.org/10.1177/2032284417716209>
- Oghenerioborue-Christopher, U., & David-Lawson, G. (2018). Realist Theory of International Relations. *The International Journal of Arts Education*, 1(1), 41–55.
- Pannilage, U. (2017). An Introduction to the Theoretical Perspectives of Globalisation. *Journal of the Humanities and Social Sciences*, 7(1), 1–18. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/316939428>
- Plansari, S. (2018). Rasis, Trump Sebut Haiti dan Afrika Negara Lubang Kotoran. Retrieved 1 January 2020, from <https://dunia.tempo.co/read/1049704/rasis-trump-sebut-haiti-dan-afrika-negara-lubang-kotoran>
- Porter, P. (2016). Taking uncertainty seriously: Classical realism and national security. *European Journal of International Security*, 1(2), 239–260.
<https://doi.org/10.1017/eis.2016.4>
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. S. (2017). Border Security in Indonesia and Papua New Guinea. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4), 92–97.
- Putri, R. A. (2019). Menakar Paradiplomasi Batam dalam Lingkup Free Trade Zone melalui Analisis Isi Regulasi, 3(2). Retrieved from file:///Users/seniwati/Downloads/7610-25801-2-PB.pdf
- Rachman, T. (2013). Presiden Tetapkan Gubernur Keppri Ketua DK FTZ. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/07/13/mpvc19-presiden-tetapkan-gubernur-keppri-ketua-dk-ftz>

- Rato, D. (2019). Legal Conflicts in the Border Dispute between Indonesia and Timor Leste. *Lentera Hukum*, 6(3), 349. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i3.14185>
- RealLife. (2017). *The World's Strangest Borders Part 2: Spain*. Spain: Real Life. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=L6tJ-mvhznU&t=8s>
- Rejeki. (2019). 8 Keunikan Pulau Socotra, Tempat Dajjal Dikurung. Retrieved 1 March 2020, from <https://rejekinomplok.net/pulau-socotra/>
- Republika. (2018). Warga Yaman Tolak Penempatan Pasukan UEA di Socotra. Retrieved 1 March 2020, from <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/05/04/p86pdp383-warga-yaman-tolak-penempatan-pasukan-uea-di-socotra>
- Sagás, E. (2000). *Race and Politics in the Dominican Republic*. Gainesville: University Press of Florida.
- Samutra, R. (2014). Korut Gali Terowongan Menuju Korsel. Retrieved 1 February 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141007131632-113-5562/korut-gali-terowongan-menuju-korsel>
- Santi, N. (2018). DMZ, Zona Demiliterisasi Korea yang Penuh Misteri. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180427051936-113-293990/dmz-zona-demiliterisasi-korea-yang-penuh-misteri>
- Schofield, C. H. (2002). *Global Boundaries. Global Boundaries*. <https://doi.org/10.4324/9780203211960>
- SejarahNegara. (2019). Peta Timor Leste. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.sejarah-negara.com/533/peta-timor-leste/>
- Sekenyap, E. (2019). Warga Masyarakat di Perbatasan PNG-RI Dihimbau Tidak Beraktivitas. Retrieved 1 March 2020, from <https://suarapapua.com/2019/10/04/warga-masyarakat-di-perbatasan-png-ri-dihimbau-tidak-beraktivitas/>
- Selkirk, D. (2019). Perbatasan AS dan Kanada yang Diam-Diam Bergejolak. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-50900459>
- Sharma, B. P. (2018). China-Nepal relations: A cooperative partnership in slow motion. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 4(3), 439–455. <https://doi.org/10.1142/S2377740018500239>
- Sidik, J. M. (2009). Kronologi Konflik Thailand-Kamboja. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.antaraneews.com/berita/136978/kronologi-konflik-thailand-kamboja>
- Silver, A. (2010). Haiti and the Dominican Republic: A Tale of Two Countries. Retrieved 1 April 2020, from <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1953959,00.html>
- Slamet, P. (2016). Timor Lester Kuasai Perbatasan, Jokowi Jangan Diam. Retrieved 1

- January 2020, from <https://www.teropongsenayan.com/38574-timor-leste-kuasai-perbatasan-jokowi-jangan-diam>
- So, A. Y. (2011). 'One country, two systems' and Hong Kong-China national integration: A crisis-transformation perspective. *Journal of Contemporary Asia*, 41(1), 99–116. <https://doi.org/10.1080/00472336.2011.530039>
- Stein, A. A. (2015). Realism / Neorealism Varieties of Realism in International Politics Electronic copy available at : <https://ssrn.com/abstract=3170653>, 20, 26–30.
- Suhartono, A. (2019). Pasukan Koalisi Pimpinan Saudi Ambil Alih Keamanan di Aden, Yaman. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.inews.id/news/internasional/pasukan-koalisi-pimpinan-saudi-ambil-alih-keamanan-di-aden-yaman>
- Sunyawati, D., Adam, H., & Vinata, R. T. (2019). The Principles of Uti Possidetis Juris As an Alternative to Settlement Determination of Territorial Limits in the Oecusse Sacred Area (Study of the NKRI and RDTL Boundaries). *Yuridika*, 34(2), 279. <https://doi.org/10.20473/ydk.v34i2.12640>
- Surwandono, S. (2019). The Dynamics of Paradiplomacy Practices in the “Frontier” Areas in Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 6(2), 137. <https://doi.org/10.21512/jas.v6i2.5160>
- Sussex, M., Clarke, M., & Medcalf, R. (2017). *National security: between theory and practice. Australian Journal of International Affairs* (Vol. 71, pp. 474–478). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/10357718.2017.1347139>
- Szeptycki, A. (2016). Poland-ukraine relations. *UNISCI Discussion Papers*, (40), 57–76. https://doi.org/10.5209/rev_RUNI.2016.n40.51806
- Tavernier, L. T. A. (2008). The stigma of blackness: Anti-haitianism in the Dominican Republic. *Socialism and Democracy*, 22(3), 96–104. <https://doi.org/10.1080/08854300802361554>
- Tempo. (2018). Masalah Akut Kota Batam. Retrieved 1 March 2020, from <https://kolom.tempo.co/read/1158337/masalah-akut-kota-batam/full&view=ok>
- TitikNol. (2017). 27 Februari 1844, Republik Dominika Merdeka dari HAITI. Retrieved 1 January 2020, from <https://titiknol.co.id/peristiwa/27-februari-1844-republik-dominika-merdeka-dari-haiti/>
- TribunNews. (2012). Ukraina Tuan Rumah Euro: Dari Etnis Rusia Hingga Yahudi. Retrieved 1 March 2020, from <https://m.tribunnews.com/euro-2012/2012/05/26/ukraina-dari-etnis-rusia-hingga-yahudi?page=all>

- Tripathi, D., & Chaturvedi, S. (2019). South Asia: Boundaries, Borders and Beyond. *Journal of Borderlands Studies*, 0(0), 1–9. <https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1669483>
- Utomo, D. R. (2016). Melihat Jalur Perekonomian Warga Nepal-China-Tibet di Perbatasan. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.merdeka.com/foto/dunia/744997/20160823135602-melihat-jalur-perekonomian-warga-nepal-china-tibet-di-perbatasan-004-dru.html>
- Vox. (2017a). *Building a Border at 4,600 meters*. United States of America: Vox. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ECch2g1_6PQ
- Vox. (2017b). *Why China is Building Islands in The South China Sea*. Unites States of America: Vox. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=luTPMHC7zHY>
- Vox. (2018). *China is Erasing its Border with Hong Kong*. United States of America: Vox. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=MQyxG4vTyZ8>
- Wagener, M. (2011). Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the Nature of Low-Intensity Border Conflicts. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30(3), 27–59. <https://doi.org/10.1177/186810341103000302>
- WildTravels. (2016). *Tours of Haskell Free Library in Canada and U.*. Unites States of America: Wild Travels. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=TgmDGM_8Xr0&feature=youtu.be
- Williams, M. C. (2003). Words , Images , Enemies : Securitization and International Politics. *International Studies Quarterly*, 47, 511–531.
- Williamson, L. (2012). South Korea Rebrands ‘Scariest Place on Earth’. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-17904247>
- Young Song, J. (2016). DMZ Cultural Center: The Role of Shared Space in the Korean Peninsula Crisis Centro Cultural DMZ: El rol del espacio compartido en la crisis de la península coreana. *Dearq Revista de Arquitectura / Journal of Architecture*, (18), 56–67. <https://doi.org/10.18389/dearq18.2016.05>



Seniwati adalah dosen Departemen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Ia lahir pada 2 Februari 1976, di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah memperoleh gelar S1 dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, dan gelar Master dari Departemen Studi Amerika di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001, Seniwati bergabung dengan program doktoral di Departemen Studi Internasional di Universitas Utara Malaysia dan lulus pada 2014. Ia menjadi dosen pada tahun 2001 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Bidang penelitiannya meliputi keamanan, konflik resolusi, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan terorisme.

Beberapa artikel yang telah diterbitkan di jurnal, seperti:

1. "The Root Causes of Terrorism (Sociological Perspective)" di *Social Sciences Journal*, volume 11 issue 31 in 2016;

2. "The United States-Indonesia Military Relationship in Countering Terrorism in Indonesia" di *International Journal of Management and Applied Science*, vol.2, issue 8 in 2016;

3. "The Role of Muslim Groups in Combating Terrorism in Indonesia: a Study of the Nahdlatul Ulama Under the New Order" di *International Journal of Applied Engineering Research*, vol.10, no.81 in 2015;

4. "The role of Australia in Countering Terrorism in Indonesia" di *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, vol.8 no.5 in 2014;

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

ISBN 978-979-530-250-6

Penerbit:



UPT Unhas Press

Gedung UPT Unhas Press Kampus Unhas
Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Email: unhaspress@gmail.com



9

789795

302506